

TESIS

**OPINI MASYARAKAT TERHADAP PERSONAL BRAND
CAWABUP DI KABUPATEN SIDOARJO**

**(Studi Kasus Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Muslim Tionghoa
Dalam Pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015)**



RAMA DIMAS ADE KUSUMA
NIM: 071414853013

PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016

**OPINI MASYARAKAT TERHADAP PERSONAL BRAND
CAWABUP DI KABUPATEN SIDOARJO**

**(Studi Kasus Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Muslim Tionghoa
Dalam Pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015)**



TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Media dan Komunikasi
pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Oleh:
RAMA DIMAS ADE KUSUMA
NIM: 071414853013

**PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
22 JUNI 2016**

Lembar Persetujuan

**PENULISAN TESIS INI TELAH DISETUJUI DAN DIREVISI
TANGGAL 22 JUNI 2016**

Oleh

Pembimbing Ketua



Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M
NIP. 197709202005012001

Pembimbing Kedua



Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D
NIP. 197605012000031001

Mengetahui
Ketua Program Studi
S-2 Media dan Komunikasi



Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M
NIP. 197709202005012001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diuji pada
Tanggal 22 Juni 2016

PANITIA PENGUJI TESIS

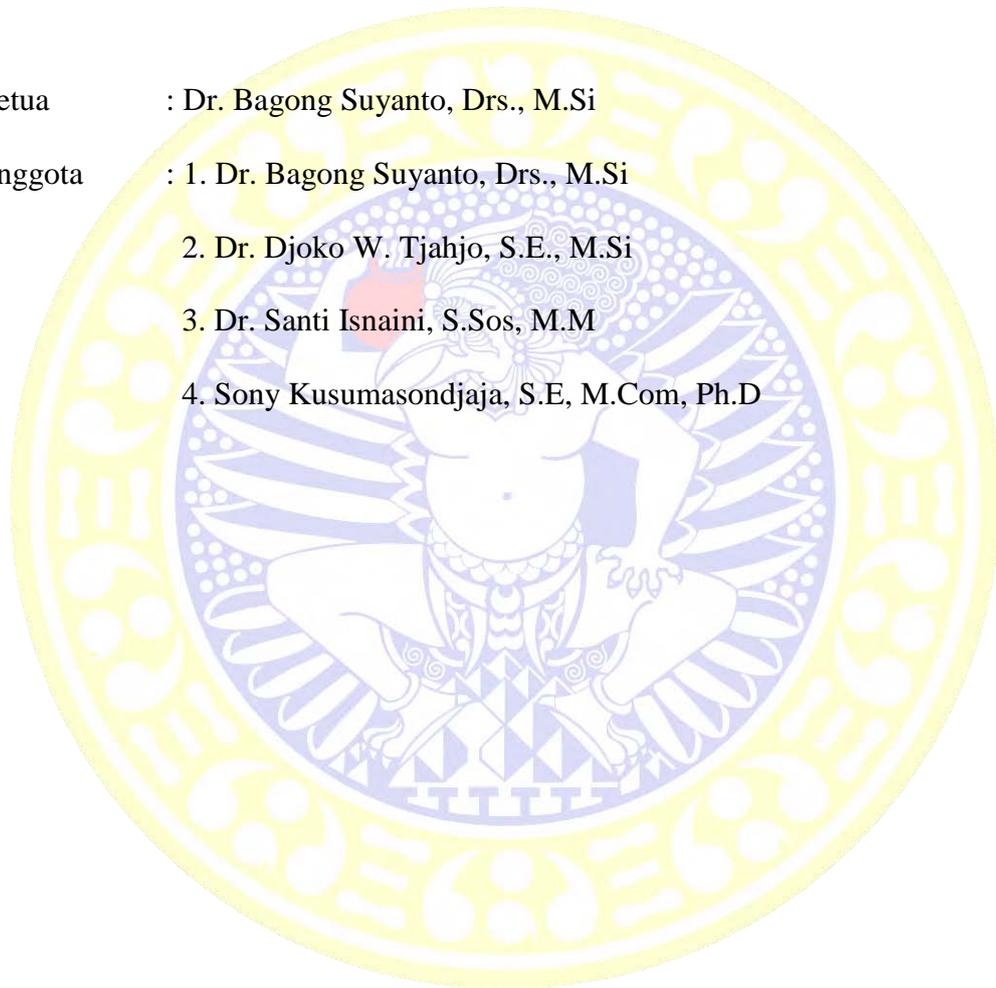
Ketua : Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si

Anggota : 1. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si

2. Dr. Djoko W. Tjahjo, S.E., M.Si

3. Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M

4. Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D



HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Halaman pernyataan ini berisi pernyataan tentang originalitas karya tulis dengan menulis kalimat:

Bagian atau keseluruhan isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya 22 Juni 2016



Rama Dimas Ade Kusuma

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini yang berjudul “Opini Masyarakat Terhadap *Personal Brand* Cawabup Di Kabupaten Sidoarjo”. Sebagai tanda rasa syukur, semua pengalaman selama proses penulisan tesis akan saya jadikan sebagai refleksi atas diri saya yang kemudian diimplementasikan untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister pada program studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, diharapkan dapat memberi gambaran pada masyarakat bahwa *personal brand* sangat penting dalam kontestasi politik, karena disitulah citra seorang kandidat politik terbangun dalam benak masyarakat. Terelesaikannya penulisan tesis ini, saya sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, bantuan dan peran berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi pada semua pihak yang telah mendukung penulisan tesis ini, salah satunya kedua orang tua yang telah sabar memberi waktu dan perhatian yang tak terhingga nilainya. Secara khusus, rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada:

- 1.1 Ibu Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M sebagai pembimbing Ketua sekaligus Kaprodi S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga.
- 1.2 Bapak Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D, sebagai pembimbing kedua.
- 1.3 Bapak Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si sebagai Ketua Panitia Penguji.
- 1.4 Bapak Dr. Djoko W. Tjahjo, S.E., M.Si sebagai Anggota Panitia Penguji.
- 1.5 Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, para pejabat, karyawan, dan dosen di Universitas Airlangga Surabaya.
- 1.6 Teman-teman satu angkatan S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga yang turut mendukung dan mendoakan.

Demikian sepatah dua yang dapat disampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan di masa yang akan datang.

RINGKASAN

Penelitian ini tentang opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim Tionghoa dalam pencalonan pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Pemilu kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses yang mulai berlangsung sejak akhir 1990-an dan partai politik dituntut untuk menyiapkan figur publik dengan tepat untuk Pemilihan Kepala Daerah. Salah satunya, Tan Mei Hwa merupakan tokoh perempuan muslim Tionghoa, bersama dengan Partai PKS dan Partai Gerindra mencoba memasuki ranah politik dengan berusaha membentuk citra yang kuat dan jelas pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Adapun teori *personal brand* digunakan untuk mengetahui aspek karakteristik dan dimensi Tan Mei Hwa. Aspek karakteristik sendiri terdiri dari kekhasan, relevansi, dan konsistensi. Sedangkan aspek dimensi, terdiri dari karakter, kompetensi, dan kekuatan. Selain itu, didukung juga oleh teori lainnya yang saling melengkapi, yakni pragmatisme partai politik, komunikasi *personal brand*, *marketing mix* dalam politik, komunikasi politik perempuan, etnisitas dan agama dalam komunikasi politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari Tan Mei Hwa dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tipe penelitian ini menggunakan eksploratif, karena selain fokus mengeksplorasi *personal brand* dari Tan Mei Hwa, disamping itu melihat sisi lain sebuah identitas diri sebagai seorang perempuan muslim yang merupakan bagian dari kelompok minoritas. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan dua kelompok informan, yakni kelompok pemula (P) dan kelompok lanjutan (U). Tentunya pertimbangan kriteria tertentu telah dibuat terhadap objek, sehingga dapat mewakili segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Dari hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat mengenai *personal brand* Tan Mei Hwa adalah perempuan pendakwah beretnis Tionghoa. Namun pemilihan partai dan pasangan politik yang kurang sesuai menyebabkan *personal brand* Tan Mei Hwa tidak maksimal dalam

pencalonan wakil bupati. Hal itu dapat terlihat dari dua aspek penting dalam *personal brand* Tan Mei Hwa, yakni karakteristik dan dimensi.

Adapun pada aspek karakteristik, elemen kekhasan terlihat dari pendapat masyarakat secara keseluruhan tidak mempermasalahkan Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik, selama tidak ada pelarangan dari Undang-Undang yang berlaku, dan melaksanakan tugas dan janji program kerja, serta meningkatkan kualitas dalam memimpin. Masih dalam elemen kekhasan, masyarakat secara keseluruhan merasakan kualitas nilai-nilai agama yang tetap dipertahankan sembari memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sebagai seorang perempuan, Tan Mei Hwa juga layak menjadi pemimpin dengan syarat tidak dalam konteks agama dan keluarga.

Tetapi dalam menerima etnis Tionghoa di dalam masyarakat terdapat perbedaan, kelompok P memiliki pemikiran yang terbuka dengan adanya etnis Tionghoa mencalonkan sebagai wakil bupati, sedangkan kelompok U mengatakan belum saatnya etnis Tionghoa memimpin Kabupaten Sidoarjo, karena masyarakat masih sulit menerima etnis lain untuk memimpin dan lebih memilih sesama pribumi yang lebih pandai. Tetapi, apabila Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama Islam secara keseluruhan masyarakat menilai tidak masalah, karena agama Islam dapat menerima segala etnis manapun. Dilihat dari sisi penampilan, Tan Mei Hwa yang selalu tampil di ranah publik dengan apa adanya, sederhana, tidak bermegah, *low profile*, dan tertutup untuk menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim diranah publik.

Elemen lain dari aspek karakteristik yakni relevansi, di dalam masyarakat terlihat terdapat perbedaan pendapat. Kelompok P belum bisa menerima pemimpin dari etnis Tionghoa, karena adanya label kikir yang terlanjur melekat dan kekhawatiran menguasai perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan kelompok U menilai sebuah keuntungan atau kerugian bergantung *output* atau hasil kinerjanya Tan Mei Hwa. Namun terkait pencalonannya sebagai wakil bupati, secara keseluruhan masyarakat tidak mempermasalahkan Tan Mei Hwa menggunakan aktivitas agama seperti pengajian untuk mencari dukungan suara politik. Hal tersebut dikarenakan Tan Mei Hwa memang merupakan pribadi yang komunikatif

dan pendekatannya yang sama dengan latar belakang sebagai pendakwah, serta didukung dengan mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam.

Sementara elemen konsistensi yang juga merupakan bagian aspek karakteristik, memperlihatkan apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh Tan Mei Hwa dalam politik tidak konsisten. Hal ini dikarenakan latar belakang Tan Mei Hwa sebagai pendakwah seharusnya lebih mementingkan kepentingan komunitas agama dibandingkan kepentingan ke politik.

Berikutnya pada aspek dimensi, elemen pertama yaitu karakter. Secara keseluruhan masyarakat terlihat dari pendapat masyarakat yang melihat Tan Mei Hwa sebagai sosok yang bertanggung jawab, peduli, jujur, berintegritas, dan berani.

Elemen kedua yaitu kompetensi, di dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat, kelompok U saja yang menilai bahwa Tan Mei Hwa memiliki ketrampilan teknis atau pengetahuan sebagai pendakwah, tetapi berbeda dengan kelompok P yang tidak mengetahui sama sekali. Bahkan dalam hal loyalitas terdapat perbedaan, kelompok P berpendapat tidak ada pengaruhnya karena apabila sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin, Tan Mei Hwa pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. Berbeda dengan kelompok U berpendapat banyak pengaruhnya, karena Tan Mei Hwa dapat saja masih mementingkan golongan.

Begitupun Tan Mei Hwa sebagai calon pemimpin perempuan dalam mengatur kebijakan, di dalam masyarakat terdapat perbedaan. Kelompok P berpendapat hanya dapat berharap Tan Mei Hwa bisa mengatur kebijakan, sedangkan kelompok U dengan tegas berpendapat bahwa, mengingat fungsi pemimpin terbatas pada aspek manajerial, sementara aspek pelaksanaan dikelola kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya. Sehingga, apabila Tan Mei Hwa yang tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli, birokrasi-birokrasi, dan diawasi oleh DPR. Namun secara keseluruhan masyarakat menilai, Tan Mei Hwa memiliki sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan dapat menjadi teladan.

Elemen ketiga yaitu kekuatan, terdapat perbedaan pendapat di dalam masyarakat dalam menilai reputasi Tan Mei Hwa. Kelompok P memilih percaya pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, karena bilamana dapat

mempercayai Tuhan, maka reputasinya sebagai pendakwah diyakini dapat dipercaya. Sedangkan kelompok U masih meragukan status pendakwah, terlebih ketika terjun ke politik. Tetapi tentunya untuk menjadi seorang kepala daerah, secara keseluruhan masyarakat memahami bahwa Tan Mei Hwa bisa dipastikan mengeluarkan modal uang pribadi untuk sosialisasi seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, iklan, publikasi, dan biaya kampanye. Terlebih, partai politik sering kali mencari keuntungan dimulai sebelum pendaftaran, seperti Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana yang membayar mahar untuk rekomendasi calon bupati bersama Tan Mei Hwa, jual beli kursi, dan kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan politik sebagai ajang mengedepankan kepentingan pribadi untuk berkuasa dalam membentuk dan mengontrol kebijakan publik.

Masyarakat menilai Tan Mei Hwa masih memiliki kelemahan atau keterbatasan, yang dapat diperbaiki apabila ingin mencalonkan kembali dalam kontestasi politik. Pertama, Tan Mei Hwa salah masuk partai politik, dimana Partai Gerindra dan Partai PKS sering mengalami kontroversi. Kedua, Tan Mei Hwa berhadapan dengan kandidat *incumbent* yang mencalonkan kembali, Ketiga, Tan Mei Hwa kurang sesuai memilih pasangan politik, dimana Utsman Ikhsan mempunyai reputasi yang tidak baik ketika menjabat sebagai ketua DPRD periode 1999-2004. Hal ini dikarenakan Utsman Ikhsan melakukan tindakan korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003. Keempat, Tan Mei Hwa kurang dalam pencitraan. Adapun pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu singkat, setidaknya sekali lagi dalam pencalonan Pilkada.

Penelitian ini menyajikan hasil opini mengenai *personal brand* pada politisi perempuan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan melakukan analisis tekstual *personal brand* politisi perempuan pada media massa. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengambil pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan kecenderungan opini masyarakat terhadap *personal brand* politisi perempuan. Dengan demikian penelitian berikutnya dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait dengan makna pesan teks mengenai *personal brand* pada politisi di Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini tentang opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim Tionghoa dalam pencalonan pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 adalah pertama kalinya Indonesia mengadakan Pemilihan Umum secara serentak seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dimanfaatkan salah satunya oleh Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim Tionghoa, yang berusaha membentuk citra yang kuat dan jelas pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pada penelitian ini, pengambilan data menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan dua kelompok informan, yakni kelompok pemula (P) dan kelompok lanjutan (U). Metode yang digunakan adalah studi kasus, supaya dapat memberikan gambaran secara mendetail sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari Tan Mei Hwa, dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya mengenai *personal brand* yang dikaitkan dengan identitas diri Tan Mei Hwa.

Dari hasil dan analisis, disimpulkan bahwa pendapat masyarakat mengenai *personal brand* Tan Mei Hwa adalah perempuan pendakwah beretnis Tionghoa. Namun pemilihan partai dan pasangan politik yang kurang sesuai menyebabkan *personal brand* Tan Mei Hwa tidak maksimal dalam pencalonan wakil bupati. Adapun aspek karakteristik pada elemen kekhasan, masyarakat merasakan kualitas nilai-nilai agama yang tetap dipertahankan sembari memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Tetapi pada elemen relevansi, terlihat dari masyarakat yang belum bisa menerima etnis Tionghoa, karena adanya label kikir yang terlanjur melekat dan kekhawatiran menguasai perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Opini Publik, *Personal Brand*, Perempuan Dalam Politik, Pilkada

ABSTRACT

This research about public opinion Sidoarjo Regency against personal brand Tan Mei Hwa as Chinese muslim women in regional election candidacy Sidoarjo Regency 2015. The Regional Election 2015 is the first time Indonesia held General Elections simultaneously in the whole of Indonesia including Sidoarjo Regency. It was used one only by Tan Mei Hwa as Chinese muslim women, attempting to form the image of a strong and clear on the public Sidoarjo Regency.

In this research, loading data using Focus Group Discussion (FGD) involving two groups of informers, i.e. the beginner groups (P) and advanced groups (U). The method used is the case study that can give description details the attributes and the characters are typical of Tan Mei Hwa, with guidelines of the interview that have been arranged earlier about personal brand that is associated with the identity of themselves Tan Mei Hwa.

From the results and analysis, concluded that public opinion regarding personal brand Tan Mei Hwa is contributes to the women of Chinese latinised. But the party elections and political pair less according to cause personal brand Tan Mei Hwa not in a maximum of the candidacy of vice regent. Now the aspects of the characteristics of the elements of uniqueness, the community felt the quality of the values of religion which is maintained while memperjuangan the rights of women. But on the elements of the relevance, visible from the community that have not yet been able to accept the ethnic Chinese due to the presence of the label covetous which lapsed stick and worries over further slowed by Indonesia.

Key Words: Public Opinion, Personal Brand, Women in politics, The Election

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Opini.....	19
2.3 Focus Group Discussion (FGD).....	20
2.4 Pragmatisme Partai Politik.....	21
2.5 Brand, Branding dan Personal Brand.....	23
2.6 Komunikasi Personal Brand.....	28
2.7 Marketing Mix Dalam Politik.....	30
2.8 Komunikasi Politik Perempuan.....	34
2.9 Etnisitas dan Agama Dalam Komunikasi Politik.....	38
2.10 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

3.1	Tipe Penelitian	43
3.2	Sasaran Penelitian	44
3.3	Unit Analisis	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Teknis Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		46
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	46
4.2	Pilkada Kabupaten Sidoarjo dan Partai Politik.....	47
4.3	Profil Tan Mei Hwa	52
4.4	Aktivitas Personal Brand Tan Mei Hwa	54
4.5	Media Komunikasi Personal Brand	62
BAB V HASIL & PEMBAHASAN		71
5.1	Profil Informan.....	72
5.1.1	Informan Kategori P	72
5.1.2	Informan Kategori U	74
5.2	Opini Informan Tentang Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa.....	78
5.2.1	Karakteristik Kekhasan Tan Mei Hwa	78
5.2.1.1	Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Masuk Ranah Politik	78
5.2.1.2	Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Menjadi Pemimpin	89
5.2.1.3	Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Menjadi Pemimpin.	98
5.2.1.4	Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Beragama Muslim..	107
5.2.1.5	Penampilan Tan Mei Hwa Di Ranah Publik	115
5.2.1.6	Kualitas Dalam Diri Tan Mei Hwa	125
5.2.2	Karakteristik Relevansi Tan Mei Hwa	134
5.2.2.1	Menilai Pemimpin Berbeda Etnis	134
5.2.2.2	Tan Mei Hwa Berkomunikasi Dengan Masyarakat	142
5.2.2.3	Perihal Yang Disampaikan Tan Mei Hwa.....	153
5.2.2.4	Agama Sebagai Unsur Politik	164
5.2.3	Karakteristik Konsistensi Tan Mei Hwa	174
5.2.4	Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa Secara Umum.....	184
5.2.4.1	Pendapat Komunal Informan P (Pemilih Pemula).....	184
5.2.4.2	Pendapat Komunal Informan U (Pemilih Lanjutan)	189

5.2.4.3	Hasil Akhir antara Informan P dan informan U.....	199
5.3	Opini Informan Tentang Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa.....	223
5.3.1	Dimensi Karakter Tan Mei Hwa	223
5.3.2	Dimensi Kompetensi Tan Mei Hwa.....	234
5.3.2.1	Kompetensi Dari Tan Mei Hwa	234
5.3.2.2	Sikap Dari Tan Mei Hwa	243
5.3.2.3	Loyalitas Kerja Dari Tan Mei Hwa.....	249
5.3.2.4	Pengaturan Kebijakan Dari Tan Mei Hwa	258
5.3.3	Dimensi Kekuatan Tan Mei Hwa.....	265
5.3.3.1	Kepercayaan Reputasi Tan Mei Hwa Sebagai Pendakwah..	265
5.3.3.2	Materi Pribadi Sebagai Modal Tan Mei Hwa	271
5.3.3.3	Dukungan Partai Politik Sebagai Kekuasaan	278
5.3.3.4	Keterbatasan Tan Mei Hwa.....	285
5.3.4	Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa Secara Umum	293
5.3.4.1	Pendapat Komunal Informan P (Pemilih Pemula).....	294
5.3.4.2	Pendapat Komunal Informan U (Pemilih Lanjutan)	298
5.3.4.3	Hasil Akhir antara Informan P dan informan U.....	309
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	327
4.1	Kesimpulan	327
4.2	Saran	331
	DAFTAR PUSTAKA.....	332

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	17
Tabel V.1 Ringkasan Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa	194
Tabel V.2 Ringkasan Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa.....	303

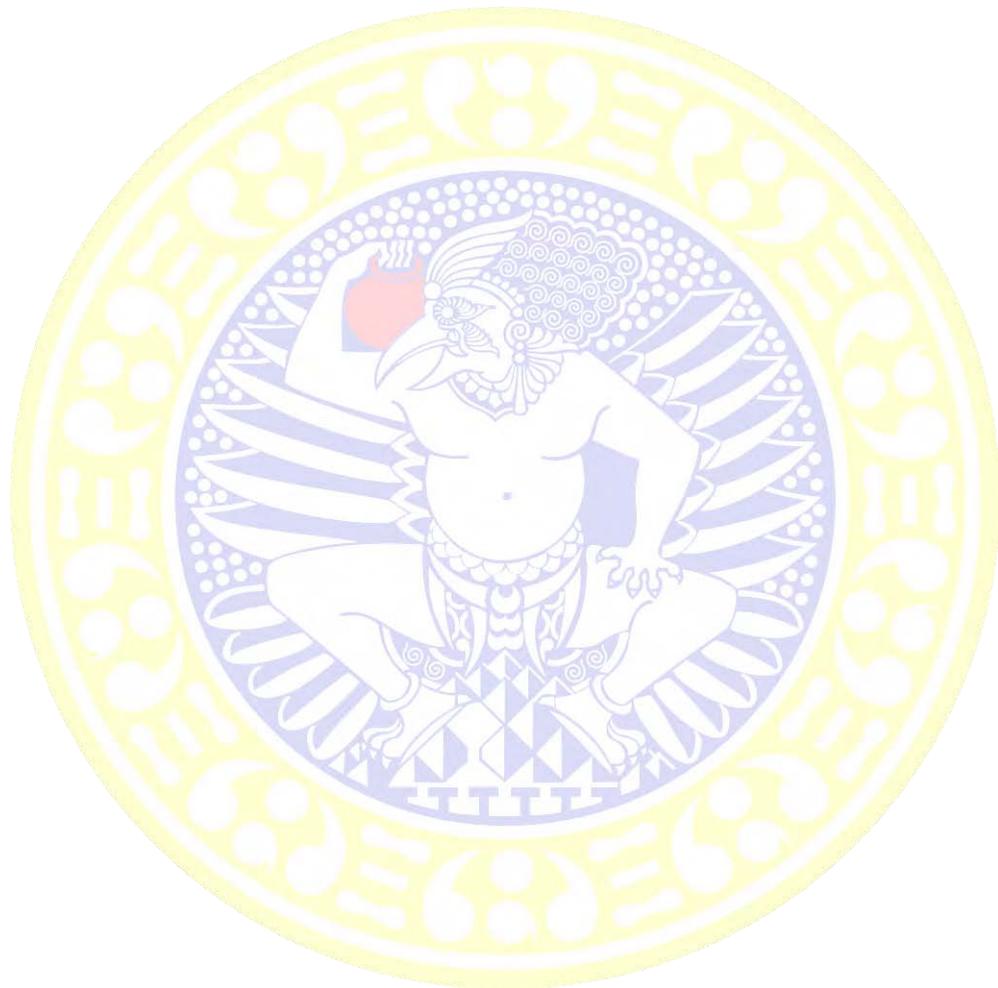


DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	42
Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo	46
Gambar IV.2 Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa.....	53
Gambar IV.3 Tan Mei Hwa Menyantuni Yatim Piatu	55
Gambar IV.4 Tan Mei Hwa Pengajian Dengan Ibu-Ibu	55
Gambar IV.5 Tan Mei Hwa Bersama Tukang Sampah	56
Gambar IV.6 Tan Mei Hwa Bersama Pedagang Kecil	57
Gambar IV.7 Tan Mei Hwa Bersosialisasi Saat Jalan Sehat	57
Gambar IV.8 Tan Mei Hwa Bersama Karang Taruna Dusun Kasak.....	58
Gambar IV.9 Kampanye Tan Mei Hwa Saat Pengajian	59
Gambar IV.10 Tan Mei Hwa Memberikan Amplop Pada Jamaah	59
Gambar IV.11 Tan Mei Hwa Tausiah Di TV Lokal	60
Gambar IV.12 Tan Mei Hwa Bersama Ikatan Haji Muslimat NU	61
Gambar IV.13 Penampilan Tan Mei Hwa Di Ranah Publik.....	61
Gambar IV.14 Website Uswatan.....	63
Gambar IV.15 Facebook Uswatan Untuk Sidoarjo.....	64
Gambar IV.16 Twitter @balaiuswatan	65
Gambar IV.17 Brosur Uswatan Tampak Depan	66
Gambar IV.18 Brosur Uswatan Tampak Belakang.....	66
Gambar IV.19 Poster Uswatan.....	67
Gambar IV.20 Spanduk Uswatan.....	68
Gambar IV.21 Panggung Kampanye	68
Gambar IV.22 Kaos Uswatan	69
Gambar IV.23 Debat Kandidat Di TV Lokal.....	70
Gambar V.1 Penampilan Fisik Tri Rismahari dan Lucy Kurniasari	119
Gambar V.2 Tan Mei Hwa Kumpul Pengamen Di Sop Pak Amin.....	145

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	340
Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD)	342
Transkrip Wawancara Kelompok P.....	343
Transkrip Wawancara Kelompok U.....	365



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini tentang opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim Tionghoa dalam pencalonan pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Tema ini menarik untuk diteliti karena opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu bahkan jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan dan semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi (*frame of experience*) dan pengalaman orang lain secara langsung ataupun tidak langsung diketahui oleh individu (*frame of reference*) (Sunarjo, 1997). Berbagai macam pengalaman dalam hidup seseorang, salah satunya yakni pengalaman dalam menghadapi pilkada baik pertama kali atau sudah beberapa kali mengalami dalam memilih kandidat kepala daerah. Karena itu peneliti hendak mengeksplorasi opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam memaknai *personal brand* dari identitas pribadi calon wakil bupati Tan Mei Hwa. Adapun Tan Mei Hwa dalam pencalonan berusaha membentuk citra yang kuat dan jelas, dengan *personal brand* yang dibentuk sedemikian rupa untuk mengemas identitasnya sebagai perempuan muslim yang beretnis Tionghoa kepada masyarakat dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2015.

Menurut Priyatmoko, pemilu kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses yang mulai berlangsung sejak akhir 1990-an. Ideologi politik, kepentingan, pengelompokan, dan kepemimpinan politik yang

berbeda-beda muncul ke permukaan, mendeklarasikan perbedaan-perbedaan diantara mereka secara terbuka (Priyatmoko dalam Wignjosoebroto, 2008). Berlakunya UU No.23/2004 menggantikan UU No.22/1999, yang berisikan politik pembebasan daerah, secara tidak langsung daerah-daerah diberi otonomi yang sangat luas, mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang ditentukan secara limitatif sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga pada era otonomi daerah, dapat dikatakan salah satu langkah maju yang besar dan babakan baru dalam sejarah politik di Indonesia, dengan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Secara teoritis, menurut Aminah pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di ranah lokal (Aminah dalam Wignjosoebroto, 2008).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan intitusi konstitutif sekaligus instrumental. Institusi konstitutif pilkada secara langsung harus diselenggarakan semata-mata karena alasan nilai dan prinsip yang sudah seharusnya diperkuat, tanpa terlalu atau bahkan tidak sama sekali mengalkulasi besaran untung-ruginya secara pragmatis. Sedangkan secara intrumental, yakni bernilai-tidaknya atau tinggi-rendahnya nilai penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak melekat pada penyelenggaraannya saja, melainkan lebih ditentukan oleh dampak atau konsekuensi yang ditimbulkannya dan dengan kata lain ditentukan oleh asas kemanfaatannya secara pragmatis (Priyatmoko dalam Wignjosoebroto, 2008).

Masyarakat bukan sosok sederhana yang dengan mudah menentukan kebulatan kehendaknya, dalam kenyataannya masyarakat merupakan himpunan

plural yang di dalamnya terdapat banyak kepentingan dan kehendak. Kadang-kadang tidak sekedar saling berbeda, melainkan juga cenderung saling berbenturan, bertentangan dan saling berusaha ingin mengalahkan. Namun, terkadang ada kehendak atau kepentingan tertentu yang dikemas sedemikian rupa atas nama mayoritas atau modernitas, kemajuan, stabilitas, atau lainnya yang hendak mengatasnamakan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dengan masa persiapan yang relatif sangat terbatas partai-partai politik dituntut untuk menyiapkan figur publik dengan tepat untuk Pemilihan Kepala Daerah, dimana “tokoh” atau “orang yang ditokohkan” atau “yang ditokoh-tokohkan” secara resminya bisa diakui sebagai “kader politik” yang dididik, disiapkan, dan dimatangkan kemampuan kepemimpinannya melalui partai politik. Hal tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang memegang kewenangan resmi, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengikat rakyat.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang telah siap menyambut Pilkada secara serentak tahun 2015 dan menjadi fokus lokasi penelitian berlangsung. Tokoh yang salah satunya telah dipersiapkan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo 2015 tidak dipungkiri didominasi oleh pasangan kaum pria, diantaranya H. MsG Hadi Sutjipto, S.H, M.M dengan H. Abdul Kolik, S.E (HATIKU), H. Utsman Ikhsan dengan Ida Astuti, S.H (USWATAN), Saiful Ilah S.H, M.Hum dengan Nur Achmad Syaifuddin, S.H (BERSINAR), dan Wareh Andono, S.H dengan H. Imam Sugiri, S.T, M.M (WANI). Berbeda halnya dengan nomor urut 2 (dua) Utsman Ikhsan yang merupakan satu-satunya pasangan menggandeng calon wakil perempuan yakni Ida Astuti alias Tan Mei Hwa, partai politik pengusungnya yakni partai PKS dan

Gerindra, dimana kedua partai bersama mendukung dan mengantarkan ke kantor KPUD Sidoarjo di Jalan Cemengkalang pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 14.00 (sumber: nasional.tempo.co).

Tan Mei Hwa lahir di Tulungagung 27 Juli 1968 merupakan salah satu sedikit perempuan berketurunan etnis Tionghoa yang sangat menekuni dunia dakwah Islam. Dakwahnya berawal pada tahun 1993 yang ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya dengan pendakwah yang mencerahkan dan penuh dengan humor. Tetapi dakwah yang dilakukan telah memiliki agenda kegiatan rutin sebelum pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Tan Mei Hwa sebagai pendakwah telah sering menghadiri sebuah pengajian dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim hingga terkenal secara massa ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya. Maka dari itu, menurut Aditya Nindyatman sebagai Ketua DPD PKS Jawa Timur, Tan Mei Hwa dinilai sesuai dengan misi PKS sebagai partai dakwah (sumber: www.pks.or.id)

Nyai Tan panggilan akrab masyarakat yang mengenalnya tersebut, mengakui dirinya mendampingi Utsman Ikhsan guna memperjuangkan aspirasi para perempuan di Kabupaten Sidoarjo, seperti yang dikatakan Tan Mei Hwa:

Saya lebih banyak mengurus internal, seperti mengurus wanita. Karena wanita itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa, jika dikembangkan. Kemudian pendidikan, kaum dhuafa, dan yatim piatu, dan ini yang pas cocok untuk ditangani seorang perempuan. (sumber: www.suarasurabaya.net)

Komitmen sebagai pendakwah, Tan Mei Hwa menerapkan strategi dengan berdakwah bersamaan dengan kampanye dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo 2015 di berbagai daerah seperti Desa Sugihwaras – Kecamatan Candi, Perum Griya Kartika – Kecamatan Sedati, Perum Anggaswangi –

Kecamatan Sukodono, Perum Candiloka – Kecamatan Candi, Desa Ngingas – Kecamatan Krian, dan sebagainya. Namun tidak hanya dakwah saja tetapi beberapa agenda juga menjadi perhatian Tan Mei Hwa dalam strategi kampanye seperti menghadiri kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia di Tropodo, bertemu dengan komunitas pengamen di Sop Ayam Pak Min Sidoarjo, bertemu dengan kaum pemuda, senam dan jalan sehat di Banjarwungu, hingga menghadiri takbir keliling di Krian. (sumber: www.facebook.com – Uswatan Untuk Sidoarjo). Disamping itu, Tan Mei Hwa sebagai satu-satunya calon perempuan memberikan perhatian lebih pada permasalahan perempuan, dan memberikan wadah pada perempuan di Kabupaten Sidoarjo seperti fatayat NU, pekerja, remaja, bahkan kaum janda yang akan diperdayakan (Jawa Pos, 24-9-2015).

Menurut Fitranisa (2011) sebenarnya etnis Tionghoa terdiskriminasi hampir di semua sektor kehidupan meskipun mereka mendapat kesempatan untuk mengembangkan ekonomi nasional, termasuk kekayaan mereka sendiri. Pemerintah juga menerapkan kebijakan satu budaya terhadap etnis Tionghoa supaya membaaur secara total ke dalam masyarakat Indonesia, dengan menutup sekolah-sekolah Tionghoa, melarang penerbitan media berbahasa Tionghoa, pelarangan penggunaan bahasa Tionghoa di muka umum dan mengharuskan mereka mengganti nama menjadi “lebih Indonesia”. Disamping itu menurut Meij, identitas orang Tionghoa juga dibentuk dan dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kelompok yang monolitik (Meij dalam Fitranisa, 2011). Berbeda halnya dengan kondisi saat ini, Tan Mei Hwa sebagai Tionghoa mualaf memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan identitas religius mereka setelah era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Hoon, 2006). Disamping itu saat era

pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah telah melegalisasi aturan kewarganegaraan Indonesia yang baru (No.12/2006). Sehingga dengan pembaruan atas peraturan kewarganegaraan di Indonesia, etnis Tionghoa lebih leluasa untuk mengartikulasikan identitas mereka.

Selain permasalahan etnis, Tan Mei Hwa sebagai seorang perempuan dapat merasakan hal yang sama dengan politisi perempuan lainnya yakni sering dikesampingkan banyak orang terutama kaum patriarki, yang menganggap perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Hal tersebut mengakibatkan semakin sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasi posisi dan kedudukannya serta semakin mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili. Menurut Bystrom et al. (2004), pendapat media massa dianggap sering menggambarkan politisi perempuan mempunyai masalah atau dikaitkan dengan isu domestik yang berkaitan dengan perilaku anak dan suaminya, namun tidak dengan politisi laki-laki. Disamping itu, media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan di rumah, persoalan penampilan mereka di publik, dan perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja *online*, dan sebagainya. Sedangkan kandidat laki-laki secara umum lebih memiliki kebebasan dalam berpakaian dan bertingkah laku karena publik telah terbiasa untuk menerima laki-laki sebagai pemimpin.

Menurut Subiakto dan Ida (2012), meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi yang menguntungkan diparlemen, perempuan belum mampu memperjuangkan suara perempuan, kebutuhan perempuan, dan proporsi

pembagian persoalan kesejahteraan serta keadilan bagi perempuan. Ketika perempuan mempunyai andil untuk bicara, perjuangan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas yang lain belum mampu secara maksimal dikedepankan, dibandingkan persoalan atau masalah yang dihadapi umum yang lebih memihak kepentingan dominan laki-laki.

Begitupun dengan permasalahan agama menjadi salah satu bagian yang tak lepas dari seorang yang berketurunan Tionghoa, dimana menurut perhimpunan INTI sebagai organisasi yang didirikan di Jakarta di hadapan Notaris James Herman Rahardjo pada 5 Februari 1999 oleh 18 Warga Negara Republik Indonesia yang peduli terhadap penyelesaian “Masalah Tionghoa”, masih terdapat prasangka atau penilaian buruk dengan nada "menghakimi" menyeruak seperti pernyataan, "Pasti ada motif mencari untung jika Tionghoa menjadi muslim agar karir atau urusan bisnis lancar serta tidak dicurigai macam-macam". Memprihatinkan memang dalam memeluk Islam pun, etnis Tionghoa masih dikait-kaitkan dengan prasangka besar sebagai pribadi yang mempertimbangkan untung dan rugi.

Perhimpunan INTI mengatakan, bahwa sebenarnya sejarah masuknya Islam dengan etnis Tionghoa sangat erat hubungannya. Ketika Islam mulai masuk Indonesia, termasuk ke Jawa Timur sekitar abad 14 dan 15, terdapat banyak sekali peran orang-orang Tionghoa. Prof Dr Slamet Muljana dalam buku Runtuhnja Keradjaan Hindu-Djawa dan Timbulnja Negara Islam di Nusantara (1968) yang kemudian dilarang pemerintah Orde Baru. Menurut buku tersebut, penyebaran Islam di Nusantara memang tidak hanya berasal dari para pedagang Arab, tetapi juga ada peran dari para migran atau pendatang dari Tiongkok (sumber: inti.or.id).

Tan Mei Hwa yang memiliki latar belakang identitas sebagai perempuan muslim Tionghoa, menjadikan Partai Politik pengusung dan Tim Pemenangan harus bekerja keras membangun sebuah *personal brand* yang berpengaruh, seperti yang dikatakan Montoya (2009), dimana *personal brand* merupakan *image* yang kuat dan jelas ada di benak klien. Meskipun begitu *personal brand* bukan semata menghadirkan *personal image* (citra), meski *image* tentulah penting, tetapi harus didukung dengan realita dan janji harus didukung dengan bukti. *Personal brand* memberikan dampak dasyat, dibuktikan kesuksesan Susilo Bambang Yudoyono memenangkan pemelihan Presiden secara langsung dua kali berturut-turut tahun 2004 dan tahun 2009. Junaedi (2013) mengatakan pada saat pemilu 2009 berbagai iklan politik menyerang SBY secara bertubi-tubi dan menohok kebijakannya, namun citra yang telah terbangun dan melekat pada sosok SBY ternyata tidak mudah dijatuhkan dengan iklan politik.

Tan Mei Hwa bertarung dalam kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan menarik dalam pemetaan suara partai politik, dimana memiliki 18 kecamatan, diantaranya memiliki 353 kelurahan dan memiliki Daftar Pemilih Tetap 2015 sekitar 60% dari jumlah penduduk yakni 1.367.945, jumlah pemilih perempuan 693.996 dan jumlah pemilih laki-laki 673.949 (kpud-sidoarjokab.go.id). Basispartai politik terbesar dari keseluruhan wilayah data tersebut yakni partai PKB, sehingga Tan Mei Hwa harus memiliki *personal brand* yang kuat dalam memenangkan kontestasi Pilkada 2015. Berdasarkan data KPU Sidoarjo Suara Pileg 2014, PKB menguasai diseluruh Dapil dengan hasil Dapil 1 terdapat 60.208, Dapil 2 terdapat 52.757, Dapil 3 terdapat 33.197, Dapil 4 terdapat 50.649, Dapil 5 terdapat 38.449, Dapil 6 terdapat 28.370, dan total seluruh dapil

terdapat 263.630 suara (kpud-sidoarjokab.go.id). Sedangkan Partai Politik yang mengusung Tan Mei Hwa, meskipun sudah diusung oleh dua partai politik PKS dan Gerindra tetapi pada kenyataannya hasil pileg 2014 tetap tidak dapat mengungguli suara PKB yang mendominasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dari KPU Sidoarjo suara Pileg 2014 gabungan antara PKS dan Gerindra yakni Dapil 1 terdapat 33.758, Dapil 2 terdapat 29.737, Dapil 3 terdapat 34.351, Dapil 4 terdapat 30.711, Dapil 5 terdapat 42.676, Dapil 6 terdapat 26.801, dan total seluruh dapil PKS dan Gerindra terdapat 198.034 suara (kpud-sidoarjokab.go.id).

PKS sebagai partai politik yang telah berdiri 1970-an dengan menggandeng partai Gerindra tetap memiliki keyakinan dengan tokoh yang diusungnya dalam perhelatan pilkada 2015, yakni Utsman Ikhsan dengan wakilnya Tan Mei Hwa (uswatan) yang merupakan kandidat terpilih dan siap menantang calon *incumbent* Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai wakil bupati dan satu periode sebagai bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015).

Melihat berbagai kesuksesan dan kontroversi tokoh politik tidak dipungkiri peran besar oleh Partai Politik. Partai Politik merupakan organisasi yang memiliki sebuah ideologi untuk memperoleh kekuasaan politik dan sebuah kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan (Budiarjo, 1989). Partai politik di Indonesia yang dinyatakan sah untuk pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 terdapat 10 partai yakni Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PBB, dan PKPI (sumber: www.kpu.go.id), dimana partai politik yang telah lolos secara administrasi akan secara langsung

mempersiapkan pengusungan seorang calon individu yang berkualitas untuk merebut kemenangan pada pemilihan umum dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai fenomena dan pandangan secara akademis yang terjadi, peneliti tertarik mengenai opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim Tionghoa dalam pencalonan pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Sebab opini sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi, terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Maka dari itu peneliti hendak mengeksplorasi opini masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam memaknai *personal brand* dari identitas pribadi calon wakil bupati Tan Mei Hwa, karena Tan Mei Hwa dalam pencalonan berusaha membentuk citra yang kuat dan jelas, dengan *personal brand* yang dibentuk sedemikian rupa untuk mengemas identitasnya sebagai perempuan muslim yang beretnis Tionghoa kepada masyarakat dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2015.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu salah satunya Yanny Hariati (2015) yang menggunakan sudut pandang persepsi pemilih pemula terhadap *political personal branding*. Namun yang berbeda dengan penelitian ini berfokus pada opini masyarakat dan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) pada dua kelompok yang telah ditentukan peneliti, sehingga peneliti mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai dari informan yang beragam mengenai *personal brand* Tan Mei Hwa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana opini masyarakat kabupaten sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa dalam pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi opini masyarakat kabupaten sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa dalam pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menyajikan hasil opini masyarakat kabupaten sidoarjo terhadap *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan tionghoa beragama muslim dalam pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Disamping itu, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terhadap *personal brand* calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi dasar bagi penelitian lain yang ingin mengkaji opini masyarakat terhadap *personal brand*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang diangkat oleh Yanny Hariati (2015) mengenai persepsi pemilih pemula terhadap *political personal branding* Jokowi yang menjadi pertimbangan komunitas Young On Top Malang dalam menentukan pilihan Presiden dan partai politiknya. Komunitas Young On Top Malang lebih berorientasi pada kesuksesan anak muda dan mengedukasi anak muda untuk lebih kreatif serta sukses di usia muda. Komunitas Young On Top Malang dilatarbelakangi banyak hal, salah satunya adalah kisah yang terinspirasi dari sebuah buku Billy Boen. Buku inspiratif tersebut mengajak anak muda untuk optimis dalam menjalani hidup, konsep yang diangkat adalah “Kalau bisa sukses muda, kenapa musti nunggu tua?”. Persamaan dengan peneliti yakni mengangkat studi tentang *political personal branding*, namun yang berbeda yakni menggunakan masyarakat Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sidoarjo.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Yanny Hariati (2015) menggunakan kualitatif, dengan beberapa langkah yang digunakan yakni pertama, Yanny mencari anggota Komunitas Young On Top Malang yang berpartisipasi dalam pemilu presiden 2014. Kedua, Yanny melakukan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang 6 orang pada tempat yang telah ditentukan. Ketiga, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta buku-buku sekunder yang mendukung. Terakhir mendokumentasikan kegiatan dengan foto dan rekaman

suara. Sedikit berbeda dengan peneliti, tidak hanya FGD namun menambahkan *In Dept Interview* guna melengkapi data lebih komperhensif.

Teknik penentuan sampel Yanny Hariati (2015) sama halnya yang dilakukan peneliti yakni dengan *Purposive Sampling*, sebagai pertimbangan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek, sehingga dapat mewakili segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti. Analisis data dilakukan dengan berupa narasi-narasi kualitatif yang diperoleh dari FGD kemudian ditranskrip. Kemudian data yang telah tersedia dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian Yanny Hariati (2015), persepsi anggota komunitas Young on Top Malang terhadap *political personal branding* Jokowi adalah sederhana, blusukan, kreatif dan identik dengan *background* pengusaha. Atribut yang dianggap melekat dengan sosok Jokowi adalah baju kotak-kotak dan kemeja putih yang dikenakan saat kampanye pilpers. Anggota komunitas Young on Top Malang sebagai pemilih pemula mempersepsi keberadaan Jokowi memberikan optimisme positif terhadap minat memilih dalam pemilu presiden 2014 terutama bagi anak muda, dimana pada tahun sebelumnya apatis terhadap pemilu menjadi aktif di tahun 2014 untuk mengikuti perkembangan pemilu. Hal ini menjelaskan bahwa persepsi anggota komunitas Young on Top Malang sebagai pemilih pemula terhadap *political personal branding* Jokowi mempersepsikan positif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ita Nurlita (2014), yang bertema opini publik terhadap kredibilitas calon Presiden RI tahun 2014 dalam perspektif mahasiswa. Menurut Ita, opini publik yang berkembang di Indonesia berpengaruh

terhadap berlangsungnya proses sosial bahkan merupakan tulang punggung negara. Oleh sebab itu peranan opini publik juga berpengaruh pada kehidupan politik dan sistem politik atau sebaliknya. Maka dari itu seorang calon pemimpin bangsa yang dinantikan akan memimpin negara harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, oleh karena bahwa inti kepemimpinan yang efektif terletak pada kredibilitas individu yang terdiri atas kejujuran, kompetensi dan kemampuan menginspirasi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, dianggap mampu dan lebih kritis untuk menilai tentang kredibilitas calon pemimpin bangsa ini, sehingga Ita Nurlita (2014) melihat opini publik dari perspektif mahasiswa tersebut dapat dijadikan referensi atau patokan apakah calon Presiden tersebut layak atau mempunyai kredibilitas untuk dipilih.

Tipe penelitian yang digunakan Ita Nurlita (2014) yakni kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis fakta-fakta melalui survey dengan menggunakan metode kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Berbeda dengan peneliti yang menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Ita Nurlita (2014) menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas (*Probability Sampling Design*), artinya penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Berbeda dengan peneliti yang *Purposive Sampling*, sebagai pertimbangan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek, sehingga dapat mewakili segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Kesimpulan penelitian Ita Nurlita (2014) yakni pertama, indikator mempunyai pikiran yang baik (*good sense*) didapat nilai untuk Bapak Prabowo 3,63

poin dan Bapak Jokowi 3,86 poin. Kedua, indikator mempunyai akhlak yang baik (*good moral character*) didapat nilai untuk Bapak Prabowo 3,43 poin dan Bapak Jokowi 4,06 poin. Ketiga, indikator mempunyai maksud yang baik (*good will*) untuk Bapak Prabowo 3,48 poin dan Bapak Jokowi 3,82 poin. Jadi nilai rata-rata keseluruhan untuk Bapak Prabowo 3,51 poin dan Bapak Jokowi 3,91 poin. Sedangkan menurut standar nilai dari Pace & Faules yaitu untuk batas atas skala 3,80 dan skala 2,80 untuk batas bawah, nilai rata-rata keseluruhan Bapak Jokowi 3,91 poin, yaitu diatas batas atas skala 3,80 sehingga Bapak Jokowi dikatakan sangat kredibel, sedangkan Bapak Prabowo 3,51 poin, yaitu kurang dari nilai batas atas sehingga dikatakan kurang kredibel.

Berikutnya penelitian oleh Yuni Tresnawati dengan rekannya Irmulan Sati T. (2014) yang berjudul *personal branding* Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2014-2019, Setiap tokoh memiliki *personal branding* masing-masing di mata masyarakat, begitu juga dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mereka memiliki *personal branding* yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang memunculkan reputasi positif untuk mereka. Menurut Yuni Tresnawati dan Irmulan Sati T. (2014) pengalaman juga mendasari persepsi seseorang, pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan melampirkan pesan. Artinya bagaimanakah masyarakat yang nantinya menjadi pemilih dalam Pemilu memiliki persepsi tentang Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga menciptakan reputasi bagi partai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yuni Tresnawati dan Irmulan Sati T. (2014) berusaha

medeskripsikan secara terperinci serta menafsirkan gejala-gejala yang ada secara alamiah dengan apa adanya untuk menjelaskan *personal branding* Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014. Berbeda dengan peneliti yang menggunakan tipe penelitian eksploratif untuk mengetahui alasan-alasan tertentu terhadap suatu topik yang diangkat. Metode teknik pengumpulan data melalui FGD dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa keterangan atau pendapat yang kompeten, pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara peneliti dengan kelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian. Begitupun peneliti menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan data primer pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek, sehingga dapat mencakup segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Kesimpulan penelitian Yuni Tresnawati dan Irmulan Sati T. (2014) yakni, dari delapan konsep *personal branding*, maka Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap baik dan positif adalah spesialisasi, kepribadian, perbedaan, *the law of visibility*, kesatuan dan keteguhan. Kemudian konsep *personal branding* nama baik dan kepemimpinan dianggap masih kurang baik oleh para siswa/I SMA dan guru-guru. Hal ini dikarenakan belum tuntasnya Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dan sosok Megawati yang selalu ada di setiap keputusan Jokowi. Terakhir media massa dijadikan sarana siswa/I SMA untuk mendapatkan informasi dalam melakukan *personal branding* terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla, sedangkan para Guru lebih mengutamakan ideology dalam melakukan *personal branding*.

Berikut merupakan tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pemahaman antara persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu.

Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

TENTANG	DESKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Judul	<p>5.3.4.1 eneliti: Opini Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terhadap Personal Brand Tan Mei Hwa Cawabup Sidoarjo (Studi Kasus Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Tionghoa Beragama Muslim Dalam Pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015)</p>	<p>5.3.4.5 Peneliti meneliti opini, berbeda dengan Yani Hariati dan Yuni Tresnawati yang meneliti sudut pandang persepsi.</p> <p>5.3.4.6 Peneliti pada variabel personal brand, berbeda dengan Ita Nurlita pada variabel kredibilitas.</p>	<p>3.1 Peneliti dan Ita Nurlita meneliti sudut pandang opini.</p> <p>3.2 Peneliti, Ita Nurlita, Yanny Hariati, dan Yuni Tresnawati meneliti tokoh politik.</p> <p>3.3 Peneliti, Yanny Hariati, dan Yuni Tresnawati meneliti variabel personal brand.</p>
	<p>5.3.4.2 Yanny Hariati: Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Political Personal Branding Jokowi (Studi pada Anggota Komunitas Young on Top Malang)</p>		
	<p>5.3.4.3 Ita Nurlita: Opini Publik Terhadap Kredibilitas Calon Presiden RI tahun 2014 Dalam Perspektif Mahasiswa</p>		
	<p>5.3.4.4 Yuni Tresnawati dengan rekannya Irmulan Sati T.: <i>Personal</i></p>		

	<i>Branding</i> Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2014-2019		
Tipe penelitian	Peneliti menggunakan tipe kualitatif	Ita Nurlita menggunakan tipe penelitian kuantitatif.	Yanny Hariati, dan Yuni Tresnawati menggunakan tipe kualitatif.
Metode	Peneliti menggunakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan <i>In Depth Interview</i> .	Ita Nurlita menggunakan metode survey.	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati menggunakan metode <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).
Instrumen	Peneliti menggunakan pedoman wawancara.	Ita Nurlita menggunakan kuisioner.	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati menggunakan pedoman wawancara.
Populasi	Peneliti menggunakan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.	4.1 Yanny Hariati menggunakan populasi komunitas. 4.2 Ita Nurlita menggunakan populasi mahasiswa. 4.3 Yuni Tresnawati menggunakan populasi sekolah.	Tidak ada kesamaan.
Sampel	Peneliti mengambil sampel dengan <i>Purposive Sampling</i> .	Ita Nurlita mengambil dengan <i>Probability Sampling Design</i> .	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati mengambil sampel dengan <i>Purposive Sampling</i> .
Unit Analisis	Peneliti memiliki unit analisis Daftar Pemilih Tetap, namun difokuskan pada karakter yang diinginkan, yakni 2	4.4 Yuni Tresnawati memiliki unit analisis para siswa, siswi, dan para guru disekolahan.	Tidak ada kesamaan.

	kelompok <i>Focus Group Discussion</i> (FGD dan 2 orang <i>In Depth Interview</i>).	4.5 Ita Nurlita memiliki unit analisis mahasiswa Universitas Bayangkara Surabaya. 4.6 Yanny Hariati memiliki unit analisis Daftar Pemilih Tetap, namun difokuskan pada Komunitas Young on Top.	
Teknik Pengumpulan Data	Peneliti menggunakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Ita Nurlita menggunakan kuisioner.	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati menggunakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).
Teknik Pengolahan Data	Peneliti menggunakan transkrip narasi.	Ita Nurlita menggunakan koding – SPSS 22 <i>for windows</i> .	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati menggunakan narasi transkrip.
Teknik Analisis Data	Peneliti menggunakan interpretasi hasil FGD.	Suci menggunakan Tabel frekuensi, Tabel Silang, dan Interpretasi.	Yanny Hariati dan Yuni Tresnawati menggunakan interpretasi hasil FGD.

(Sumber: Olahan Peneliti)

2.2 Opini

Menurut Rakhmat (2001) opini sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nimmo (2001) berpendapat opini sebagai tanggapan aktif terhadap

rangsangan, tanggapan yang disusun melalui interpretasi personal yang diturunkan dan turut membentuk citra. Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas tiga komponen, yaitu kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Begitupun Sunarjo (1997) berpendapat opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau issue ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan dan semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi (*frame of experience*) dan pengalaman orang lain secara langsung ataupun tidak langsung diketahui oleh individu (*frame of reference*). Dari beberapa pengertian penjabaran mengenai opini, peneliti lebih mendasari opini pada pernyataan Sunarjo (1997), karena opini tidak hanya sebatas tanggapan biasa dari seseorang tetapi terdapat *frame of experience* dan *frame of reference* dalam mempengaruhi keragaman opini dari seseorang.

2.3 Focus Group Discussion (FGD)

Menurut Berger (1998), diskusi kelompok fokus adalah wawancara kelompok yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana khalayak merasakan tentang suatu produk, jasa, atau issue (Berger dalam Ida, 2014). Sehingga dalam penelitian ini sekelompok orang yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo dikumpulkan dan diajak untuk berdiskusi dalam situasi yang bebas. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator untuk memperoleh informasi-informasi yang diinginkan, dan peneliti yang akan menjadi moderator.

Anders Hansen et al.(1998) berpendapat, bahwa FGD adalah diskusi terbatas yang dilakukan terhadap informan dengan jumlah ideal sebanyak 8 orang, minimal 6 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang. Lebih dari jumlah tersebut maka FGD

tidak lagi ideal karena terlalu banyak (Hansen dalam Ida, 2014). Tujuan pelaksanaan teknik FGD terbatas ini adalah tidak untuk membangun konsensus tetapi untuk mencari tahu apa yang setiap anggota kelompok pikirkan tentang topik yang disajikan dalam diskusi, dan untuk mendapatkan informasi dari setiap orang berkaitan dengan opininya dan deskripsi dari perilaku kepentingannya. Sehingga pada hasil akhirnya dari teknik FGD ini berupa makna bersama.

2.4 Pragmatisme Partai Politik

Ostrogorski (1979) mengatakan kemunculan partai politik dapat ditemukan di awal abad ke-19 (Ostrogorski dalam Firmanzah, 2007). Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan politik yang sama. Plato tahun 428-328 BC, mengatakan bahwa politik sebagai usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang (Plato dalam Firmanzah, 2007).

Kehadiran partai politik yang terlibat dalam dunia politik sangat terkait dengan sistem parlemen, sehingga secara tidak langsung Partai Politik memiliki motif untuk mendapatkan kekuasaan supaya mempunyai kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik di tingkat lokal maupun nasional (Firmanzah, 2007). Tidak dapat dipungkiri Partai Politik memiliki pragmatisme politik yang berorientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik, maka sering kali orientasi jangka pendek membawa sikap lebih mementingkan kepentingan partai dan golongan

dibandingkan bangsa dan negara. Berikut beberapa pragmatisme Partai Politik yang sedang berkembang (Firmanzah, 2007):

- Politik sebagai media kekuasaan

Partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa, sedangkan idealnya berkuasa hanyalah media, untuk memberikan sarana dalam menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan nilai yang dianut oleh suatu Partai Politik. Namun untuk tujuan berkuasa tersebut, banyak Partai Politik menggadaikan ideologi partai melalui pembangunan koalisi dengan Partai Politik yang lain meskipun menganut ideologi yang bersebrangan. Hal tersebut menjadikan banyak politisasi dalam berbagai kebijakan dan menjadikan tokoh politik enggan berbuat sesuatu, dimana ujungnya banyak pihak yang akan dirugikan.

- Politik sebagai media jalan pintas

Masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki karakter dasar budaya “nrabas atau jalan pintas”, jalan pintas nyaris memasuki setiap aktivitas politik, dari rekrutmen anggota, pencalonan wakil partai, memenangkan pemilu, bahkan sampai melanggar aturan yang ditentukan oleh panitia pengawas pemilu. Budaya jalan pintas seringkali dilakukan dengan memperpendek proses dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan akhir.

- Politik sebagai media kapitalis

Dalam era kapitalis rasionalitas ekonomi menjadi sangat penting, semuanya diukur oleh analisis untung-rugi ala ekonomi. Tokoh politik yang berpolitik dengan didasari kalkulasi untung-rugi memiliki sebuah ekspetasi

bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika terpilih, melebihi biaya yang dikeluarkan untuk dapat terpilih. Katakanlah biaya atau mahar besar untuk menjadi Bupati, secara rasional orang awam akan berkata setelah menjadi Bupati, semua uang yang dikeluarkan supaya berkuasa akan dapat ditebus. Sehingga terdapat penyelewangan arah, dimana berpolitik untuk dapat menyelesaikan pertikaian kepentingan, akan berganti sebagai ajang mencari keuntungan.

- Politik sebagai materialisme

Implikasi dari kapitalisme adalah materialisme politik, segalanya harus dapat dimaterialkan dan dijadikan objek. Hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai-nilai, dan norma politik menjadi kurang relevan. Dapat dibuktikan ketika pemilih Indonesia mayoritas sangat tidak peduli terhadap hal-hal berbau abstrak ideologi dan program kerja Partai Politik, masyarakat lebih senang dengan hal yang mudah dipahami, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan disentuh langsung. Contohnya ketika terdapat kampanye terdapat “goyang dangdut” terkenal akan lebih mudah dilihat, disukai, dinikmati dan dirasakan secara langsung karena bersifat material.

2.5 Brand, Branding dan Personal Brand

Hal yang perlu diperhatikan ibarat sebuah produk supaya dapat diketahui, dihargai, dan dipilih, membutuhkan sebuah *brand* untuk memberikan tanda pada konsumen mengenai sumber merek, dan melindungi konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk yang tampak identik

(Kotler, 2002). *Brand* yang telah ditentukan perlu meresap ke hati khalayak sesuai dengan harapan yang memiliki produk, maka dibutuhkan usaha dengan proses yang terus menerus untuk menancapkan *brand* tersebut ke hati khalayak dengan berbagai cara, usaha, dan proses yang disebut *branding* (Haroen, 2014).

Demikian yang terjadi pada *brand* yang mengemas sebuah kepribadian, yakni *personal brand*. Timothy P. O'Brien (2007) mengatakan *personal brand* adalah identitas pribadi yang mampu menciptakan sebuah respon emosional terhadap orang lain mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki orang tersebut. Penjelasan sama pernah ditulis Montoya (2009), dimana *personal brand* merupakan *image* yang kuat dan jelas ada di benak klien. Meskipun begitu *personal brand* bukan semata menghadirkan *personal image* (citra), meski *image* tentulah penting, tetapi harus didukung dengan realita dan janji harus didukung dengan bukti.

Beberapa bukti tokoh yang memiliki *personal brand* yang kuat, yakni David Beckham adalah pemain sepak bola profesional yang pada dirinya melekat kuat *image* sebagai lelaki macho dan mahir bermain sepak bola. Selanjutnya Nelson Mandela yang berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk menghapus politik apartheid di Afrika Selatan sehingga mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Begitupun dengan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat kulit hitam pertama kali yang meraih suara hampir 80% warga amerika, dimana yang sebenarnya tidak mudah tercapai pada negara yang mengandung rasisme sangat tinggi, sehingga Obama mendapatkan penghargaan Grammy pada tahun 2006 untuk rekaman kata-kata terbaik yang diucapkan. Maka dengan kata lain *personal brand* adalah persepsi seseorang terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, diantaranya adalah kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, dan menimbulkan

perspektif positif dari masyarakat sehingga dapat berlanjut pada kepercayaan dan aksi lainnya (Haroen, 2014).

David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan sebuah *personal brand* yang kuat terdapat tiga hal karakteristik yang menyatu:

- Pertama, kekhasan menjadi hal penting supaya berbeda dengan kebanyakan orang, kekhasan berasal dari pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan orang lain, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mampu melakukan hal itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai diri. Dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai hidup dalam diri akan membedakan dengan *personal* yang lain. Nilai-nilai diri dapat berupa kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian.
- Kedua, relevansi akan dimulai ketika seseorang percaya bahwa *personal* dapat memahami dan memperhatikan apa yang penting untuk orang lain. Relevansi juga merupakan bagaimana dapat memecahkan masalah orang lain dan kebutuhan orang lain. Sehingga dengan kata lain, latar belakang keahliannya dengan kebutuhan orang lain harus relevan supaya dapat dipercayai dengan mudah oleh masyarakat tanpa anggapan negatif omong kosong.
- Ketiga, konsistensi akan menegaskan *personal brand* secara lebih jelas dan lebih ringkas dibandingkan dengan kecakapan yang paling terpoles dan paling banyak dipraktekkan sekalipun. Dalam sebuah hubungan konsistensi akan terbentuk dari perilaku seseorang lagi, lagi dan lagi. Sehingga orang lain akan mempercayai *personal brand* dengan merasakan konsistensi yang dilakukan

secara terus menerus, disisi lain orang lain memutuskan percaya setelah mengetahui prestasi yang diperoleh.

Para peneliti bertanya kepada para konsumen, nilai-nilai apa yang mereka kaitkan dengan *brand*, jawabannya adalah bahwa konsumen memperoleh berbagai variasi dari kualitas. Maka inti dari sebuah hubungan antara *brand* dengan konsumen adalah emosi, dimana atribut yang tidak dapat diraba dan tidak dapat diukur, dan emosi yang dirasakan akan terkait erat dengan ukuran-ukuran yang lebih objektif. Seperti halnya dalam bisnis, hubungan yang memiliki nilai dan daya tahan yang paling hebat adalah hubungan yang dikuasai oleh emosi yang positif. Dibuktikan masyarakat kurang tertarik memilih seseorang karena partainya, tetapi karena orangnya atau tokohnya, survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka menunjukkan, sebanyak 38,1% responden memilih PDIP karena faktor Jokowi, sebanyak 55,4% pemilih Partai Gerindra mengaku tertarik figur Prabowo Subianto, dan sebanyak 39,4% pemilih Partai Demokrat mengaku tertarik dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga jika dikaitkan dengan pencalonan politik, masyarakat terhubung dengan *personal brand* idealnya harus pada dimensi *personal brand* yakni karakter, kompetensi, dan kekuatan (Haroen, 2014).

- Karakter

Dalam bahasa Indonesia karakter mengandung arti antara lain watak, sifat, atau akhlak sehari-hari. Karakter merupakan krisis yang dialami Indonesia saat ini, karena buruknya karakter pejabat publik tidak sedikit yang melakukan tindak korupsi, padahal karakter merupakan dasar atau fondasi dari suatu kepemimpinan (Purjear Jr, 2000). Karakter dari seorang tokoh

politik menyumbangkan porsi yang paling besar atas munculnya kepercayaan, kepercayaan mengalahkan suka atau benci, sentimen atau tidak sentimen. Karakter adalah sebuah kualitas personal, diri sebenarnya, ekspresi dan pembuktian, tetapi bukan sebuah kepribadian. Sebab kepribadian merupakan sebuah persona atau kedok yang biasanya dipakai oleh pemain sandiwara untuk menjadi karakter pribadi tertentu. Karakter merupakan sumber reputasi, sedangkan reputasi adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda (Purjean Jr, 2000). Karakter yang perlu dimiliki menurut Kartajaya (2012), yakni Kepercayaan (Jujur dan Integritas), Menghormati, Tanggung Jawab, Keadilan, Peduli, dan Kewarganegaraan.

- Kompetensi

Kompetensi merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, karena karakter saja tidak cukup, dengan kata lain menjadi orang baik dan orang bersih saja tidak cukup dalam politik. Sumber kompetensi adalah kemauan untuk belajar melalui berbagai sarana, Rustiyah (1982) mengatakan bahwa kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Apabila mengacu pada UU No.13/200, tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10), kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi dibedakan menjadi dua bagian, yakni *hard competency* antara lain ketrampilan teknis, pengetahuan, dan *soft competency* antara lain aspek sikap dan kepribadian. Sebab secanggih apapun proses

branding tidak akan mengubah orang yang tidak punya kompetensi, langsung dapat dipandang sebagai orang hebat dan mumpuni.

- Kekuatan

Kekuatan sejatinya telah dimiliki setiap orang, hanya saja ada yang sudah mengetahuinya dan ada yang belum mengetahui. Kekuatan merupakan sebuah bekal yang dimiliki seseorang yang telah ada atau telah terbentuk sejak dini, dimana kekuatan seseorang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuatan material dan non-material. Kekuatan material lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal dan kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain. Setelah mengetahui kekuatannya, dapat menjadi sebuah tolak ukur pencapaian sebuah kemenangan yang akan diraih. Tetapi kekuatan tidak hanya sampai disitu saja, termasuk diantaranya mengetahui kelemahan dan keterbatasan, sebab bila seorang politisi hanya mengetahui kekuatan saja tanpa mengetahui kelemahan dan keterbatasannya, akan berpotensi celaka setiap saat.

2.6 Komunikasi Personal Brand

Komunikasi merupakan jembatan bagi calon kepala daerah dengan masyarakat menuju dipahami, disukai, dipercaya, dan dipilih. Tanpa komunikasi yang intensif, bagaimana masyarakat memilih tanpa memahami siapa calon yang akan dipilih atau apa yang diperjuangkan. Oleh karena itu, Hubert K. Rampersad (2008) berpendapat bahwa kesuksesan sebuah *branding* tak lepas dari empat langkah, yakni merencanakan, menyebarkan, bertindak, dan mengembangkan.

Personal Brand sejatinya menjelaskan secara efektif dan efisien tiga hal yang mendasar 2W+1H, yakni (Haroen, 2014):

- *What* (Apa)

Hal yang perlu diperhatikan apa yang akan dikomunikasikan, seharusnya semata-mata bukan karena rencana pencalonan, hal tersebut terlalu sederhana dan sering kali tidak dapat menggerakkan energi orang lain untuk bisa mendukung dalam berbagai hal. Jadi yang harus dipikirkan bukan hanya kepentingan pribadi semata dan mengabaikan kepentingan khalayak, justru kepentingan khalayak yang harus diutamakan sehingga mempunyai alasan mengapa harus mendukung. Sebab ketika khalayak terpenuhi kebutuhannya, maka nilai-nilai dari pribadi dapat dirasakan khalayak dan semakin tegas *personal brand* yang tertanam dibenak khalayak.

- *Whom* (Siapa)

Komunikasi yang perlu didahulukan adalah orang-orang yang sudah kenal dekat, seperti teman kantor, tetangga, organisasi, dan lain-lain. Setelah itu menyebar pada khalayak luas, seperti tokoh yang dikenal masyarakat, petani, nelayan, sahabat dari keluarga, bahkan memungkinkan jaringan orang-orang yang telah mengenal. Alur penyebaran tersebut merupakan strategi pengawasan penyebaran informasi yang dapat dikontrol secara baik, sebab apabila khalayak umum telah mengetahui, hal yang pasti terjadi adalah khalayak mencari jejak dan prestasi yang telah dilakukan atau diperoleh.

- *How* (Bagaimana)

Dalam berkomunikasi perlu dibedakan adalah pendekatannya dan alatnya. Salah satunya berkomunikasi melalui kinerja, keterlibatan dalam

berbagai kegiatan publik, diantaranya ikut terlibat dalam kerja bhakti dengan kontribusi yang berbeda, ikut terlibat dalam konflik isu yang sedang menjadi perbincangan, dimana keterlibatan tersebut untuk kepentingan publik. Kemudian dapat juga berkomunikasi secara verbal di panggung khusus yang memang telah dipersiapkan, diantaranya kampanye atau debat kandidat yang dihadiri banyak orang, sehingga perlu kemampuan berbicara di depan umum supaya mendapatkan reputasi yang tinggi.

2.7 Marketing Mix Dalam Politik

Marketing politik menyediakan perangkat teknik dan metode *marketing* dalam dunia politik, dimana Scammell (1997) menyatakan bahwa kontribusi *marketing* dalam dunia politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan para pemilih. Secara khusus para pemilih memperhatikan apa yang dapat dilakukan oleh suatu partai politik atau kandidat untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, disamping itu dunia politik bukan semata-mata merupakan permasalahan ideologi tetapi politik harus membumi serta selalu mencari jalan keluar bagi permasalahan bangsa dan negara.

Locke dan Haris (1996) menyatakan penggunaan *marketing* dalam dunia politik sangat dikhawatirkan justru menjadikan dunia politik layaknya dunia bisnis kapitalis beserta implikasinya yang sarat dengan manipulasi informasi. Namun kekhawatiran tersebut ditepis oleh O’Cass (1996) yang menyatakan bahwa falsafah *marketing* memberikan sebuah arahan tentang menerapkan ilmu *marketing* dalam dunia politik, dimana pada dasarnya ilmu *marketing* melihat bahwa kebutuhan

konsumen adalah hal terpenting dan perlu dicari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Marketing politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh sebuah partai politik atau kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image* publik (Butler & Collins, 2001). Membangun kepercayaan dan *image* ini hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa kampanye (Dean & Croft, 2000). Dengan demikian dalam dunia politik juga harus menjalankan 4P yang tidak asing lagi bagi dunia ekonomi dan selalu dilakukan dalam dunia perdagangan, berikut aplikasi 4P dalam politik:

- *Product*

Produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau kandidat terpilih (Niffenegger, 1989). Niffenegger (1989) membagi produk dalam tiga kategori: (1) *Party Platform* yang berisikan konsep, identitas ideologi, dan program kerja sebuah institusi politik, (2) *Past Record* yang merupakan jejak yang telah dilakukan partai politik di masa lalu dalam kontribusi pembentukan sebuah produk politik, dan (3) *Personal Characteristic* merupakan karakter seorang kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik.

O'Shaughnessy (2001) menekankan bahwa partai politik menjual produk yang tidak nyata, sangat terkait dengan sistem nilai dan di dalamnya terdapat visi yang bersifat daya tarik, kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera tercapai tetapi hasilnya lebih dapat dinikmati dalam jangka panjang, tidak pasti dan dapat ditafsirkan bermacam-macam.

Sehingga Butler dan Collins (1994) menyatakan adanya tiga dimensi penting yang mesti dipahami dari sebuah produk politik: (1) *Party/Person/Ideology* adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih, dimana pemilih menimbang dan menilai Partai/Pribadi/Ideologi yang menurutnya berpihak dan mewakili suara mereka, (2) *Loyalty* merupakan kesetiaan hubungan antara institusi politik dan pemilih dengan kontrak sosial, maka institusi politik harus menjaga kepercayaan publik, (3) *Mutability* yakni publik dapat berubah-ubah yang disebabkan karena partai atau pribadi yang sudah dianggap mewakili justru bergabung dengan pihak yang merugikan.

- *Promotion*

Dalam promosi tidak jarang institusi politik bekerja sama dengan sebuah agen iklan dalam membangun slogan, jargon dan citra yang akan ditampilkan (Wring, 1996). Selain itu, pemilihan media perlu dipertimbangkan sebab tidak semua media tepat sebagai ajang untuk melakukan promosi, harus dipikirkan dengan matang media yang paling efektif dalam mentransfer pesan politik.

Rothschild (1978) menunjukkan pilihan media dalam penetrasi pesan politik ke publik memiliki tingkat perbedaan antara media TV, Radio, Cetak, dll, bergantung pada wilayah untuk menjamin efektivitas pesan politik yang disampaikan. Salah satu contoh promosi dilakukan institusi politik melalui debat di TV (Niffenegger, 1989), dimana acara tersebut memberikan kesempatan pada para pemilih untuk melihat pertarungan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing institusi politik. Contoh lainnya yakni seperti

lambang, simbol, dan warna bendera partai yang disebar melalui pamflet, umbul-umbul, dan poster semasa periode kampanye juga merupakan media promosi institusi politik.

Namun sebenarnya promosi institusi partai politik tidak hanya terjadi semasa periode kampanye belaka, tetapi aktivitas promosi harus dilakukan terus-menerus dan permanen yang tidak sebatas pada periode kampanye saja, meskipun beberapa kalangan tertentu menyebut cara ini mendahului (Butler & Collins, 2001).

- *Price*

Firmanzah (2008) menyatakan bahwa harga meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat-akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye. Harga *image* berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif suatu bangsa-negara dan bisa menjadi kebanggaan atau tidak. Bentuk sebuah harga disisi lain yakni seperti semua orang tahu bahwa dalam hari pemilihan, orang yang datang ke bilik suara tidak akan dipungut biaya sepeser pun, dan hal ini seringkali dimanfaatkan dengan menawarkan para pemilih sebuah *reward* oleh para kandidat dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya seperti yang terjadi dalam kasus *money-politics*. Namun sebuah harga juga harus dibayar oleh para pemilih yakni kepercayaan dan keyakinan akan partai atau kandidat yang akan didukung, sebab sebagai pemilih akan memberikan hak dan kewenangan atau legitimasi pada suatu partai atau kandidat guna mengatur kehidupan semua individu dalam masyarakat.

- *Place*

Tempat sangat berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih (Niffenegger, 1989). Kampanye politik memang harus bisa menyentuh segenap lapisan masyarakat dan dapat dicapai dengan melakukan segmentasi publik (Niffenegger, 1989). Pemetaan segmentasi publik dapat dilakukan secara geografis dengan melihat konsentrasi penduduk suatu wilayah dan secara demografis dengan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman akan dunia politik, kepercayaan, agama, dan etnis.

O'Shaughnessy (1995) menyatakan dalam dunia politik, distribusi produk politik sangat terkait erat dengan mekanisme jangkauan dan penetrasi produk politik sampai ke daerah dan pelosok. Pemilihan media seperti koran, TV, radio, internet, majalah, brosur, pamflet, dan poster yang diedarkan ke daerah merupakan salah satu bentuk fisik dari distribusi dalam konteks *marketing* politik. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam menentukan tempat yang membawa produk politik terdapat dua hal yakni cukup didistribusikan melalui media atau harus datang dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, hal tersebut harus dipertimbangkan dengan secara matang.

2.8 Komunikasi Politik Perempuan

Perempuan tidak boleh bermain dan berkibrah di ranah politik, akibatnya menjadi semakin sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasi posisi dan kedudukannya serta semakin mempersempit ruang gerak sekaligus suara

perempuan yang terwakili. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun, dilihat dari data tahun 1992-1997 terdapat 63 perempuan anggota DPR atau sekitar 12,3% dari seluruh jumlah anggota DPR. Tahun 1997-1999 terdapat 57 perempuan anggota DPR atau sekitar 11,5% dari seluruh jumlah anggota DPR, Pada tahun 1999-2004 terdapat 45 perempuan atau 9% dari seluruh jumlah anggota DPR (Subiakto dan Ida, 2012).

Kemudian yang mengejutkan setelah Pemilu 2004, terdapat perubahan besar terjadi dengan pengapdosian hukum tentang kuota dalam Partai Politik yaitu UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, dimana muncul wacana tentang kuota perempuan 30% pada Pemilu yang harus dilakukan pada pemilu 2009 (Soetjipto, 2011). Makna mencalonkan perempuan hanya dilihat perempuan sebagai kategori seksual jenis kelamin yang berbeda dari laki-laki, dan sama sekali tidak berbicara tentang perempuan sebagai identitas gender.

Hampir semua partai politik tidak siap dengan para kader dan calon yang disiapkan untuk mengisi kuota ini, akibatnya terjadi asal memasukkan seperti keluarga sendiri, putrinya, artis perempuan, dan sosok lainnya yang muncul menjadi “kader dadakan”. Tindakan asal tersebut sangat erat mengandung nepotisme dan bukan berdasarkan rekam jejak serta kompetensi politik, jika hal tersebut terus terjadi dan berulang, maka suara perempuan masih dipertanyakan. Catatan Litbang Kompas (2010), menyebutkan 2005-2008 terdapat 5 perempuan calon kepala daerah pada Pilkada Jawa Timur dan 2 diantaranya berhasil. Sementara pilkada 2010, terdapat 11 perempuan yang menjadi calon dan 7 diantaranya berhasil (Subiakto dan Ida, 2012).

Menurut Soetjipto (2011), kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan aspirasinya.

Sehingga budaya politik terhadap eksistensi perempuan di ranah politik selama ini belum memberikan diskursus yang positif, karena posisi dan peran tradisional perempuan di ranah domestik lebih mengedepan dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah publik apalagi di bidang politik. Perilaku memilih atau *voting behavior* perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada perempuan yang ada, dimana kuatnya nilai patriarki dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat.

Bystrom et al. (2004) berpendapat media massa dianggap sering menggambarkan politisi perempuan mempunyai masalah atau dikaitkan dengan isu domestik yang berkaitan dengan perilaku anak dan suaminya, namun tidak dengan politisi laki-laki. Disamping itu media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan di rumah, persoalan penampilan mereka di publik, dan perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja *online*, dan sebagainya.

Sedangkan kandidat laki-laki secara umum lebih memiliki kebebasan dalam berpakaian dan bertingkah laku karena publik telah terkoordinasikan atau terbiasa untuk menerima laki-laki sebagai pemimpin. Subiakto dan Ida (2012) mengatakan dalam banyak kasus, perempuan sendiri tidak mampu mengkomunikasikan

identitas dirinya sebagai perempuan, dan juga tidak mampu mengkomunikasikan agenda-agenda dan visi politiknya.

Meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi yang menguntungkan diparlemen, perempuan belum mampu memperjuangkan suara perempuan, kebutuhan perempuan, dan proporsi pembagian persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. Ketika perempuan mempunyai andil untuk bicara, perjuangan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas yang lain belum mampu secara maksimal dikedepankan, dibandingkan persoalan atau masalah yang dihadapi umum yang lebih memihak kepentingan dominan laki-laki.

Selama ini khalayak perempuan hanya menjadi penonton politik, sehingga keterlibatan aktif suara mereka tidak mampu diraih, hanya dalam hal jumlah atau kuantitas saja yang diperjuangkan. Tetapi untuk isu-isu serius perempuan seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan masih banyak hal kurang digunakan sebagai amunisi retorika politik untuk dibawa ke ranah publik yang lebih besar bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan di Tanah Air.

Seperti halnya Erika Falk (2008) melakukan studi analisis isi koran-koran kasus gender di Amerika terkait pencalonan Hillary dan Obama, dalam kesimpulan penelitian Falk menemukan bahwa meskipun dalam *polling* saat itu Hillary Clinton unggul tetapi memperoleh liputan yang lebih sedikit dibandingkan Obama dan lebih sering memiliki julukan yang rendah dengan memanggil dengan nama pertamanya.

Menurut Falk (2010) liputan berita tentang kandidat politisi perempuan yang *stereotype*, menggambarkan perempuan lemah, tidak dapat mengambil keputusan,

mempunyai masalah dengan keluarga, dan lain sebagainya merupakan hambatan bagi kandidat perempuan (Falk dalam Subiakto & Ida, 2012).

2.9 Etnisitas dan Agama Dalam Komunikasi Politik

Menurut Suryadinata (2002), terdapat tiga hal penting dalam menganalisis politik Indonesia, yaitu Etnisitas, Agama dan Militer. Pada pemilihan umum 1955 partai yang menggunakan identitas etnik tidak ada yang unggul. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemenang pemilu juga bukanlah partai yang menggunakan identitas agama. PNI merupakan partai terbesar yang menunjukkan identitas nasionalis lebih diterima dibandingkan identitas etnik maupun agama (Feith dalam Widyawati, 2014).

Berbeda dengan Pemilu 1971 pada Orde Baru pergolakan politik yang berkaitan dengan isu etnisitas dan agama tidak banyak dibicarakan serta tidak muncul dalam partai, menurut Suryadinata (2002) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak diperkenankan dibicarakan secara terbuka. Namun pada tahun 1990 Soeharto memprakarsai berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh B.J. Habibie, kebijakan Soeharto untuk menggandeng kelompok islam menyebabkan Islam sebagai agama dan sebagai kekuatan politik tumbuh dengan pesat.

Pada masa itu kekuatan politik Islam meningkat, para pemimpin partai politik Islam mulai mengadaptasi strategi politik Muslim dan politik Islam. Politik Muslim adalah strategi untuk mendapatkan dukungan kelompok Muslim melalui partai atau organisasi non-Islam, sedangkan politik Islam adalah strategi mendapatkan dukungan dari kelompok Muslim melalui partai atau organisasi Islam. Hasilnya

menunjukkan bahwa politik Muslim unggul dalam memperoleh kekuasaan. Pasca Orde Baru runtuh, pemilihan umum tahun 1999 mirip pemilu 1955, yaitu Partai besar yang muncul sebagai pemenang merupakan partai yang mengusung identitas nasionalis, yakni PDIP dan Golkar.

Isu etnisitas dan agama muncul menjelang pemilu 2009, *Rakyat Merdeka* 11 Maret 2008 mengangkat berita berjudul: Bachtiar Chamsyah Mau Jadi Presiden, “Tapi Mana Mungkin, Saya Bukan Orang Jawa”. Pernyataan Bachtiar Chamsyah bisa diartikan dalam dua hal: pertama, etnisitas merupakan salah satu variabel yang menentukan elektabilitas kandidat. Kedua, pernyataan Bachtiar Chamsyah merupakan sebuah teks yang menunjukkan bahwa selama ini terjadi hegemoni dalam pembentukan pesan seolah-olah hanya orang Jawa yang pantas menjadi Presiden.

Hegemoni tersebut dilakukan oleh kelompok dominan untuk mengamankan posisi mereka tidak hanya dalam institusi publik, melainkan juga dalam pendapat, nilai, standar pengakuan melalui bagian terbesar masyarakat, serta adanya hegemoni pengaruh budaya Jawa dalam politik Indonesia yang merasa sungkan untuk membicarakan etnisitas dalam konteks kekuasaan. Sedangkan terminologi “bukan orang Jawa”, menggambarkan sebuah realitas bahwa selama ini terjadi kesadaran palsu seolah-olah bahwa hanya orang Jawa yang berhak menjadi Presiden, kesadaran Palsu tersebut dibentuk melalui proses sejarah yang panjang, sejak Republik Indonesia berdiri hingga saat ini hanya terdapat satu presiden dari luar Jawa, yaitu B.J. Habibie (Widyawati, 2014).

Pada pemilu tahun 2009, terdapat isu etnisitas dan agama ketika Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pemilihan Presiden. Isu etnisitas tersebut sebagai advokasi

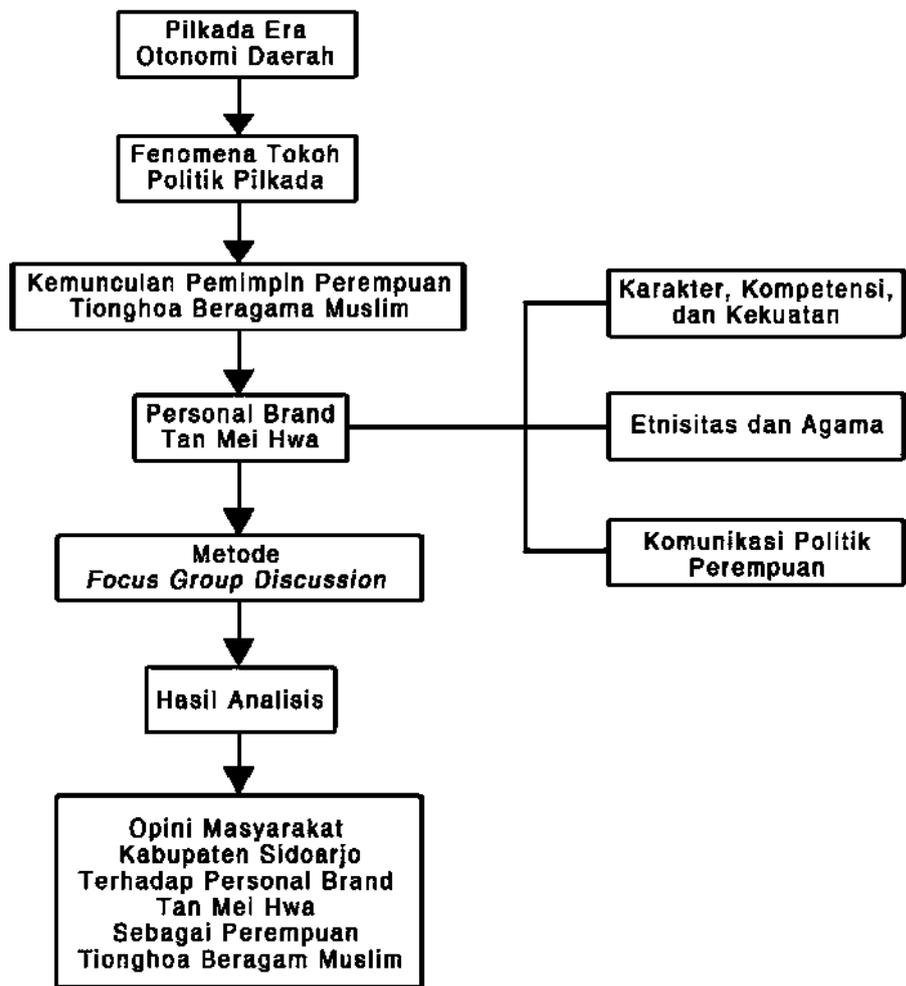
politik yang dilontarkan melalui slogan “Pasangan Nusantara”, dimaksudkan adalah perpaduan antara kandidat yang berasal dari luar Jawa, yaitu Jusuf Kalla dari Makasar dan Wiranto dari Jawa. Begitupun isu agama dilontarkan melalui slogan “Istri Muslimah” dan “Jilbab Loro”, terkandung makna bahwa pasangan JK-Wiranto merupakan representasi dari umat Islam, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan mendapatkan simpati sebagai kandidat yang paling Islami. Hasil pemilihan presiden 2009 perolehan suara JK-Wiranto 12,41%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan partai yang mengusung mereka, yakni Partai Golkar (14,45%) dan Partai Hanura (3,77%). Rendahnya perolehan suara JK-Wiranto menunjukkan bahwa afiliasi politik tidak berbanding lurus dengan dukungan terhadap calon presiden yang diusung sebuah partai. Menurut Eriyanto (2008) pengaruh etnisitas dan agama terhadap perilaku memilih dalam Pemilu maupun Pilkada sangat kontekstual pengaruhnya, bergantung pada daerah dan karakteristik sosial budaya masyarakat.

Pada masa ini isu etnisitas untuk pimpinan daerah tidak lagi tabu untuk dibicarakan, hal ini ditandai dengan muncul wacana bahwa kepala daerah sebaiknya merupakan putra daerah, karena banyak tokoh nasional yang bukan dari daerah setempat, belum tentu memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Menurut Zakina (2008) Pilkada Kalimantan Barat yang diselenggarakan 15 November 2007, masyarakat memiliki kedewasan berpikir dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur yang terpilih yakni Cornelis, seorang asli Dayak beragama Katolik, sedangkan Wakil Gubernur terpilih yakni Christiandy Sanjaya, seorang etnis Tionghoa dan beragama Kristen, dimana mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam. Kemenangan mereka karena sangat

teliti dalam membaca kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat sehingga mendapatkan afiliasi antara perbedaan etnisitas dan agama.

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena Pemilu Kepada Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ketika otonomi daerah telah resmi diterapkan, sehingga banyak sekali partai politik mempersiapkan “Tokoh” yang dididik, disiapkan, dan dimatangkan kemampuan kepemimpinannya melalui partai politik guna menduduki jabatan-jabatan publik yang memegang kewenangan resmi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengikat rakyat. Kemudian munculah seorang calon pemimpin perempuan Tionghoa bernama Tan Mei Hwa yang beragama muslim mencoba mencalonkan dirinya sebagai wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Seorang Tan Mei Hwa sebagai calon yang akan dimenangkan, pastinya telah membangun sebuah *personal brand* yang unik untuk menjadi daya tarik para pemilih Kabupaten Sidoarjo dibandingkan tokoh politik lainnya. Dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD), pemaknaan opini masyarakat sangat beragam dan tidak sebatas *personal brand*, tetapi juga terhadap identitasnya sebagai perempuan dan etnis Tionghoa yang beragama muslim dalam pencalonannya di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Untuk mempermudah penjelasan mengenai gambaran penelitian, berikut kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
(Sumber: Olahan Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yakni peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari Tan Mei Hwa dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo (Nazir, 1999). Studi kasus memberikan gambaran secara mendetail sifat-sifat serta karakter yang khas dari Tan Mei Hwa, dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya mengenai *personal brand* yang dikaitkan juga identitas diri Tan Mei Hwa. Peneliti membentuk dua kelompok informan yang keduanya telah ditentukan sesuai karakteristik, sehingga dapat melihat segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti. Dengan demikian, dalam interpretasi data tidak hanya dari satu sisi informan sejenis, namun dengan keberagaman akan memberikan hasil yang lebih bersifat komprehensif.

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan eksploratif, karena selain fokus mengeksplorasi *personal brand* dari Tan Mei Hwa, disamping itu melihat sisi lain sebuah identitas diri sebagai seorang perempuan muslim yang merupakan bagian dari kelompok minoritas yang mencoba mencalonkan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015.

Metode penelitian menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), dimana menurut Ida (2014) sekumpulan individu yang berpendapat secara komunal yang terkadang dapat saling mempengaruhi pendapat individu, bahkan dapat

mengkonfrontasi pendapat individu dengan atau terhadap individu lainnya dan mendapatkan sebuah hasil yang merupakan makna bersama.

3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek, sehingga dapat mencakup segala lapisan populasi sesuai dengan tujuan peneliti. Berikut informan dalam penelitian ini terdapat dua kelompok:

1. *Focus Group Discussion (FGD) Kelompok P*

Kelompok kategori ini berdasarkan pada pemilih pemula yang baru pertama kali akan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, berikut kriterianya:

- 1.1 Umur : 17 – 25 Tahun
- 1.2 Kelamin : Pria dan Wanita
- 1.3 Domisili : Kabuapten Sidoarjo
- 1.4 Politik : Mengikuti perkembangan Tan Mei Hwa

2. *Focus Group Discussion (FGD) Kelompok U*

Kelompok kategori ini berdasarkan pada pemilih berkelanjutan yang lebih dari satu kali berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, berikut kriterianya:

1. Umur : 26 – 70 Tahun
2. Kelamin : Pria dan Wanita
3. Domisili : Kabuapten Sidoarjo
- 1.5 Politik : Mengikuti perkembangan Tan Mei Hwa

3.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah seluruh narasi transkrip hasil wawancara dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan oleh peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data bergantung pada sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik lapangan (*field research*), yaitu peneliti berada langsung dengan informan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dimana dengan cara ini diharapkan memperoleh data akurat dan sebenarnya yang terjadi pada suatu fenomena. Kemudian dengan didukung observasi pada kajian literatur serta data-data dokumentasi dari internet atau media lainnya yang menginformasikan mengenai Tan Mei Hwa.

3.5 Teknis Analisis Data

Dalam menganalisa, peneliti terlebih dahulu menarasikan data yang diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, menarik sebuah esensi atau hal pokok dari masing- masing pendapat kelompok P dan U sesuai dengan aspek dan elemen *personal brand*. Kemudian, kelompok P dan U disatukan untuk dikaitkan dengan kajian literatur dan data-data dokumentasi, sehingga menghasilkan pendapat yang mewakili masyarakat Kabupaten Sidoarjo, serta menjawab rumusan masalah akan *personal brand* Tan Mei Hwa sebagai perempuan muslim beretnis Tionghoa.

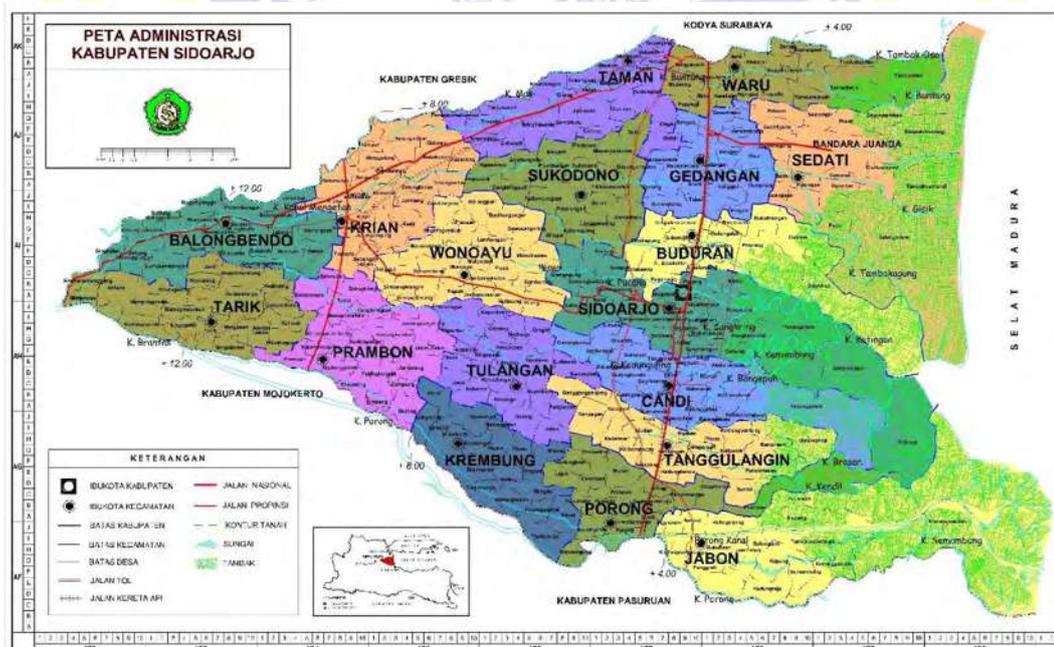
BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 714,243 km² yang terbagi sebagai berikut (www.sidoarjokab.go.id):

- 2.1 Sebesar 40,81 persen berada dibagian tengah, terletak diketinggian 3-10 meter dan berair tawar.
- 2.2 Sebesar 29,99% berada disebelah timur, terletak di ketinggian 0-3 meter dan merupakan daerah pantai.
- 2.3 Sebesar 29,20% sisanya terletak di ketinggian 10-25 meter dan berada dibagian barat.



Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo
(sumber: www.sidoarjokab.go.id)

Batas - batas wilayah Kabupaten Sidoarjo :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Selat Madura

Wilayah Sidoarjo merupakan daerah Delta yang subur, karena diapit kali Surabaya dan kali Porong, serta lokasinya cukup strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Malang, Jalan Surabaya – Banyuwangi dan Surabaya – Madiun. Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.053.467 jiwa, sedangkan tahun 2011 sejumlah 1.984.635 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 223.697 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7,963 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 58.562 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 941 jiwa/km² (www.sidoarjokab.go.id).

4.2 Pilkada Kabupaten Sidoarjo dan Partai Politik

Menurut Surbakti pemerintah dan DPR menyepakati mengenai penggantian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sudah disahkan oleh Presiden menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Sebagian isi UU yang baru (Pasal 56 & Pasal 119) berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pasal 22E UUD 1945 maupun UU NO.

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sama sekali tidak dijadikan rujukan, namun yang digunakan sebagai rujukan utama adalah Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 mengenai pemerintah daerah (Surbakti, 2004).

Adanya Pilkada secara langsung memberikan manfaat diantaranya Pertama, sebagai bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Kedua, sebagai kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi. Ketiga, sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan bagi elit politik lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik serta menyusun anggaran. Keempat, partisipasi rakyat dalam politik formal melalui Pilkada secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan dan stabilitas politik di daerah. Kelima, dengan partisipasi politik yang luas, maka akan lebih berpeluang terwujudnya kesetaraan politik. Keenam, mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat, dan mendistribusikan kekuasaan dalam kelompok yang lebih luas, termasuk ke kelompok masyarakat miskin, kelompok marginal, dan perempuan. Ketujuh, akuntabilitas publik, dimana calon yang terpilih akan membuktikan bahwa mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk perilaku, pilihan kebijakan publik dan keputusan politiknya kepada warga masyarakat. Kedelapan, meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat (Prihatmoko, 2005).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang telah siap menyambut Pilkada secara serentak tahun 2015 dan tokoh yang telah dipersiapkan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo 2015 tidak dipungkiri

didominasi oleh pasangan kaum pria, diantaranya H. MsG Hadi Sutjipto, S.H, M.M dengan H. Abdul Kolik, S.E (HATIKU), H. Utsman Ikhsan dengan Ida Astuti, S.H (USWATAN), Saiful Ilah S.H, M.Hum dengan Nur Achmad Syaifuddin, S.H (BERSINAR), dan Wareh Andono, S.H dengan H. Imam Sugiri, S.T, M.M (WANI). Berbeda halnya dengan nomor urut 2 (dua) Utsman Ikhsan yang merupakan satu-satunya pasangan menggandeng calon wakil perempuan yakni Ida Astuti alias Tan Mei Hwa, partai politik pengusungnya yakni partai PKS dan Gerindra, dimana kedua partai bersama mendukung dan mengantarkan ke kantor KPUD Sidoarjo di Jalan Cemengkalang pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 14.00 (sumber: nasional.tempo.co).

Daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo terdapat 6 pembagian Dapil yang memiliki 18 kecamatan, diantaranya memiliki 353 kelurahan dan memiliki Daftar Pemilih Tetap 2015 sekitar 60% dari jumlah penduduk yakni 1.367.945, jumlah pemilih perempuan 693.996 dan jumlah pemilih laki-laki 673.949. Disamping itu Kabupaten Sidoarjo sangat menarik dalam pemetaan suara partai politik, dimana basis suara partai politik yang terbesar dan menguasai 8 kecamatan dari 18 kecamatan yakni partai PKB. Berdasarkan dukungan data KPU Sidoarjo Suara Pileg 2014, PKB menguasai diseluruh Dapil dengan hasil Dapil 1 terdapat 60.208, Dapil 2 terdapat 52.757, Dapil 3 terdapat 33.197, Dapil 4 terdapat 50.649, Dapil 5 terdapat 38.449, Dapil 6 terdapat 28.370, dan total seluruh dapil terdapat 263.630 suara (kpud-sidoarjokab.go.id).

Sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi Partai Politik lain untuk memenangkan kontestasi pemilihan bupati 2015, khususnya Partai Politik yang mengusung pasangan Utsman dan Tan Mei Hwa, meskipun sudah diusung oleh dua

partai politik PKS dan Gerindra tetapi pada kenyataannya hasil pileg 2014 tetap tidak dapat mengungguli suara PKB yang mendominasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dari KPU Sidoarjo suara Pileg 2014 gabungan antara PKS dan Gerindra yakni Dapil 1 terdapat 33.758, Dapil 2 terdapat 29.737, Dapil 3 terdapat 34.351, Dapil 4 terdapat 30.711, Dapil 5 terdapat 42.676, Dapil 6 terdapat 26.801, dan total seluruh dapil PKS dan Gerindra terdapat 198.034 suara (kpu-sidoarjokab.go.id).

Disamping itu Kabupaten Sidoarjo memiliki basis partai terbesar yakni PKB, maka secara tidak langsung yang mendominasi dalam tubuh partai PKB adalah Islam Nahdlatul Ulama (NU). Seperti yang dikatakan oleh Yon Machmudi sebagai dosen Universitas Indonesia dalam artikelnya, bagi Nahdlatul Ulama PKS menuai berbagai kritikan dan menjadi ancaman, pertama karena ideologis yang dimilikinya, kedua lahirnya PKS sebagai kekuatan dakwah alternatif berpotensi melemahkan eksistensi ormas islam di kalangan generasi muda, dan ketiga kader PKS menimbulkan gesekan kepentingan, elit politik, dan agama dari golongan tua tidak dapat memonopoli dinamika di daerah yang sejatinya melemahkan dukungan umat dan otoritas kepemimpinan tokoh- tokoh ormas (Machmudi, 2007).

PKS merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi yang memiliki ideologi Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir dan Sayyid Quthb yang telah tewas dibunuh karena gerakan dakwahnya yang dianggap subversif dan mengancam keutuhan negara Mesir. Organisasi Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam upaya penggulingan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh Mesir, pengeboman, dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Maka dari Ikhwanul Muslimin

memiliki agenda tersembunyi di Indonesia yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam, sehingga melalui dakwah PKS berupaya menegakkan sistem pemerintahan islam dengan berbagai atributnya dan akan mengganggu stabilitas nasional (Rahmat, 2008). Sejatinya Partai Politik adalah organisasi yang mengelola ideologi, dimana ideologi tidak hanya ditempatkan sebagai tujuan, tetapi juga secara integritas memiliki ikatan sosial antara organisasi partai politik dengan masyarakat (Firmanzah, 2008). Sedangkan hal yang terjadi pada ideologi PKS memiliki sisi lain, seperti Rahmat (2008) katakan bahwa PKS dapat berpotensi melemahkan eksistensi dukungan umat dan otoritas kepemimpinan tokoh- tokoh ormas, seperti yang diketahui di Kabupaten Sidoarjo terdapat tokoh agama seperti Kyai yang dihormati dan disegani masyarakat yakni KH. Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat di Sidoarjo.

Kritikan terhadap PKS semakin kentara ketika dalam ulang tahun PKS ke-9 April lalu yang mendapatkan teguran dari dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dalam Koran *Sindo* terdapat artikel yang berisi kemarahan aktifis Muhammadiyah terhadap PKS (Sindo, 3-5-07) dan peringatan ketua PBNU, Hasyim Muzadi akan bahaya gerakan transnasional yakni gerakan liberalisme maupun fundamentalisme (Sindo, 9-5-07). Namun partai politik yang telah berdiri 1970an dengan menggandeng partai Gerindra tetap memiliki keyakinan dengan tokoh yang diusungnya dalam perhelatan pilkada 2015, yakni Utsman Ikhsan dengan wakilnya Tan Mei Hwa (uswatan) merupakan kandidat yang terpilih dan siap menantang calon *incumbent* Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu

periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015).

4.3 Profil Tan Mei Hwa

Ida Astuti alias Tan Mei Hwa lahir di Tulungagung 13 Juli 1968 merupakan salah satu sedikit perempuan berketurunan etnis Tionghoa yang sangat menekuni dunia dakwah islam, dakwahnya berawal pada tahun 1993 yang ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya dengan pendakwah yang mencerahkan dan penuh dengan humor (kpu-sidoarjo.go.id). Dakwah yang dilakukan telah memiliki agenda kegiatan rutin sebelum pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dengan pengajian dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga terkenal secara luas ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya.

Tan Mei Hwa yang telah genap berusia 47 tahun memiliki lembaga Az-Zahra yang bergerak dibidang pelatihan, konsultasi dan majelis dzikir. Pelatihan lembaga ini melayani perusahaan walau itu milik non muslim, sedangkan untuk konsultasi Tan Mei Hwa tidak memungut biaya dengan syarat kliennya dibatasi satu orang saja tiap harinya supaya konsultasi atau masukan yang diberikan kepada klien lebih tepat sasaran, Selain itu konsultan yang dimiliki Az-Zahra memang terbatas, begitupun majelis dzikir hanya khusus perempuan saja dimana setiap ahad pagi menggelar pengajian di rumah Tan Mei Hwa dikawasan benowo Surabaya. Lembaga Az-Zahra sudah membuka cabang di Tulungagung dan setiap tahun Tan Mei Hwa memiliki agenda rutin seperti mengadakan khitanan massal, bantuan

sosial, dan pengobatan gratis bagi warga lansia, dimana semua dana yang digunakan diambil dari dana pribadinya (Indra, 2014).

Sebagai lulusan hukum Universitas Wijaya Putra, Tan Mei Hwa ingin mengabdikan kepada Negara dengan mencalonkan sebagai wakil bupati bersama dengan pasangannya Utsman Ikhsan bernomor urut 2 dari 4 kandidat yang resmi bertarung dalam Pilkada 2015 Kabupaten Sidoarjo (kpud-sidoarjokab.go.id).



**Gambar IV.2 Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa
(sumber: kpud-sidoarjokab.go.id)**

Meskipun memiliki kesibukan berdakwah dan berkampanye di Pilkada Kabupaten Sidoarjo, Tan Mei Hwa tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai isteri atau ibu yang tetap memasak untuk suaminya dan tak pernah menggantikannya pada pembantu. Sehingga suami selalu tetap mendukung kegiatannya bersama dengan kedua anaknya yang kerap ikut serta apabila sedang bertugas ke luar kota, karena Tan Mei Hwa berharap dari lingkup terdekat yakni keluarganya dapat memberikan masukan mengenai respon jamaah pada saat ceramah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dikemudian hari (Indra, 2014).

4.4 Aktivitas Personal Brand Tan Mei Hwa

Personal brand bukan semata menghadirkan *personal image* (citra), meski citra tentulah penting, tetapi harus didukung dengan realita dan janji harus didukung dengan bukti. Begitupun dengan Tan Mei Hwa yang sedang membangun *personal brand* di hadapan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan harapan mendapatkan *image* yang kuat dan kepercayaan tinggi sehingga pada puncaknya memenangkan kontestasi Pilkada di Kabupaten Sidoarjo.

Kemenangan kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo tidak semata-mata hanya pada hari penentuan pengambilan suara, tentunya diperlukan beberapa hal untuk memperkuat ingatan masyarakat akan tokoh calon pemimpinnya. Tan Mei Hwa sebagai salah satu calon pemimpin Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa aktivitas *personal brand* untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara efektif dan efisien bersama tim pemenangannya.

Bermula dari dirinya sejak awal seorang ustadzah, maka bukan hal baru bagi Tan Mei Hwa berhubungan dengan berbagai golongan masyarakat dan menjadikannya seorang yang mempunyai jiwa sosial tinggi. Jiwa sosial yang ada pada Tan Mei Hwa merupakan sebuah kualitas karakter yang telah tertanam sebenarnya sebelum mengikuti kontestasi politik hingga saat ini tetap dilakukan meskipun bersaing dalam arena politik. Karakter dari seorang tokoh politik menyumbangkan porsi yang paling besar atas munculnya kepercayaan, kepercayaan mengalahkan suka atau benci, sentimen atau tidak sentimen.

Pada masa kampanye pemilihan kepala daerah Tan Mei Hwa sebagai calon wakil bupati membuktikan konsistensinya secara sosial dalam memberikan dampak lingkungan sekitar dirinya yang telah lama dilakukan, sekaligus menjadi aktivitas

personal brand selama kampanye mulai dari panti asuhan, panti jompo, kesehatan, khitanan, pengajian, dll.



Gambar IV.3 Tan Mei Hwa Menyantuni Yatim Piatu
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Salah satu kegiatan rutin terlihat pada gambar IV.3 Tan Mei Hwa yang sedang menyantuni anak yatim piatu di desa Tarik Sidoarjo pada tanggal 13 September 2015 pada masa kampanye seperti yang dilansir dalam akun sosialnya di facebook dan kedatangannya disambut antusias puluhan anak yatim laki-laki dan perempuan dengan berbagai umur.



Gambar IV.4 Tan Mei Hwa Pengajian Dengan Ibu-ibu
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Begitupun dengan pengajian yang dilakukan secara rutin dari perumahan ke perumahan atau desa ke desa dan pada gambar IV.4 merupakan salah satu pengajian

yang diadakan di kediaman lurah Sugih Waras, Kecamatan Candi Sidoarjo. Terlihat pengajian yang dilaksanakan pada masa kampanye tanggal 14 September 2015 memang difokuskan pendekatan untuk kaum ibu-ibu sebagai penggerak perubahan.



Gambar IV. 5 Tan Mei Hwa Bersama Tukang Sampah (sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Disamping itu Tan Mei Hwa tidak melupakan suara dari kaum marginal yang sangat butuh didengar dan terlihat pada gambar IV.5 terlihat Tan Mei Hwa sedang berbicara dengan tukang sampah bernama Sutopo yang sedang mengambil sampah, Tan Mei Hwa berusaha mendengarkan secara langsung keluhan yang dirasakan Pak Sutopo selama ini, meskipun dekat dengan sampah begitu banyak dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Hal tersebut dilakukan oleh Tan Mei Hwa untuk mendapat dukungan dari segala aspek sosial, tidak hanya pada kaum wanita saja tetapi tidak menutup kemungkinan penentu suara seperti Pak Sutopo memberikan dampak yang besar bagi kemenangan Tan Mei Hwa dalam Pilkada Sidoarjo.



**Gambar IV.6 Tan Mei Hwa Bersama Pedagang Kecil
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)**

Selain itu Tan Mei Hwa juga mendengarkan profesi lain diluar kebiasaan seorang wanita yakni pedagang kecil yang terlihat pada gambar IV.6 Tan Mei Hwa sedang mendengarkan suara ibu-ibu penjual DVD di pasar Krian Sidoarjo, blusukan yang dilakukan pada masa kampanye tanggal 9 September 2015 ini berlangsung pada malam hari dan Tan Mei Hwa tetap semangat menyambut pedagang dengan senyuman lebar sehingga pedagang juga ikut senang akan kedatangannya.



**Gambar IV.7 Tan Mei Hwa Bersosialisasi Saat Jalan Sehat
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)**

Karakter yang dimilikinya secara tidak langsung merupakan sebuah kemampuan atau ketrampilannya dalam bidang sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam keadaan dan situasi seperti apapun tetap dapat menyesuaikan

diri, terlihat pada gambar IV.7 Tan Mei Hwa mengikuti senam dan jalan sehat di Banjarwungu, Tarik Sidoarjo, yang berlangsung pada tanggal 27 September 2015.



Gambar IV.8 Tan Mei Hwa Bersama Karang Taruna Dusun Kasak (sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Meskipun sepertinya hanya wanita yang antusias tetapi generasi muda juga tidak kalah antusias bersama Tan Mei Hwa dengan menunjukkan kedekatan dirinya saat acara karang taruna di Dusun Kasak, Krian Sidoarjo. Gambar IV.8 menunjukkan generasi muda berusaha *aware* akan calon pemimpinnya kedepan dan berusaha untuk benar-benar mengenal, acara tersebut berlangsung pada tanggal 13 September 2015.

Strategi Tan Mei Hwa dalam kontestasi politik tidak hanya sampai disitu saja, tetapi ada beberapa kekuatan yang dapat diandalkan dalam dirinya yang telah lama dilakukannya yakni pengajian atau dakwah. Apalagi sebagai pendakwah yang telah membangun karir sejak 1993 diberbagai daerah menjadikannya sebagai tokoh yang cukup dikenal dikalangan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang senang dengan gaya ceramah dari Tan Mei Hwa.



Gambar IV.9 Kampanye Tan Mei Hwa Saat Pengajian
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Pengajian terbukti sangat efektif mendulang suaranya dalam politik, dimana Tan Mei Hwa tetap berdakwah sekaligus mempromosikan diri dalam pencalonannya sebagai calon wakil walikota Kabupaten Sidoarjo. Pada gambar IV.9 peserta pengajian membawa poster yang dibagikan Tan Mei Hwa setelah acara selesai dan terkadang terlihat dalam pengajian kaum laki-laki ikut serta karena penasaran atau ingin mengenal secara langsung sosok Tan Mei Hwa.



Gambar IV.10 Tan Mei Hwa Memberikan Amplop Pada Jamaah
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Selain promosi menggunakan alat peraga kampanye Tan Mei Hwa memberikan sebuah bantuan kecil berupa amplop sesuai kemampuannya untuk membantu wanita yang sebagian besar mengandalkan penghasilan suami. Pada gambar IV.10 kaum ibu-ibu dengan senang hati secara bergantian menerima

amplop berwarna merah atau sering disebut angpao dari Tan Mei Hwa dan berlangsung pada tanggal 5 September 2015 di Griya Permata Hijau, Gedangan Sidoarjo.



**Gambar IV.11 Tan Mei Hwa Tausiah Di TV Lokal
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)**

Debutnya sebagai pendakwah sudah tidak dapat diremehkan, tidak hanya sekedar dari rumah ke rumah melainkan sudah merambah dunia media masa, terlihat pada gambar IV.11 Tan Mei Hwa sedang berdakwah di stasiun TV lokal Surabaya dan tidak hanya satu kali atau dua kali saja, tetapi sudah memiliki program sendiri yang dapat disaksikan secara terus menerus, namun yang menarik adalah ketika berdakwah di rumah dan di stasiun TV dalam cara berpakaian dan berdakwah tidak ada bedanya, apa adanya seperti halnya sebuah rutinitas yang di lakukan selama ini dalam pengajian.

Hal tersebut ingin ditunjukkan seorang Tan Mei Hwa akan kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun, dan menjadikannya mempunyai kedekatan dengan berbagai kelompok komunitas salah satunya Ikatan Haji Muslimat NU yang mendukungnya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015.



Gambar IV.12 Tan Mei Hwa Bersama Ikatan Haji Muslimat NU
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Pada gambar IV.12 Tan Mei Hwa terlihat memakai setelan warna yang kontras bersama Ikatan Haji Muslimat NU setelah acara pengajian selesai di Keboan Sikep Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 27 September 2015. Tan Mei Hwa selalu identik mengenakan hijab yang menandakan bahwa dia seorang muslimah dan sekaligus menjadi kekhasan untuk tampilan fisiknya ketika di ranah publik, baik ketika berdakwah maupun saat berkampanye.



Gambar IV.13 Penampilan Tan Mei Hwa Di Ranah Publik
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Tan Mei Hwa berusaha mempertahankan nilai islam secara konsisten dengan berusaha menjaga penampilannya di depan publik, terlihat pada gambar IV.13 Tan Mei Hwa mengenakan gaya hijab yang sama dan yang membedakan hanya warna yang dikenakan saja, baik ketika berdakwah maupun saat memosisikan dirinya

sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Beberapa strategi yang dilakukan Tan Mei sedemikian rupa dikomunikasikan sesuai dengan latar belakangnya, supaya harapannya relevan untuk dipercayai dengan oleh masyarakat tanpa anggapan negatif omong kosong, serta berusaha konsisten apa yang telah dilakukan tidak akan berubah dan apa adanya.

4.5 Media Komunikasi Personal Brand

Media Komunikasi merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara matang dalam kampanye politik, supaya dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat dan hal ini dicapai dengan melakukan segmentasi publik. Segmentasi atau pemetaan dapat dilakukan melalui beberapa hal dasar seperti wilayah, pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, agama, etnis, dan pemahaman akan politik dari suatu daerah.

Distribusi produk politik sangat terkait erat dengan mekanisme jangkauan dan penetrasi produk politik, apakah produk politik didistribusikan melalui media atau harus datang dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, itu juga harus dipertimbangkan. Apabila pemilihan menggunakan media terdapat beberapa pilihan, seperti TV, Radio, Internet, Majalah, Brosur, Pamflet, Poster, dll yang diedarkan dalam bentuk fisik dan dapat didistribusikan sesuai dengan segmentasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Tan Mei Hwa menggunakan beberapa media untuk menjangkau beberapa segmentasi yang telah dipetakan oleh tim pemenangannya, mulai dari media *online* yang dapat dijangkau siapa saja dan kapan saja, hingga media konvensional untuk beberapa segmentasi yang memerlukan pendekatan khusus.



**Gambar IV.14 Website Uswatan
(sumber: uswatan.com)**

Website merupakan salah satu halaman *online* di internet yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun asalkan terdapat jaringan data internet, terlihat pada gambar IV.14 website milik Uswatan atau lebih tepatnya Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa yang berusaha berkomunikasi di halaman pribadi, dikelola sendiri oleh tim dan dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. Website Uswatan digunakan untuk menampilkan beberapa unsur seperti visi misi, profil pasangan, lima program utama, foto kegiatan yang dilakukan selama kampanye, berita terbaru mengenai pasangan, foto pasangan, slogan yang dibawa, komentar beberapa masyarakat dan warna yang digunakan didominasi hijau serta merah putih lambang negara

Indonesia. Tidak hanya sampai disitu, Tan Mei Hwa menggunakan beberapa sosial media yang sangat dekat generasi muda dan mudah diakses melalui *mobile phone*.



Gambar IV.15 Facebook Uswatan Untuk Sidoarjo
(sumber: [www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo](http://www.facebook.com/uswatan-untuk-sidoarjo))

Pada gambar IV.15 Tan Mei Hwa menggunakan salah satu media sosial yakni *facebook* yang dinilai masih efektif dalam memberikan komunikasi pada generasi muda atau era komunikasi moderen saat ini, akun yang diberi nama “Uswatan Untuk Sidoarjo” cukup aktif dalam memberikan berita terbaru mengenai pasangan Uswatan, meskipun berita yang muncul didominasi oleh Tan Mei Hwa dari berbagai kegiatan kampanye dibandingkan Utsman Ikhsan, namun masyarakat tetap interaktif memberikan komentar dalam mengikuti perkembangannya.

Dalam facebook tersebut menampilkan nomor urut yang terdapat di foto profil sama dengan tampilan di *website*, latar *background* gambar yang mencantumkan 5 program utama Uswatan, kemudian foto kegiatan selama kampanye juga disamakan dengan foto kampanye di *website* beserta dengan

keterangan dengan tidak ada batasan jumlah kata pada *timeline facebook*, dan video mengenai profil kandidat ditampilkan secara audio visual.



**Gambar IV.16 Twitter @balaiuswatan
(sumber: www.twitter.com - @balaiuswatan)**

Disamping itu Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan menggunakan media social lainnya yakni *twitter* dengan nama akun “@balaiuswatan”, terlihat pada gambar IV.16 secara tampilan terdapat beberapa perbedaan dengan menampilkan 5 program utama menggunakan kalimat, kemudian menggunakan foto profil pasangan dengan gaya yang berbeda, dan pemberitaan yang di perbarui tidak sesering *facebook* sehingga menjadikan media ini tidak terlalu memiliki interaktif dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Meskipun Tan Mei Hwa mengikuti perkembangan dalam penggunaan media, Tan Mei Hwa tetap memanfaatkan beberapa media konvensional untuk berkomunikasi dengan beberapa sasaran segmentasi yang tidak terjangkau. Media konvensional yang digunakan tidak jauh berbeda dengan media *online*, beberapa informasi yang penting mengenai profil pasangan kandidat, program pasangan kandidat, dan visi misi pasangan kandidat.



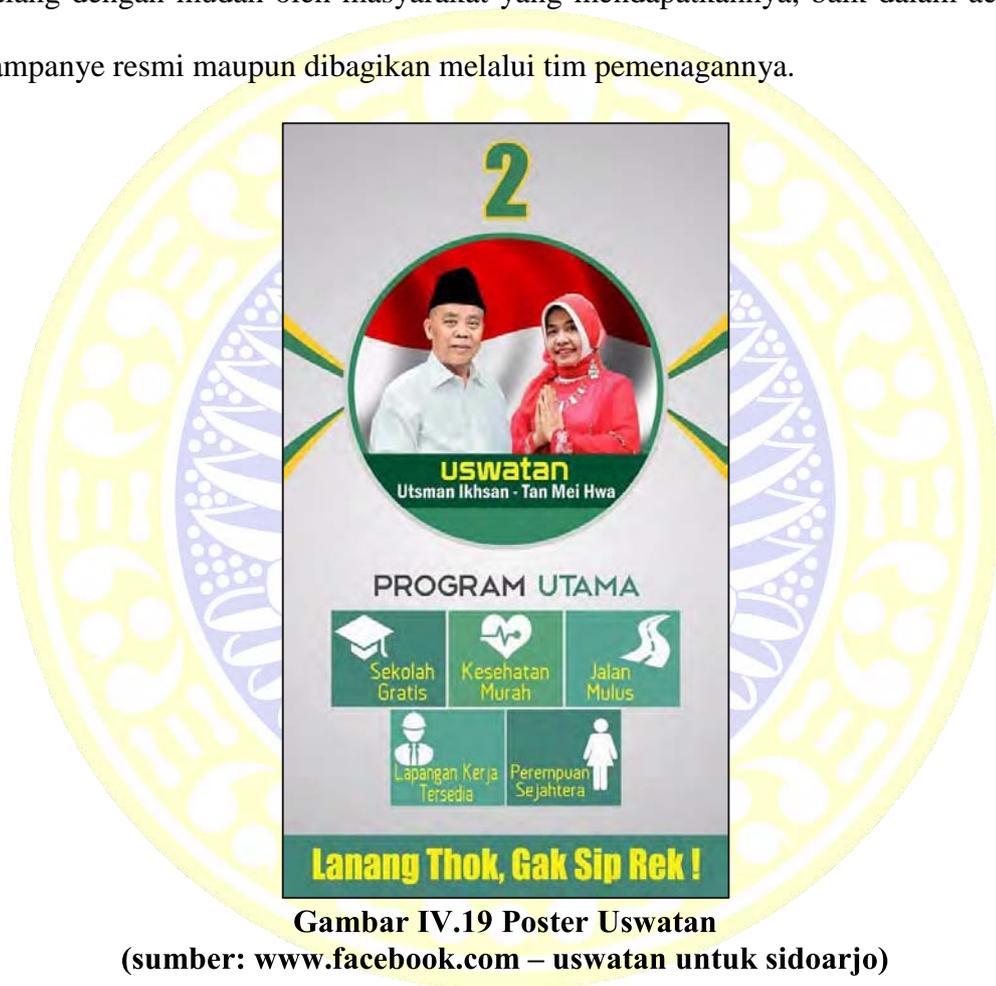
Gambar IV.17 Brosur Uswatan Tampak Depan
(sumber: [@balaiuswatan](http://www.twitter.com))

Pada gambar IV.17 merupakan brosur Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan tampak depan dari dua sisi yang digunakan, dalam brosur tersebut terdapat beberapa informasi yang memudahkan pembaca mengetahui tentang pasangan tersebut, seperti nomor urut pasangan, foto pasangan dengan gaya sama seperti pada *website*, akun sosial media yang digunakan, visi dan misi, 5 program utama, dan pendapat dari pasangan.



Gambar IV.18 Brosur Uswatan Tampak Belakang
(sumber: [@balaiuswatan](http://www.twitter.com))

Namun disisi lain pada gambar IV.18 merupakan sisi belakang dari brosur Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan yang lebih menjabarkan secara detail 5 program utama, form suara masyarakat apabila mendukung Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan, dan sedikit diberi gambar yang bercerita mengenai slogan mereka “Lanang thok, gak sip rek”. Media brosur digunakan supaya dapat dibagikan dan dibawa pulang dengan mudah oleh masyarakat yang mendapatkannya, baik dalam acara kampanye resmi maupun dibagikan melalui tim pemenagannya.



Gambar IV.19 Poster Uswatan

(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Sama halnya seperti brosur, Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan juga memakai media poster dalam penyebaran informasi, pada gambar IV.19 merupakan tampilan poster yang digunakan dalam kampanye yang menampilkan nomer urut pasangan, foto pasangan dengan gaya yang sama pada *website*, 5 program utama, dan slogan pasangan. Media poster digunakan sifatnya lebih simpel dan jelas, dan

kemungkinan besar dapat di tempel dimanapun sehingga dapat menjangkau ruang publik yang lebih luas.



Gambar IV.20 Spanduk Uswatan
(sumber: beritajatim.com)

Beberapa tempat yang mempunyai intensitas tinggi untuk menjadi jalur yang mudah dilihat, tim dari Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan juga mempersiapkan media spanduk yang terlihat pada gambar IV.20. Meskipun diproduksi dan pemasangan ditentukan oleh tim KPUD Kabupaten Sidoarjo, untuk *content* tetap dari kandidat pasangan yang menentukan sehingga dapat menjaga konsistensi komunikasi yang telah menjadi standart. Kampanye yang digunakan Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan tidak hanya mengandalkan yang sifatnya pengajian saja, tetapi terdapat juga beberapa acara kampanye yang menyenangkan untuk dihadiri.



Gambar IV.21 Panggung Kampanye
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)

Salah satunya kampanye dengan acara jalan sehat, terlihat pada gambar IV.21 panggung tersebut dipersiapkan untuk salah satu acara jalan sehat untuk memperingati HUT Kemerdekaan ke 70 di Candi Sidoarjo. Acara tersebut dibuat meriah dengan adanya banyak hadiah sehingga menarik perhatian masyarakat sekitar sembari Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan berkampanye didepan masyarakat, bahkan tidak ketinggalan dalam beberapa acara kampanye dibagikan kaos gratis dengan gambar pasangan dan slogan Uswatan.



Gambar IV.22 Kaos Uswatan
(sumber: [www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo](http://www.facebook.com-uswatan-untuk-sidoarjo))

Pada gambar IV.22 merupakan kaos gratis yang dipersiapkan untuk dibagikan pada masyarakat yang hadir dalam acara kampanye. Namun ada sedikit yang berbeda dari kaos tersebut dengan media yang lainnya, dimana foto yang dipasang paling berbeda dengan media lainnya, seperti gaya yang berbeda, warna yang berbeda, pakaian yang berbeda, dan slogan yang dicantumkan berbeda. Tetapi

untuk warna secara keseluruhan tidak jauh berbeda yakni dominan warna merah, putih dan hijau.

Acara kampanye tidak hanya digelar oleh tim partai politik pengusung, tetapi KPUD Kabupaten Sidoarjo juga memfasilitasi semua pasangan kandidat untuk tampil di media masa berlektronik yakni JTV sebagai TV lokal yang mempunyai segmentasi acara lokal.



**Gambar IV.23 Debat Kandidat Di TV Lokal
(sumber: www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo)**

Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan terlihat sangat serasi dan kompak ketika tampil debat kandidat di JTV yang terlihat pada gambar IV.23. Penampilan mereka sangat sesuai dengan foto yang disetorkan pada KPUD Kabupaten Sidoarjo dan sesuai dengan beberapa media yang digunakan dalam kampanye, sehingga masyarakat yang menontonnya secara langsung ditempat atau melalui TV tetap dapat mengenali dengan baik Tan Mei Hwa dan Utsman Ikhsan.

Debat kandidat tersebut diadakan pada tanggal 10 Oktober 2015 di Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo Pk.19.30-21.00 WIB, dimana acara tersebut dapat dikatakan paling menegangkan dan bersiteru antara satu dengan lainnya karena dihadirkan secara langsung keempat kandidat untuk saling menunjukkan keunggulannya dibanding calon lainnya.

BAB V**HASIL & PEMBAHASAN**

Penelitian menggunakan pengambilan data *focus group discussion* dengan jumlah 15 orang yang dibagi atas dua kelompok group, yakni Kategori P dan Kategori U, dimana dalam pemilu Pilkada 2016 turut serta dalam memberikan suara. Kategori P terdiri 7 orang yang sebagian besar merupakan anak muda yang dapat digolongkan sebagai pemilih pemula, sedangkan Kategori U terdiri 8 orang yang sebagian besar sudah berkeluarga yang dapat digolongkan sebagai pemilih berkelanjutan. Kedua kelompok tersebut hadir sesuai dengan kualifikasi, dimana informan berdomisili penduduk Sidoarjo yang mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, khususnya Tan Mei Hwa sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Utsman Ikhsan sebagai calon bupati dan informan memenuhi syarat sebagai peserta pemilih Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian di dapatkan melalui *focus group discussion* dengan dua kategori, yakni Kategori P dilaksanakan pada 7 Desember 2015 pukul 12:00 – 16:00 WIB yang bertempat di A&W Restaurants – Maspion Square Lt.1 Surabaya dan Kategori U dilaksanakan pada 8 Desember 2015 pukul 15:00 – 19:00 WIB yang bertempat di Agfa Warung Kuliner – Kahuripan Nirwana Sidoarjo. Namun sebelum *focus group discussion* dilaksanakan, peneliti melakukan penyampaian prosedur atau tata cara tanya jawab dalam kelompok *focus group discussion* dan tujuan penelitian kepada semua informan yang telah hadir dan siap memberikan informasi.

5.1 Profil Informan

5.1.1 Informan Kategori P

- Informan P1

Informan P1 merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 4 dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Pria kelahiran 27 Mei 1995 ini telah 20 tahun berdomisili di Pasar Kedungrejo, kecamatan Waru Sidoarjo. Mengetahui Tan Mei Hwa sebelumnya dari dakwahnya di stasiun TV lokal dan pilkada merupakan pengalaman pertamanya dan selalu mengikuti perkembangan semua calon kandidat di Kabupaten Sidoarjo.

- Informan P2

Informan P2 berdomisili di Kramat Jegu, kecamatan Taman Sidoarjo. Lahir pada tanggal 7 Juni 1995 merupakan seorang mahasiswa semester 4 dan Pilkada 2015 merupakan pengalaman pertamanya di umur 20 tahun dan tidak ingin melewatkan suaranya demi memilih pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Sidoarjo, terutama Tan Mei yang menarik perhatiannya ketika melihat di stasiun TV lokal JTV.

- Informan P3

Informan P3 merupakan seorang wanita kelahiran 8 Oktober 1995 sedang menjalani kesibukan studi strata satu di Universitas Bhayangkara Surabaya dan gemar mengikuti Tan Mei Hwa dalam berdakwah, namun uniknya meskipun sudah lama mengikuti Tan Mei Hwa di TV lokal, baru-baru saja mengetahui kalau mencalonkan menjadi wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Wanita yang berdomisili

di Tawangsari Barat, kecamatan Taman Sidoarjo tidak ingin menyiakan suara pertamanya di Pilkada Kabupaten Sidoarjo di umurnya yang genap 20 tahun ini.

- Informan P4

Informan P4 seorang wanita berusia 21 tahun yang berdomisili di Candi Sidoarjo, Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015 merupakan pengalaman pertamanya dalam politik di Indonesia. Wanita kelahiran 19 November 1994 ini tertarik mengikuti Tan Mei Hwa, meskipun tidak secara langsung melihatnya, melalui TV lokal awal mula mengenal Tan Mei Hwa dan dirasa paling cocok dalam memberikan dakwah pada kaum muda sepertinya.

- Informan P5

Informan P5 merupakan seorang wanita kelahiran 20 Februari 1995 yang berdomisili di Bluru Kidul, kecamatan Sidoarjo dan tidak menyangka ketika 2 tahun lalu saat ramadhan menonton Tan Mei Hwa di TV lokal SBO, saat ini menyalonkan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Sebagai mahasiswi yang sudah berumur 20 tahun, kali ini tidak ingin melewatkan suaranya dalam memilih pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu Pilkada saat ini menarik baginya karena hanya ada satu wanita diantara kandidat yang didominasi oleh kaum pria.

- Informan P6

Informan P6 mahasiswi kelahiran tanggal 3 Juni 1994 ini merupakan pertama kalinya akan mengikuti perpolitikan di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015. Salah satunya yang menjadi perhatian yakni Tan Mei Hwa yang diketahuinya melalui

sebuah poster yang tertempel di salah satu Alfamart, tempat tersebut tentunya tidak jauh dari kediamannya yang berdomisili di daerah Kemiri Sidoarjo sejak 20 tahun yang lalu.

- Informan P7

Informan P7 merupakan seorang pria berumur 20 tahun, individu yang aktif dalam masalah politik, sebab ketika Tan Mei Hwa hadir untuk berkampanye di dekat kediamannya yakni Candi Sidoarjo, pria kelahiran 23 Juni 1995 ini menyempatkan waktu untuk melihat secara langsung bagaimana kampanye Tan Mei Hwa pada warga sekitar. Baginya penting untuk mengetahui secara langsung calon pemimpinnya karena menyadari bahwa ini pertama kalinya mengikuti Pilkada 2015 dan satu suara sangat berarti dalam terpilihnya pemimpin di Kabupaten Sidoarjo.

5.1.2 Informan Kategori U

- Informan U1

Informan U1 seorang pria kelahiran kota Cilacap, 28 Februari 1968, memiliki beberapa pengalaman di bidang politik yakni sebagai ketua cabang Partai Buruh Kabupaten Sidoarjo. Tetapi sebelum di posisi seperti saat ini, pernah menjabat sebagai tim sukses Pemilihan Legislatif 2014 untuk anggota DPR yakni Ir. Fandi Utomo dari Partai Demokrat dan meraih keberhasilan. Pria 47 tahun yang berdomisili di Buduran Sidoarjo ini tidak pernah ketinggalan berita mengenai sepaik terjang Tan Mei Hwa, meskipun Tan Mei Hwa merupakan pemain baru di Kabupaten Sidoarjo.

- Informan U2

Informan U2 merupakan ibu rumah tangga 36 tahun, namun terjun juga di partai politik. Partai Republikan merupakan wadahnya dalam berpolitik di Kabupaten Sidoarjo, meskipun hanya anggota saja tetapi yang terpenting baginya untuk belajar berpolitik dan suatu saat dapat mencalonkan. Wanita kelahiran tanggal 4 Mei 1980 ini bertempat tinggal di Rangkah Kidul Sidoarjo, dan selalu mengikuti perkembangan kandidat calon pemimpin Kabupaten Sidoarjo, salah satunya Tan Mei Hwa menarik perhatiannya karena sebagai sesama wanita yang merasakan menjadi ibu rumah tangga yang berkecimpung di dunia politik.

- Informan U3

Informan U3 seseorang kelahiran kota Pasuruan, 5 April 1968. Belum lama ini menempati posisi sebagai ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sidoarjo, meskipun Partai Perindo terhitung partai baru yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo, masa yang telah ikut serta dalam partai mencapai 7000 anggota untuk Kabupaten Sidoarjo. Pria 47 tahun ini bertempat tinggal di Buduran Sidoarjo dan telah mengetahui kandidat Tan Mei Hwa sebenarnya sudah sejak lama sebelum pencalonan Pilkada 2015, dimana melalui dakwah di media TV lokal menjadi salah satu informasi mengenal sosok Tan Mei Hwa.

- Informan U4

Informan U4 seorang pria 49 tahun yang telah sukses menjadi koordinator pemersatu 17 partai politik untuk menyukseskan pencalonan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Bagi pria kelahiran 20 Mei 1966 ini dunia politik bukanlah hal baru

baginya karena pernah menjabat sebagai mantan Ketua Partai Pemuda Indonesia angkatan 2009-2014. Bertempat tinggal di Gedangan Sidoarjo puluhan tahun menjadikannya harus tepat memilih calon pemimpin untuk Kabupaten Sidoarjo, sehingga selalu mengikuti perkembangan Tan Mei Hwa semenjak mengetahuinya melalui pengajian di daerahnya.

- Informan U5

Informan U5 seseorang yang berumur 54 tahun berpengalaman dalam menyukseskan kandidat dalam pertarungan politik, karirnya bersama ormas Gerbang Intan (Gerakan Pembangunan Insan Pacitan) mengantarkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 bersama partai yang tergolong baru yakni Partai Demokrat. Kemudian setelah kemenangan tersebut tidak lama pria yang bertempat tinggal di kecamatan Jati Sidoarjo ini ditarik ke Majelis Zikir Nurul Salam Jawa Timur, tujuannya tidak jauh lagi dari sebelumnya yakni memenangkan Susilo Bambang Yudoyono dalam kontestasi kandidat presiden dan berakhir menang untuk kedua kalinya. Apalagi antusiasnya untuk Kabupaten Sidoarjo sangat menarik perhatian, karena menurut pria kelahiran 22 Mei 1961 terdapat seorang wanita pendakwah masuk ranah politik dan sedang mencalonkan sebagai wakil bupati yakni Tan Mei Hwa.

- Informan U6

Informan U6 merupakan wanita kelahiran 27 November 1964 yang pernah membantu gardu Prabowo di Partai Gerindra pada Pilpres 2014. Sepak terjangnya dalam partai politik tahun 2009 pernah mencalonkan legislatif dari Partai

Republikan untuk dapil Porong, kemudian tahun 2014 mencalonkan legislatif kembali dari Partai Demokrat untuk dapil Waru dan Taman. Meskipun tidak berhasil dalam Pemilihan Legislatif, wanita 51 tahun yang berdomisili di Waru Sidoarjo ini tidak menjadikannya hengkang dari partai politik, sebab Pilkada Kabupaten Sidoarjo saat ini menarik perhatiannya karena Tan Mei Hwa sebagai wanita yang sama terjun ke dunia politik.

- Informan U7

Informan U7 seorang pria yang memiliki usia telah tergolong senja yakni 67 tahun. Sebagai Purnawirawan TNI Angkatan Udara sejak tahun 2003, untuk mengisi kekosongannya berinisiatif masuk Partai Suara Bangsa dan diterima menjabat posisi bendahara partai, dibawah naungan Partai Demokrat. Pria kelahiran 22 Agustus 1948 bertempat tinggal di Lemahputro Sidoarjo ini dalam jiwanya ingin tetap selalu mendukung keluarga besar TNI sampai sekarang, meskipun dalam benaknya tidak ingin berpolitik tetapi mempunyai pendirian harus mengerti politik, apalagi menyangkut pemimpin Kabupaten Sidoarjo. Semua kandidat calon pemimpin diikutinya tak terkecuali Tan Mei Hwa menjadi sorotannya karena satu-satunya wanita diantara calon lainnya.

- Informan U8

Informan U8 merupakan seorang kelahiran kota Tulungagung 6 September 1947 tahun silam. Meskipun usia senja, tetapi masih menjabat ketua Partai PNI Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2018. Karir dalam politik sebelum di Partai PNI pada tahun 1999 sempat merasakan Partai PDI pada tahun 2004 mendukung SBY,

tetapi nasib berkehendak lain pada tahun 2008 memperoleh SK dari Partai PNI untuk kembali. Bertempat tinggal di Buduran Sidoarjo sedang menjalani profesi sebagai pengobatan alternatif kanker dan diabet melalui media *online*, namun tetap diusianya 68 tahun tidak meninggalkan dunia politik di Kabupaten Sidoarjo, terlebih pengakuannya akan sepak terjang Tan Mei Hwa yang diapresiasi.

5.2 Opini Informan Tentang Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa

David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan sebuah *personal brand* yang kuat terdapat tiga hal karakteristik yang menyatu, yakni kekhasan, relevansi, dan konsistensi.

5.2.1 Karakteristik Kekhasan Tan Mei Hwa

Kekhasan menjadi hal penting supaya berbeda dengan kebanyakan orang, kekhasan berasal dari pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan orang lain, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mampu melakukan hal itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai diri. Dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai hidup dalam diri akan membedakan dengan *personal* yang lain. Nilai-nilai diri dapat berupa kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian (David McNally & Karl D. Speak, 2004). Berikut merupakan beberapa point yang terdapat dalam kekhasan Tan Mei Hwa:

5.2.1.1 Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Masuk Ranah Politik

Menurut Subiakto dan Ida (2012) banyak anggapan perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik, akibatnya menjadi semakin sulit bagi

perempuan untuk mengonsolidasi posisi dan kedudukannya serta semakin mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili. Maka dari itu saat ini perlu mengetahui bagaimana pendapat masyarakat menilai seorang perempuan masuk ranah politik.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) untuk Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik secara menyeluruh memiliki cara pandang yang sama, yakni tidak masalah mengenai hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh informan P1 mengatakan selama ini Undang-Undang tidak pernah tertulis melarang perempuan untuk masuk ranah politik.

Kalau menurut saya tidak masalah. Pertama, karena apa itu tidak bertentangan dengan undang-undang kita, bahwa undang-undang kita tidak menyebutkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, Bupati, atau Gubernur harus laki-laki. Kedua, saya rasa perempuan harus ranah politik karena mewakili rakyat, jadi butuh beberapa perempuan yang duduk sebagai pemimpin untuk mewakili aspirasi-aspirasi wanita, bayangkan kalau di isi laki-laki siapa yang akan mewakili suara perempuan, seperti itu aja sih. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P1 memberikan pendapat bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada persyaratan untuk menjadi Presiden, Bupati, Gubernur, atau Kepala Daerah harus laki-laki ataupun perempuan, sehingga Tan Mei Hwa sebagai perempuan tidak masalah untuk masuk dalam politik dan tidak melanggar aturan apapun. Bahkan menurut informan P1 sebagai mahasiswa menginginkan perempuan harus masuk ranah politik untuk mewakili aspirasi-aspirasi wanita, karena laki-laki belum tentu dapat mewakili suara perempuan. Selain itu juga perempuan didukung dengan peraturan kuota untuk partai politik yakni UU Papol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, mengharuskan kuota perempuan 30% dilakukan pada Pemilu 2009

(Soetjipto, 2011). Seperti yang diungkapkan oleh informan P4 yang berpendapat 30% di DPR atau di partai politik harus isi oleh perempuan.

Menurut saya tidak apa-apa soalnya kenapa, dari 100% diambil 30% di DPR atau dipolitik harus diisi oleh wanita. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Namun berbeda yang dikatakan oleh informan P1 dengan bukti yang ditemukan oleh Subiakto dan Ida (2012) berpendapat meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi yang menguntungkan diparlemen, perempuan belum mampu memperjuangkan suara perempuan, kebutuhan perempuan, dan proporsi pembagian persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. Ketika perempuan mempunyai andil untuk bicara, perjuangan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas yang lain belum mampu secara maksimal dikedepankan, dibandingkan persoalan atau masalah yang dihadapi umum yang lebih memihak kepentingan dominan laki-laki. Bahkan informan P5 sebagai mahasiswi yang berpendidikan, sudah tidak ingin memandang sesama perempuan untuk berprofesi pada umumnya.

Kalau menurut saya ini era wanita modern, jadi wanita sekarang tidak terpaksa sama profesi yang mainstream, mungkin aja dia sudah punya kemampuan, mungkin partai politik juga melihat perempuan lebih menarik hati pemilih. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P5 memandang saat ini adalah era perempuan modern, sehingga perempuan saat ini tidak lagi terpaksa profesi pada umumnya, seperti halnya yang dikatakan Subiakto dan Ida (2012) banyak posisi dan peran tradisional perempuan di ranah domestik lebih mengedepan dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah publik apalagi di bidang politik. Seharusnya menurut pendapat informan P5 apabila perempuan sudah memiliki kemampuan politik yang baik dapat juga menempati posisi laki-laki, bahkan perempuan dapat menjadi penarik

hati pemilih. Senada dengan informan P5, Soetjipto (2011) mengatakan kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan aspirasinya.

Adapun secara singkat informan P2 menambahkan tidak ada masalah perempuan masuk ranah politik dan tidak menutup kemungkinan perempuan dapat lebih baik dalam memimpin di dunia politik dari pada laki-laki.

Untuk saya sih tidak ada masalahnya dan tidak menutup kemungkinan perempuan bisa sangat baik memimpin di dunia politik dari pada laki-laki, udah itu aja sih. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sedangkan informan P7 lebih memberikan contoh perempuan yang sukses berkiprah di politik dan hal tersebut merupakan bentuk dukungannya untuk perempuan masuk ranah politik.

Banyak ya, seperti lulusan SMP juga bisa jadi menteri kelautan, seperti Bu Risma perempuan yang menutup gang dolly. Jadi Bu Tan Mei Hwa semoga bisa menjadikan Sidoarjo jauh lebih baik lagi. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 melihat terdapat seorang perempuan yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi namun dapat sukses menjadi seorang Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Susi Pudjiastuti. Susi Pudjiastuti merupakan perempuan kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965, mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMAN 1 Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh sekolah karena aktif dalam Gerakan Golput yang terlarang pada tahun 1980-an atau era Orde Baru.

Ketika diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 26 Oktober 2014, sempat menjadi sorotan publik dikarenakan memiliki gaya yang eksentrik

dan terdapat fakta bahwa tidak mengenyam pendidikan di bangku kuliah (profil.merdeka.com). Serta pemimpin perempuan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang menutup pusat prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014).

Sehingga dengan adanya bukti keberhasilan tokoh perempuan tersebut, informan P7 mengharapkan Tan Mei Hwa lebih dari seperti tokoh-tokoh perempuan tersebut dan menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari sekarang. Begitupun dengan informan P6 dan P3 sebagai mahasiswi tidak masalah perempuan masuk ranah politik, yang terpenting adalah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaksanakan janji-janjinya.

Kalau untuk saya nggak ada beda sih, semoga gak mengingkari janjinya itu aja sih. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Wanita ataupun laki-laki sama aja jadi pemimpin, asalkan mereka mampu melaksanakan tugasnya, baik wakilnya atau bukan yang penting bisa melaksanakan janji-janjinya. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Melaksanakan tugas yang dimaksudkan oleh informan P3 yakni sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program yang diandalkan oleh Tan Mei Hwa untuk Sidoarjo yang salah satunya terdapat di media poster pada gambar IV.19 (www.facebook.com – uswatan untuk sidoarjo).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) untuk Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik secara menyeluruh juga memiliki cara pandang yang sama, yakni tidak masalah mengenai hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh

informan U8 yang baik-baik saja adanya perempuan masuk ranah politik, dengan alasan bahwa tidak ada Undang-Undang yang melarangnya.

Saya rasa baik-baik aja karena memang Undang-Undang tidak ada yang melarang, cuma bagaimana menyikapi dan interaktif dengan masyarakat karena kita punya hak jadi manusia. Jadi saya rasa tidak ada larangan, kalau kita melihat sudut pandang salah satu agama memang, saya jawabnya secara nasional ya jadi saya rasa tidak apa-apa jadi pimpinan juga tidak apa-apa, cuma jadi imam itu memang selama ini tidak bisa dalam Islam. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena secara Undang-Undang tidak ada yang melarang perempuan masuk ranah politik, maka informan U8 tidak masalah apabila Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk politik dan menjadi pemimpin suatu daerah, karena UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, mengharuskan kuota perempuan 30% dilakukan pada Pemilu 2009 (Soetjipto, 2011). Hanya informan U8 menekankan bagaimana strategi dalam menyikapi dan berinteraktif dengan masyarakat, karena mengacu pada yang dikatakan oleh Hubert K. Rampersard (2008) bahwa kesuksesan *branding* tidak lepas dari empat langkah, yakni merencanakan, menyebarkan, bertindak, dan mengembangkan. Tetapi dalam segi agama islam informan U8 memberikan pengecualian bahwa laki-laki menjadi pemimpin hanya dalam konteks rumah tangga. Informan U7 juga menambahkan dukungan pada informan U8, bahwa memang sah-sah saja Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik.

Kalau menurut saya sah-sah saja karena tidak ada peraturan pemerintah atau Undang-Undang yang melarang untuk wanita sebagai pemimpin, cuma kalau kita lihat dari sudut pandang agama kaum wanita tidak boleh jadi pemimpin, kan gitu, itu sudah tegas dijelaskan sampai rumah tangga saja tidak ada istri itu jadi pemimpin kecuali bapaknya, juga dalam sholat misalnya tidak ada perempuan jadi imam, dilarang itu sudah tegas, itu menurut pandangan saya. Mungkin pandangan pemerintah sah-sah saja karena tidak ada Undang-Undang yang melarang, tapi barangkali masyarakat Indonesia masih memilah-milah pertimbangan agama tadi, sehingga calon pimpinan wanita itu jarang yang jadi kalau kebetulan ada yang jadi itu udah top yang nomor satu. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U7 menyatakan memang perempuan tidak dilarang untuk masuk dalam ranah politik, bahkan Undang-Undang tidak melarang perempuan berposisi sebagai pemimpin. Tetapi kembali dipertegas setelah sebelumnya dipaparkan oleh informan U8, bahwa dalam segi keluarga dan agama seorang pemimpin hanya untuk seorang laki-laki. Walaupun sudah tidak ada peraturan yang membatasi perempuan, banyak masyarakat yang menggunakan dasar agama dalam memilih dan memilah, sehingga banyak calon perempuan jarang memenangkan kontestasi politik di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan perilaku memilih atau *voting behavior* perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada perempuan yang ada, dimana kuatnya nilai patriarki dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat (Soetjipto, 2011).

Sama halnya dengan informan U6 juga mendukung perempuan sah-sah saja masuk ranah politik, dikarenakan dirinya sendiri sudah memiliki latar belakang politik dan pernah mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sidoarjo dua kali yakni pada tahun 2009 untuk dapil Porong dan tahun 2014 untuk dapil Waru dan Taman.

Kalau perempuan sah-sah saja, asalkan mereka pandai, jujur, ulet dan semangat tinggi, tidak korupsi. Terima kasih. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Hal yang ditekankan oleh informan U6 yang terpenting adalah perempuan harus pandai, harus jujur, harus ulet, harus semangat tinggi, dan tidak boleh korupsi. Informan U6 berharap seperti itu pada perempuan karena pernah merasakan sendiri bagaimana ketika mencalonkan diri dalam pemilihan daerah, pasti banyak hal dalam politik yang nantinya memberikan dampak negatif kelak. Seperti yang ditulis dalam artikel oleh Ramadhan (2014), bahwa catatan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati 29 perempuan yang tersangkut masalah korupsi sejak tahun

2007. Tetapi kembali lagi pada kualitas integritas orang tersebut, seperti yang disampaikan oleh informan U3.

Saya dikira di zaman emansipasi tidak ada masalah, perempuan laki-laki pun saya kira sama tergantung integritasnya orangnya aja, bisa ndak dia memimpin gitu. Saya kira sah saja perempuan laki-laki dalam konteks kepemimpinan duniawi ya mas, dipimpin laki-laki gak becus ya percuma, mending dipimpin perempuan yang becus, tapi dipimpin perempuan tidak becus ya percuma. Saya kira di era emansipasi dimana kita bisa merebut peluang, laki perempuan tiada beda. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U3 mengatakan di zaman emansipasi sudah tidak ada masalah perempuan atau laki-laki, yang terpenting integritas dari orang tersebut dalam memimpin. Salah satu teori integritas mengidentikkannya sebagai kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi moral seseorang (Paine, 1994) antara perilaku yang ditunjukkannya dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu (Yukl dan Van Fleet, 1992; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Becker, 1998). Sedangkan informan U5 menegaskan permasalahan perempuan masuk ranah politik, dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap warga Negara berhak mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tertulis.

Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menyebutkan setiap warga Negara berhak mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tertulis, artinya semua warga Negara itu kedudukannya sama dalam hukum dan berpolitik, kan gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan bahwa ini tidak boleh berpolitik itu tidak ada, yang penting itu moral. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Spesifiknya yang dirujuk oleh informan U5 adalah UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam UUD tersebut tidak kaintannya batasan antara perempuan dan laki-laki untuk kedudukannya dalam hukum dan berpolitik, yang terpenting adalah moral orang tersebut. Karena mengingat banyak partai politik yang belum siap dengan para

kader perempuan untuk mengisi kuota 30% sesuai UU Parpol, sehingga terjadi banyak nepotisme dan tidak berdasarkan rekam jejak serta kompetensi politik (Subiakto & Ida, 2012). Begitupun informan U2 dengan berlatar belakang perempuan ibu rumah tangga dan anggota partai politik ini juga merasakan bangga kalau perempuan masuk ranah politik hingga menjadi pemimpin.

Saya malah bangga perempuan itu menjadi pemimpin, contohnya seperti Bu Risma, dia itu seorang perempuan tegas dan wibawa di dalam lapangan. Saya inginkan itu perempuan seperti Bu Risma, dia punya semangat yang luar biasa untuk masyarakat, untuk membangun. Jadi selama ini politisi-politisi untuk bisa menjadi suatu kedudukan dengan uang. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 mengatakan bangga perempuan dapat menjadi pemimpin, apalagi seperti Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, dikarenakan ketegasan dan wibawa dalam memimpin, serta semangat dalam melayani masyarakat. Secara tidak langsung informan U2 menginginkan semua perempuan yang masuk ranah politik setidaknya bertauladan pada Tri Rismaharini, bukan menjadi politisi dengan imbalan uang untuk menduduki suatu posisi.

Mengapa sebagian masyarakat memilih perempuan seperti Tri Rismaharini, karena menurut Soetjipto (2011), kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing. Bahkan informan U1 menegaskan kepemimpinan perempuan bukan sesuatu yang harus ditabukan, karena sejak jaman dahulu sudah ada Ratu Shima yang memimpin Kerajaan Kalingga.

Saya kira sah-sah saja dan kalau kita melihat sejarah ada Ratu Shima dari Kalingga, saya kira ini menjadi motivasi ya bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan sesuatu yang ditabukan, walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih menanggap bahwa perempuan itu sebagai konco wingking ya, artinya bukan seorang yang di depan tapi tidak masalah saya kira. Banyak walikota dan bupati yang jadi kalangan perempuan ya, kita lihat Surabaya Bu Risma, tetapi kadang-kadang juga ada

semacam dinasti ya, masyarakat kita masih menganggap mitologi itu seperti yang mistik itu masih melekat bahwa kalau orang tuanya pernah menjadi kepala desa misalkan, biasanya turun kepada tidak tahu anaknya, cucunya atau cicitnya, jadi silsilah seperti itu mau tidak mau masih ada. Jadi saya kira Ibu Tan Mei Hwa tidak masalah, sebagian masyarakat kita sudah bergeser pada sifatnya rasional, kalau memang dia baik memiliki kapasitas yang baik kenapa tidak. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sedikit mengenai Ratu Shima merupakan putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya, dilahirkan tahun 611M di Musi Banyuasin. Pada tahun 628M dipersunting oleh Pangeran Kartikeyasingha yang merupakan keponakan dari kerajaan Melayu Sribuja. Ayah Kartikeyasingha adalah Raja Kalingga yang memerintah antara tahun 632-648M, naumun tahun 648M ayahandanya wafat dan Pangeran Kartikeyasingha naik tahta dan memerintah sampai tahun 674M.

Mulai saat itulah peran permaisuri Shima dalam politik mulai kelihatan, ketika Kartikeyasingha wafat tahun 674M, Shima mengambil alih posisi suaminya sebagai ratu sampai dengan tahun 695 M dengan gelar Sri Maharani Mahissasuramardini Satyaputikeswara (Gusblero, 2014). Informan U1 mencontohkan Ratu Shima supaya menjadi motivasi untuk berpikir jauh kedepan, bukan lagi memperdebatkan sesuatu yang telah terjadi ribuan tahun lalu.

Walaupun informan U1 tidak menafikan bahwa perempuan itu memang bukan seorang yang selalu di depan, tetapi buktinya masih ada juga politisi perempuan yang dipilih oleh masyarakat seperti Tri Rismahari sebagai Walikota Surabaya, meskipun masih banyak masyarakat masih mempercayai mitos bahwa perempuan yang menjadi pemimpin itu karena dalam silsilah keluarga pejabat juga. Apapun alasannya apabila Tan Mei Hwa mempunyai kapasitas yang baik, informan U1 yakin bahwa masyarakat dapat berpikir untuk memilihnya secara rasional.

Namun tidak dengan informan U4 yang melihat perempuan masuk ranah politik tergantung Kota atau Kabupaten yang ditempati, karena setiap daerah

memiliki dominasi basis partai politik yang berbeda dan implikasinya terhadap keberhasilan dalam kontestasi politik.

Seperti yang dilansir oleh Litbang Kompas (2010) yang menyebutkan tahun 2005-2008 terdapat 5 perempuan calon kepala daerah di Jawa Timur dan 2 diantaranya berhasil. Sementara Pilkada 2010 ada peningkatan, dimana terdapat 11 perempuan yang menjadi calon kepala daerah dan 7 diantaranya berhasil (Subiakto & Ida, 2012)

Kalau saya lihat, dilihat dulu dimana basisnya Kota dan Kabupaten yang ditempati, artinya basis partai di Kota atau Kabupaten itu, kalau Nasional saya melihat okelah kalau perempuan itu, memang kalau dilihat secara Nasional dia jujur, dia menghindari korupsi kecil sehingga lebih banyak kuota laki-laki daripada perempuan meskipun perempuan ada. Makanya polwan-polwan itu ditaruh didalam ndak di luar, kalau ditaruh di luar jujur semua kena tilang semua, cuma ada kekurangannya kalau perempuan itu jadi orang nomer satu yang bisik-bisik suaminya sendiri dikuatirkan kebijakan itu melenceng tapi kalau yang jadi laki-laki istrinya tidak akan berani bisik-bisik, ya itu demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pertimbangan informan U4 tersebut dimana ketika politisi perempuan yang dilihat secara Nasional mempunyai kepribadian jujur dan menghindari korupsi, maka akan lebih banyak pemilih laki-laki yang mendukungnya meskipun tidak menutup kemungkinan perempuan juga.

Pengalaman informan U4 hidup berkeluarga puluhan tahun melihat adanya sebuah kekurangan, apabila politisi perempuan menjadi yang pertama dikhawatirkan kebijakan yang akan dibuat melenceng, karena mendengarkan suaminya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi berbeda kalau yang pertama seorang laki-laki tidak akan ada hal tersebut.

5.2.1.2 Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Menjadi Pemimpin

Segala yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa masuk ranah politik supaya dapat memimpin Kabupaten Sidoarjo, karena selama ini khalayak perempuan hanya menjadi penonton politik, sehingga keterlibatan aktif suara mereka tidak mampu diraih, hanya dalam hal jumlah atau kuantitas saja yang diperjuangkan. Bahkan menurut Falk (2010) liputan berita tentang kandidat politisi perempuan yang *stereotype*, menggambarkan perempuan lemah, tidak dapat mengambil keputusan, mempunyai masalah dengan keluarga, dan lain sebagainya merupakan hambatan bagi kandidat perempuan (Falk dalam Subiakto & Ida, 2012).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) dalam membahas Tan Mei Hwa sebagai seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Adapun sebagian besar tidak masalah memandang perempuan menjadi pemimpin, seperti Informan P2 mengatakan dengan singkat bahwa perempuan menjadi pemimpin tidak masalah.

Kalau buat pemimpin perempuan, ya bagus-bagus aja sih, nggak masalah. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Meskipun informan P1 mengakui perempuan dan laki-laki jelas berbeda karena secara alamiah sudah sangat berbeda, baik secara fisik maupun psikis.

Kalau menurut saya sih sebenarnya perempuan dan laki-laki ada bedanya, karena secara alamiah sudah sangat berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Kalau melihat perempuan sebagai seorang pemimpin, kita kembali lagi pada teori politik bahwa seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti apa yang dia perintahkan. Nah kalau yang memimpin adalah seorang perempuan, kurang di power yaitu dari uang dan agama tapi khususnya dari segi agama dimana perempuan diletakan tempat kedua setelah pria, tapi tidak ada salahnya kalau tidak ada laki-laki yang lebih baik dari perempuan itu. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tetapi untuk cara kepemimpinan baik laki-laki atau perempuan, informan P1 menyatakan kembali pada teori kepemimpinan, salah satunya menurut

Ratnaningsih (2009) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan pemimpin. Sehingga secara tidak langsung kembali pada Tan Mei Hwa sebagai calon pemimpin perempuan, apakah dapat menjadi pengaruh bagi bawahannya dalam pemerintahan nanti. Kekurangan seorang perempuan menurut informan P1 adalah cara pandang masyarakat terhadap perempuan acap kali berdasar pada ajaran agama islam yang menempatkan perempuan kedua setelah laki-laki, bahwa dalam segi keluarga dan agama seorang pemimpin hanya untuk seorang laki-laki.

Begitupun dengan pendapat informan P3 dan P7 yang mengatakan tidak masalah laki-laki atau perempuan sama saja.

Untuk perempuan atau laki-laki itu sama aja, yang penting mereka itu dapat menjalankan janji-janjinya, tugas-tugasnya, jadi mereka itu tidak hanya mengumbar janji. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ya untuk saya, cewek cowok tidak ada masalah, paling penting berani tegas, tindakannya berani, jangan asal janji tapi bukti paling penting. Karena kebanyakan pemimpin seperti Walikota, Bupati, Presiden, kebanyakan janji dan progres banyak tidak terlaksana. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena yang terpenting bagi informan P3 dan P7 menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program yang diandalkan oleh Tan Mei Hwa untuk Sidoarjo yang salah satunya terdapat di media poster pada gambar IV.19 (www.facebook.com – [uswatan.com](http://www.uswatan.com) untuk [sidoarjo](http://www.sidoarjo.go.id)). Serta tambahan dari informan P7 yakni seorang pemimpin itu harus berani tegas dan tindakannya berani, bukan yang janji palsu atau untuk kepentingan partai politik pengusungnya saja namun tidak ada tindakan nyata untuk rakyat.

Disamping itu informan P4 melihat Tan Mei Hwa seorang perempuan menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo tidak masalah karena posisinya hanya sebagai wakil bupati.

Kalau menurut saya sih gpp, masalahnya kan dia mencalon sebagai wakil bupati bukan yang bupati. Bukan salah kalau jadi bupati, tapi kurang efisien ditakutkan dia itu mentalnya kurang kuat, itu aja sih. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena latar belakangnya sesama perempuan, informan P4 secara tidak langsung ikut merasakan apabila Tan Mei Hwa menjadi bupati akan kurang efisien dan mentalnya kurang kuat dalam persaingan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Efisien sendiri menurut Anthony (2005) rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input, secara tidak langsung informan P4 mengkhawatirkan apabila hasilnya kurang maksimal ketika posisinya sebagai bupati, karena akan banyak yang mengintervensi atau memberi tekanan pada Tan Mei Hwa. Bahkan informan P6 juga mendukung informan P4, bahwa tidak masalah kalau menjadi pemimpin dengan posisi wakil bupati.

Kalau wakil bupati ngga masalah, contohnya Bu Risma sebagai walikota, buktinya bisa memberantas gang dolly, tegas itu kan. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tetapi tidak menafikan apabila Tan Mei Hwa menjadi bupati tidak masalah, karena informan P6 mencontohkan seorang Tri Rismaharini Walikota Surabaya seorang perempuan berhasil memberantas atau menutup gang dolly yang belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014).

Namun tidak dengan informan P5 yang berharap pemimpin lebih baik laki-laki, meskipun sebenarnya mengetahui sebuah emansipasi perempuan.

Kalau menurut agama saya kan pemimpin lebih baik laki-laki, tapi kalau memang Beliau mempunyai kemampuan ya gpp juga, karena saya juga

mendukung emansipasi wanita, ya kalau bisa seorang pemimpin itu laki-laki.
(Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Melihat latar belakang informan P5 sebagai mahasiswi, dipastikan memiliki pembendaharaan ilmu yang lebih luas dalam menyikapi sebuah fenomena. Namun dalam memilih pemimpin kepala daerah, informan P5 menggunakan ajaran agama sebagai landasan yang utama dibandingkan sebuah emansipasi perempuan. Sebenarnya melihat pemikiran informan P5 sudah disampaikan oleh Soetjipto (2011), dimana perilaku memilih atau *voting behavior* perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada perempuan yang ada, dimana kuatnya nilai patriarki dengan kepercayaan “laki-laki adalah imam” begitu kuat.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) dalam membahas Tan Mei Hwa sebagai seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Adapun sebagian besar tidak masalah memandang perempuan menjadi pemimpin, karena menurut informan U1 seorang pemimpin dapat dilahirkan atau diciptakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Saya kira kenapa tidak ya, bisa-bisa saja yang perlu digaris bawahi pemimpin kan bisa lahir dan diciptakan sesuai kebutuhan masyarakatnya kan gitu, yang terjadi di Sidoarjo ini kebetulan secara umum kepemimpinan Pak Saiful ini kan cukup baik artinya tidak ada sesuatu yang mendasari adanya perubahan yang radikal kecuali pemimpin kita maaf Pak Saifulilah ini terjadi sesuatu yang dia kena kasus korupsi atau lainnya itu pasti energi untuk menuju kesana akan lebih kuat. Jadi untuk seorang Tan Mei Hwa menjadi seorang pemimpin saya kira tidak apa-apa, saya kira tidak ada sesuatu aturan dalam Undang-Undang yang mengharuskan seorang perempuan harus begini-begini kan tidak, saya kira sama kedudukannya dalam hukum. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sehingga tidak masalah apabila Tan Mei Hwa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo, karena tidak ada Undang-Undang yang melarang dan kedudukannya sama dalam hukum. Namun hanya saja Saiful Ilah adalah *incumbent* yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode

sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015), menjadikan Informan U1 melihat situasi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang tidak memiliki kejadian berarti yang menjadikan masyarakat berubah secara radikal terhadap kepemimpinannya, seperti korupsi atau hal negatif lainnya. Jadi secara tidak langsung informan U1 memberikan gambaran persaingannya akan berat melawan *incumbent* yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo. Karena masyarakat bukanlah sosok yang sederhana dengan mudah menentukan kebulatan kehendaknya, tetapi kenyataannya masyarakat merupakan himpunan plural yang di dalamnya terdapat banyak kepentingan dan kehendak, yang kadang-kadang tidak sekedar saling berbeda, melainkan juga cenderung saling berbenturan, bertentangan dan saling berusaha ingin mengalahkan. Kadang ada kehendak atau kepentingan tertentu yang dikemas sedemikian rupa atas nama mayoritas, atau modernitas, kemajuan, stabilitas, atau lainnya yang hendak mengatasmakan masyarakat secara keseluruhan.

Namun tidak dengan informan U2 yang melihat Tan Mei Hwa layak nya Basuki Tjahja Purnama, seorang Tionghoa yang menjadi Gubernur DKI Jakarta karena situasi Joko Widodo telah menjadi Presiden Republik Indonesia.

Saya sepakat bahwasanya pemimpin perempuan diciptakan juga tergantung sesuai situasi dan kondisi, mungkin kalau saya lihat Beliau karena Pak Ahok sebelumnya memimpin Jakarta akhirnya dimunculkan Tionghoa-Tionghoa selanjutnya, itu karena situasi dan kondisi saja kalau saya melihat, kalau secara ideologi kita sudah tidak membolehkannya. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Begitupun dengan Tan Mei Hwa, informan U2 yakin bahwa Tan Mei Hwa dibentuk menjadi pemimpin karena situasi kondisi dalam kepentingan tertentu, karena bagi informan U2 yang utama secara ideologi tidak sejalan, ideologi disini

menurut Firmanzah (2008) meliputi nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon dalam suatu struktur sosial masyarakat. Apabila dihubungkan dengan ideologi yang dimaksudkan oleh informan U2, Tan Mei Hwa dibentuk karena kepentingan partai politik pengusungnya yang melihat akan potensi pendukung dari seorang pendakwah cukup banyak dan memberikan peluang besar dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Sidoarjo. Terlepas sebuah kepentingan apapun itu, kembali lagi untuk menjadi pemimpin sebenarnya tidak semata hanya menduduki suatu jabatan paling atas dalam pemerintahan, tetapi ada sebuah jiwa kepemimpinan layaknya yang dikatakan oleh informan U7.

Menurut saya silahkan saja menjadi pemimpin, siapa aja boleh cuma jadi leadership itu memang sulit kalau di Birokrasi, kalau secara politis memang karena ini Pilkada pemimpin jadi panglima di daerah, yang penting bagaimana dia nanti dia memimpin ketika jadi pemimpin. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U7 menekankan bahwa kepemimpinan di birokrasi sulit, hal tersebut dikatakan menurut pengalamannya yang telah mengabdikan menjadi TNI Angkatan Udara puluhan tahun. Meskipun menurut informan U7 tidak masalah Tan Mei Hwa seorang perempuan menjadi pemimpin, yang penting bagaimana cara Tan Mei Hwa memimpin Kabupaten Sidoarjo kedepan. Namun bagi informan U6 tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin, karena masih ada lembaga yang mengontrol kinerjanya.

Memang Tan Mei Hwa sebagai pemimpin tidak masalah yang penting dia bisa menata Sidoarjo karena nanti kan ada controlling dari DPR dan sebagainya. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pengalaman informan U6 yang pernah mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif dua kali pada tahun 2009 dan 2014, menjadikan tenang dalam menyikapi kekhawatiran mengenai hal tersebut. Informan U6 mengetahui kepala daerah nanti pastinya akan diawasi oleh DPR, dan telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2014

Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo (dprd-sidoarjokab.go.id). Sehingga tidak mungkin bekerja sendiri dan berpikir sendiri dalam memutuskan kebijakan, dan hal tersebut senada dengan informan U5.

Jujur kalau saya sebagai lelaki dipimpin oleh istri saya tidak mau kalau dirumah, tapi tidak salah kalau Beliau jadi pemimpin saya karena disitu ada DPR sebagai kontrol masyarakat, sebagai kontrol pemerintah, ada elemen-elemen lain, ada ormas, ada LSM, ada staf-staf ahli, jadi saya kira tidak ada permasalahan dalam pemerintahan sesuai kontrol. Kalau di rumah tangga saya jelas tidak mau dipimpin istri saya. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena informan U5 sadar bahwa pemimpin di lingkup rumah tangga dengan sistem pemerintahan jelas berbeda, bahwa dalam segi keluarga dan agama seorang pemimpin hanya untuk seorang laki-laki. Berbeda halnya ketika Tan Mei Hwa sebagai pemimpin di pemerintahan masih banyak lembaga yang mengawasinya, seperti DPR, Pemerintah, Staf Ahli, Ormas, dan LSM. Tentunya dalam DPR terdapat juga sesama perempuan yang siap saling mengawasi, meskipun dengan jumlah perempuan dari data tahun 1992-1997 terdapat 63 perempuan anggota DPR atau sekitar 12,3% dari seluruh jumlah anggota DPR. Tahun 1997-1999 terdapat 57 perempuan anggota DPR atau sekitar 11,5% dari seluruh jumlah anggota DPR, Pada tahun 1999-2004 terdapat 45 perempuan atau 9% dari seluruh jumlah anggota DPR (Subiakto dan Ida, 2012). Melihat masih kurangnya keterwakilan jumlah kuota untuk perempuan, informan U4 mengatakan tidak masalah perempuan ikut serta, karena Pemerintah sendiri sudah memperbarui UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, dimana muncul wacana tentang kuota perempuan 30% pada Pemilu yang harus dilakukan pada pemilu 2009 (Soetjipto, 2011).

*Memang dalam Undang-Undang pecalegkan kuota perempuan 30%, pelan-pelan naik mungkin nanti bisa 40% - 50%, harapan saya demikian meskipun tidak ada Undang-Undang berapa persen, kesempatan Pilkada ini semuanya boleh mencalonkan. Saya katakan tadi memang perempuan itu jujur, tidak berani korupsi, dan tidak menyimpang, kekurangannya yang bisik-bisik bukan orang lain tetapi suaminya memang itupun tertentu, dimanapun perempuan itu saklak, di Sidoarjo demikian kalau boleh diganti yang sekarang diganti perempuan saja, diganti Tan Mei Hwa kalau boleh...hehehe (**Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015**)*

Informan U4 berharap kuota untuk perempuan perlahan dapat ditingkatkan, karena perempuan lebih lurus jalan pikirannya dan memiliki kelebihan dalam hal kejujuran, tidak berani korupsi, dan tidak menyimpang, hanya saja yang ditakutkan ikut campur seorang suami meskipun hanya tertentu. Sehingga dengan begitu yakin terhadap Tan Mei Hwa menjadi pemimpin, informan U4 berandai Bupati Kabupaten Sidoarjo saat ini dapat digantikan secara langsung sekarang juga tidak masalah tanpa adanya Pemilihan Kepala Daerah. Namun hal tersebut tidak mungkin terjadi, kecuali salah satunya mengalami sebuah musibah seperti meninggal dunia atau diberhentikan dapat merujuk pada UU Pemda Pasal 29 ayat (2) jo dan UU Pemda Pasal 29 ayat (1) (www.hukumonline.com).

Peluang Tan Mei Hwa menjadi pemimpin sebenarnya diakui oleh informan U3, karena terbukti banyak pemimpin perempuan juga dapat sukses dari pada laki-laki, tergantung strategi yang dimiliki oleh kandidat dalam kontestasi politik.

Saya kira kemungkinan besar Tan Mei Hwa bisa jadi pemimpin, cuma bagaimana manajemen politik dia lakukan dan bagaimana dia membangun pencitraan. Pertama, dia harus bisa membaca momentum, kalau saat ini saya lihat terlalu berat sangat ceroboh, makanya saya katakan tadi dijadikan boneka, kalau mungkin di tahun depan khusus Sidoarjo dimana Bapak Saiful tidak bisa menjabat lagi itu momentum yang sangat bagus, bagaimana dia memulai awal membangun pencitraan dari dasar bahwa yang namanya Tan Mei Hwa itu bisa dari segala manapun, dari pendidikan, dari hukum, dari budaya buat pencitraan bahwa dia itu dewa di Sidoarjo karena dewa itu kesempatannya lebih besar. Karena itu dibuat pencitraan yang bagus bagaimana dia bisa segalanya di Sidoarjo dan itu kemungkinan untuk 5 tahun kedepan, saya yakin bisa, kita lihat aturannya nggak usah ngomong masalah agama, dalam aturan Undang-Undang Dasar kita tidak menekankan seorang pemimpin perempuan nggak boleh kan nggak, kita real aja kan toh banyak

pemimpin perempuan yang lebih sukses daripada pemimpin laki-laki ini dalam konteks kepemimpinan Negara. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi kemenangan dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan yang disarankan oleh informan U3, dimana pertama Tan Mei Hwa dapat membaca momentum dalam perhelatan kontestasi politik, karena yang dihadapi adalah *incumbent* mencalonkan kembali dan sudah terbukti nyata hasil kerjanya, sehingga waktu yang tepat yakni 5 tahun kedepan ketika *incumbent* sudah tidak dapat mencalonkan kembali karena sudah dua periode. Kedua, membangun citra dari dasar bahwa seorang Tan Mei Hwa ibarat dewa yang memiliki kemampuan segalanya baik pendidikan, hukum, budaya, dll. Citra merupakan hasil dari *personal brand* yang telah terbangun dengan kuat, seperti yang dikatakan David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan sebuah *personal brand* yang kuat terdapat tiga hal karakteristik yang menyatu, yakni kekhasan, relevansi, dan konsistensi. Serta masyarakat terhubung dengan *personal brand* idealnya harus pada dimensi *personal brand* yakni karakter, kompetensi, dan kekuatan (Haroen, 2014). Sehingga dengan pencitraan yang bagus, informan U3 memastikan sebuah memungkinkan kesempatan yang kuat 5 tahun kedepan. Begitupun dengan informan U8 yang melihat peluang Tan Mei Hwa adalah 5 tahun kedepan.

Ibu Tan Mei Hwa saya rasa tidak apa-apa jadi pemimpin, kenapa tidak boleh kan tidak ada Undang-Undangnya, ya itu tadi bagaimana nanti dia bisa mimpin atau tidak. Jadi niatnya itu memang untuk jadi pemimpin untuk memimpin rakyat dalam arti dia itu juga ibadah, jangan sampai nanti mimpin dengan harapan mencari rejeki yang lain, tidak bisa itu tidak boleh karena saya rasa tidak akan kesampaian, tapi ya itu untuk Sidoarjo paling tidak 5 tahun lagi. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebab Undang-Undang saja tidak melarang, kenapa Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus diragukan menjadi pemimpin. Informan U8 melihat Tan Mei Hwa kelak memimpin Kabupaten Sidoarjo dengan positif, karena memimpin dengan

harapan memperoleh pahala bukan sekedar mencari rejeki atau harta duniawi dan itulah yang seharusnya tercermin dari seorang ustadzah atau pendakwah.

5.2.1.3 Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Menjadi Pemimpin

Tidak sampai disitu saja Tan Mei Hwa dilihat sebagai seorang perempuan, karena menurut Suryadinata (2002) terdapat tiga hal penting dalam menganalisis politik Indonesia, yaitu Etnisitas, Agama dan Militer. Pada pemilihan umum 1955 partai yang menggunakan identitas etnik tidak ada yang unggul. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemenang pemilu juga bukanlah partai yang menggunakan identitas agama. PNI merupakan partai terbesar yang menunjukkan identitas nasionalis lebih diterima dibandingkan identitas etnik maupun agama (Feith dalam Widyawati, 2014).

Sedangkan Pemilu 1971 pada Orde Baru pergolakan politik yang berkaitan dengan isu etnisitas dan agama tidak banyak dibicarakan serta tidak muncul dalam partai, karena menurut Suryadinata (2002) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak diperkenankan dibicarakan secara terbuka. Bahkan isu etnisitas dan agama belum lama muncul menjelang pemilu 2009, *Rakyat Merdeka* 11 Maret 2008 mengangkat berita berjudul: Bachtiar Chamsyah Mau Jadi Presiden, “Tapi Mana Mungkin, Saya Bukan Orang Jawa”. Pernyataan Bachtiar Chamsyah bisa diartikan dalam dua hal: pertama, etnisitas merupakan salah satu variabel yang menentukan elektabilitas kandidat. Kedua, pernyataan Bachtiar Chamsyah merupakan sebuah teks yang menunjukkan bahwa selama ini terjadi hegemoni dalam pembentukan pesan seolah-olah hanya orang Jawa yang pantas menjadi Presiden. Begitupun dengan Tan Mei Hwa perlu dilihat bagaimana masyarakat Kabupaten Sidoarjo

dalam menyikapi sebuah etnis Tionghoa yang melekat pada seorang pendakwah Tan Mei Hwa menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) semua mengatakan tidak masalah dengan Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi calon pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Adapun informan P7 yang secara singkat menyatakan tidak masalah meskipun berbeda etnis.

Ya ngga masalah mas kalau menurutku. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Begitupun dengan informan P2 yang tidak masalah pemimpin bukan pribumi, karena yakin seperti halnya Basuki Tjahja Purnama yang berhasil diterima dan memukau warga Provinsi DKI Jakarta akan kepemimpinannya.

Kalau menurut saya ngga ada masalah, kalau pemimpin yang bukan pribumi seperti Ahok yang memimpin Jakarta, Beliau kan latar belakangnya bukan asli Jakarta dan orang Cina, tidak menutup kemungkinan orang tersebut layak memimpin suatu daerah. Negara ini Negara Pancasila, ngga harus asli pribumi, Indonesia kan luas dari Sabang sampai Merauke dan berbagai suku. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sedikit melihat latar belakang Basuki Tjahja Purnama yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, Desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Menimba ilmu perguruan tinggi di Jakarta memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan lulus mendapatkan gelar Insiyur Geologi pada tahun 1989. Ketika pada tahun 2012 nama Ahok baru dikenal secara meluas karena dipilih Joko Widodo sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai Gerindra, meskipun melalui dua tahap Pemilukada akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org).

Dengan membandingkan latar belakang antara Basuki Tjahja Purnama dengan Tan Mei Hwa, informan P2 melihat kesamaan yakni keduanya bukan orang asli kota yang akan dipimpin, bahkan dari etnis yang berbeda. Hal tersebut yang menjadikan informan P2 yakin Tan Mei Hwa tidak menutup kemungkinan memiliki nasib yang sama, dimana semua kembali pada dasar Negara Indonesia adalah Pancasila yang harus dijunjung tinggi, sebab Indonesia berbagai suku dari Sabang sampai Merauke. Apapun latar belakangnya informan P5 yakin masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki pemikiran yang terbuka dengan adanya etnis Tionghoa mencalonkan sebagai wakil bupati.

Kalau menurut saya ya ngga masalah, karena masyarakat Sidoarjo berpikiran terbuka, kita kan ngga bisa melihat dari etnisnya saja, ini orang Cina atau bukan dan saya yakin orang Sidoarjo ngga rasis ya, karena biasanya menurut tanggapan tetangga-tetangga saya kalau lihat dakwah Ibu Tan Mei Hwa juga yang dikomentari mengenai dakwahnya, bukan mengenai orang Cina atau Jawa. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Keyakinan informan P5 tersebut didasari oleh tanggapan tetangga disekitar kediamannya, apabila melihat Tan Mei Hwa berdakwah tidak mengomentari secara SARA masalah etnis Tionghoa atau Jawa melainkan dakwahnya. Dimana dalam artikel Ibnu Dawam Aziz, SARA merupakan kepanjangan dari Suku, Agama, RAS dan Aliran, dan satu metode pendekatan sosiologis primordialistik yang terdiri dari empat pendekatan tersebut terbagi dalam berbagai golongan / unsur tradisional primordialistik yang lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan metode untuk mengurai dan melihat realita mengenai Suku, Agama, RAS dan Aliran yang ada di Negeri ini termasuk permasalahan yang bakal muncul dan jalan keluar yang harus ditempuh (Aziz, 2012). Maka dari itu informan P5 yakin masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menilai seseorang tidak hanya berdasarkan etnis, namun ada nilai lain atau jalan keluar lain untuk menerima Tan Mei Hwa. Serta sudah berbeda

dengan Pemilu 1971 pada Orde Baru pergolakan politik yang berkaitan dengan isu etnisitas dan agama tidak banyak dibicarakan serta tidak muncul dalam partai, karena masyarakat masih berpikiran seperti apa yang dikatakan Suryadinata (2002) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak diperkenankan dibicarakan secara terbuka.

Meskipun masih belum mengetahui dengan pasti, apakah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat menerima etnis Tionghoa sebagai calon pemimpin, tetapi informan P6 berharap Tan Mei Hwa ketika menjadi pemimpin dapat menjadi contoh pada masyarakat untuk saling berbaur dan menghargai satu sama lain.

Ngga sih, Tan Mei Hwa kan orang Cina dan mayoritas orang Sidoarjo orang Jawa, mungkin bisa berbaur dengan orang Jawa. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan informan P4 merasa baik-baik saja, karena semboyan Negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dimana secara tidak langsung implikasi dari informan P4 yakni perbedaan yang beraneka ragam di Indonesia, mulai dari bahasa, suku, agama, keyakinan, budaya, dll harusnya dapat tetap rukun dan teguh dalam satu Indonesia.

Menurut saya sih gpp, semboyan Negara kita aja Bhineka Tunggal Ika, jadi menurut saya ya gpp. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Meskipun Indonesia memiliki sebuah semboyan Bhineka Tunggal Ika, tetapi masih belum hilang sejarah buruk mengenai etnisitas di Indonesia, seperti yang dilansir artikel Rizka Diputra yakni peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi masyarakat. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik, bahkan penjarahan dan pembakaran terjadi dimana-mana. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 berujung pada aksi

kerusuhan pada penghujung rezim Orde Baru pimpinan almarhum Soeharto. Tidak sampai di situ saja, kerusuhan yang terjadi malah menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa, dimana banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Serta paling buruk massa pribumi yang melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para wanita dari etnis Tionghoa (Diputra, 2016). Dengan adanya sejarah tersebut dan menghindari terjadi kembali, setidaknya seperti yang disampaikan oleh informan P3 yakni baik berbeda suku ataupun agama, harapannya Tan Mei Hwa dapat mengikuti budaya Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo tidak masalah.

Kalau menurut saya entah berbeda suku atau entah berbeda agama, asal Bu Tan Mei Hwa dapat mengikuti budaya kita di Indonesia, lebih tepatnya di Sidoarjo ini. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Begitupun informan P1 menyatakan ketika berbagai faktor tidak dapat mengubah pola pikir untuk positif terhadap etnis dan agama, yang terpenting adalah Tan Mei Hwa sebagai warga Negara Indonesia yang sah, itu lebih dari cukup untuk tidak menolak sebuah kriteria kandidat dalam politik.

Mungkin di tahun 2015 ini bukan saatnya lagi kita melihat dia etnisnya apa, yang pasti dilihat Bu Tan Mei Hwa warga Negara Indonesia, sudah itu cukup dan tidak harus melihat dia etnis apa. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena suatu hal yang mustahil dan tidak akan terjadi, apabila calon kandidat yang akan menjadi pemimpin benar-benar datang dari Negara lain dan ingin menguasai Negara Indonesia, oleh karena itu informan P1 memastikan Tan Mei Hwa yang sebenarnya asli Indonesia sudah dapat dipastikan ingin bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) dalam membahas Tan Mei Hwa

sebagai seorang etnis Tionghoa menjadi seorang pemimpin, sebagian besar memandang belum saatnya dan masih lebih memilih sesama pribumi, seperti yang dikatakan oleh informan U2.

Kalau saya mau jujur ya saya suka pribumi mas, yah karena kita Negara Indonesia..hahaha (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 dengan jujur terbuka mengatakan lebih suka orang pribumi, dikarenakan Negara ini adalah Indonesia dan secara tidak langsung diasumsikan menegaskan bahwa bukan Negara Cina. Hal tersebut terjadi, karena menurut informan U7 tradisi masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang masih sulit menerima etnis lain memimpin mereka, dan masih banyak calon pemimpin dari pribumi yang dapat dipilih.

Kalau menurut saya tradisi masyarakat kita ini masih sulit untuk menerima seorang etnis ya, kita kan masih banyak calon pemimpin-pemimpin kita saja yang dipilih, sekian. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Adapun sebenarnya informan U8 dan masyarakat yang menganut agama islam mengetahui bahwa dalam sejarah agama islam di Indonesia, wali-wali yang menyebarkan ajaran islam adalah banyak dari orang etnis Tionghoa.

Untuk umum dulu ya saya rasa tidak ada masalah karena etnis apapun juga bisa jadi pemimpin apalagi dulu menurut sejarah bahwasanya wali-wali kita banyak yang dari etnis Cina, itu kan pemimpin juga tapi kalau untuk Sidoarjo saya rasa ini belum waktunya. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pernyataan mengenai wali yang dimaksud informan U8 adalah walisongo, dimana disalah satu buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, membeberkan nama-nama asli Walisongo yang asli Cina atau Tionghoa dan sangat jauh dari kesan berbau Arab. Salah satunya Prof. Slamet Muljana menyimpulkan bahwa Sunan Ampel aslinya bernama Bong Swi Hoo, kemudian menikah dengan Ni Gede Manila

yang merupakan anak Gan Eng Cu (mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423) (Muljana, 2008). Meskipun mengetahui sejarah islam ke Indonesia, tetapi menurut informan U8 untuk Kabupaten Sidoarjo masih belum waktunya, termasuk dirinya sendiri. Begitupun dengan informan U6 kurang setuju etnis Tionghoa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo.

Kalau etnis Tionghoa saya kurang setuju ya kalau ada pribumi yang lebih pandai kenapa tidak milih pribumi yang lebih pandai. Saya lebih menyukai orang pribumi orang Indonesia asli dan mereka seorang muslim. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 berpikir kalau ada pribumi yang lebih pandai kenapa harus memilih etnis Tionghoa, sebab pribumi merupakan asli rakyat Indonesia yang diharapkan lebih mencintai rakyatnya sendiri, apalagi ditambah kandidat tersebut memiliki status agama islam lebih diutamakan. Pendapat informan U6 berkaitan mendukung pendapat informan U3 mengenai kriteria kandidat pemimpin di Kabupaten Sidoarjo akan etnis dan agama saling berkaitan dan sangat berpengaruh sekali di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut sebenarnya juga diungkapkan oleh Eriyanto (2008) pengaruh etnisitas dan agama terhadap perilaku memilih dalam Pemilu maupun Pilkada sangat kontekstual pengaruhnya, bergantung pada daerah dan karakteristik sosial budaya masyarakat.

Untuk Sidoarjo memang untuk etnis sangat berpengaruh sekali kecuali dia mempunyai kelebihan yang sangat dan sangat luar biasa, kalau kelebihannya standart-standart saja sulit mas. Etnis apapun terjadi permisi ya saya islam apapun yang terjadi tidak mau dipimpin oleh agama lain kecuali dia punya kelebihan dalam kontek kerakyatan. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kecuali kandidat yang akan menjadi pemimpin tersebut memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dibandingkan kandidat yang pernah ada, bahkan informan U3 sendiri mengakui bahwa tidak ingin dipimpin oleh pemimpin agama lain dan pengecualian berlaku apabila memiliki kelebihan yang luar biasa dalam konteks

kerakyatan. Informan U3 memberikan pengecualian terhadap pemimpin dengan agama lain, sama halnya yang dikatakan oleh Mahbub Ma'afi Ramdhan sebagai Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam artikelnya “Kebolehan Mengangkat Pemimpin Non-Muslim”, jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang dari kalangan umat Islam atau tampak adanya pengkhianatan pada pelaksana dari kalangan umat Islam. Dalam konteks tersebut boleh menyerahkan jabatan padanya agama lain yang karena adanya keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan sesuatu, maka calon pemimpin dari agama lain diangkat untuk mengurusinya. Meskipun demikian, bagi pihak yang mengangkatnya, harus selalu mengawasi orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya dari mengganggu terhadap siapapun dari kalangan umat Islam (Ramdhan, 2014).

Tetapi pemikiran lain dari Informan U1 yang menyampaikan sebenarnya tidak lagi saatnya berbicara masalah etnis atau hanya orang tertentu yang dapat menempati tempat teratas sebagai pemimpin.

Sebenarnya untuk saat ini kita tidak bicara lagi etnis atau apa ya in the right man in the right place lah, saya kira kalau memang bagus punya leadership yang kuat saya kira kenapa tidak lah ya, saya kira saat ini banyak juga kok orang-orang etnis Tionghoa mereka justru memiliki semangat nasional yang besar ya, saya kira tidak ada masalah. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kepemimpinan yang kuat adalah hal utama yang ditekankan oleh informan U1 dalam menempati tempat teratas, bukan dari segi etnis yang diutamakan karena saat ini banyak orang etnis Tionghoa yang justru memiliki semangat nasional yang lebih besar dari pada orang pribumi. Nasionalisme etnis Tionghoa dibuktikan oleh Arif Supriyono sebagai wartawan republika dalam artikelnya “Etnis Tionghoa dan Pusaran Elite Kekuasaan”, bahwa pada masa Orde Baru nama etnis Cina pertama

yang menjadi menteri adalah Bob Hasan (The Kian Seng), pengusaha kayu tersebut menjadi menteri perindustrian dan perdagangan pada era terakhir Presiden Soeharto. Kemudian menteri perekonomian yakni Kwik Kian Gie pada tahun 1999-2000, yang selanjutnya bergeser menjadi menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan kepala bappenas pada tahun 2001-2004. Bahkan Amir Syamsuddin dengan nama asli Tan Toan Sin ini merupakan menteri hukum dan hak asasi manusia pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disusul oleh Marie Elka Pangestu sebagai menteri perdagangan lalu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dan yang paling akhir adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Nasionalisme dari beberapa etnis Tionghoa yang telah diungkapkan oleh Arif Supriyono menjadikan informan U5 memiliki keyakinan, bahwa etnis Tionghoa sudah menjadi bagian dari warga Negara Indonesia yang hak dan kewajibannya sama dalam hukum dan pemerintahan.

Eee...Etnis Tionghoa selama dia udah masuk jadi warga Negara Indonesia hak dan kewajiban sama didalam hukum dan pemerintahan, ya itu aja. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi informan U4 melihat sudut pandang lain, selain permasalahan apakah etnis Tionghoa atau pribumi yang akan menjadi calon pemimpin di Kabupaten Sidoarjo, tetapi perbedaan antara orang pribumi dan orang Tionghoa dalam memenangkan kontestasi Pilkada.

Kalau saya setuju karena memang mungkin Ahok bagian dua tapi ini W2nya, ya toh. Sementara Ahok sudah berhasil karena biasanya tanpa tendensi, rata-rata Cina kan kaya punya duit begitu dia berkiprah nanti kembalinya mungkin tidak diperhitungkan, lain dengan kita-kita ini mau maju nanti harus kembali modal kan gitu, BEPnya berapa kan gitu kalau Cina sudah siap duitnya artinya bolehlah dia tampil untuk didepan. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U4 pada intinya setuju dengan adanya pemimpin dari etnis Tionghoa, layaknya Basuki Tjahja Purnama yang akrab dipanggil Ahok sebagai

gubernur DKI Jakarta, tetapi Tan Mei Hwa sebagai wakil bupati. Mengapa informan U4 setuju pemimpin dari etnis Tionghoa, dikarenakan melihat apabila etnis Tionghoa yang memenangkan Pilkada, tidak akan ada tendensi mencari uang dari posisinya sebagai kepala daerah untuk mengembalikan modalnya dalam mencapai posisi tersebut, karena rata-rata orang Tionghoa sudah mapan dalam ekonomi. Berbeda apabila orang pribumi memenangkan Pilkada, maka perhitungannya harus BEP (*Break Even Point*) yang artinya analisis untuk menentukan dan mencari harga sejumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan (Apriani, 2016). Dasar pendapat informan U4 atas perhitungan tersebut karena pengalamannya sebagai mantan Ketua Partai Pemuda Indonesia tahun 2009-2014 dalam mengelola sebuah partai politik.

5.2.1.4 Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Beragama Muslim

Menurut Eriyanto (2008) pengaruh etnisitas dan agama terhadap perilaku memilih dalam Pemilu maupun Pilkada sangat kontekstual pengaruhnya, bergantung pada daerah dan karakteristik sosial budaya masyarakat. Tetapi kenyataannya pengaruh tersebut merambah hingga tingkat nasional, yang terjadi pada pemilu tahun 2009 terdapat isu etnisitas dan agama ketika Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pemilihan Presiden. Isu etnisitas tersebut sebagai advokasi politik yang dilontarkan melalui slogan “Pasangan Nusantara”, dimaksudkan adalah perpaduan antara kandidat yang berasal dari luar Jawa, yaitu Jusuf Kalla dari Makasar dan Wiranto dari Jawa. Begitupun isu agama dilontarkan melalui slogan “Istri Muslimah” dan “Jilbab Loro”, terkandung makna bahwa pasangan JK-

Wiranto merupakan representasi dari umat Islam, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan mendapatkan simpati sebagai kandidat yang paling Islami. Hasilnya ternyata pada pemilihan presiden 2009 perolehan suara JK-Wiranto 12,41%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan partai yang mengusung mereka, yakni Partai Golkar (14,45%) dan Partai Hanura (3,77%).

Maka dari itu Tan Mei Hwa sebagai calon pemimpin daerah di Kabupaten Sidoarjo, perlu dipertanyakan terkait erat dengan pengaruh tersebut karena dirinya memiliki keturunan etnis Tionghoa, tetapi menganut agama muslim. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) semua mengatakan tidak masalah dengan Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menganut agama islam. Seperti yang dikatakan oleh informan P1 yang menerima berdasarkan Al-Quran atau ajaran islam.

Hmm menurut saya ya tidak ada masalah, karena itu tadi di Al-Quran, Allah berfirman Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, ada lak-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, semuanya berbeda-beda, jangankan etnis yang berbeda-beda, antar beragama pun Allah berfirman “untukmu agamamu, untukku agamaku”, jadi toleransi sangat diajarkan di islam. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P1 menjelaskan firman dalam Al-Quran atau ajaran islam, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, ada laki-laki-perempuan, ada langit-bumi, dan semuanya berbeda-beda. Begitupun dengan informan P4, P5, dan P6 yang sah-sah saja dan tidak ada masalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama muslim.

Kalau untuk aku sih sah-sah saja. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kalau untuk saya ngga ada masalah. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Iya sama...hehe (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan informan P6 dan P7 mencontohkan banyak agama Kristen atau Katholik yang pindah ke Islam, meskipun terkadang kurang dalam mendalaminya.

Ya nggak ada masalah sih. Karena banyak juga contohnya kristen banyak yang pindah ke islam, tapi terkadang kurang dalam mendalaminya. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kalau menurut saya nggak masalah jadi mualaf, entah itu dari orang kristen atau katholik nggak ada masalah. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Salah satunya artikel dari Djibril Muhammad yang berjudul “Mualaf Di Indonesia Alami Peningkatan”, yang menjelaskan pada tahun 2012 sudah tercatat sebanyak 193 orang telah memeluk agama islam, jika diuraikan untuk bulan Juni 2012 sudah 33 orang, dengan rincian 22 warga negara Indonesia dan 11 orang merupakan warga negara asing (Muhammad, 2012). Tetapi menurut informan P3, masalah agama, kembali pada setiap pribadi masing-masing.

Kalau untuk aku sih, agama itu terserah ya entah agama apapun sama, karena agama islam itu menerima segala etnis dan dari etnis manapun dapat beragama islam, asalkan menjalani perintah-perintah agama islam. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P3 berpendapat agama islam menerima segala etnis manapun, asalkan dapat menjalani perintah-perintah ajaran agama islam.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) semua juga mengatakan tidak masalah dengan Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menganut agama islam. Adapun informan U1 bangga, bahkan berterima kasih pada Tan Mei Hwa bisa memeluk agama islam.

Sebagai seorang muslim saya tentu banggalah, berterima kasih sebagian kecil etnis Tionghoa termasuk Tan Mei Hwa bisa memeluk agama islam, tapi masalahnya bukan berhenti disitu, sebenarnya kalau kita ingin menciptakan pemimpin tentu kita juga harus menyediakan ruang untuk itu. Bagaimana kita menyediakan ruang itu, artinya mulai dari pendidikan madrasah, sekolah-sekolah formal juga harus memungkinkan anak-anak didik kita menjadi calon pemimpin masa depan. Jadi saya berpikiran positif sajalah bahwa mereka memeluk islam tentu mereka dengan kesadaran sendiri ya, bukan karena

dipaksa atau hal lain ya, saya kira begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi tidak berhenti sampai disitu, menurut informan U1 perlu adanya kesinambungan mengenai ajaran islam baik pendidikan madrasah ataupun pendidikan formal untuk masa yang akan datang. Sehingga informan U1 berharap siapapun yang memeluk agama islam dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, baik lulusan madrasah ataupun sekolah formal. Karena menurut Syukron Sajadi dalam artikelnya “Madrasah dan Sekolah”, menjelaskan madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar yang berbeda dengan sekolah, meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana diajarkan di sekolah, madrasah memiliki karakter tersendiri yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sedangkan sekolah kegiatan utamanya, yaitu mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral atau budi pekerti dan estetika atau seni, dan untuk mendampingi dalam kegiatan anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk berkembang (Sajadi, 2014).

Begitupun dengan informan U2 yang sangat senang sekali, apalagi Tan Mei Hwa sebagai minoritas dapat menganut agama islam.

Kalau saya pribadi mas sebagai orang islam ya sangat senang sekali apalagi minoritas mau masuk islam, cuma yang saya amati tuh gini setelah mereka mualaf terkesan eksklusif gitu lo, terkesan tidak bisa membaur dengan kita padahal dia minoritas. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Hanya saja menurut pengamatan informan U2, ketika etnis Tionghoa menjadi mualaf, tekesan eksklusif dan tidak dapat membaur dengan masyarakat lokal, padahal etnis Tionghoa yang merupakan minoritas. Bahkan informan U3 menambahkan, menjadikan orang mualaf adalah salah satu programnya.

Itu sudah program saya, kalau di kristen ada kristenisasi saya sudah berprogram islamisasi, terus terang ini tapi selama 8 tahun baru 1 memasukkan orang kristen menjadi islam itu rejeki saya yang sangat besar, walaupun mereka berlomba-lomba masuk islam saya akan yang pertama memulainya, kalau Cina-Cina itu mau masuk islam aku danai mas, itu program saya. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Program tersebut diistilahkan islamisasi yang memiliki pengertian pengislaman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), dimana dalam 8 tahun informan U8 sudah berhasil menjadikan 1 orang mualaf dan hal tersebut merupakan rejeki yang besar baginya. Siapapun tidak hanya etnis minoritas, berkehendak ingin menjadi mualaf atau berpindah menganut agama islam, informan U8 menegaskan akan siap memfasilitasi demi programnya berjalan. Karena memang untuk menjadi mualaf di Indonesia memiliki beberapa persyaratan dan secara tidak langsung menggunakan biaya untuk mengurusnya, seperti pengalaman yang ditulis oleh Desi Sachiko (2014) dalam artikelnya “Prosedur Mualaf Di Indonesia”, yang menjelaskan bahwa di setiap masjid intinya memerlukan syarat, seperti Khitan terlebih dahulu, Pasfoto 3×4 (3 lembar), Fotokopi paspor (asli dibawa), Materai 6000 (2 lembar), Surat pengantar dari kedutaan (WNA), dan Membawa dua orang saksi Muslim saat ikrar syahadat (boleh pria atau wanita). Apabila semua telah terpenuhi, maka prosesi dapat dilakukan dalam jam kerja senin-jumat dan setelah itu menunggu sertifikat keluar sebagai bukti sah menjadi mualaf.

Sama halnya dengan pendapat informan U4 yang menyatakan menerima Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menganut agama islam,

Kalau mualaf oke saya terima itu bagus, kalau tendensi ke politik juga oke boleh-boleh saja karena memang harus demikian, kan kita tidak dibatasi begitu mualaf tidak boleh asal pendukungnya ada kalau pendukungnya tidak ada ya tidak jadi gitu, demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun Tan Mei Hwa menganut agama islam ada tendensi terhadap politik, informan U4 tidak memperlakukan asalkan banyak pendukungnya, karena kalau tidak ada pendukung maka susah akan memenangkan kontestasi politik. Massa pendukung sangatlah penting bagi informan U4 karena pengalamannya menyaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dengan menyatukan 17 partai politik, guna meningkatkan dukungan dalam kemenangan kontestasi politik. Hasilnya menurut Agita Sukma Listyanti dalam artikelnya dengan judul “Hasil Lengkap Pilkada Jatim Versi Hitung Cepat”, memaparkan bahwa Direktur Lingkaran Survei Indonesia, Arman Salam mengumumkan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) unggul dengan kemenangan 47,91 persen, disusul dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dengan 37,76 persen, sedangkan pasangan Eggi Sudjana-M Sihat hanya 2,38 persen dan Bambang DH-Said Abdullah dengan 11,95 persen. (Listyanti, 2013).

Dukungan terhadap Tan Mei Hwa juga disampaikan oleh informan U5, yang menilai baik-baik saja etnis Tionghoa menganut agama islam.

Ya baik-baik aja, Insyaallah bisa jadi pengaruh juga di masyarakat, bagaimanapun juga kalau menurut sejarah kewalian yang dikatakan sama Pak Bambang memang benar. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Bahkan Informan U5 melihat akan dapat menjadi pengaruh positif di masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan adanya etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas menganut agama islam. Hal tersebut dikarenakan informan U5 membenarkan pernyataan informan U8 mengenai sejarah kewalian dalam islam, yakni walisongo banyak dari etnis Tionghoa dan diperkuat oleh salah satu buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, membeberkan nama-nama asli

Walisono yang asli Cina atau Tionghoa dan sangat jauh dari kesan berbau Arab. Salah satunya Prof. Slamet Muljana menyimpulkan bahwa Sunan Ampel aslinya bernama Bong Swi Hoo, kemudian menikah dengan Ni Gede Manila yang merupakan anak Gan Eng Cu (mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423) (Muljana, 2008).

Sedangkan informan U6 melihat etnis Tionghoa menganut agama islam lebih menarik dan lebih menyenangkan, karena menurut informan U6 sering kali menemui etnis Tionghoa lebih mempelajari ajaran agama islam, dari pada kaum pribumi yang telah sering mendapatkan ajaran agama dari lingkup terdekat.

Kalau seorang Tionghoa masuk muslim lebih menarik ya, lebih menyenangkan ya, biasanya Tionghoa masuk islam mereka lebih mempelajari dibandingkan pribumi, seorang pribumi islam banyak yang KTP tidak mempelajari secara detail ya, tapi kalau orang Tionghoa mempelajari secara detail dan mempelajari betul-betul islam itu. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 menyiratkan bahwa saat ini banyak kaum pribumi yang menganut agama islam hanya dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), tidak mempelajari dengan detail layaknya Tan Mei Hwa hingga menjadi pendakwah berawal pada tahun 1993 yang ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya dengan pendakwah yang mencerahkan dan penuh dengan humor. Dakwah yang dilakukan telah memiliki agenda kegiatan rutin sebelum pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dengan pengajian dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga terkenal secara luas ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya. Namun informan U7 melihat Tan Mei Hwa terlambat masuk agama islam, karena sejarah sunan-sunan sudah mendahuluinya layaknya yang disampaikan informan U5 dan U8 sebelumnya, serta buku Prof. Slamet

Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”.

Kalau menurut saya Tan Mei Hwa ini sudah terlambat masuk islam karena sejarah sunan-sunan dari sana, sunan ampel itu kan Tionghoa. Sebetulnya banyak orang Tionghoa terdahulu, tapi tidak tampil dan tidak kelihatan di masyarakat, kalau tampilnya Tan Mei Hwa ini barusan saja. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebetulnya menurut informan U7 banyak etnis Tionghoa terdahulu yang tidak tampil dan tidak kelihatan layaknya Tan Mei Hwa, seperti yang dipublikasikan oleh Desy Afrianti dan Dwifantya Aquina dalam artikelnya berjudul “Syiar Muslim Tionghoa Berawal Di Jakarta”, yang memaparkan sebuah tokoh terkenal Karim Oei, dimana tokoh islam tersebut keturunan Tionghoa yang akrab dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta dan pengusaha sukses yang ikut mendirikan Bank Central Asia (Bank BCA) (Afrianti, 2011).

Begitupun dengan informan U8 mengucapkan terima kasih pada etnis Tionghoa layaknya informan U4, karena Tan Mei Hwa mau menjadi muallaf untuk masuk agama islam.

Saya rasa kita harus berterima kasih ya kalau ada etnis Cina atau mungkin agama lain yang masuk islam, saya rasa kita sebagai umat islam juga harus senang terima dengan bagus, jangan terus dipilah-pilahkan dari dulu-dulu kita kan tidak tahu nenek moyang kita etnis Cina kan tidak tahu. Jadi jangan membedakanlah, itu istri saya dari Gunung Jati jadi Cina juga anak saya, apalagi ada yang bilang dipilah-pilahkan dari Cengho itu kan hanya sebuah nama aja, apa arti sebuah nama. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U8 berharap dengan adanya etnis Tionghoa menjadi muallaf tidak serta merta dipilah-pilah menjadi kelompok tersendiri. Karena dalam diri informan U8 sendiri tidak mengetahui apakah nenek moyangnya keturunan etnis Tionghoa atau bukan, sehingga tidak perlu membedakan berdasarkan nama asalnya. Informan U8 mencontohkan istrinya yang berasal dari Gunung Jati, tepatnya Kabupaten Cirebon dan menurut buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya

Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, menjelaskan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memiliki nama Tionghoa, yakni Toh A Bo, yang merupakan putra dari Sultan Trenggana dalam pemerintahan Demak tahun 1521-1546 (Muljana, 2008).

5.2.1.5 Penampilan Tan Mei Hwa Di Ranah Publik

Ketika Tan Mei Hwa bertarung dalam kontestasi politik, tentunya masyarakat akan memerhatikan dengan seksama penampilan seorang Tan Mei Hwa di ranah publik, baik sebagai calon wakil bupati dan sebagai pendakwah. Karena David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan kekhasan menjadi hal penting supaya berbeda dengan kebanyakan orang, kekhasan berasal dari pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan orang lain, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mampu melakukan hal itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai diri. Dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai hidup dalam diri akan membedakan dengan *personal* yang lain. Nilai-nilai diri dapat berupa kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian.

Maka perlu mengetahui pendapat masyarakat akan penampilan Tan Mei Hwa secara fisik di ranah publik, apakah memiliki sebuah kekhasan atau berbeda dengan pemikiran masyarakat selama ini. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) semua tidak ada yang berpendapat negatif, dan pendapat informan P7 penampilan Tan Mei Hwa baik-baik saja di ranah publik.

Ya baik-baik aja, kembali ke dasarnya sebagai pendakwah, seorang pria pasti melihat oh dia beriman rek, otomatis itu aja sudah mengangkat Bu Tan Mei Hwa. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 melihat seorang Tan Mei Hwa dominan pada figur seorang pendakwah, dimana informan P7 mengatakan dasarnya pendakwah dan pakaiannya sesuai dengan profesi utamanya yakni seperti yang ada pada gambar IV.13, ketika Tan Mei Hwa berpakaian layaknya pendakwah dengan warna yang berbeda-beda. Bahkan informan P7 dirinya sebagai pria melihat Tan Mei Hwa dengan pakaian layaknya wanita muslim sudah cukup memberi nilai lebih bagi Tan Mei Hwa, seperti yang dikatakan oleh Saad Saefullah dalam artikelnya berjudul “8 Syarat Pakaian Wanita Muslimah” yang menjelaskan, bahwa wanita muslimah setidaknya harus memenuhi syarat dalam berpakaian, seperti Pakaian harus menutupi aurat, Pakaian tidak boleh terlalu tipis, Pakaian tidak boleh sempit karena akan menampilkan lekuk tubuh, Anjuran memakai pakaian berwarna gelap, Pakaian tidak boleh disemprotkan parfum, Pakaian wanita tidak boleh menyerupai pria, Pakaian tidak bermegah-megah, dan Pakaian tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (Saefullah, 2015).

Begitupun dengan pengamatan informan P3 selama ini melalui dakwahnya di TV lokal, menilai Tan Mei Hwa apa adanya dalam bernampilan.

Kalau menurut pengamatan dia apa adanya, seandainya jadi pemimpin dia harus merubah penampilan yang dulu seperti lebih rapi, berwibawa, humoris, dan tegur sapa sama warga. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tetapi informan P3 memberikan saran pada Tan Mei Hwa apabila jadi pemimpin daerah, harus meningkatkan penampilannya untuk terkesan lebih rapi, lebih berwibawa, dan tetap humoris serta tegur sapa dengan warga. Secara tidak langsung informan P3 melihat Tan Mei Hwa dengan penampilannya yang sekarang apa adanya sebagai pendakwah tidak sesuai ketika menjabat sebagai pemimpin atau kepala daerah. Namun sebenarnya yang disampaikan informan P3 ketika Tan Mei

Hwa menjadi kepala daerah baik bupati atau wakil bupati sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Kepala Desa, yang berisikan lengkap tata cara berpakaian Pakaian Dinas Marian disingkat PDH, Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU, Pakaian Sipil Harian disingkat PSH, Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR, dan Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL (www.kemendagri.go.id).

Sama halnya dengan informan P6 dan P4 yang mengatakan Tan Mei Hwa bernampilan sopan dan rapi di ranah publik.

Kalau menurut saya sopan, sama rapi, udah itu aja. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ya menurut saya sih didepan umum sopan, tertutup, menjaga hakat dan martabatnya dengan mengikuti adat ketimuran. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P4 menambahkan Tan Mei Hwa juga tertutup dalam berpakaian menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim, sesuai dengan salah satu syarat pakaian wanita muslim yang disampaikan sebelumnya oleh Saefullah (2015) dalam artikelnya berjudul “8 Syarat Pakaian Wanita Muslimah”. Bahkan informan P2 melihat Tan Mei Hwa yang murah senyum terhadap publik, baik publik ketika sebagai pendakwah maupun publik ketika berkampanye sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo.

Pandangan saya penampilan murah senyum terhadap publik dan sederhana, secara penampilan tidak nyleneh. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Disamping itu penampilan Tan Mei Hwa sederhana yang artinya tidak megah atau tidak mewah dan sesuai dengan kaidah bernampilan, tidak sembarangan dalam memilih pakaian. Adapun informan P5 sebagai wanita melihat penampilan Tan Mei Hwa terlihat tegas, berwibawa, dan enak dipandang.

Kalau menurut saya ya kelihatan tegas, yang kelihatan berwibawa, enak dipandang juga. Supaya dilihat seorang perempuan itu tidak lemah, kan biasanya orang lihat dari tampilan fisik dulu, kalau dari tampilan fisik kelihatan garang gitu, mungkin gak akan direndahkan dan juga pakaiannya nggak bermewah-mewahan gitu, karena biasanya masyarakat kan nggak suka seorang pemimpin yang bajunya mencolok. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P5 dengan penampilan Tan Mei Hwa yang tegas dan berwibawa, dapat dilihat oleh masyarakat bahwa dari tampilan fisik dapat memberikan makna perempuan itu tidak lemah dan tidak untuk direndahkan. Informan P5 juga mewakili masyarakat luas sudah sesuai dengan penampilan Tan Mei Hwa saat ini, karena masyarakat tidak menyukai pemimpin yang dalam berpakaian terlihat megah dan terlihat menyala seperti mencari perhatian. Terutama yang terpenting, menurut informan P1 adalah Tan Mei Hwa dapat menempatkan diri dimana dia berada, karena merupakan simbol dari Kabupaten Sidoarjo.

Ya saya kira penampilan standart saja, pastinya berpenampilan nyaman, sopan dan yang paling penting dia dapat menempatkan dia sedang berada dimana, istilahnya dia tidak harus sederhana dan dia tidak harus mewah, tapi bisa menempatkan dia berada dimana karena dia calon simbol dari Kabupaten Sidoarjo. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P1 tentunya melihat Tan Mei Hwa bernampilan yang sekiranya membuatnya nyaman, sopan, dan sederhana. Apalagi ketika Tan Mei Hwa telah terpilih sebagai kepala daerah, pastinya masyarakat memberikan perhatian lebih pada Tan Mei Hwa sebagai simbol Kabupaten Sidoarjo dan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Kepala Desa (www.kemendagri.go.id).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) secara keseluruhan mengarah pada hal positif. Adapun informan U2 melihat penampilan Tan Mei Hwa sangat apa adanya, bahkan tidak mengira calon pemimpin kepala daerah berpakaian sederhana.

Kalau saya lihat penampilannya Beliau itu apa adanya, saking apa adanya itu saya bertanya-tanya, loh ini kok W2 penampilannya seperti itu, harusnya kalau Beliau sudah berani menginjak ke ranah politik kan ada prestige pasti akan digunakan. Ya kalau saya lihat si seperti ustadzah gitu aja beda dengan Bu Risma atau Bu Lusi, pakaian-pakaian yang memang resmi untuk kampanye. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 berpendapat, seharusnya kalau sudah masuk dalam ranah politik atau calon pemimpin kepala daerah setidaknya memiliki *prestige* lebih. Secara tidak langsung informan U2 ingin Tan Mei Hwa berbeda penampilannya, ketika menjadi pendakwah tidak masalah seperti pada gambar IV.4, tetapi ketika tampil saat kampanye setidaknya seperti Tri Rismahari dan Lucy Kurniasari yang tampil secara resmi dalam kontestasi Pilkada Kota Surabaya 2015.



Gambar V.1 Penampilan Fisik Tri Rismahari dan Lucy Kurniasari
(sumber: www.bangsaonline.com)

Pada sisi lain sebenarnya Tan Mei Hwa ingin menanamkan *personal brand*nya kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan nilai kesederhaan dalam cara bernampuilannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Haroen (2014), bahwa dalam *personal brand* sejatinya menjelaskan secara efektif dan efisien dengan tiga hal dasar, yakni *What*, *Whom*, dan *How*. Sehingga Tan Mei Hwa secara tidak langsung sedang mengaplikasikan teori Haroen (2014) yakni salah satunya pada point *What*, dimana yang akan dikomunikasikan, seharusnya semata-mata bukan karena rencana pencalonan tetapi sebuah keaslian nilai-nilai pribadi yang ada dalam diri Tan Mei Hwa. Bahkan informan U3 memberikan tepuk tangan pada Tan Mei

Hwa, karena dapat merangkul dan menjalin hubungan erat dengan perempuan dimanapun dia berada.

Memang secara pribadi saya kasih applause baik untuk Tan Mei Hwa yang jelas bisa merajut dan menjalin dengan kaum hawa ya, tetapi saya lihat memang penampilannya low profile dan saya dapat mengacungkan jempol masalah penampilan dengan ilmu dakwahnya ya. Jadi strategi dia sudah punya bagaimana cara berdakwah dan ilmu-ilmu dakwahnya masuk gitu, kalau secara politik tidak layak jual. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Hal itu dikarenakan penampilannya yang *low profile*, dimana tidak hanya kaum hawa, tetapi segala lapisan masyarakat senang dengan Tan Mei Hwa. *Low profile* merupakan sikap yang tidak suka memperlihatkan kelebihan yang dimiliki, sehingga informan U3 memberikan acungan jempol terhadap penampilan dan ilmu dakwahnya. Acungan jempol merupakan bahasa nonverbal yang sesuai dengan kesepatan masyarakat Indonesia memiliki makna hebat, bagus, jago, pintar, atau apapun yang bernilai positif, dan secara tidak langsung informan U3 memberikan nilai positif pada Tan Mei Hwa akan cara berdakwah dan ilmu dalam berdakwah, tetapi tidak dalam perpolitikan. Begitupun dengan pendapat informan U4 melihat Tan Mei Hwa berpenampilan cukup sederhana di ranah publik.

Kalau pakaian sehari-hari sebagai ustadzah itu cukup sederhana, tidak terlalu mahal yang dipakai bahkan sebagai pemahaman penuturan kepada ibu-ibu, ibu-ibu tidak harus terlalu mewah pakaiannya artinya saat berjamaah mendengarkan pengajian dan sebagainya itu memberi contoh. Sikapnya okelah, peformancenya okelah, kapabilitinya untuk menarik perhatian orang okelah. Namun disini dia kurang penempatannya saja, artinya dia tampil sebagai ustadzah dia oke, namun ketika tampil sebagai public figure yang akan datang menjadi calon wakil bupati kalau jadi itu kurang menempatkannya, seakan-akan pakaian sehari-hari sebagai ustadzah dipakai sehingga kurang pas karena public disini kan sifatnya nasional bukan hanya satu agama tapi 5 agama plus 1 kepercayaan yang disitu ada, jadi ini kurang pas. Seharusnya beliaunya feminim dan elegan dipandang dari manapun enak seandainya jadi model bagus, jadi pramugari bagus, jadi apapun bagus, memang orangnya cantik. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Senada dengan informan U2, informan U4 melihat sikap Tan Mei Hwa ingin menanamkan *personal brand*nya kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan

nilai kesederhaan dalam cara bernampilannya saat berdakwah dalam pengajian. Begitupun dengan sikap, perbuatan yang ditunjukkan pada publik, dan kapasitasnya menarik perhatian sesuai dengan yang dikatakan Soetjipto (2011), kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing. Tetapi tidak tepat ketika berperan sebagai calon kepala daerah, karena penilaian terhadap penampilan tidak semata-mata terbatas hanya pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, melainkan pada moment tertentu secara nasional masyarakat juga memberi perhatian pada kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahkan penampilannya seakan-akan hanya mewakili salah satu agama saja, sedangkan di Indonesia terdapat 5 agama ditambah 1 kepercayaan, diantara Kristen, Katholik, Islam, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Seharusnya menurut informan U4 Tan Mei Hwa lebih berpenampilan feminim dan elegan, seperti yang dikatakan informan U2 supaya memiliki *prestige* lebih sebagai calon kepala daerah, serta informan U4 berandai Tan Mei Hwa sebagai model dipastikan pramugari bagus, atau jadi profesi apapun terlihat bagus, karena dasarnya sudah cantik.

Disamping itu informan U5 menilai Tan Mei Hwa terlihat islami sesuai dengan pakaian wanita muslim yang disampaikan oleh Saad Saefullah dalam artikelnya berjudul “8 Syarat Pakaian Wanita Muslimah”, seperti Pakaian harus menutupi aurat, Pakaian tidak boleh terlalu tipis, Pakaian tidak boleh sempit karena akan menampilkan lekuk tubuh, Anjuran memakai pakaian berwarna gelap, Pakaian tidak boleh disemprotkan parfum, Pakaian wanita tidak boleh menyerupai pria, Pakaian tidak bermegah-megah, dan Pakaian tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (Saefullah, 2015).

Kalau penampilan Beliaunya itu islami ya, karena dia itu leadership di majelis dzikirnya. Karena saya sendiri dari Humas Nur Salam punya SBY untuk Jawa Timur itu saya pantau terus, berapa masa yang dia punya, bagaimana cara dia kepemimpinannya, ternyata bagus dia sebagai leadership. Kenapa dia sangat sederhana, karena itu sesuai dengan tuntunan islami dan tuntutan Qur'an, jadi kalau diluar dia tidak perlu pakai yang bermewah-mewah, kalau ada suami dia baru berdandan itu perintah Qur'an. Jadi artinya dia itu memberi contoh kepada masyarakat khususnya di jamaahnya, itu saya kira. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U5 yang memiliki pengalaman sebagai Humas (Hubungan Masyarakat) Nur Salam Jawa Timur milik Susilo Bambang Yudhoyono, dan mensukseskan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia ke-6 dengan dua kali periode, menjadikannya terbiasa mengamati tokoh politik yang sedang bertarung dalam kontestasi politik. Salah satunya Tan Mei Hwa yang telah lama diamati oleh informan U5 dari segala sisi, baik pendukungnya, cara memimpin, dan diakui Tan Mei Hwa memiliki kepemimpinan yang bagus.

Segala yang dilakukan oleh informan U5 terhadap Tan Mei Hwa dengan cara mengamati, sesuai dengan tugasnya sebagai Humas dan dikatakan oleh Scott M. Cutlip & dkk dalam bukunya “Efektive Public Relations”, menyatakan bahwa Humas memiliki tugas untuk menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dari tata cara seseorang atau organisasi untuk kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya (Cutlip & dkk, 2011).

Kemudian informan U5 juga menilai kesederhanaan Tan Mei Hwa karena tuntunan Al-Qur'an sehingga terlihat islami, dan hanya berdandan ketika bersama suami. Serta secara tidak langsung informan U5 mendukung pernyataan informan U2 dan U4 yang melihat Tan Mei Hwa ingin menanamkan *personal brand*nya kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan nilai kesederhaan dalam cara

bernampuilannya. Namun berbeda dengan informan U1 yang menilai Tan Mei Hwa sudah bernampilan *fashionable*, yang artinya sudah modern dalam berpenampilan di ranah publik.

Secara penampilan fashionable, jadi enak dilihatlah, rapi dan kamera facelah, tetapi kembali lagi sebagai muslimah saya kira dia merupakan suatu tren baru dan fenomena baru di Jawa Timur. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Di sisi lain informan U1 menambahkan secara fisik memiliki wajah yang bagus dipandang, rapi dan memiliki nilai jual. Pengalaman yang dimiliki informan U1 sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Sidoarjo, melihat Tan Mei Hwa sebagai muslimah merupakan fenomena baru di Jawa Timur, dimana seorang perempuan berketurunan Tionghoa tetapi dapat menjadi pendakwah dan masuk dalam politik sebagai calon kepala daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sama halnya dengan informan U2, U4 dan U5, bahwa penampilan Tan Mei Hwa ingin menanamkan *personal brandnya* kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan nilai kesederhaan dalam cara bernampuilannya.

Masalah penampilan saya rasa ibu Tan Mei Hwa itu diduniannya dunia ustadzah saya rasa cukup bagus ya, cukup baik dan sederhana memang, itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan kesederhaan untuk memberikan contoh. Orang jangan dilihat dari pakaiannya yang penting isinya, jadi baju ini saja sampai rumah saya lepas dan pakai kaos, tapi isinya Pak Bambang kan ya Pak Bambang gitu. Jadi seumpama saya insiyur, saya naik truk sama dengan kuli-kuli, kemudian saya hitung bangunan ambrol kan tidak mungkin. Kemudian hal-hal penampilan yang bersifat nasional, tadi seperti kata teman-teman bahwasanya harus modis dan harus nasional, ya saya terus terang aja pribadi saya kalau melihat pakaian celana ya jangan terlalu ketat tetapi tetap islami pakai tudung, itu saya acungi jempol. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Terpenting bagi informan U8, apabila menilai seseorang jangan hanya dari luarnya saja, tetapi nilai dari diri seseorang tersebut, karena penampilan secara fisik tidak akan merubah nilai dalam diri seseorang. Kemudian informan U8 juga mendukung informan U2 dan U4 dalam hal berpakaian secara nasional, secara tidak

langsung mengarahkan pada gaya berpakaian resmi saat berkampanye layaknya calon kepala daerah Tri Rismaharini dan Lucy Kurniasari pada gambar V.1, asalkan tidak ketat dan tetap islami sesuai penjelasan Saefullah (2015) dalam artikelnya berjudul “8 Syarat Pakaian Wanita Muslimah”. Begitupun dengan informan U7 yang menilai Tan Mei Hwa bagus dalam berpakaian, meskipun belum pernah melihat secara langsung.

Kalau menurut saya ya baguslah penampilannya, secara umum meskipun saya belum pernah melihat sendiri, dengan bukti dia laris untuk memberikan ceramah kan gitu, berarti penampilannya bagus. Namun belum tentu bagus dan belum tentu baik apabila nanti ketika jadi pimpinan kepala daerah, karena yang menilai masyarakat nanti itu penilaiannya lain lagi, tapi kalau untuk penceramah mungkin bagus karena dia laris kan. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Namun informan U7 juga berpendapat sama, layaknya informan U2, U4, dan U8 mengenai penampilan Tan Mei Hwa yang islami saat ini belum tentu tepat apabila terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, karena sebagai kepala daerah sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Kepala Desa (www.kemendagri.go.id). Dukungan tambahan dari informan U6 yang menilai penampilan Tan Mei Hwa, memang belum sesuai apabila menjadi calon kepala daerah.

Penampilan Bu Tan Mei Hwa itu sederhana ya, sangat sederhana. Tetapi kembali lagi ya untuk penampilan seorang calon wakil bupati seandainya harus modis ya, karena Sidoarjo kan heterogen juga ya, jadi yang modis harganya murah itu ada. Ya saya rasa sangat sederhana sekali. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebagai sesama perempuan yang pernah mencalonkan diri dalam politik, Tan Mei Hwa terlalu sederhana dalam berpenampilan. Penilaian informan U6 didasari oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang heterogen, sehingga secara tidak

langsung informan U6 berharap Tan Mei Hwa dapat lebih modern atau modis dalam bernampilan sebagai calon kepala daerah.

5.2.1.6 Kualitas Dalam Diri Tan Mei Hwa

Karena David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan kekhasan supaya berbeda dengan kebanyakan orang, tentunya sebuah kualitas diri memiliki peran penting dalam membedakan satu sama lain. Apalagi ketika berbicara mengenai kualitas diri, tentunya ada nilai-nilai yang harus dipertahankan dan dapat dirasakan oleh khalayak, karena nantinya berdampak pada kuatnya *personal branding* seseorang. Maka perlu mengetahui pendapat masyarakat bagaimana kualitas diri dari Tan Mei, dibandingkan kandidat politik lainnya. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara agama kualitas diri Tan Mei Hwa bagus. Adapun menurut informan P1 seorang Tan Mei Hwa memiliki semua kualitas yang ada.

Menurut saya Bu Tan Mei Hwa punya semua itu. Jadi gini ya dari segi agama mengatur dari segala bidang kehidupan kita mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, di agama kita sudah diatur, jadi ketika agama orang itu sudah bagus, InsyaAllah dia bisa mengatur segala bidang. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P1 menjelaskan bahwa dari ajaran agama sudah mengatur segala bidang kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sehingga ketika melihat Tan Mei Hwa sudah profesional dalam mengajar agama atau berdakwah, maka secara tidak langsung Tan Mei Hwa sudah memiliki kualitas diri dalam segala bidang. Begitupun dengan informan U2 yang mendukung pernyataan dari informan P1 secara langsung yakni ketika agama orang tersebut bagus maka dapat mengatur segala bidang.

Ya menurut saya sependapat barusan, udah gitu aja. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kemudian informan P3 sebagai mahasiswi dan bagian masyarakat Kabupaten Sidoarjo juga menilai positif akan kualitas diri dari Tan Mei Hwa.

Saya sendiri sebagai warga Sidoarjo menilai Tan Mei Hwa ini mendapat nilai positif, karena warga Sidoarjo ini kebanyakan beragama islam dan Beliau berdakwah menyebarkan ajaran islam, jadi banyak orang menilai Tan Mei Hwa memang baik dalam menyebarkan agama islam di Sidoarjo. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Alasan penilaian tersebut karena informan P3 mengetahui kebanyakan masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo adalah agama islam, sehingga sesuai dengan Tan Mei Hwa yang berprofesi sebagai pendakwah yang menyebarkan agama islam. Dan dipastikan banyak masyarakat Kabupaten Sidoarjo menilai Tan Mei Hwa memiliki kualitas dalam agama islam. Bahkan informan P4 sebagai warga kecamatan Candi, mengatakan Tan Mei Hwa sangat berkualitas.

Kalau menurut saya sih sangat berkualitas dan sangat bernilai positif, karena saya melihat tujuan dia, visi misinya dia untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan keadaan masyarakat Sidoarjo. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena Tan Mei Hwa memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dimana visi Tan Mei Hwa adalah membangun Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, adil dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah 5 program utamanya diantaranya sekolah gratis, kesehatan murah, jalan mulus, lapangan kerja tersedia, dan perempuan sejahtera (uswatan.com). Senada dengan informan P1 dan P3, informan P5 berpendapat Tan Mei Hwa berkualitas dalam sudut pandang agama.

Kalau menurut saya, ngelihat kualitasnya bagus sih. Orang yang religius pasti dasar atau pondasi yang kuat, jadi menurut sudut pandang agama saya, itu kualitasnya sudah bagus sih. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sebab bagi informan P5 apabila orang yang religius pasti memiliki pondasi yang kuat, dimana menurut Kamus Besa Bahasa Indonesia kata religius adalah yang

berhubungan dengan keagamaan (kbbi.web.id). Sehingga secara tidak langsung informan P5 menjelaskan bahwa Tan Mei Hwa memiliki kualitas diri karena prinsip dari ajaran agama yang kuat. Begitupun dengan informan P6 yang menilai bagus akan kualitas yang dimiliki Tan Mei Hwa.

Kalau menurut saya bagus-bagus aja sih mas, karena dari pencitraannya sudah kelihatan bagus. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kualitas Tan Mei Hwa dinilai bagus karena informan P6 melihat dari pencitraannya sudah bagus, dimana citra yang ditangkap oleh informan P6 disebabkan, Tan Mei Hwa secara tidak langsung sudah membangun *personal brandnya* dengan memberikan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, diantaranya kesederhaan dalam berpenampilan yang telah disampaikan oleh informan U5 sebelumnya yang menilai Tan Mei Hwa terlihat islami dan tentunya ajaran islam yang dibawakan saat mendakwah.

Namun tidak untuk informan P7 yang menilai Tan Mei Hwa belum terlihat kualitasnya, karena belum terpilih dan belum melihat progres ke depan sebagai kepala daerah.

Kalau menurut saya terkait nilai positif, ya ada lah Bu Tan Mei Hwa, mulai dari dakwahnya itu sudah bagus, kalau kualitas saya belum lihat kualitasnya karena saya belum melihat progresnya kedepan. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Apabila terkait Tan Mei Hwa mendakwah, informan P7 melihatnya positif dan bagus, tetapi bagi informan P7 hal tersebut bukan kualitas diri sebenarnya, meskipun informan P7 sudah pernah menghadiri secara langsung kampanye Tan Mei Hwa yang langsung disekitar kediamannya daerah Candi-Kabupaten Sidoarjo.

Maka perlu mengetahui pendapat masyarakat bagaimana kualitas diri dari Tan Mei, dibandingkan kandidat politik lainnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) mengenai kualitas diri dari Tan Mei Hwa positif dan berkualitas dari agama. Adapun informan U2 mengatakan Tan Mei Hwa sangat berkualitas perihal kualitas.

Kalau saya melihat beliau sangat berkualitas sekali mas, baik dari segi agama beliau seorang ustadzah, apalagi sudah jadi public figure terkenal di media dan di masyarakat langsung, jadi sangat berkualitas sekali. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kualitas yang dimaksudkan oleh informan U2 adalah dari segi agama, dengan dibuktikan menjadi *public figure* atau tokoh masyarakat sebagai pendakwah yang terkenal di media, seperti pada gambar IV.11 menunjukkan Tan Mei Hwa sedang berdakwah di Stasiun TV lokal Surabaya, diantaranya TV9 dan JTV. Informan U2 menganggap Tan Mei Hwa sebagai tokoh masyarakat, karena dakwahnya yang sudah setingkat nasional, meskipun masih dalam TV lokal setidaknya seluruh penduduk Indonesia dapat melihat Tan Mei Hwa berdakwah. Karena menurut Lembaga Survei Nielsen, secara keseluruhan di Indonesia, konsumsi media di kota-kota baik di Jawa maupun Luar Jawa menunjukkan bahwa Televisi masih menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), disusul oleh Internet (33%), Radio (20%), Surat kabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%) (www.nielsen.com). Begitupun dengan informan U1 yang secara tidak langsung mengakui kualitas Tan Mei Hwa hingga menjadi *public figure* atau tokoh masyarakat.

Sebenarnya seorang public figure ini memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan masyarakat biasa seperti saya, kalau dia seorang pendakwah otomatis dia menjadi public figure dan saya kira tinggal memoles ya, memoles itu pengertiannya bagaimana dia berkomunikasi dengan seluruh golongan karena kita tidak bisa menafikan di Indonesia ini sangat heterogen bukan hanya umat Islam saja tetapi masih ada banyak kalangan lain. Jadi saya kira sebagai seorang public figure atau seorang ustadzah dia memiliki khans yang besar menjadi seorang leadership dalam pengetahuan menduduki jabatan dalam strata struktur politik ya, mau jadi wakil bupati atau mau jadi bupati,

walikota, dst. Tapi itu harus dibangun ya, bagaimana dia dikenal lebih oleh masyarakat, aktualisasinya lebih dipahami oleh masyarakat dimana dia akan dicalonkan. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U1 melihat sebuah peluang besar ketika Tan Mei Hwa menjadi *public figure* atau tokoh masyarakat, tinggal bagaimana strateginya dalam berkomunikasi dengan seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi dengan seluruh lapisan sangat penting bagi informan U1, karena kita hidup di lingkungan yang heterogen atau beraneka ragam manusia, khususnya agama yang berbeda-beda dan Indonesia sendiri mengakui adanya 6 agama, tidak hanya agama islam saja.

Jadi ketika Tan Mei Hwa sudah mempunyai label *public figure* atau tokoh masyarakat, berarti secara tidak langsung Tan Mei Hwa juga memiliki khans atau kesempatan untuk menang dalam kontestasi politik sangat besar, baik itu wakil bupati, walikota, atau kepala daerah lainnya, dibandingkan orang biasa yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Tetapi dengan catatan yang dikatakan oleh informan U1, harus membangun aktualisasi dalam masyarakat dimana akan dicalonkan, dimana secara tidak langsung mengacu pada pendapat Butler & Collins (2001) mengenai strategi akan *marketing* politik dengan konsep permanen yang harus dilakukan terus-menerus oleh sebuah partai politik atau kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image* publik, serta didukung oleh pendapat Firmanzah (2008) dalam dunia politik juga harus menjalankan 4P yang tidak asing bagi dunia ekonomi dan selalu dilakukan dalam dunia perdagangan, yakni *Product*, *Promotion*, *Price*, dan *Place*.

Disamping itu informan U3 juga memberikan penilaian positif akan kualitas Tan Mei Hwa sebagai ustadzah atau pendakwah.

Yang jelas punya tanda jempol besar untuk masalah kualitas dalam dia sebagai ustadzah. Tapi dalam segi politik sangat jauh, kalau dia saya lihat dari ceramahnya dia belum berani mengatakan bohongi itu benar, belum pernah mengatakan membual itu halal. Jadi kalau dari segi politik sangat bertolak belakang, maka saya tekankan dia seorang ulama yang mau ke umara karena di Indonesia kita tidak butuh orang yang kualitas butuhnya secara kuantitas, secara kuantitas dia sudah punya masanya banyak, kalau saya lihat dia kan setengah-setengah lari ke politik karena belum pernah tebar pesona dalam persoalan membual itu halal dalam segi politik itu sangat sulit. Makanya kualitas punya sangat besar dalam segi seorang ustadzah tapi secara politik belum mampu dia melakukan itu. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi tidak untuk kualitas secara politik, karena informan U3 melihat dunia politik itu bertolak belakang dengan dunia dakwah, sehingga menyebut Tan Mei Hwa sebagai ulama yang berpindah ke umara. Apabila melihat pernyataan dari informan U3 mengenai Ulama ke Umara, layaknya yang publikasikan Muhammad Shobri Azhari dalam artikelnya yang berjudul “Ulama dan Umara” yang menjelaskan, perbedaan mendasar dari ulama dan umara, yakni ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang. Sedangkan *umara* adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengurus kehidupan masyarakat, dimana kebijakan dan keputusannya dalam hukum dan peraturan ditegakkan demi ketenteraman umum (Azhari, 2014).

Sehingga secara tidak langsung informan U3 menilai Tan Mei Hwa sebagai pewaris ajaran nabi dan penyambung lidah, kemudian pindah menjadi orang yang berprofesi mengatur kehidupan masyarakat dengan kebijakan dan keputusan dalam hukum serta peraturan. Bahkan informan U3 menegaskan di Indonesia tidak butuh orang yang berkualitas, tetapi orang yang berkuantitas yang memiliki pendukungnya banyak. Maka dari itu informan U3 melihat kualitas politik Tan Mei Hwa masih belum maksimal, dan masih mengandalkan kualitas secara agama.

Hal senada juga disampaikan oleh informan U6, apabila kualitas secara agama Tan Mei Hwa merupakan tokoh masyarakat sebagai pendakwah.

Kalau Bu Tan Mei Hwa secara agama bagus ya, dia seorang public figure, seorang pendakwah, tetapi dalam hal politik masih kurang dibandingkan dengan kandidat lainnya masih kurang, untuk saat ini jangan dulu lah mungkin 10 tahun mendatang bisa kalau sekarang jangan dulu ya. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kembali lagi dalam hal politik, Tan Mei Hwa masih kurang menurut informan U6, karena pengalamannya pernah gagal mencalonkan dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2009 dan 2014. Sehingga secara tidak langsung mengetahui kapasitas Tan Mei Hwa tergolong baru dalam ranah politik, bagi informan U6 butuh 10 tahun mendatang untuk berkompetisi dalam politik. Namun informan U5 menegaskan bahwa berbicara mengenai kualitas, apabila kualitas ajaran Al-Qur'an sudah benar maka kualitas secara duniawi akan mengikuti.

Memang saya selalu berdasar pada Qur'an dan Hadiz Islam, karena yang kita hadapi itu Pilkada yang ada di Sidoarjo yang sangat religius. Karena pada jamannya Pak Utsman jadi Ketua DPR, waktu penetapan atau pemilihan bupati atau kepala daerah itu kan langsung DPR, itu ada teman saya yang nonislam bahkan dia itu uangnya banyak tapi tersisihkan, kalau dipimpin orang ini gimana rakyatnya kalau begini, itu perhitungan secara agama. Kalau sudah menginjak ke kualitas otomatis mas, kalau Qur'annya sudah benar dan bagus otomatis duniawi akan ikut, kan gitu. Kalau masalah kualitas pendidikan itu bisa dibina, suatu contoh anggota DPR tidak ada pembekalan apa-apa mas, kadang-kadang ada orang tidak tahu masalah politik bisa jadi, itu pembekalan namanya Pelatihan Bimtek, itu yang kasus Pak Utsman karena Pelatihan Bimtek itu dilatih sesuai dengan job-jobnya, contohnya pemerintahan masalah perpajakan dan sebagainya. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U5 dalam menghadapi Pilkada di Kabupaten Sidoarjo yang religius, harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadiz islam. Hal tersebut diketahui informan U5 ketika Ketua DPR Kabupaten Sidoarjo yakni Utsman Ikhan periode tahun 1999-2004, dimana pada kala itu penetapan bupati dan wakil bupati langsung dari DPR, dan teman informan U5 yang memiliki kekuatan uang tidak terpilih sebagai kepala daerah Kabupaten Sidoarjo karena menganut agama non-

muslim. Sebenarnya antara tahun 1999-2004 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (www.kpk.go.id). Namun kinerjanya belum maksimal seperti saat ini, sehingga dimanfaatkan oleh teman informan U5 untuk menyuap Ketua DPR Kabupaten Sidoarjo Utsman Ikhsan, tetapi gagal mendapatkan posisi tersebut.

Tetapi apabila kualitas secara pendidikan, bupati dan wakil bupati terpilih dapat dibina, layaknya anggota DPR dibina oleh Pelatihan Bimtek, dimana menurut Spiunud (2013), tujuan pelatihan bimtek adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengelola SDM, Memberikan pemahaman yang sama bagi para atasan langsung/Kasubag Kepegawaian di unit kerja masing-masing dalam pengelolaan SDM, dan Terciptanya pengelolaan SDM yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sehingga informan U5 yakin ketika Tan Mei Hwa terpilih, tidak perlu khawatir akan kompetensinya sebagai kepala daerah.

Bahkan informan U7 dan U8 menilai kualitas Tan Mei Hwa cukup tinggi dalam bidang moral agama, tetapi tidak dengan kualitas politik dan pemerintahan.

Saya rasa kualitasnya cukup tinggi ya dalam bidang moral agama tapi dalam bidang pemerintahan belum tentu karena dia belum mengalami bidang pemerintahan. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kualitas di dalam dunianya cukup tapi kuantitasnya untuk ke arah politik masih jauh, kira-kira 5 tahun kemudian mungkin baru dia cari pasangan yang tepat. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Begitupun dengan informan U4 yang menegaskan kembali kualitas dalam politik seorang Tan Mei Hwa masih kurang dan paling sedikit, dibandingkan kandidat lain yang ikut dalam kontestasi politik Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

Kualitas dalam Pilkada di W2 disini dia masih kalah jauh, dia paling sedikit karena dia nda banyak punya, artinya seorang maju dalam Pilkada atau Partai Politik ataupun berpolitik praktis ada beberapa hal, seperti harus ambisi itu satu, ambisi saja dia punya, pandai diplomasi dia kurang, tega sangat kurang yang lain tega, punya duit sama sekali tidak punya duit hanya kecil sekali itu yang paling ditentukan, pencitraan belum sama sekali dibirokrasi ndak, lembaga profesi nda, lembaga ormas ndak. Makanya saya klaim kualitasnya paling sedikit dibandingkan dengan yang lain, tunggu dulu mungkin ada waktunya perlu belajar lebih lama. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena bagi informan U8, ketika seseorang maju dalam ranah politik harus mempunyai ambisi, harus pandai diplomasi, harus tidak berbelas kasihan, dan harus punya kekuatan uang. Disamping itu Tan Mei Hwa tidak pernah bekerja dalam birokrasi pemerintah, bekerja pada lembaga profesi juga tidak pernah, lembaga organisasi masyarakat juga tidak pernah, dan itulah sebabnya pengalaman informan U4 sebagai Ketua Partai Pemuda Indonesia menganjurkan Tan Mei Hwa untuk belajar politik lebih dalam dan lama. Namun sebenarnya yang dikatakan oleh informan U4 mengenai keharusan ketika masuk ranah politik, secara tidak langsung adalah syarat non-teknis yang tidak kasat mata dan berdasarkan pengalaman, tetapi apabila seseorang ingin berpolitik dan ingin menjadi kepala daerah tentunya harus melewati syarat secara teknis yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (www.kpu.go.id).

5.2.2 Karakteristik Relevansi Tan Mei Hwa

Relevansi akan dimulai ketika seseorang percaya bahwa *personal* dapat memahami dan memperhatikan apa yang penting untuk orang lain. Relevansi juga merupakan bagaimana dapat memecahkan masalah orang lain dan kebutuhan orang lain. Sehingga dengan kata lain, latar belakang keahliannya dengan kebutuhan orang lain harus relevan supaya dapat dipercayai dengan mudah oleh masyarakat tanpa anggapan negatif omong kosong (David McNally & Karl D. Speak, 2004). Berikut beberapa point relevansi yang ada pada Tan Mei Hwa:

5.2.2.1 Menilai Pemimpin Berbeda Etnis

Menurut O'Shaughnessy (2001) bahwa partai politik menjual produk yang tidak nyata, sangat terkait dengan sistem nilai dan di dalamnya terdapat visi yang bersifat daya tarik, kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera tercapai tetapi hasilnya lebih dapat dinikmati dalam jangka panjang, tidak pasti dan dapat ditafsirkan bermacam-macam. Maka terkait hal tersebut, seorang Tan Mei Hwa termasuk sebuah produk yang tidak nyata, dalam artian masyarakat tertarik hanya melalui visi dan misi yang disampaikan, serta salah satu nilai yang ada di dalam dirinya yakni seorang perempuan beretnis Tionghoa. Sehingga belum dapat dipastikan apakah ketika Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi kepala daerah dapat memberi keuntungan atau bahkan sebuah kerugian bagi Kabupaten Sidoarjo, karena hasilnya memerlukan jangka panjang.

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai keuntungan atau kerugian apabila terdapat pemimpin berbeda etnis, karena hal tersebut memberikan implikasi jangka panjang terhadap Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan

hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) memiliki pendapat banyak kerugian terdapat pemimpin yang berbeda etnis. Adapun informan P7 yang mengatakan pasti ada sebuah keuntungan, meskipun belum jelas seperti apa hasilnya nanti, karena tergantung kepemimpinan dan *progress* atau kemajuan dari Tan Mei Hwa ketika menjadi kepala daerah.

Ya kalau dari keuntungan, keuntungan sih ya pasti ada tergantung dia memimpinnya, progressnya dia sebagai seorang pemimpin, terus kalau yang aku takutkan sekarang banyak sekali dari luar bentuk sedikit-sedikit dari penjajahan apalagi datangnya MEA, seperti itu. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Namun disisi lain informan P7 juga takut dengan adanya penjajahan yang kemungkinan datang dikit demi sedikit, apalagi dengan datangnya MEA. Dimana Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan pembentukan pasar tunggal yang nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya (www.bbc.com). Sehingga secara tidak langsung informan P7 takut akan banyak orang asing masuk dengan bebas, dan dikit demi sedikit menguasai pasar tenaga kerja profesional yang ada di Indonesia, serta memiliki implikasi tersisihnya kaum pribumi. Begitupun dengan informan P5 yang melihat dulu cara kepemimpinan Tan Mei Hwa ketika terpilih sebagai kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Kalau menurut saya tergantung dia mimpinnya bagaimana, kan kita belum tau juga, tapi kalau dilihat selama ini berkaca dari pak Ahok mungkin saya rasa enggak ya, karena kalau sudah jadi pemimpin otomatis yang dipikir masyarakat majemuk, berbeda-beda budayanya, mungkin rasnya juga, pasti seorang pemimpin harus mikir warganya memang majemuk. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tetapi informan P5 berkaca terhadap apa yang dilakukan Ahok atau Basuki Tjahja Purnama wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai

Gerindra, meskipun melalui dua tahap Pemilu pada akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org). berharap tidak akan ada sebuah kerugian. Karena menurut informan P5, ketika seorang pemimpin terpilih untuk mewakili rakyat, dapat dipastikan memikirkan masyarakat yang paling utama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sangat majemuk, berbeda-beda budaya, berbeda ras, dan secara tidak langsung harus dapat merangkul semua lapisan masyarakat.

Sedangkan informan P3 dan P4 berpendapat, tidak ada keuntungan pemimpin berbeda etnis di Kabupaten Sidoarjo.

Kalau untuk kelebihan itu Beliau pernah berbagi ajaran agama kepada warga Sidoarjo tentunya dan untuk kerugiannya mungkin gini kan dia dari etnis cina, otomatis calon pemilihnya tidak dari cina juga ada yang asli dari warga Sidoarjo, mungkin kerugiannya yang asli warga Sidoarjo akan kalah poling dari yang ada etnis cinanya itu. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut saya tidak ada keuntungannya tetapi ada kerugian, kenapa kerugian sepengetahuan saya etnis Cina dalam pemilihan poling suara pencoblosan pada saat nanti mungkin kerugiannya, itu lebih memilih hanya yang sama seetnis dengan dia saja yang memilih. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kekurangannya yakni pada polling ketika pemilihan berlangsung, dimana warga Sidoarjo akan kalah jumlah dari pada etnis Tionghoa yang merasa sesama etnis. Polling sendiri merupakan cara untuk mengetahui bagaimana pendapat yang berkembang dalam masyarakat terhadap suatu isu (Sudibyo, 2004), sehingga secara tidak langsung informan P3 menjelaskan bahwa suara pendukung terhadap etnis Tionghoa akan datang lebih banyak dari sesama etnis Tionghoa, karena warga asli Kabupaten Sidoarjo banyak yang tidak memihak etnis Tionghoa. Meskipun informan P3 menambahkan ada sedikit keuntungan dari Tan Mei Hwa karena dapat

mengajarkan ajaran agama di Kabupaten Sidoarjo. Pendapat lain dari informan P6 secara tegas mengatakan sebuah kerugian ada pemimpin yang berbeda etnis.

Kalau aku sih kerugian, kan kebiasaan orang Cina itu kan pelit, jadi mudah-mudahan nggak pelit sama masyarakatnya. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena informan P6 melihat etnis Tionghoa mempunyai *stereotype* tidak suka memberi atau kikir, dan informan P6 berharap tidak akan terjadi. *Stereotype* tersebut tidak tahu asal mulanya dari mana, tetapi hampir sama dengan kisah seorang Margareta Astaman yang mengisahkan dirinya sendiri sebagai keturunan Tionghoa sedang berdebat dengan seorang pengemis di jalan raya dan seorang pria di rumah makan padang. Ketika Margareta menolak pengemis yang meminta sedekah, memakinya dengan istilah “Cina pelit”. Serta penjaga rumah makan padang bahkan memberi porsi daging yang terkecil dari susunan paha ayam goreng (Astaman, 2011). Pernyataan informan P3, P4, dan P6 didukung juga oleh informan P2, bahwa tidak ada keuntungan pemimpin berbeda etnis di Kabupaten Sidoarjo.

Kalau menurut pernyataan saya sih nggak jauh dari pernyataan teman-teman sebelumnya, mungkin sebagian warga Sidoarjo yang fanatik dengan daerahnya, mungkin mereka masih mikir-mikir buat milih lain etnis dan berpengaruh pada poling suara juga. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sebab informan P2 melihat masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang fanatik dengan kedaerahannya akan berpikir kembali untuk memilih kandidat yang berbeda etnis, dan akan berpengaruh juga dalam polling suara nanti. Hal tersebut secara tidak langsung dikarenakan, pada era otonomi daerah untuk kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(www.dpr.go.id). Sehingga isu etnisitas untuk pimpinan daerah tidak lagi tabu untuk dibicarakan, hal ini ditandai dengan muncul wacana bahwa kepala daerah sebaiknya merupakan putra daerah (Widyawati, 2014).

Oleh karena itu informan P1 menegaskan, bahwa bukan lagi saatnya melihat orang etnis Jawa, orang etnis Tionghoa, atau etnis manapun, yang terpenting adalah warga Indonesia sudah lebih dari cukup.

Kalau saya pribadi melihatnya seperti yang saya bilang tadi, bukan lagi kita melihat orang Jawa, orang Cina, atau orang mana, yang pasti dia warga Indonesia ya sudah. Tapi dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari masyarakat Sidoarjo masih membedakan seperti itu, dan itu menjadi salah satu kendala yang mungkin bisa berarti atau tidak lihat kondisinya, tergantung Bu Tan Mei Hwa mensiasati, bagaimana merebut hati dari seseorang yang berbeda etnis itu. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Meskipun dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih membedakan masalah etnis, dan hal tersebut kembali lagi kepada Tan Mei Hwa bagaimana cara merangkul seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mendukungnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) mengenai keuntungan atau kerugian keberadaan pemimpin berbeda etnis, tergantung hasil kinerjanya ketika terpilih sebagai kepala daerah nantinya. Adapun informan U1 mengukur sebuah keuntungan dan kerugian harus berdasarkan *output* atau hasil kinerjanya.

Dalam mengukur atau menjadi barometer keuntungan atau kerugian secara fisik ya, saya kira dihasilkan dari outputnya artinya kalau pemimpin memberikan kemaslahatan yang lebih besar kepada yang dipimpin saya kira itu lebih baik ya. Tapi sekali lagi memang primordial ini menjadi isu yang mengemuka sekarang ini tetapi saya kira dengan adanya persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara, saya kira tidak ada masalah. Jadi saya kira mengukur untung ruginya dari outputnya selama memimpin ya, artinya memberikan masalah nda kepada masyarakat, saya rasa begitu. Tapi sebenarnya ada keuntungannya mungkin kita sebagai sebuah Bangsa lebih berhasil, transformasi budaya berarti berhasil artinya kita sebagai Bangsa bisa lebih berbudaya karena bisa menerima hal yang

berbeda, saya rasa begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U1 melihat apabila Tan Mei Hwa memberikan kemaslahatan atau manfaat lebih besar pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut memberikan keuntungan bagi Kabupaten Sidoarjo. Namun informan U1 mengembalikan lagi pada primordial atau pemikiran dasar, bahwa sebagai warga Negara Indoensia sudah ada persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban, seharusnya perbedaan etnis sudah untuk menjadi pemimpin tidak masalah. Tetapi keuntungan lainnya selain berbicara masalah hasil kinerja, informan U1 melihat sebagai Bangsa berhasil melakukan transformasi budaya karena dapat menerima sebuah perbedaan yang ada. Dimana hal tersebut sudah terwujud dalam kedewasaan masyarakat Kalimantan Barat 15 November 2007, masyarakat memilih gubernur yang terpilih yakni Cornelis, seorang asli Dayak beragama Katolik, sedangkan wakil gubernur terpilih yakni Christiandy Sanjaya, seorang etnis Tionghoa dan beragama Kristen, dimana mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam. Kemenangan mereka karena sangat teliti dalam membaca kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat sehingga mendapatkan afiliasi antara perbedaan etnisitas dan agama (Zakina, 2008).

Begitupun dengan informan U2 dan U3 yang mendukung informan U1, keuntungan dan kerugian tergantung hasil kerja pemimpin tersebut.

Keuntungan dan kerugian tergantung dari output pemimpin gitu lo, kalau mereka bisa untuk mensejahterahkan rakyat kenapa tidak. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Saya setuju sama Pak Sukendar mas, semua itu tergantung outputnya. Kita bisa lihat Jakarta dipimpin oleh Ahok nggak banjir sekarang. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut Informan U3 dengan pemimpin berbeda etnis dapat mensejahterakan rakyat pasti dapat diterima, seperti Informan U2 memberikan

contoh pemimpin berbeda etnis yakni Basuki Tjahja Purnama yang berhasil mengatasi banjir di DKI Jakarta. Secara tidak langsung pendapat informan U2 serupa dengan pernyataan Alsadad Rudi dalam artikelnya “Penanganan Banjir Dongkrak Elektabilitas Ahok”, yang menjelaskan Populi Center menempatkan gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki elektabilitas di angka teratas dengan angka 52,2 persen, dimana dari survei yang pernah dilakukan, angka ini merupakan yang tertinggi. Peneliti Hasan Nasbi menilai, melesatnya elektabilitas Ahok karena dianggap berhasil mengatasi banjir, karena tidak adanya banjir besar di Jakarta pada awal tahun ini membuat publik mengapresiasi kinerja Ahok, serta dahulu warga yang harus mengungsi, sekarang tidak ada yang mengungsi walaupun masih ada genangan (Rudi, 2016).

Senada dengan informan sebelumnya, informan U3 melihat keuntungan atau kerugian dari hasil kinerjanya dalam memimpin.

Keuntungan dan kerugian saya belum tahu karena barometernya hanya satu Ahok saja, mungkin Ahok ini ada perubahan di Jakarta tapi Tionghoa yang lain belum tahu se-Indonesia selain Ahok, apakah yang lain berhasil dan untuk disini apakah bisa berhasil, demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi informan U3 masih meragukan, karena alat ukur pemimpin berbeda etnis yang berhasil hanya Basuki Tjahja Purnama, dan belum tentu pemimpin berbeda etnis di daerah lain berhasil. Sama halnya dengan informan U5 yang berpendapat, selama pemimpin berbeda etnis sukses merupakan sebuah keuntungan.

Selama dia memimpin sukses itu merupakan suatu keuntungan tapi yang di katakan oleh Pak Sukendar memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan yang sama dan hak yang sama dalam pemerintahan. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun secara tidak langsung pendapat informan U5 yakni tergantung hasil kinerjanya, disisi lain informan U5 setuju dengan pendapat informan U1 yang

menyatakan siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah, bahwa secara Undang-Undang kedudukan hak dan kewajiban sama dalam pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (www.dpr.go.id).

Sama halnya dengan informan U1, U2, U3, U4, dan U5, karena belum terpilih menjadi wakil bupati, informan U7 melihat sebuah keuntungan atau kerugian dari hasil kinerjanya.

Ini kan belum jadi wakil bupati ya, berarti belum tahu untung dan ruginya tapi sebelumnya sekilas kalau dia bisa memimpin masyarakat dengan baik saya rasa ada keuntungannya, tapi kalau ruginya saya rasa ketika tidak jadi pemimpin ruginya finansial saja. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U7 melihat kemungkinan kerugian secara langsung bukan ke Kabupaten Sidoarjo, melainkan kandidatnya sendiri yang rugi secara finansial karena gagal memimpin suatu daerah. Kerugian finansial tersebut dikarenakan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk berkampanye, seperti yang dikatakan oleh Firmanzah (2008) menyatakan bahwa harga meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat-akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye. Namun berbeda dengan informan U6 yang berpendapat, kerugiannya lebih pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tidak tertarik dengan pemimpin yang berbeda etnis, dimana lebih baik memilih kaum pribumi yang pandai.

Kalau untungnya bisa mensejahterakan masyarakat, ruginya masyarakat utama Sidoarjo memandang etnis Tionghoa tidak tertarik, saya pribadi kurang tertarik kalau ada pribumi kenapa sih nggak pilih pribumi yang lebih pandai dan yang lebih mumpuni ya. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun terlebih ada sebuah keuntungan seorang pemimpin dapat mensejahterakan masyarakat, hal tersebut sudah menjadi tugas kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id). Tetapi informan U8 mengingatkan hendaknya sebagai masyarakat tidak perlu skeptis terhadap etnis tertentu.

Saya rasa pada umumnya kita tidak perlu skeptis bahwasanya etnis apa mau Arab, India atau Jawa dari mana saja saya rasa tidak apa-apa, otomatis nanti rakyat bisa menerima, itu hanya mindset mereka tidak mengingat sejarah atau jas merah siapa yang dulu pertama jadi orang islam kan orang Cina. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Apapun latar belakang baik etnis Arab, India, Jawa, bahkan Tionghoa, secara tidak langsung informan U8 menerima sebagai sesuatu yang positif. Hanya pemikiran masyarakat yang terkadang sering lupa akan sejarah, dimana orang islam pertama di Indonesia dari etnis Tionghoa. Hal yang dimaksudkan informan U8 adalah walisongo, dimana disalah satu buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, membeberkan nama-nama asli Walisongo yang asli Cina atau Tionghoa dan sangat jauh dari kesan berbau Arab. Salah satunya Prof. Slamet Muljana menyimpulkan bahwa Sunan Ampel aslinya bernama Bong Swi Hoo, kemudian menikah dengan Ni Gede Manila yang merupakan anak Gan Eng Cu (mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423) (Muljana, 2008).

5.2.2.2 Tan Mei Hwa Berkomunikasi Dengan Masyarakat

Menurut Haroen (2014) dalam berkomunikasi perlu dibedakan dari pendekatannya dan alatnya. Salah satunya berkomunikasi melalui kinerja, keterlibatan dalam berbagai kegiatan publik, diantaranya ikut terlibat dalam kerja

bhakti dengan kontribusi yang berbeda, ikut terlibat dalam konflik isu yang sedang menjadi perbincangan, dimana keterlibatan tersebut untuk kepentingan publik. Kemudian dapat juga berkomunikasi secara verbal di panggung khusus yang memang telah dipersiapkan, diantaranya kampanye atau debat kandidat yang dihadiri banyak orang, sehingga perlu kemampuan berbicara di depan umum supaya mendapatkan reputasi yang tinggi.

Maka terkait dengan komunikasi, Tan Mei Hwa sebagai calon kepala daerah harus dapat berinteraksi dengan memperhatikan dan memahami, baik permasalahan atau kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sehingga perlu mengetahui cara Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil kinerjanya sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) memiliki pendapat Tan Mei Hwa dalam secara komunikatif dan terjun langsung ke masyarakat. Adapun informan P1 mengatakan karena Tan Mei Hwa pada dasarnya seorang pendakwah, maka ilmunya dalam berkomunikasi tinggi.

Untuk dari segi komunikasi Bu Tan Mei Hwa ini dapat dikatakan elektabilitasnya cukup tinggi menurut saya, karena Bu Tan Mei Hwa itu sangat merakyat tidak hanya di Sidoarjo, bahkan di kalangan regional Jawa Timur sudah terkenal, istilahnya untuk masyarakat Sidoarjo sendiri Beliau sangat mudah untuk masuk ke kalangan masyarakat. Karena itu tadi pendakwah itu kan ilmu komunikasi dakwahnya pasti tinggi dan dari situlah Beliau memiliki kelebihan masuk ke dalam masyarakat, kemungkinan besar Bu Tan Mei Hwa bisa mengambil hati rakyat, bisa menjadi wakil bupati di Sidoarjo. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena kelebihan Tan Mei Hwa seorang pendakwah, maka untuk masuk ke dalam masyarakat sangat mudah, jadi bisa mengambil hati rakyat untuk mendapat dukungan menjadi kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo. Cara Tan Mei Hwa dalam mengambil hati melalui dakwah sesuai dengan pendapat O'Shaughnessy (1995)

bahwa Tan Mei Hwa sebagai produk politik sangat terkait erat dengan mekanisme jangkauan dan penetrasi produk. Disamping itu informan P1 menyatakan banyak dukungan terhadap Tan Mei Hwa dikarenakan merakyat dengan masyarakat dan menjadikan elektabilitas Tan Mei Hwa tinggi. Meskipun pada nyatanya yang dilansir oleh Badrus (2015) pada halaman situs DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan judul “Survei Pilkada Sidoarjo The Republic Institute, Inilah Popularitas dan Elektabilitas Masing-Masing Calon”, menjelaskan persentase popularitas calon wakil bupati untuk tanggal 3-9 agustus 2015, yakni Abdul Kolik 45,6%, Nur Ahmad Syaifuddin 36,7%, Tan Mei Hwa 33,5%, dan Imam Sugiri 35%.

Begitupun dengan informan P3 yang berpendapat, Tan Mei Hwa berkomunikasi hanya melalui dakwah.

Setauku Bu Tan Mei Hwa itu berkomunikasi hanya melalui dakwah, dakwah di khitanan, di pernikahan, di acara-acara hajatan seperti itu. Mungkin dakwahnya tidak jauh dari dengan agama atau beribadah, seperti itu saja yang saya tau dari Ibu Tan Mei Hwa. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Meskipun dakwah Tan Mei Hwa yang diketahui oleh informan P3 berbeda-beda tempatnya, seperti di khitanan, di pernikahan, yang pasti acara hajatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, dan tidak jauh dari unsur agama dan beribadah. Tetapi berbicara masalah berdakwah adanya perbedaan dengan yang dikatakan oleh Indra (2014) dalam artikelnya yang berjudul “Tan Mei Hwa, Apa Yang Diucapkan Juga Menjadi Perilakunya Sehari-hari”, yang menjelaskan bahwa Tan Mei Hwa melakukan dakwah dengan pengajian seperti pada gambar IV.4 dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga secara luas ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya seperti pada gambar IV.11 Tan Mei Hwa berdakwah di TV9 dan JTV.

Kemudian informan P4 juga mengatakan Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat dengan berdakwah melalui pengajian, salah satunya di desa Pecantingan, Sekardangan-Sidoarjo.

Sepengetahuan saya komunikasi Beliau dengan masyarakat Sidoarjo itu yang pertama mengadakan pengajian di desa Pecantingan, Sekardangan. Kemudian dia komunikasi dengan menyerahkan hewan kurban sapi di desa Sugihwaras dan suka berkumpul dengan pengamen yang kebetulan ketemu di Sop Pak Amin, sepengetahuan saya sampe itu aja sih. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P4 berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, salah satunya menyerahkan hewan kurban sapi di Desa Sugihwaras dan berkumpul dengan pengamen yang kebetulan bertemu saat makan di Sop Pak Amin. Hal yang disampaikan oleh informan P4 sesuai dengan yang dipublikasikan oleh Akun resmi Facebook dari Uswatan (Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa), dimana Tan Mei Hwa memberikan kurban sapi dan berkumpul dengan pengamen di Sop Pak Amin seperti yang dilansir oleh Ismail (2015) dalam artikelnya yang berjudul “Tan Mei Hwa Kumpul Pengamen Di Sop Pak Amin”



**Gambar V.2 Tan Mei Hwa Kumpul Pengamen Di Sop Pak Amin
(sumber: beritajatim.com)**

Mengenai Tan Mei Hwa terjun langsung ke masyarakat didukung juga oleh informan P7, yang secara langsung melihat Tan Mei Hwa terjun untuk berkorban di Desa Sugihwaras, Sekardangan-Sidoarjo.

Kalau dari komunikasi Bu Nyai Tan Mei Hwa cukup bagus, dia langsung terjun ke masyarakatnya, seperti saya lihat sendiri di Sugihwaras, dia terjun langsung untuk berkorban, sangat ramah dengan masyarakat setempat dan itu yang saya suka. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Disamping itu informan P7 menilai Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi sangat ramah dengan masyarakat setempat, dan hal tersebut menjadikan informan P7 menyukai Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi. Segala bentuk interaksi Tan Mei Hwa dengan masyarakat secara tidak langsung sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Haroen (2014) yang menganjurkan dalam komunikasi perlu memerhatikan cara pendekatannya, salah satunya ikut terlibat diantara masyarakat yang nanti hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Tetapi berbeda dengan informan P6 dan P2 yang benar-benar belum mengetahui bentuk komunikasi dari Tan Mei Hwa.

Menurut saya sih belum tau benar-benar bentuk komunikasinya. *(Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)*

Menurut saya sih belum tau benar-benar bentuk komunikasinya. *(Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)*

Bahkan informan P5 juga belum mengetahui pasti bagaimana Tan Mei Hwa berkomunikasi dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

Sejauh yang saya tau kalau komunikasi untuk pilkada ini jujur saya belum pernah tau Ibu Tan Mei Hwa ini seperti apa komunikasi dengan masyarakat Sidoarjo, cuma yang saya tau kemarin pas daftar pencalonan, itu Beliau sama pasangannya naik sepeda kalau gak salah ke KPUD Sidoarjo, menurut saya bagus sih bentuk komunikasinya. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sepengetahuan informan P5 komunikasinya bagus, karena saat pendaftaran Tan Mei Hwa bersama dengan pasangan politiknya yakni Utsman Ikhsan, menggunakan sepeda saat menuju KPUD Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dinilai bagus oleh informan P5, karena secara tidak langsung Tan Mei Hwa ingin

menanamkan *personal brand*nya kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan nilai kesederhaan dengan cara tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) berpendapat komunikasi Tan Mei Hwa komunikatif dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Adapun informan U1 mengatakan Tan Mei Hwa memiliki komunikasi yang baik secara gestur dan komunikasi, dengan kata lain Tan Mei Hwa merupakan seseorang yang ekspresif (Mulyana, 2007).

Iya kalau melihat saat debat di JTV, sebenarnya kalau melihat gesturnya pada saat dia berkomunikasi, bagaimana dia ingin mengeluarkan ide-ide yang mungkin di kepalanya cukup banyak, tapi kalau sedang debat berarti ada lawannya pada saat itu Pak Gusman yakni lawan temannya dia. Kalau melihat dia sangat komunikatif, saya sebagai orang luar atau masyarakat biasa artinya yang dia presentasikan itu messagenya masuk, apa yang ingin dia sampaikan itu masuk, cuma kesempatan menyampaikannya itu yang kurang diberi waktu leluasa oleh Pak Utsman. Tetapi dia sebagai seorang ustadzah, saya kira dia memiliki komunikasi yang baik secara gestur dan komunikasinya bagus. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Secara tidak langsung informan U1 sedang menjelaskan mengenai Tan Mei Hwa yang berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa nonverbal yakni gestur dan bahasa verbal yakni komunikasi atau berbicara secara langsung. Hal tersebut artinya Tan Mei Hwa mempunyai sebuah pesan verbal tertentu/khas juga dilengkapi dengan pesan nonverbal tertentu/khas yang sejajar dengan pesan verbal tersebut (Mulyana, 2007). Meskipun informan U1 mengakui Tan Mei Hwa tidak mempunyai waktu banyak untuk berkomunikasi, tetapi informan U1 merasa pesan yang disampaikan oleh Tan Mei Hwa dapat diterima dengan baik. Pengamatan informan U1 terhadap Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi bahasa verbal yang diikuti dengan bahasa nonverbal, hanya untuk memberikan penekanan pada beberapa bagian dari pesan verbal (DeVito dalam Moerdijati, 2012). Informan U1

melihat Tan Mei Hwa berkomunikasi ketika TV lokal menyiarkan debat kandidat calon kepala daerah Kabupaten Sidoarjo pada hari Sabtu 10 Oktober 2015, dan ditayangkan dari Studio JTV Surabaya Pk. 19.30-21.00 dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Memajukan Daerah, dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (kpud-sidoarjo.kab.go.id).

Begitupun dengan informan U2 yang mengakui Tan Mei Hwa seorang yang komunikatif tanpa batas.

Kalau melihat di TV sosok beliau itu komunikatif tanpa batas, seperti kalau kita melihat Ahok itu ceplas-ceplos ya, begitu ada pertanyaan ini langsung dijawab ada pertanyaan itu dijawab. Nah ini tidak ada batas, mau dimana enak-enak aja. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 menilai Tan Mei Hwa layaknya Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang ceplas-ceplos atau terus terang dan tidak berbelit-belit, seperti yang dilansir oleh Mulya Nur Bilkis dalam artikelnya berjudul “Ahok Ceplas-ceplos, Nasdem: Daripada Ngomong Baik Tapi Nggak Kerja”, menjelaskan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak ragu marah pada bawahan dan doyan ceplas-ceplos, dan tidak jarang karakternya berujung adu mulut dengan tokoh lainnya (Bilkis, 2016). Tetapi juga dibuktikan sendiri oleh informan U2 saat debat kandidat di TV, ketika Tan Mei Hwa mendapatkan pertanyaan dari moderator, dan seketika itu juga langsung dijawab.

Sedangkan pendapat informan U3 secara pribadi tidak mengetahui, tetapi apabila melalui media TV Tan Mei Hwa memiliki komunikasi yang baik.

Kalau secara pribadi saya tidak tahu, tapi kalau secara umum di TV jelas komunikasi baik karena ada manajemen dakwah itu tadi. Bagaimana seorang pendakwah membuat yang mendengarkan itu bisa enjoy bisa enak, kalau manajemen tidak dilakukan mungkin tidak laku seperti ini, disini kan hanya manajemen saja. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U3 komunikasi baik Tan Mei Hwa, dikarenakan manajemen seorang pendakwah, dimana pendakwah berusaha membuat yang mendengarkan dapat nyaman. Sebab apabila tidak manajemen dakwah, informan U3 yakin Tan Mei Hwa tidak akan digunakan seperti saat ini, baik menjadi seorang pendakwah ataupun sebagai calon kepala daerah Kabupaten Sidoarjo. Secara tidak langsung informan U3 sedang membahas mengenai sebuah pesan, dimana pesan merupakan sesuatu yang dikirimkan dan atau diterima sewaktu tindakan komunikasi berlangsung (Moerdijati, 2012). Begitupun dengan manajemen dakwah yang dimaksud adalah Bentuk dan Teknik penyajian pesan, menurut Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Namun informan U4 mengembalikannya lagi pada dasar profesi seorang Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, maka dinilai bagus dalam berkomunikasi.

Kembali lagi sebagai ustadzah bagus sekali memang, dia punya program yang bagus, planning kontroling yang cukup bagus. Begitu tampil sebagai ustadzah tampil sangat menarik, orang-orang langsung ketawa, joke-jokenya keras, sehingga orang jarang yang mengantuk bahkan sampai ada orang disitu masih ingin terus dan ingin terus. Tapi begitu tampil di Pilkada sebagai calon wakil bupati tentunya W2 ini tidak terlalu didengar oleh massa, biasanya W1nya. Dimana-mana calon W1 yang dikenal, seandainya datang calon W2 dapat waktu sisa saja, padahal calon W2 ini yang menarik dan ditunggu-tunggu, akhirnya tidak terlalu berpengaruh karena menjadi ban serep seandainya terjadi apa-apa, sehingga komunikasi tidak akan pernah sampai. Begitu dia sebagai ustadzah, dia sebagai komunikator menyampaikan pesan pada komunikan yang ingin berdialog interaktif maupun monolog langsung dari satu pihak dan diterima oleh pihak lain tanpa harus kembali responnya, itu kalau sebagai ustadzah bagus tapi begitu timingnya dibawa ke Pilkada sebagai W2 orang tidak terlalu mendengarkan karena eventnya sudah berbeda apalagi waktunya hanya sedikit, demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U4 menilai Tan Mei Hwa bagus dalam berkomunikasi, karena mempunyai program *planning* dan *controlling* yang bagus, baik secara interaktif dua arah maupun linier satu arah. Dimana ketika Tan Mei Hwa tampil sebagai Ustadzah dapat menarik perhatian, karena pandai bercanda dengan peserta yang hadir dan menjadikan peserta tidak ada yang bosan serta ingin melanjutkan terus. Sedangkan ketika Tan Mei Hwa tampil sebagai calon wakil bupati tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, karena posisi Tan Mei Hwa hanya sebagai calon wakil bupati yang tertupi oleh dominasi pasangannya yakni Utsman Ikhsan selaku calon bupati. Sehingga informan U4 melihat pesan yang dikomunikasikan oleh Tan Mei Hwa tidak akan pernah sampai, hanya karena posisinya ditempat kedua sebagai calon wakil bupati.

Sebenarnya secara tidak langsung pendapat informan U1 hampir sama dengan informan U3, ketika Tan Mei Hwa tampil sebagai Ustadzah atau Pendakwah maka keberhasilannya dalam berkomunikasi mengacu pada Bentuk dan Teknik penyajian pesan, menurut Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Senada dengan informan sebelumnya, informan U5 mengakui komunikasi Tan Mei Hwa bagus dan sering kali hadir pada jamaah Al-Hidayah di sekitar kediaman informan U5.

Tan Mei Hwa memang untuk komunikasi bagus, itu sering diundang di tempat saya di jamaah ibu-ibu Al-Hidayah. Begitu mengetahui Beliau itu mencalonkan W2 disayangkan sama ibu-ibu, begitu bagus tapi sayangnya Pak Utsmanya seperti itu jadi jomplang. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi ibu-ibu jamaah Al-Hidayah tidak terlalu senang Tan Mei Hwa menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan Tan Mei Hwa yang sudah bagus harus bersama dengan Utsman Ikhsan, dan terkesan tidak seimbang. Tidak keseimbangan antara yang dimaksudkan oleh informan U5 adalah status Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana, hal tersebut sesuai dengan yang diberitakan oleh Bruriy Susanto pada artikel situs www.suarasurabaya.net yang berjudul “Mantan Napi Maju Pilkada Yakin Dapat 80 Persen Suara”, yang menjelaskan Utsman Ikhsan merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003, dan pencalonannya didukung dari partai koalisi, PKS dan Gerindra sebagai calon Bupati Sidoarjo, serta simpatisan yang setia mendukungnya (Susanto, 2015).

Begitupun dengan pendapat informan U6 menilai komunikasi Tan Mei Hwa bagus karena dapat membuat tertawa jamaah yang hadir.

Kalau Bu Tan Mei Hwa itu komunikasinya cukup bagus bisa membuat tertawa ibu-ibu, tetapi kalau untuk sebagai calon wakil bupati nampaknya memang kurang, kurangnya di calon bupatinya kurang pas. Jadi kalau komunikasinya memang bagus setahu saya di TV memang bagus, tetapi masyarakat Indonesia memang aneh, contohnya saya ikut caleg dua kali tetapi pandangan masyarakat itu selalu uang uang uang gitu, kalau mengadakan pertemuan kalau tidak ada uang itupun tidak ditanggapi, mungkin masyarakat Indonesia kurang mampu atau gimana yang dipikirkan selalu uang aja. Selama dua kali itu hanya uang uang uang aja, walaupun jungkir balik setengah mati itu mas tidak berarti apalagi memberikan pengajian sudah tidak di tanggapi, mereka datang yang penting ada uang, itu masyarakat Indonesia yang sangat disayangkan. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pengalaman informan U6 dalam Pemilihan Legislatif menjelaskan, bahwa dalam politik segala bentuk pendekatan dengan warga menggunakan uang, meskipun mengadakan sebuah pengajian layaknya Tan Mei Hwa, tidak akan berarti dan tidak ditanggapi oleh masyarakat apabila tidak memberikan sedekah uang. Secara tidak langsung gambaran politik tersebut menjelaskan yang dikatakan oleh

Firmanzah (2007), dimana perpolitikan sebagai materialisme politik, dan segalanya harus dapat dimaterialkan serta dijadikan objek, hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai-nilai, dan norma politik menjadi kurang relevan. Dapat dibuktikan ketika pemilih Indonesia lebih senang dengan hal yang mudah dipahami, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan disentuh langsung, contohnya pengalaman informan U6 yang selalu menggunakan uang untuk melakukan pendekatan dengan rakyat dan pengalaman Tan Mei Hwa seperti pada gambar IV.10 yang memberikan amplop ketika selesai mengadakan pengajian.

Namun berbeda dengan informan U7 yang menilai bagus tidaknya komunikasi Tan Mei Hwa, tergantung keberhasilannya sebagai calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

Ya terima kasih, saya simpel saja berhasilnya suatu misi kalau komunikasinya baik, cepat, lancar. Terutama misi pertempuran misalnya, nomor satu itu komunikasi, kalau komunikasinya tidak baik pasti tidak berhasil, hancur dengan musuh. Begitu juga misi untuk di Pilkada tidak berhasil berarti komunikasinya jelek, itu penilaian saya. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Dasar penilaian tersebut dikarenakan informan U7 adalah purnawirawan TNI Angkatan Udara, maka pendapatnya mengibaratkan sebuah pertempuran, dimana yang utama adalah komunikasi, karena apabila komunikasi tidak berhasil maka hancur dengan musuh. Kegagalan dalam komunikasi yang diibaratkan oleh informan U7, sebenarnya tergantung dari ketepatan unsur-unsur proses komunikasi yang ada, dimana menurut Moerdijati (2012) unsur proses komunikasi terdiri dari, Sumber-Penerima, Konteks, Pesan, Saluran/Media, Enkoding-Dekoding, Gangguan, Efek, dan Umpan Balik. Bahkan informan U8 berpendapat, sebagai apapun komunikasi yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa, apabila bukan dari kaum pribumi masih sulit memenangkan hati masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Sebagus-bagusnya orang untuk di Sidoarjo biasanya kalau belum pribumi memang masih sulit. Sebelum tahun 1990an, saya mantan kepala desa, saya orang dari Tulungagung mencalonkan diri tanpa uang tetapi pencitraan kita sudah besar, sampai dulu pengurus kepala desa berkata ngapain kok mau dijajah sama orang pendatang. Jadi Tan Mei Hwa jelas secara umum itu bagus, cuma dalam Pilkada saya rasa masih kurang dan faktor tadi itu ngapain kok mau dijajah oleh pendatang. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun secara tidak langsung Informan U8 memberikan penilaian bagus terhadap komunikasi Tan Mei Hwa, tetapi ditegaskan kembali dengan pengalaman informan U8 ketika menjadi kepala desa di Tulungagung sebelum tahun 1990, dimana informan U8 dalam mencalonkan tidak memerlukan uang untuk membangun sebuah pencitraan, karena masyarakat masih tidak ingin dijajah dan dipimpin oleh pendatang.

5.2.2.3 Perihal Yang Disampaikan Tan Mei Hwa

Menurut Haroen (2014) hal yang perlu diperhatikan apa yang akan dikomunikasikan, seharusnya semata-mata bukan karena rencana pencalonan, hal tersebut terlalu sederhana dan sering kali tidak dapat menggerakkan energi orang lain untuk bisa mendukung dalam berbagai hal. Jadi yang harus dipikirkan oleh Tan Mei Hwa bukan hanya kepentingan pribadi semata dan mengabaikan kepentingan khalayak, justru kepentingan khalayak yang harus diutamakan sehingga mempunyai alasan mengapa harus mendukung. Sebab ketika khalayak terpenuhi kebutuhannya, maka nilai-nilai dari pribadi dapat dirasakan khalayak dan semakin tegas *personal brand* yang tertanam dibenak khalayak.

Maka dari itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai perihal apa yang paling dominan disampaikan oleh Tan Mei Hwa kepada masyarakat, karena hal tersebut nantinya akan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) banyak yang tidak terlalu mengetahui secara detail apa yang dominan Tan Mei Hwa sampaikan pada masyarakat. Adapun informan P2, P6, dan P7 secara terus terang tidak mengetahuinya.

Nggak tau, hehehe (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Untuk itu saya kurang tau mas. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Untuk komunikasinya saya tidak pernah secara langsung. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ketidaktahuan oleh informan P2, P6 dan P7 sejatinya dapat dikarenakan banyak faktor, salah satunya dapat terjadi Tan Mei Hwa kurang matang dalam pemilihan saluran media, seperti yang disampaikan Rothschild (1978) dalam pemilihan media untuk penetrasi pesan politik ke publik memiliki tingkat perbedaan antara media TV, Radio, Cetak, dll, bergantung pada wilayah untuk menjamin efektivitas pesan politik yang disampaikan.

Faktor lainnya adalah kelompok informan P termasuk pemilih skeptis, dimana tidak memiliki ikatan emosi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat (Firmanzah, 2008), menjadikan keaktifan dalam mencari atau mendapatkan informasi mengenai Tan Mei Hwa kurang.

Begitupun dengan informan P3 dan P4 lebih mengetahui hal dakwah yang disampaikan oleh Tan Mei Hwa, karena berdasarkan latar belakangnya sebagai pendakwah.

Setauku Beliau untuk berdakwah saja, lainnya itu aku kurang tau. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ya sama seperti itu hanya dakwah saja. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Keterbatasan informan P3 dan P4 dalam mengetahui apa yang disampaikan Tan Mei Hwa, dimungkinkan karena media untuk mendapatkan informasi tentang kandidat yang bertarung dalam kontestasi politik hanya sebatas media TV, layaknya informan P3 dan P4 yang mengetahui Tan Mei Hwa dari dakwahnya di TV lokal. Bahkan informan P5 hanya mengetahui satu hal dari Tan Mei Hwa yang ingin memberdayakan perempuan melalui Batik Sidoarjo.

Setauku sih memberdayakan perempuan Sidoarjo itu aja, mungkin lewat Batik Sidoarjo. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Penuturan informan P5 setidaknya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ismail (2015) dalam artikelnya “Nyai Tan Setuju Perempuan Dilibatkan Musrenbang Desa”, mengenai Tan Mei Hwa ingin perempuan ikut dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang Desa), supaya dapat mengapresiasi suara perempuan dan meningkatkan potensi perempuan pada ekonomi kreatif masyarakat desa, seperti jargonnya yakni “Lanang Tok Gak Sip Rek” yang dicantumkan pada semua media promosinya. Selain itu sebenarnya informan P5 juga sudah menyebutkan salah satu program Tan Mei Hwa dari 5 program yang menjadi produk politiknya (uswatan.com).

Namun berbeda dengan informan P1 yang benar mengetahui hal apa yang disampaikan oleh Tan Mei Hwa, salah satunya 5 program kerja yang menjadi andalan Tan Mei Hwa.

Untuk mengenai program dari Tan Mei Hwa sendiri, jujur saya belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan Beliau, mengikuti kampanye Beliau atau melihat Beliau berkampanye, tetapi minimal saya sudah pernah membuka salah satu websitenya Beliau tentang strategi-strateginya, untuk Pilkada itu masalah klasik sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, ya klasik lah seperti itu, yang paling penting adalah nanti bagaimana mereka merealisasikan janji-janji mereka itu. Nah yang paling penting juga untuk Kabupaten Sidoarjo ini adalah dalam hal ketegasan, beberapa kasus itu pemerintah Sidoarjo tuh kurang berani secara tegas seperti Kota Surabaya, contohnya frontageroad yang seharusnya dilanjutkan dari Waru ke Sidoarjo, itu sangat lama sekali eksekusi oleh pemerintah Kabupaten, bahkan Mall Cito

pun sangat cepat diatasi oleh Bu Risma. Nah harapannya pemimpin Sidoarjo lebih tegas dan lebih jujur tidak ada permainan mafia didalam pemerintah itu. Saya menangkap 5 program dari Bu Tan Mei ini, tapi yang jadi pertanyaan mengapa masyarakat Sidoarjo banyak yang belum nggeh dengan strategi Beliau. Sebenarnya Bu Tan Mei Hwa itu memikirkan bagaimana cara mencitrakan dirinya, oke kenyataanya Bu Tan Mei Hwa dekat dengan rakyat, merakyat dan masuk dalam rakyat, tapi harusnya bagaimana Bu Tan Mei Hwa bisa membranding dirinya ini terlihat dengan diliput, dibuat suatu tanyangan yang mana mengarahkan masyarakat kalau Bu Tan Mei Hwa itu dengan rakyat dan itu sangat penting seperti Bu Risma dan Pak Jokowi itu benar-benar strategi yang sangat jitu di era saat ini yang berbeda dengan era- era jaman dulu. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Mengenai Tan Mei Hwa, Informan P1 menegaskan tidak pernah berkomunikasi secara langsung, tidak pernah mengikuti kampanye secara langsung, dan tidak pernah melihat Tan Mei Hwa secara langsung. Tetapi informan P1 mengkonsumsi media internet untuk mendapatkan informasi mengenai Tan Mei Hwa, dan mendapati strategi 5 program kerja yang menjadi andalan Tan Mei Hwa untuk bertarung dalam kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo yakni mengenai Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (uswatan.com). Kelima program kerja tersebut dinilai oleh informan P1 adalah hal klasik atau secara tidak langsung program kerjanya terlihat ketinggalan jaman dan tidak ada terobosan baru dari Tan Mei Hwa.

Paling terpenting menurut informan P1 adalah realisasinya dan sebuah ketegasan dalam kepemimpinan, contohnya perihal *frontage road* yang menjadi rencana Kabupaten Sidoarjo dalam mengurai kemacetan, informan P1 menilai pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlalu lama dalam eksekusi realisasinya, berbeda dengan Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini yang begitu cepat membuka *frontage road* depan Mall City Of Tomorrow.

Meskipun Informan P1 berpikir ada mafia dalam realisasi, tetapi menurut penuturan Irwan Syairwan dalam artikelnya pada surabaya.tribunnews.com dengan

judul “Ini Penyebab Kembali Molornya Proyek Frontage Road Waru-Buduran Sidoarjo”, menjelaskan bahwa permasalahan utama pada pembebasan lahan karena belum jelasnya batas-batas antara lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga sekitar, masih banyak yang tidak sinkron antara sertifikat dengan kondisi nyata di lapangan. Total pembangunan *frontage road* yakni 9.200 meter, diantaranya 2.850 meter milik warga, 4.750 meter milik swasta dan 1.600 meter milik instansi pemerintah (Syairwan, 2016).

Kemudian informan P1 juga mempertanyakan mengenai kelima program kerja Tan Mei Hwa yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Meskipun Tan Mei Hwa sudah dekat dengan rakyat, merakyat, dan masuk dalam rakyat, informan P1 merasa Tan Mei Hwa belum *membranding* dirinya dengan baik karena hasilnya tidak seperti Tri Rismaharini dan Joko Widodo.

Berbicara mengenai tingkat pengetahuan masyarakat akan informasi seorang kandidat dalam politik, memiliki beberapa faktor penyebab layaknya informan P2, P6 dan P7 yang juga tidak mengetahui hal dominan apa yang disampaikan oleh Tan Mei Hwa, selain karena saluran media dan keaktifan calon pemilih, dapat juga kurang kuatnya karakteristik *personal brand* yang terdiri dari kekhasan, relevansi, dan konsistensi (David McNally & Karl D. Speak, 2004), serta kurang kuatnya dimensi *personal brand* yang terdiri dari Karakter, Kompetensi, dan Kekuatan (Haroen, 2014).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) hal yang paling dominan yakni terkait permasalahan agama dan permasalahan perempuan di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun informan U2 yang berpendapat, karena latar belakangnya seorang ustadzah, maka paling dominan hal mengenai agama.

Kalau dari Tan Mei Hwa karena backgroundnya sudah ustadzah, terus Beliau juga punya Azhara, jadi kalau melihat sosok Beliau itu dominannya sebagai konsultan, dia selalu mendengarkan dan selalu menjawab apa yang disampaikan. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 mengibaratkan Tan Mei Hwa layaknya konsultan yang selalu mendengarkan dan menjawab segala permasalahan yang disampaikan oleh siapapun, disamping karena Tan Mei Hwa juga memiliki yayasan Az-Zahra. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Steven Indra dalam artikelnya “Tan Mei Hwa, Apa Yang Diucapkan Juga Menjadi Perilakunya Sehari-hari”, yang menjelaskan Tan Mei Hwa yang telah genap berusia 47 tahun memiliki lembaga Az-Zahra yang bergerak dibidang pelatihan, konsultasi dan majelis dzikir, pelatihan lembaga ini melayani perusahaan walau itu milik non muslim, sedangkan untuk konsultasi Tan Mei Hwa tidak memungut biaya dengan syarat kliennya dibatasi satu orang saja tiap harinya supaya konsultasi atau masukan yang diberikan kepada klien lebih tepat sasaran (Indra, 2014).

Begitupun dengan informan U3 secara singkat mengatakan, paling dominan Tan Mei Hwa sebagai Ustadzah papan atas dan dalam politik hanya seorang perempuan di Kabupaten Sidoarjo.

Ini kalau secara pribadi dominannya ustadzah papan atas gitu aja, kalau masalah politik dominannya hanya seorang perempuan di Sidoarjo. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U3 secara tidak langsung melihat Tan Mei Hwa dari latar belakangnya yang kuat sebagai Ustadzah yang terkenal, karena dakwahnya sudah merambah media massa TV lokal. Disamping itu melihat perawakan Tan Mei Hwa seorang perempuan, maka informan U3 melihat tidak jauh dari permasalahan

perempuan yakni kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan dibawa ke ranah publik untuk kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan (Subiakto & Ida, 2012).

Selanjutnya informan U1 juga menegaskan karena Tan Mei Hwa seorang perempuan, secara naluriah lebih dominan dengan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Dia kan dari kalangan perempuan secara naluriah dia pasti ingin meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan program mereka yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, peningkatan peran serta daripada wanita. Saya kira ini sesuatu yang alamiah, wajar-wajar saja karena kalau perempuan berpikrnya naluriahnya ya perempuan yang disekitar kehidupannya dia. Jadi kalau melihat jargonnya juga sudah bagus dan di Sidoarjo peran dari wanita masih kurang optimal, jadi saya kira Tan Mei Hwa ini sesuatu tradisi baru yang dibutuhkan oleh Sidoarjo tapi timing dan positioningnya yang kurang tepat, artinya kalau tembakau itu enak, kopi itu enak kalau dijadikan satu tidak enak, kembali lagi Tan Mei Hwa sebagai suatu aset dan berbicara aset berarti sesuatu kedepan butuh seorang Tan Mei Hwa. Bagaimanapun juga kita perlu orang-orang yang punya visioner kedepan, orang-orang yang lebih konsen kepada peningkatan dan peran serta dari pada perempuan. Melihat yang kecil saja misalkan sekolahan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak perempuannya, artinya mata rantai terbesar yang harus kita gerakkan adalah mata rantai yang paling banyak baru seterusnya. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Dimana informan U1 melihat Tan Mei Hwa menyampaikan pada masyarakat sesuai dengan programnya, yakni pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan peningkatan peran serta wanita, serta sesuai dengan jargon yang dimiliki Tan Mei Hwa “Lanang Thok, Gak Sip Rek”. Pendapat informan U3 mengenai program kerja ataupun jargon Tan Mei Hwa, sesuai juga dengan kondisi kenyataannya yang ditampilkan di berbagai media promosinya, seperti website pada gambar IV.14, Facebook pada gambar IV.15, Brosur pada gambar IV.17 dan IV.18, Poster pada gambar IV.19, Spanduk pada gambar IV.20, dan Panggung Kampanye pada gambar IV.21.

Kemudian pendapat informan U1 mengenai Tan Mei Hwa meningkatkan harkat dan martabat perempuan, sependapat dengan pernyataan Subiakto & Ida (2012) yang menjelaskan perempuan tidak jauh dari permasalahan kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan dibawa ke ranah publik untuk kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan. Tetapi informan U1 melihat Tan Mei Hwa belum tepat *timingnya* dan *positioningnya*, dimana Tan Mei Hwa diibaratkan sebuah aset yang diperlukan disaat yang tepat, karena melihat jumlah populasi perempuan lebih banyak yang artinya memerlukan perhatian lebih.

Hal yang dimaksudkan oleh informan U1 mengenai *positioning* adalah tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan atau produk, sehingga perusahaan atau produk dapat berada di posisi kompetitif yang bermakna dan berbeda di benak konsumen (Philip Kotler dalam Academy, 2010), maka *positioning* berperan penting untuk meningkatkan kesadaran pasar terhadap merek produk.

Terkait dengan *positioning* Tan Mei Hwa belum tepat menurut informan U1, secara tidak langsung menjelaskan bahwa Tan Mei Hwa merupakan sebuah produk yang berbeda dengan nilai aset yang bagus bagi kaum perempuan, tetapi tidak sesuai dengan pasangan politiknya, dikarenakan Tan Mei Hwa berpasangan dengan Utsman Ikhan yang menurut Susanto (2015) merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003. Serta informan U1 mengatakan *timing* yang tidak tepat, karena berhadapan dengan calon *incumbent* Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga

sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015).

Begitupun dengan informan U4 yang sependapat dengan informan U1 mengenai hal yang dominan adalah permasalahan perempuan, disamping itu sependapat juga mengenai *positioning* Tan Mei Hwa yang kurang tepat.

Kurang lebih demikian, tapi seandainya srikandi itu muncul yang dipasangkan tadi itu adalah srikandi yang berpasangan dengan orang yang basisnya banyak mungkin lebih pas meskipun dia W2, atau dia kembali lagi menjadi W1 meskipun pendukung partainya kecil mungkin disitu masih ada harapan karena peluang waktu untuk mendominasi itu ada, apalagi dia ada joke-joke dominan yang perlu diberikan pada kalayak di Sidoarjo khususnya muslimin. Nah itu disitu penting kelebihan dari ustadzah paling unik adalah di srikandinya, namun jangan lupa apakah srikandi ini dapat di tempatkan di Sidoarjo meskipun srikandi ini uniknya di tionghoanya, dia unik muslim ustadzahnya, namun apakah nilai jualnya disitu cocok dominan di Pilkadanya. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Terkait dengan *positioning* untuk menjadi calon wakil bupati, informan U4 secara tidak langsung memberikan dua pilihan terhadap Tan Mei Hwa. Pertama, Tan Mei Hwa sebagai srikandi dan posisi calon wakil bupati lebih tepat dipasangkan oleh kandidat yang memiliki jumlah basis partai banyak atau Kedua, Tan Mei Hwa sebagai calon Bupati meskipun pendukung partainya kecil.

Pada pilihan pertama yang dimaksud oleh informan U4 adalah berpasangan dengan *incumbent* yakni Saiful Ilah yang diusung oleh partai PKB, dimana dalam pemetaan suara partai politik, dimana basis suara partai politik yang terbesar dan menguasai 8 kecamatan dari 18 kecamatan yakni partai PKB (kpu-sidoarjokab.go.id), sehingga Tan Mei Hwa dapat meraih kemenangan dengan mudah dan memberikan implikasi terhadap programnya mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan pada pilihan kedua, Tan Mei Hwa dapat menjadi posisi di depan yakni sebagai calon bupati, meskipun basis partainya kecil tetapi setidaknya dapat

mengandalkan jumlah pemilih wanita yang lebih besar yakni perempuan 693.996 dan jumlah pemilih laki-laki 673.949 (kpud-sidoarjokab.go.id).

Pemberian sebuah pilihan Informan U4 terhadap Tan Mei Hwa karena pengalamannya berkecimpung bersama Partai Pemuda Indonesia, maka dengan adanya potensi nilai jual dari Tan Mei Hwa untuk menang di Kabupaten Sidoarjo, menjadikan informan U4 mengibaratkan Tan Mei Hwa menjadi seorang srikandi bagi Kabupaten Sidoarjo, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, srikandi merupakan wanita yang gagah berani atau pahlawan wanita yang diambil dari kisah pewayangan (kbbi.web.id).

Selain itu informan U5 juga mendukung pendapat informan U1 dan U4 mengenai hal yang dominan adalah permasalahan perempuan, disamping itu sependapat juga mengenai *timing* dan *positioning* Tan Mei Hwa yang kurang tepat.

Dia itu untuk menumbuhkan semangat kaum ibu, bagaimana untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai dari rumah tangga. Makanya kenapa beliau ingin tahu politik dari situ, cuma sayangnya kemarin ini kurang bagus pasangannya itu. Dia sangat peduli mas, dia mengadakan bakti sosial setiap satu tahun rutin itu pertama. Kedua, pengobatan gratis termasuk pengajian keliling kaum ibu-ibu, otomatis ibu-ibu terbangun adanya Tan Mei Hwa itu tadi. Jadi karena dakwahnya, memang dakwah membangun karakter mental secara islami, saya kira gitu. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U5 Tan Mei Hwa ingin membangun Bangsa dan Negara Indonesia dimulai dari rumah tangga, dimana dalam rumah tangga peran perempuan perlu diperhitungkan. Maka dari itu Tan Mei Hwa terjun ke partai politik, karena Tan Mei Hwa peduli dan ingin menumbuhkan semangat kaum ibu-ibu, seperti mengadakan bakti sosial rutin setiap tahunnya, pengobatan gratis, dan berdakwah dengan pengajian keliling bagi kaum ibu-ibu untuk membangun mental secara ajaran agama islam.

Selanjutnya dukungan juga dari informan U8 mengenai hal yang dominan Tan Mei Hwa sampaikan permasalahan perempuan, dan pencalonannya dalam *timing* dan *positioning* Tan Mei Hwa yang kurang tepat.

Jadi saya rasa hampir 20 tahun ibu Tan Mei Hwa jadi ustadzah, dominannya memang lebih ke perempuan memang betul. Jadi itu untuk memperbaiki ibu-ibu, tapi untuk yang ke politik terus terang aja saya rasa belum waktunya, mungkin sudah waktunya tapi salah pasangan. Jadi saya kira masih ada peluang 5 tahun kemudian, mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang mindsetnya itu dirubah, bagaimana bisa lebih bagus. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi informan U5 menegaskan untuk kemenangan dalam kontestasi politik baru dapat dicapai 5 tahun kedepan, mengingat *timing* dan *positioning* yang belum tepat dan berubahnya pemikiran masyarakat mengenai Tan Mei Hwa karena dampak pasangan politiknya Utsman Ikhsan. Berikutnya dukungan juga datang dari informan U6 yang berpendapat dominannya itu permasalahan perempuan, dari mendidik ibu-ibu panda memasak, dan lain sebagainya.

Singkat aja ya mas, dominannya di Tan Mei Hwa itu di perempuannya, mendidik ibu-ibu pandai memasak, dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi kurang pas pasangannya, tetapi kembali lagi untuk Sidoarjo itu memang kurang diminati, apalagi dari etnis Tionghoa karena Indonesia sendiri yang di ini kan kaum pribumi. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Namun kembali lagi pada pasangannya yang tidak tepat, sehingga kurang diminati. Disamping itu juga, karena informan U6 tidak terlalu senang dengan Tan Mei Hwa yang berasal dari keturunan Tionghoa dan masih lebih memilih kaum pribumi. Terlepas dari pendapat informan U6, pendapat informan U7 berbeda dengan yang lain, dimana justru, Tan Mei Hwa percaya diri dapat menang menjadi wakil bupati karena keturunan Tionghoa.

Kalau menurut saya, Tan Mei Hwa ini kan dari keturunan Tionghoa, ya yang paling dominan itu. Sehingga dia percaya diri pasti akan berhasil menjadi calon wakil bupati. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Secara tidak langsung informan U7 mengacu pada keberhasilan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai Gerindra, meskipun melalui dua tahap Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org).

5.2.2.4 Agama Sebagai Unsur Politik

Unsur Keagamaan menjadi salah satu point dalam relevansi, karena menurut David McNally & Karl D. Speak (2004) relevansi seharusnya dapat memahami dan memperhatikan apa yang penting untuk orang lain. Disamping itu bagaimana dapat memecahkan masalah orang lain. Sehingga dengan kata lain, latar belakang keahliannya dengan kebutuhan orang lain harus relevan supaya dapat dipercayai dengan mudah oleh masyarakat.

Maka dari itu Tan Mei Hwa dengan latar belakang Ustadzah atau Pendakwah menjadikan tidak jauh dari kegiatan keagamaan, salah satu pengajian yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk berdakwah, dengan harapan dapat memahami dan memperhatikan permasalahan dari jamaahnya.

Terkait hal tersebut secara tidak langsung Tan Mei Hwa memanfaatkan kesempatannya sebagai pendakwah untuk mencari pendukung dalam pencalonan sebagai wakil bupati di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai Tan Mei Hwa menggunakan unsur keagamaan seperti pengajian digunakan untuk mendulang suara dalam politik.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) semua mengatakan tidak masalah Tan Mei menggunakan pengajian untuk mencari dukungan dalam politik. Adapun informan P3 dan P7 berpendapat tidak apa-apa atau tidak masalah, asalkan tujuan positif dan tidak merugikan orang yang beragama islam.

Sebenarnya sih gpp, asalkan tujuannya positif dan tidak merugikan yang beragama islam. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut saya sih gpp itu salah satu bentuk kampanye dari Tan Mei Hwa. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 menambahkan bahwa pengajian itu dapat juga sebagai salah satu bentuk kampanye dari Tan Mei Hwa. Kampanye politik sendiri menurut Lilleker & Negrine (2000) periode yang diberikan kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu mencoblos (Lilleker & Negrine dalam Firmanzah, 2008). Sehingga secara tidak langsung informan P7 melihat Tan Mei Hwa menggunakan pengajian sebagai sarana untuk memaparkan program-program kerja dan memobilisasi jamaah untuk memberikan suaranya.

Selain itu pendapat informan P1 juga tidak masalah Tan Mei Hwa menggunakan pengajian sebagai sarana untuk mencari dukungan politik.

Hmm menurut saya sih tidak masalah, selama tidak merusak nilai-nilai agama itu, tidak merusak aqidah umat, hanya meyakinkan umat karena memiliki potensi sebagai wakil bupati tidak masalah. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P1 melihat Tan Mei Hwa hanya meyakinkan jamaah pengajiannya bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi wakil bupati, disamping itu selama tidak merusak nilai-nilai dan aqidah umat agama islam tidak masalah. Akidah yang dimaksudkan oleh informan P1 adalah sesuai dengan yang

dikatakan oleh Muhammad Singgih Pamungkas dalam artikelnya berjudul “Makna Akidah”, yang menjelaskan akidah bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu, tanpa ada keraguan.

Jika keyakinan tersebut sesuai dengan realitas yang ada maka akidah tersebut benar, namun jika tidak sesuai maka akidah tersebut bathil (Pamungkas, 2015). Maka dari itu informan P1 tidak masalah Tan Mei Hwa menggunakan pengajian dalam mencari dukungan, selama tidak merusak apa yang telah menjadi keyakinan umat atau jamaah pada ajaran agama islam.

Begitupun dengan pendapat informan P5 yang tidak masalah, Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari pendukung hanya bertepatan dengan latar belakangnya sebagai Pendakwah.

Hmm menurut saya sih ngga juga ya, mungkin kebetulan Beliau itu seorang pendakwah, ya yang biasa dilakukan ya pengajian, kalau memang orang-orang memilih dia karena pengajian-pengajiannya, itu kan pendapat masing-masing orang, tapi biasanya orang memilih karena dia tahu, kalau nggak kenal sama calonnya ngapain dipilih. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena informan P5 melihat hal yang memungkinkan dan yang terdekat untuk dilakukan oleh Tan Mei Hwa adalah pengajian, adapun masyarakat Kabupaten Sidoarjo memilih Tan Mei Hwa karena senang dengan pengajiannya tidak masalah karena pendapat setiap orang berbeda. Tetapi yang pasti orang memilih seorang kandidat sebagai kepala daerah dikarenakan kenal dengan calonnya, apabila tidak kenal sedikit kemungkinan untuk dipilih.

Hal yang disampaikan informan P5 mengenai kandidat dipilih karena mengenal pribadinya, sebenarnya sudah mengacu pada apa yang dikatakan oleh David McNally & Karl D. Speak (2004) bahwa relevansi akan dimulai ketika seseorang percaya bahwa *personal* dapat memahami dan memperhatikan apa yang

penting untuk orang lain, dan disitulah seorang calon pemilih memilihnya sebagai kandidat yang dipercaya.

Bahkan pendapat informan P2 dan P6 wajar-wajar saja Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mendapatkan dukungan, asalkan saling menghargai dan tidak berbau SARA.

Ya wajar-wajar aja, intinya jangan rasis itu aja. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Saling menghargai. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Dimana dalam artikel Ibnu Dawam Aziz, SARA merupakan kepanjangan dari Suku, Agama, RAS dan Aliran, dan satu metode pendekatan sosiologis primordialistik yang terdiri dari empat pendekatan tersebut terbagi dalam berbagai golongan / unsur tradisional primordialistik yang lebih kecil.

Sehingga dapat disimpulkan metode untuk mengurai dan melihat realita mengenai Suku, Agama, RAS dan Aliran yang ada di Negeri ini termasuk permasalahan yang bakal muncul dan jalan keluar yang harus ditempuh (Aziz, 2012), maka dari itu informan P3 dan P6 berharap jangan sampai permasalahan tersebut terjadi.

Senada dengan informan P3 dan P6, informan P4 juga menilai sah-sah saja Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari pendukung, asalkan dapat menghargai agama yang nonmuslim.

Menurut saya sih sah-sah saja, asalkan dia tetap bisa menghargai agama yang non-muslim itu tadi, kan cara dia berdakwah karena kebetulan dia islam, tapi dia harus tetap menghormati agama-agama lain. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P4, Tan Mei Hwa berdakwah karena bertepatan dengan agama yang dianutnya adalah islam, dimungkinkan akan berbeda cara mendapatkan dukungan apabila bukan agama islam. Disamping itu Tan Mei Hwa terlihat sekali

menggunakan strategi politik islam, dimana mendapatkan dukungan seutuhnya dari kelompok Muslim melalui partai atau organisasi Islam (Widyawati, 2014), sehingga informan P4 berharap Tan Mei Hwa dapat menghargai agama-agama lain.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) semua mengatakan tidak masalah Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari dukungan dalam politik. Adapun informan U2 mengatakan sah-sah saja tidak apa-apa.

Sah-sah saja tidak apa-apa, karena melihat sosok Beliau lagi memang awalnya sudah ustadzah kalau mau ke dunia politik udah tinggal ngelanjutin aja. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U2 karena dari awal Tan Mei Hwa sudah menjadi pendakwah, jadi dalam mencari dukungan dalam pencalonannya di politik hanya melanjutkan apa sudah dilakukan sebelumnya.

Hal tersebut yang dikatakan informan U2 benar adanya menurut data KPUD Kabupaten Sidoarjo, dimana Ida Astuti alias Tan Mei Hwa lahir di Tulungagung 13 Juli 1968 merupakan salah satu sedikit perempuan berketurunan etnis Tionghoa yang sangat menekuni dunia dakwah islam, dakwahnya berawal pada tahun 1993 yang ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya dengan pendakwah yang mencerahkan dan penuh dengan humor.

Selain itu dakwah yang dilakukan telah memiliki agenda kegiatan rutin sebelum pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dengan pengajian dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga terkenal secara luas ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya (kpud-sidoarjokab.go.id). Disamping itu informan U5

menegaskan, tidak ada Undang-Undang politik yang melarang berkampanye dalam agama.

Tidak ada aturan melarang berkampanye dalam agama, apa ada aturan di UU politik mengatur, karena masanya dia itu dari pengajian yang lebih efektif, kalau misalkan dilarang bagaimana dia bisa mencari masa seperti itu, disamping itu dia bisa mengarahkan secara agama terhadap konsituen. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Bahkan menurut Ferry Koto dalam artikelnya berjudul “Undang-Undang Yang Mengharuskan Agama Dilibatkan Dalam Memilih Pemimpin”, yang menjelaskan bahwa di Indonesia justru harus membawa-bawa agama dalam memilih pemimpin.

Bukan saja karena negara kita berdasarkan Pancasila yang mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, tetapi salah satunya terdapat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah didalam UU Nomor 18 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana dalam Bab III, Persyaratan calon kepala daerah, pada pasal 7 butir a sampai dengan butir u, dicantumkan persyaratan warga Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.

Pada pasal tersebut seorang calon harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, kemudian berhak diusung sebagai calon, baik melalui partai politik maupun lewat jalur independen. Secara khusus dalam Pasal 7 butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Syarat ini sama mutlaknya dengan syarat lainnya, seperti berpendidikan minimal SLTA (c), berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Walikota (e), dan seterusnya (Koto, 2016).

Pendapat informan U5 secara tidak langsung sama dengan Ferry Koto yang mengacu pada Undang-Undang tersebut, dan memang harus semestinya Tan Mei

Hwa melakukan hal tersebut, karena sebagai tokoh masyarakat, pemimpin, atau calon kepala daerah Kabupaten Sidoarjo harus menunjukkan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya yakni agama islam, serta mematuhi Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Selain itu informan U6 juga mendukung yang dilakukan Tan Mei Hwa dalam pengajian untuk mencari dukungan di politik.

Okelah tidak apa-apa ya, karena berpolitik itu melalui agama dikarenakan mayoritas agama masyarakat Indonesia agama muslim, jadi sah-sah aja kalau melalui pengajian dan sebagainya karena di pengajian ibu-ibu yang banyak, jadi pendekatan melalui ibu-ibu. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 melihat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, maka tidak salah menggunakan pendekatan agama khususnya pengajian untuk mengumpulkan dukungan, disamping itu dalam pengajian banyak dihadiri ibu-ibu seperti pada gambar IV. 4 dan sesuai dengan program kerjanya yang lebih mengarah pada permasalahan perempuan yakni kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan dibawa ke ranah publik untuk kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan (Subiakto & Ida, 2012).

Selanjutnya informan U7 secara singkat berpendapat tidak masalah, karena selama tujuannya kemaslahatan atau kemanfaatan untuk umat atau masyarakat tidak menjadi permasalahan.

Nggak masalah menurut saya, karena untuk kemaslahatan umat tidak apa-apa. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kemanfaatan yang dimaksudkan oleh informan U7 adalah supaya Tan Mei Hwa terpilih, implikasinya 5 program kerja yang telah disusun oleh Tan Mei Hwa yakni Sekolah Gratis, Kesehatan Murah, Jalan Mulus, Lapangan Kerja Tersedia,

dan Perempuan Sejahtera dapat terlaksana untuk masyarakat (uswatan.com). Begitupun dengan pendapat informan U1 yang mengatakan simbol-simbol atau kegiatan agama di Indonesia memberikan energi yang kuat untuk mendulang suara.

Saya kira di Jawa Timur bahkan di Indonesia, simbol-simbol agama atau kegiatan-kegiatan agama memberikan energi yang cukup kuat ya untuk mendulang suara, saya kira oke tidak apa-apa. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut Soekamto (2001) simbol sendiri berasal dari Yunani kata symboion dari symballo berarti menarik kesimpulan berarti memberi kesan. Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang dianut. Sehingga secara tidak langsung informan U1 menangkap, bahwa kegiatan simbol pengajian digunakan Tan Mei Hwa menyampaikan pesan pada sesama umat muslim untuk mendukungnya.

Kemudian dukungan datang juga dari pendapat informan U3 yang sah-sah saja menggunakan pengajian untuk mengumpulkan dukungan.

Yah sah-sah saja mas, paling tidak dalam politik bagaimana yang halal menjadi haram dan yang haram jadi halal. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena informan U3 melihat dalam politik sesuatu yang halal akan menjadi haram dan yang haram akan menjadi halal. Salah satunya permasalahan politik uang yang dibahas oleh KPUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam artikelnya “Dorong MUI Buat Fatwa Haram Politik Uang”, menjelaskan bahwa dalam kaedah islam, politik uang itu adalah haram, tetapi masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami kaedah islam tersebut, karena partai politik sering kali dikuasai oleh para pemodal, maka sulit dihindari proses kapitalisasi pemilu.

Kultur politik Indonesia adalah kultur politik pasar, maka siapa yang berani membayar paling tinggi tentu yang akan mendapatkan suara. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan maraknya politik uang dalam pemilu, Pertama, partai politik lahir dari gerakan sosial yang dituntut harus terus berinteraksi dengan masyarakat, ketika kultur politik kita adalah kultur politik pasar, maka berinteraksi dengan masyarakat harus dibayar.

Kedua, kapasitas partai politik dengan keuangan sangat terbatas, akibatnya partai politik tidak bisa membangun interaksi dengan masyarakat secara terus-menerus, hal tersebut menjadikan ketika pemilu akan berlangsung seorang kandidat atau partai politik baru turun ke masyarakat. Dalam kondisi-kondisi seperti itulah menjadikan masyarakat tidak percaya dengan partai, maka cara yang paling mudah membuat masyarakat percaya adalah politik uang (kpud-ntbprov.go.id).

Contohnya pengalaman pribadi informan U6 yang selalu menggunakan uang untuk melakukan pendekatan dengan rakyat ketika mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif dan pengalaman Tan Mei Hwa seperti pada gambar IV.10 yang secara tidak langsung memberikan imbalan amplop ketika selesai mengadakan pengajian.

Disamping itu informan U4 juga berpendapat baik adanya, Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mendulang suara dalam politik.

Kalau menurut saya baik, itu memang salah satu cara apalagi akademisnya dari sarjana hukum, sarjana hukum kan melenceng jadi lurus dan lurus menjadi melenceng tergantung dari argumentasinya dan pasalnya tapi harus jujur dan benar bukan karena uang. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Apalagi informan U4 melihat secara akademis, Tan Mei Hwa sebagai sarjana hukum dapat meluruskan sesuatu hal yang tidak sesuai menjadi sesuai, dan yang sesuai dijadikan seolah-olah tidak sesuai, bergantung kejujuran argumentasi dari

Tan Mei Hwa. Artinya informan U4 menjelaskan bahwa Tan Mei Hwa merupakan seorang yang pandai berargumentasi, apapun yang dilakukannya meskipun salah, tetapi seolah-olah tidak ada yang salah atau tidak terlihat salah.

Sama halnya dengan pendapat informan U8 yang tidak masalah dengan Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari pendukung dalam politik.

Saya rasa tidak masalah ya, karena jamannya sekarang itu begitu, mungkin caranya itu untuk ngiming-ngimingi doktrinnya selama ini lewat itu, kalau tidak lewat itu sulit juga karena mindset penduduk kita seperti jaman dulu kalau nyoblos ini masuk surga hahaha. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U8 melihat melalui pengajian adanya kemungkinan doktrin agama yang dilakukan Tan Mei Hwa sama seperti zaman dahulu, dimana yang mencoblos akan masuk surga.

Kemungkinan yang terpikir oleh informan U8, dikarenakan masih mendengar adanya keberadaan doktrin tersebut, seperti yang dilansir oleh Eko Widiyanto dalam artikel www.republika.co.id yang berjudul “Yang Tak Coblos PKB Takkan Masuk Surga”, menjelaskan bahwa terdapat buku baru terbitan DPP PKB yang menuai kontroversi di kalangan warga Nahdlatul Ulama, dalam buku berjudul 'Belum Terlambat Sebelum Kiamat' yang ditulis Dewan Syuro DPP PKB, KH Ushfuri Anshor, berisikan kalimat yang terbilang kontroversial.

Dalam halaman 8 buku tersebut, disebutkan warga NU yang tidak mencoblos PKB, tidak akan masuk surga. Dan Buku tersebut dapat dilihat di situs www.dpp.pkb.or.id dimana ditampilkan dalam versi file kompresi (rar) (Widyanto, 2013).

5.2.3 Karakteristik Konsistensi Tan Mei Hwa

Berdasarkan penjelasan David McNally & Karl D. Speak (2004) konsistensi akan menegaskan *personal brand* secara lebih jelas dan lebih ringkas dibandingkan dengan kecakapan yang paling terpoles dan paling banyak dipraktekkan sekalipun. Dalam sebuah hubungan, konsistensi akan terbentuk dari perilaku seseorang lagi, lagi dan lagi. Sehingga orang lain akan mempercayai *personal brand* dengan merasakan konsistensi yang dilakukan secara terus menerus, disisi lain orang lain memutuskan percaya setelah mengetahui prestasi yang diperoleh.

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai konsistensi Tan Mei Hwa selama ini di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) sebagian besar mengatakan Tan Mei Hwa tidak konsisten. Adapun pendapat informan P1 mengatakan Tan Mei Hwa tidak konsisten karena awalnya seorang Pendakwah menjadi seorang politisi.

Berbicara masalah konsisten jelas tidak, dia sebagai pendakwah kemudian menjadi seorang politisi, perlu dipertanyakan apa yang Bu Tan Mei Hwa cari dalam politik, seperti yang dikatakan banyak orang bahwa politik itu bertolak belakang dengan dunia dakwahnya dan bisa menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi akan dakwahnya. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P1 politik merupakan hal yang bertolak belakang dengan dunia dakwah, dan perlu dipertanyakan apa yang dicari seorang Tan Mei Hwa sebenarnya dalam politik, karena nantinya setelah berkiprah di politik akan menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan dakwahnya. Pendapat informan P1 secara tidak langsung menegaskan bahwa Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang ulama, seperti yang dikatakan Muhammad Shobri Azhari dalam artikelnya yang berjudul “Ulama dan Umara” yang menjelaskan, ulama merupakan

pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang (Azhari, 2014). Ketika pada dasarnya Tan Mei Hwa sudah menjadi penyambung lidah dan pewaris ilmu para nabi, maka informan P1 mempertanyakan apa yang sebenarnya dicari ketika Tan Mei Hwa terjun dalam politik, karena apabila masuk dalam politik tentunya dapat menyebabkan tidak dipercaya dan akan bersinggungan dengan pragmatisme partai politik seperti yang dikatakan oleh Firmanzah (2007), yang menjelaskan politik sebagai media kekuasaan, politik sebagai media jalan pintas, politik sebagai media kapitalis, dan politik sebagai materialisme. Begitupun dengan pendapat informan P3 melihat Tan Mei Hwa tidak konsisten, dimana seorang pendakwah harus pindah ke politik.

Tidak konsisten karena seorang pendakwah ngapain harus ke politik dan membuang waktu dan tenaga saja, banyak hal lebih bermanfaat daripada masuk politik atau memperdalam lagi ilmu agamanya. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena bagi informan P3 Tan Mei Hwa masuk dalam politik hanya membuang waktu dan tenaga, banyak hal yang lebih bermanfaat dengan memperdalam ilmu agamanya. Meskipun sebenarnya menurut Subiakto & Ida, (2012) masih banyak isu yang belum diperjuangkan, seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan.

Selanjutnya pendapat informan P6 juga sama, seharusnya Tan Mei Hwa tidak perlu ke politik, karena politik itu kotor.

Seharusnya tidak usah lari ke politik karena politik itu kotor dan nantinya bisa dipengaruhi kawan-kawan partai untuk korupsi karena uang di pemerintahan sangat besar bisa menggiurkan mata siapapun tanpa terkecuali Bu Tan Mei Hwa. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P6 khawatir, ketika Tan Mei Hwa masuk politik akan dipengaruhi kawan anggota partai politiknya untuk korupsi, karena uang dipemerintahan sangat besar dan dapat membangkitkan niat siapapun tanpa terkecuali Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Kekhawatiran informan P3 dapat dikarenakan pengalamannya selama ini melihat, bahwa korupsi dapat dilakukan oleh siapapun meskipun mempunyai keterkaitan erat dengan agama, layaknya yang diberitakan oleh Yohannie Lingasari dalam artikelnya di CNN Indonesia yang berjudul “Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara”, yang menjelaskan Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali divonis enam tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta subsider selama tiga bulan terkait kasus korupsi. Hakim juga memutuskan Suryadharma harus membayar kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dengan pengganti pidana penjara selama dua tahun. Suryadharma Ali didakwa menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Perbuatan itu dinilai telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi (Lingasari, 2016).

Melihat kasus yang terjadi, sebagai Menteri Agama seharusnya lebih menjunjung nilai agama seperti keadilan dan kejujuran. Perbuatan terkait jamaah haji seharusnya terbebas dari perbuatan yang menyimpang. Tetapi pada kenyataan hal tersebutlah yang menjadi gambaran banyak orang, apabila sudah terjun pada politik maka kemungkinan terburuk juga dapat terjadi, sekalipun itu menyangkut masalah agama.

Selain itu informan P7 juga mengatakan tidak konsisten, sebagai pendakwah berpindah menjadi pemimpin daerah.

Ya tidak konsisten karena dia sebagai penceramah kok ingin berpindah sebagai pemimpin daerah kan aneh, ya semoga dia bisa membuktikan tetap konsisten dalam dunia politik dan agama. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 hanya bisa berharap dapat tetap konsisten baik dalam dunia agama dan dunia politik. Sebenarnya informan P7 secara tidak langsung menjelaskan mengenai seorang Ulama yang berpindah ke Umara, layaknya yang publikasikan Muhammad Shobri Azhari dalam artikelnya yang berjudul “Ulama dan Umara” yang menjelaskan, perbedaan mendasar dari ulama dan umara, yakni ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang.

Sedangkan *umara* adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengurus kehidupan masyarakat, dimana kebijakan dan keputusannya dalam hukum dan peraturan ditegakkan demi ketenteraman umum (Azhari, 2014). Penjelasan tersebut menjelaskan Tan Mei Hwa sebagai Pendakwah atau Ulama mempunyai tugas yang berbeda dan dikhawatirkan ilmu agamanya untuk membeli dunia, serta kontras dengan perilakunya sehari-hari.

Tetapi berbeda dengan informan P2 yang memandang selama ini Tan Mei Hwa konsisten dengan tetap memperjuangkan perempuan dan yang diajarkan agama islam.

Bu Tan Mei Hwa konsisten, meskipun di politik dia tetap memperjuangkan wanita atau yang diajarkan agama, jadi sebenarnya tidak masalah masuk politik asalkan Bu Tan Mei Hwa tidak berubah. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P2 tidak masalah Tan Mei Hwa masuk ke ranah politik, asalkan tetap konsisten memperjuangkan perempuan dan sesuai dengan ajaran agama islam.

Hal yang disampaikan informan P2 senada dengan Subiakto & Ida, (2012) masih banyak isu yang belum diperjuangkan, seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan. Sedangkan informan P4 juga merasakan Tan Mei Hwa selama ini konsisten-konsisten aja.

Konsisten-konsisten aja sih, karena jamaahnya jumlahnya banyak dan banyak yang apresiasi dia sebagai pendakwah dan yang dilakukan untuk orang banyak, apalagi kalau dia jadi pemimpin. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P4 membuktikan kekonsistenan Tan Mei Hwa dengan jumlah jamaahnya tetap banyak, seperti pada gambar IV.4 dan gambar IV.9 yang terlihat suasana ketika pengajian berlangsung dipenuhi dengan jamaah. Sekaligus apresiasi terhadap profesinya sebagai pendakwah, seperti pada gambar IV.11 Tan Mei Hwa sudah berdakwah mencapai TV lokal dan hal tersebut menjadikan informan P4 mempunyai pandangan apalagi nantinya jadi pemimpin, diyakininya akan membawa hal yang lebih positif.

Namun bagi informan P5 bukan berarti tidak konsisten, tetapi penilaian sebenarnya setelah terpilih menjadi kepala daerah.

Karena belum terpilih menurut saya belum bisa dibilang konsisten, penilaian konsisten hanya sebatas saat dia berdakwah dan berkampanye aja. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P5 menilai Tan Mei Hwa selama ini hanya sebatas ketika berdakwah pada masyarakat dan berkampanye sesuai dengan programnya, yakni pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan peningkatan peran serta wanita.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) sebagian besar mengatakan tidak konsisten dan sebagian tidak dapat menilai karena belum terpilih. Adapun pendapat

informan U1 yang mengatakan tidak konsisten, karena posisi awalnya sebagai Pendakwah melompat menjadi Politisi.

Saya kira berbicara masalah konsisten jelas dia tidak konsisten, dia posisinya sebagai pendakwah kemudian melompat menjadi seorang politisi atau menjadi seorang wakil bupati, artinya dalam hidup ini perlu ada semacam tujuan kalau dia lompat begitu perlu dipertanyakan kealimannya beliau, seperti yang dikatakan rekan-rekan sebaiknya seorang ustadzah komunitasnya seperti itu, akan lebih baik seperti itu daripada terjun ke dunia politik karena pasti akan banyak mudharatnya kira-kira begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U1 kealiman Tan Mei Hwa perlu dipertanyakan, karena sebagai Ustadzah seharusnya komunitas agama yang lebih dikedepankan, daripada dunia politik yang banyak mudharatnya atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti banyak merugikannya (kbbi.web.id).

Perihal merugikan dari informan U1 secara tidak langsung mengacu pada politik yang selama ini yang mementingkan kepentingan partai dan golongan, seperti yang dikatakan Firmanzah (2007), yang menjelaskan politik sebagai media kekuasaan, politik sebagai media jalan pintas, politik sebagai media kapitalis, dan politik sebagai materialisme.

Begitupun dengan pendapat informan U3 dan U7 yang mengatakan tidak konsisten karena seorang Pendakwah atau Ulama tidak perlu berpindah ke politik.

Tidak konsisten karena dia seorang ulama sudah ulama saja tidak perlu lari ke politik, sudah terima kasih. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Ya tidak konsisten karena dia sebagai penceramah kok ingin berpindah sebagai pemimpin daerah, saya rasa begitu. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U3 dan U7 tidak ingin Tan Mei Hwa sebagai Pendakwah atau Ulama dengan ilmu agamanya untuk membeli dunia, serta kontras dengan perilakunya sehari-hari. Karena Ulama dan Umara mempunyai dasar yang berbeda, layaknya yang publikasikan Muhammad Shobri Azhari dalam artikelnya yang

berjudul “Ulama dan Umara” yang menjelaskan, perbedaan mendasar dari ulama dan umara, yakni ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang. Sedangkan *umara* adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengurus kehidupan masyarakat, dimana kebijakan dan keputusannya dalam hukum dan peraturan ditegakkan demi ketenteraman umum (Azhari, 2014).

Bahkan pendapat informan U6 juga setuju Tan Mei Hwa tidak konsisten, seharusnya tidak perlu ke politik karena tujuannya tidak jelas.

Kalau menurut saya pribadi Bu Tan Mei Hwa tidak konsisten, Beliau seorang pendakwah seharusnya berdakwah aja tidak usah lari ke politik, trus tujuannya itu apa ke W2, tujuannya mencari keuntungan atau bagaimana, kalau dia sudah dikatakan ustadzah yang mumpuni, terkenal dan sering dakwah di TV seharusnya tidak usah lari ke kancah politik karena politik itu kotor sekali. Maksudnya begini ya dia seorang pendakwah tentunya harus konsisten jadi pendakwah karena mereka berhubungan dengan Tuhan, tidak usah lari ke politik karena politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan. Seharusnya pendakwah-pendakwah ulung sampai tingkat nasional sering memberikan ceramah-ceramah di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional itu kan lebih bagus karena politik itu sangat kotor sekali nantinya bisa dipengaruhi kawan-kawannya sehingga bisa terjadi korupsi karena uang sangat rentan sekali. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U6 politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan, dan dapat dipengaruhi kawan anggota partai politik untuk korupsi, sebab menyangkut uang rentan sekali.

Karena pengalaman informan U6 dua kali mencalonkan Pemilihan Legislatif, menjadikannya berpengalaman dan mengerti benar apa yang akan terjadi bilamana Tan Mei Hwa ke politik, layaknya yang diberitakan oleh Yohannie Linggarsi dalam artikelnya di CNN Indonesia yang berjudul “Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara”, yang menjelaskan Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali divonis enam tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta subsider selama tiga bulan terkait kasus korupsi. Hakim juga memutuskan

Suryadharma harus membayar kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dengan pengganti pidana penjara selama dua tahun. Suryadharma Ali didakwa menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013.

Perbuatan itu dinilai telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi (Linggasari, 2016). Berkaca pada pengalaman informan U6 dalam politik dan realita di lapangan hingga saat ini, menunjukkan bahwa Menteri Agama sekalipun masih dapat melakukan perbuatan menyimpang, dan tidak menutup kemungkinan hal terburuk juga dapat menimpa Tan Mei Hwa apabila berpindah ke politik.

Namun pendapat informan U8 berbeda, menilai Tan Mei Hwa konsisten, karena tidak perlu mendikotomikan atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membagi dua hal yang bertentangan (kbbi.web.id), karena dapat terjadi oleh siapapun tidak hanya Pendakwah saja.

Maaf ini mungkin lain daripada kawan-kawan, permasalahan dari Bu Tan Mei Hwa dari pendakwah kok masuk politik, saya rasa tidak ada masalah cuma belum beruntung saja, soalnya kalau pendakwah tetap jadi pendakwah susah juga, sekarang apa bedanya pendakwah dan selebritis atau pelawak toh mereka ada yang masuk juga jadi nda masalah, ini jangan mendikotomikan. Saya rasa kita tidak boleh menghakimi bahwasanya pendakwah tetap menjadi pendakwah, kalau begitu pelawak jadi pelawak aja terus, selebritis jadi selebritis aja, sapa tahu namanya nasib dari Tuhan, jadi saya kira konsisten saja. Ya sebetulnya kalau dibilang politik kotor itu tidak ada, kalau saya bilang politik bagus karena orang hidup harus berpolitik, jadi kita lihat politik apa? prakteknya dibidang apa? mungkin manusia-manusia oknum yang membuat politik itu menjadi kotor, kalau politik kotor kenapa tidak dibubarkan saja politik di Indonesia kalau itu kotor ya. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebab informan U8 melihat banyak orang menilai Pendakwah tidak sejalan dengan politik, padahal dicontohkan informan U8 seorang selebritis atau pelawak sebenarnya juga tidak sejalan dengan politik, tetapi nyatanya banyak masuk ke politik, kemenangan dalam politik hanya masalah keberuntungan saja.

Salah satu komedian yang masuk ke politik adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, seperti yang dipublikasikan oleh Dhemas Reviyanto dalam halaman m.tempo.co yang berjudul “Terpilih Lagi, Eko Patrio Punya Resep Khusus”, yang menjelaskan Hendro Purnomo alias Eko Patrio terpilih kembali menjadi anggota DPR RI kedua kalinya, menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional lolos ke setelah meraup sekitar 64 ribu suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 dan 133 ribu untuk suara partai (Reviyanto, 2014).

Disamping itu informan U8 meluruskan pemikiran mengenai politik itu kotor tidak ada, karena dalam hidup manusia harus berpolitik, sebab yang menjadikan politik itu kotor sebnarnya manusianya. Kemudian hal tersebut ditanggapi kembali oleh informan U6, yang dimaksud memang okum manusianya yang membuat politik itu kotor.

Yang saya maksud kotor disini oknumnya ya, orang memandang manusianya yang kotor tapi partainya ikut dibawa kotor. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sejenak melihat apa yang dikatakan oleh Firmanzah (2007) yang menjelaskan tentang politik sangat terkait erat dengan keberagaman kepentingan, konflik dan kekuasaan. Siapapun yang terlibat dalam dunia politik akan akrab dengan ketiga hal diatas, dimana kekuasaan untuk mendapatkan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik tingkat lokal maupun nasional, selanjutnya konflik adalah ruang dinamika untuk tukar menukar ide dan gagasan sekaligus pembagian tugas dan pekerjaan, dan kepentingan adalah yang melatarbelakangi seseorang untuk masuk politik.

Sehingga terkait hal tersebut, secara tidak langsung informan U6 meyakini orang yang masuk ke politik akan terkait erat dengan kepentingan, konflik, dan

kekuasaan yang tidak sehat, dan hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat termasuk informan U6 berpikiran partai politik itu kotor.

Pada sisi lain informan U5 dan U2 berpendapat, tidak bisa menilai Tan Mei Hwa saat ini konsisten atau tidak, karena belum terpilih menjadi kepala daerah.

Karena belum pernah merasakan W2 ya jadi bagaimana kita bisa menilai Beliau itu konsisten. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kalau Beliau dalam hal ustadzah saya amati Beliau konsisten, bagaimana dia melayani suami dan bagaimana dia posisi seorang istri terhadap suaminya, itu selalu diberitakan tapi kalau dalam seperti SPP gratis dan lain sebagainya orang belum menjabat apanya yang konsisten. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Bahkan informan U2 melihat konsistensi Tan Mei Hwa hanya sebatas perempuan yang melayani suami sebagaimana mestinya, dan program kerja dalam politik belum berjalan karena Tan Mei Hwa belum terpilih. Tetapi menurut pendapat informan U4 Tan Mei Hwa sedang belajar konsisten, dan belum bisa memberikan nilai untuk saat ini.

Mungkin dia belajar untuk konsisten jadi saya belum bisa memberikan nilai, tapi kalau dia jadi konsisten tetapi karena belum jadi masih belum bisa membentuk apakah dia konsisten atau tidak. Tapi yang jelas kalayak menilai dari jamaahnya banyak lantas media masa menampungnya dengan gratis yang seharusnya iklan bertarif, itu sudah menunjukkan konsisten kan tapi mungkin masih perlu belajar di politik. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Namun apabila menilai jumlah jamaahnya banyak, hingga media masa juga menampungnya di TV lokal, maka dapat dikatakan konsisten. Perilaku konsisten Tan Mei Hwa sebagai pendakwah menurut informan U4, karena perilaku Tan Mei Hwa dalam dakwah dengan semua masyarakat selalu sama dimanapun dan kapanpun (David McNally & Karl D. Speak, 2004).

5.2.4 Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa Secara Umum

Sesuai yang dikatakan Rachmah Ida dalam bukunya “Studi Meida dan Kajian Budaya”, menjelaskan bahwa dalam mendapatkan data berkaitan dengan opini khalyak menggunakan *Focus Group Discussion* akan memperoleh nantinya “makna bersama atau pendapat komunal”. Dimana pendapat komunal yang terkadang bisa mempengaruhi pendapat individu, atau bahkan terkadang mengkonfrontasi pendapat individu dengan atau terhadap individu lain.

Oleh sebab itu dengan data yang telah diperoleh dari *Focus Group Discussion* informan P dan informan U terhadap karakteristik personal brand Tan Mei Hwa, didapati makna bersama atau pendapat komunal sebagai berikut:

5.2.4.1 Pendapat Komunal Informan P (Pemilih Pemula)

1. Kekhasan Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik, secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik. karena tidak ada Undang-Undang yang melarang, melainkan menganjurkan perempuan untuk masuk politik seperti yang ditulis dalam UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, mengharuskan kuota perempuan 30% dilakukan pada Pemilu 2009 (Soetjipto, 2011). Disamping itu yang terpenting, ketika Tan Mei Hwa terpilih dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program yang diandalkan oleh Tan Mei Hwa, diantaranya sekolah gratis, kesehatan murah, jalan

mulus, lapangan kerja tersedia, dan perempuan sejahtera (uswatan.com). Serta Tan Mei Hwa sebagai perempuan diharapkan tegas layaknya Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang dapat tegas menutup pusat prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014).

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin, asalkan tidak dalam konteks agama dan keluarga. Disamping itu tergantung gaya kepemimpinan Tan Mei Hwa, apakah dapat menjadi pengaruh bagi bawahannya dalam pemerintahan nanti untuk melaksana tugas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id), serta janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program yang diandalkan oleh Tan Mei Hwa, diantaranya sekolah gratis, kesehatan murah, jalan mulus, lapangan kerja tersedia, dan perempuan sejahtera (uswatan.com). Selain itu Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo tidak masalah karena posisinya hanya sebagai wakil bupati, karena apabila menjadi bupati akan kurang efisien dan mentalnya kurang kuat dalam persaingan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Serta diharapkan tegas layaknya Tri Rismaharini Walikota Surabaya seorang perempuan berhasil memberantas atau menutup gang dolly yang belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014).

Poin ketiga adalah Tan Mei Hwa sebagai etnis tionghoa menjadi pemimpin. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi calon pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Karena diyakini masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki pemikiran yang terbuka dengan adanya etnis Tionghoa mencalonkan sebagai wakil bupati. Selain itu, Tan Mei Hwa sudah sebagai warga Negara Indonesia yang sah, secara otomatis harus mengikuti budaya Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Tan Mei Hwa dapat saling berbaur dan menghargai satu sama lain berdasarkan semboyan Negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika. Serta diharapkan sebagai etnis Tionghoa dapat seperti Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dipilih Joko Widodo sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai Gerindra, meskipun melalui dua tahap Pemilukada akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org).

Poin keempat adalah Tan Mei Hwa sebagai etnis tionghoa beragama muslim. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menganut agama islam, dimana agama islam menerima segala etnis manapun, asalkan dapat menjalani perintah-perintah agama islam.

Poin kelima adalah penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai secara positif dan tidak ada yang berpendapat negatif terhadap penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik. Karena Tan Mei Hwa tampil dengan apa adanya, sederhana,

tidak bermegah, tegas, dan berwibawa, dengan kata lain tidak sembarangan dalam memilih pakaian, sehingga memberikan kesan masyarakat perempuan itu tidak lemah dan tidak untuk direndahkan. Disamping itu Tan Mei Hwa juga bernampilan sopan dan rapi dengan tertutup dalam berpakaian menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim, sesuai dengan profesi utama pendakwah yang terlihat pada IV.13, ketika Tan Mei Hwa berpakaian dengan warna yang berbeda-beda.

Poin keenam adalah kualitas dalam diri Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai secara agama Tan Mei Hwa berkualitas. Karena dari ajaran agama sudah mengatur segala bidang kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang kebanyakan adalah agama islam.

2. Relevansi Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah penilaian terhadap pemimpin berbeda etnis. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai banyak kerugian terdapat pemimpin yang berbeda etnis. Karena dikhawatirkan masih adanya penjajahan yang kemungkinan datang dikit demi sedikit, apalagi dengan datangnya MEA. Disamping itu kekurangannya yakni pada polling ketika pemilihan berlangsung, dimana warga sidoarjo akan kalah jumlah dari pada etnis Tionghoa yang merasa sesama etnis dan etnis Tionghoa mempunyai *stereotype* tidak suka memberi atau kikir. Meskipun belum jelas seperti apa hasilnya nanti, tergantung kepemimpinan dan *progress* atau kemajuan dari Tan Mei Hwa ketika menjadi kepala daerah

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi komunikatif dan terjun langsung ke masyarakat. Karena pada dasarnya seorang pendakwah, maka ilmunya dalam berkomunikasi tinggi. Disamping itu Tan Mei Hwa merakyat dan sangat ramah, ketika berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, saat menyerahkan hewan kurban sapi di Desa Sugihwaras dan berkumpul dengan pengamen yang kebetulan bertemu saat makan di Sop Pak Amin.

Poin ketiga adalah perihal yang disampaikan Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak terlalu mengetahui secara detail apa yang dominan Tan Mei Hwa sampaikan pada masyarakat.

Poin keempat adalah agama sebagai unsur politik. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah menggunakan pengajian untuk mencari dukungan dalam politik. Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari pendukung hanya bertepatan dengan latar belakangnya sebagai Pendakwah dan hal yang memungkinkan terdekat untuk dilakukan oleh Tan Mei Hwa adalah pengajian. Dimana menggunakan pengajian tujuannya harus positif, saling menghargai yang agama islam dan nonislam, serta tidak berbau SARA. Bahkan dapat juga sebagai salah satu bentuk kampanye dari Tan Mei Hwa, yang meyakinkan jamaah pengajiannya bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi wakil bupati

3. Konsistensi Tan Mei Hwa

Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa tidak konsisten. Dimana awalnya seorang Pendakwah menjadi seorang politisi atau dengan kata lain seorang Ulama berpindah ke Umara, sebab politik merupakan hal yang bertolak belakang dengan dunia dakwah, dan perlu dipertanyakan apa yang dicari seorang Tan Mei Hwa sebenarnya dalam politik. Sehingga Tan Mei Hwa masuk dalam politik hanya membuang waktu dan tenaga, dan dapat dipengaruhi kawan anggota partai politiknya untuk korupsi.

5.2.4.2 Pendapat Komunal Informan U (Pemilih Lanjutan)

1. Kekhasan Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik. Asalkan bukan pemimpin dalam agama dan keluarga. Bahkan dalam Undang-Undang tidak ada yang melarang, melainkan menganjurkan perempuan untuk masuk politik yang diatur dalam UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, mengharuskan kuota perempuan 30% dilakukan pada Pemilu 2009 (Soetjipto, 2011). Disamping itu Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus pandai, harus jujur, harus ulet, harus semangat tinggi, tidak boleh korupsi, dan yang terpenting berintegritas dalam memimpin.

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin.

Karena seorang pemimpin dapat dibentuk sesuai situasi dan kondisi dalam kepentingan tertentu, serta tidak ada Undang-Undang yang melarang dan kedudukannya sama dalam hukum. bahkan pemerintah sudah memperbarui UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, dimana muncul wacana tentang kuota perempuan 30% pada Pemilu yang harus dilakukan pada pemilu 2009 (Soetjipto, 2011). Disamping itu seorang pemimpin daerah pastinya akan diawasi oleh DPR, dan telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo (dprd-sidoarjokab.go.id). Serta yang terpenting perempuan menjadi pemimpin tidak dalam konteks agama dan keluarga, karena kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Poin ketiga adalah Tan Mei Hwa sebagai etnis tionghoa menjadi pemimpin. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai belum saatnya Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi calon pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Karena masyarakat masih sulit menerima etnis lain memimpin dan lebih memilih sesama pribumi yang lebih pandai, dikarenakan Negara ini adalah Indonesia dan secara tidak langsung diasumsikan menegaskan bahwa bukan Negara Cina. Kecuali kandidat yang akan menjadi pemimpin tersebut memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dibandingkan kandidat yang pernah ada.

Poin keempat adalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama muslim. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menganut agama islam, dan berterima kasih pada Tan Mei Hwa dapat memeluk agama islam. Bahkan

Tan Mei Hwa sebagai minoritas dapat menganut agama islam, sangat senang sekali. Meskipun Tan Mei Hwa menganut agama islam ada tendensi terhadap politik, tidak mempermasalahakan asalkan banyak pendukungnya. Oleh sebab itu Tan Mei Hwa menganut agama islam lebih menarik dan lebih menyenangkan, dimana banyak kaum pribumi yang menganut agama islam hanya dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan hal yang terpenting dapat menjadi pengaruh positif di masyarakat Kabupaten Sidoarjo, karena dari sejarah kewalian dalam islam, yakni walisongo banyak dari etnis Tionghoa, seperti yang tertulis dalam buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, membeberkan nama-nama asli Walisongo yang asli Cina atau Tionghoa dan sangat jauh dari kesan berbau Arab. Salah satunya Prof. Slamet Muljana menyimpulkan bahwa Sunan Ampel aslinya bernama Bong Swi Hoo, kemudian menikah dengan Ni Gede Manila yang merupakan anak Gan Eng Cu (mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423) (Muljana, 2008).

Poin kelima adalah penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai secara positif Tan Mei Hwa berpenampilan di ranah publik. Dimana Tan Mei Hwa sangat apa adanya, bahkan tidak mengira calon pemimpin kepala daerah berpakaian sederhana. Selain itu penampilannya yang *low profile*, sederhana, *fashionable*, dan terlihat islami sesuai dengan pakaian wanita muslim yang diharuskan menutupi aurat, tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh sempit karena akan menampilkan lekuk tubuh, Anjuran memakai pakaian berwarna gelap, Pakaian tidak boleh

disemprotkan parfum, tidak boleh menyerupai pria, tidak bermegah-megah, dan tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (Saefullah, 2015).

Poin keenam, kualitas dalam diri Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa dengan positif dan berkualitas dari segi agama. Hal tersebut dibuktikan Tan Mei Hwa menjadi *public figure* atau tokoh masyarakat sebagai pendakwah yang terkenal di media. Disamping itu kualitas ajaran Al-Qur'an atau ajaran Islam sudah benar maka kualitas secara duniawi akan mengikuti. Tetapi untuk kualitas politik belum, karena dalam politik harus mempunyai ambisi, harus pandai diplomasi, harus tidak berbelas kasihan, dan harus punya kekuatan uang, serta disayangkan Tan Mei Hwa sebagai ulama harus berpindah ke umara.

2. Relevansi Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah penilaian terhadap pemimpin berbeda etnis. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai tergantung kinerjanya nanti. Karena untuk menilai keuntungan atau kerugian berdasarkan *output* atau hasil kinerjanya. Tetapi apabila memberikan kemaslahatan atau manfaat lebih besar pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, seperti mensejahterakan rakyat, hal tersebut memberikan keuntungan. Disamping itu kemungkinan kerugian secara langsung bukan ke Kabupaten Sidoarjo, melainkan kandidatnya sendiri yang rugi secara finansial karena gagal memimpin suatu daerah atau masyarakat yang tidak tertarik dengan pemimpin yang berbeda etnis, dimana lebih baik memilih kaum pribumi yang pandai.

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai komunikasi Tan Mei Hwa komunikatif dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Karena dasarnya pendakwah dinilai bagus dalam berkomunikasi, baik secara interaktif dua arah maupun linier satu arah. Disamping itu Tan Mei Hwa seseorang yang ekspresif, dimana berusaha membuat yang mendengarkan dapat nyaman dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Serta komunikatif tanpa batas ceplas-ceplos atau terus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat membuat tertawa jamaah yang hadir.

Poin ketiga adalah perihal yang disampaikan Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai perihal terkait permasalahan agama dan permasalahan perempuan. Karena latar belakangnya seorang ustadzah, maka paling dominan hal mengenai agama. Serta Tan Mei Hwa seorang perempuan, maka tidak jauh dari permasalahan meningkatkan harkat dan martabat perempuan, sesuai jargonnya “Lanang Thok, Gak Sip Rek”.

Poin keempat adalah agama sebagai unsur politik. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari dukungan dalam politik tidak masalah. Karena sebagai pendakwah hanya melanjutkan apa sudah dilakukan sebelumnya dan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, maka tidak salah menggunakan pendekatan agama khususnya pengajian untuk mengumpulkan dukungan, selama tujuannya kemaslahatan atau kemanfaatan untuk umat atau masyarakat tidak menjadi permasalahan. Disamping itu tidak ada Undang-Undang politik yang

melarang berkampanye dalam agama, sebab dalam politik sesuatu yang halal akan menjadi haram dan yang haram akan menjadi halal, dan kemungkinan Tan Mei Hwa melakukan doktrin secara agama.

3. Konsistensi Tan Mei Hwa

Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai sebagian besar mengatakan tidak konsisten dan sebagian tidak dapat menilai karena belum terpilih. Karena posisi awalnya sebagai Pendakwah melompat menjadi Politisi perlu dipertanyakan, karena sebagai Ustadzah seharusnya komunitas agama yang lebih dikedepankan. Tan Mei Hwa terjun politik tujuannya tidak jelas, politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan, dan dapat dipengaruhi kawan anggota partai politik untuk korupsi, sebab menyangkut uang rentan sekali.

Tabel V.1 Ringkasan Karakteristik Personal Brand Tan Mei Hwa

NO.	PEMBAHASAN	INFORMAN P	INFORMAN U
K E K H A S A N			
1.	Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Masuk Ranah Politik	Tidak masalah, karena: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Undang-Undang yang melarang. • Tan Mei Hwa dapat melaksanakan tugasnya dan janji-janjinya. • Sebagai perempuan diharapkan tegas. 	Tidak masalah, karena: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Undang-Undang yang melarang. • Bukan pemimpin dalam agama dan keluarga. • Sebagai perempuan harus pandai, jujur, ulet, semangat tinggi, tidak boleh korupsi,

			dan berintegritas dalam memimpin.
2.	Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Menjadi Pemimpin	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dalam konteks agama dan keluarga. • Tergantung gaya kepemimpinan Tan Mei Hwa. • Dapat memenuhi janji-janjinya. • Karena posisinya hanya sebagai wakil bupati. • Sebagai perempuan diharapkan tegas. 	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seorang pemimpin dapat dibentuk. • Pemimpin pastinya akan diawasi oleh DPR. • Tidak dalam konteks agama dan keluarga.
3.	Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Menjadi Pemimpin	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memiliki pemikiran yang terbuka. • Tan Mei Hwa sudah sebagai warga Negara Indonesia yang sah. • Dapat mengikuti budaya Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo. • Dapat saling berbau dan menghargai satu sama lain. • Semboyan Negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika. 	<p>Belum saatnya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat masih sulit menerima etnis lain memimpin. • Lebih memilih sesama pribumi yang lebih pandai, • Negara ini adalah Indonesia. • Kecuali kandidat memiliki kelebihan.
4.	Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Beragama Muslim	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agama islam menerima segala etnis manapun. • Dapat menjalani perintah-perintah agama islam. 	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berterima kasih pada Tan Mei Hwa dapat memeluk agama islam. • Sangat senang sekali, sebab dari minoritas. • Banyak pribumi islam KTP. • Meskipun ada tendensi terhadap politik tidak masalah.

			<ul style="list-style-type: none"> • Lebih menarik dan lebih menyenangkan. • Dapat menjadi pengaruh positif di masyarakat. • Walisongo banyak dari etnis Tionghoa.
5.	Penampilan Tan Mei Hwa Di Ranah Publik	<p>Berpandangan positif, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampil dengan apa adanya. • Sederhana dan tidak bermegah. • Tegas dan Berwibawa. • Sopan dan Rapi • Tidak sembarangan dalam memilih pakaian. • Tertutup dalam berpakaian menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim. 	<p>Berpandangan positif, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat apa adanya. • Sederhana. • <i>Low profile</i>. • <i>Fashionable</i>. • Terlihat islami.
6.	Kualitas Dalam Diri Tan Mei Hwa	<p>Secara agama berkualitas, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajaran agama sudah mengatur segala bidang kehidupan manusia. • Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang didominasi agama islam. 	<p>Secara agama berkualitas, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi tokoh masyarakat sebagai pendakwah. • Kualitas ajaran Al-Qur'an sudah benar. • Kualitas politik belum, karena harus ambisi, pandai diplomasi, tidak berbelas kasihan, dan punya kekuatan uang.
R E L E V A N S I			
1.	Penilaian Terhadap Pemimpin Berbeda Etnis	<p>Banyak kerugian, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikhawatirkan masih adanya penjajahan yang kemungkinan datang 	<p>Tergantung kinerjanya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan atau kerugian berdasarkan

		<p>dikit demi sedikit, apalagi dengan datangnya MEA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada polling ketika pemilihan berlangsung warga sidoarjo akan kalah jumlah dari pada etnis Tionghoa yang merasa sesama etnis. • Etnis Tionghoa mempunyai <i>stereotype</i> tidak suka memberi atau kikir. 	<p><i>output</i> atau hasil kinerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan kerugian secara finansial karena gagal memimpin. • Kemungkinan kerugian karena berbeda etnis, dimana masyarakat lebih memilih kaum pribumi yang pandai.
2.	Tan Mei Hwa Berkomunikasi Dengan Masyarakat	<p>Komunikatif dan terjun langsung ke masyarakat, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya seorang pendakwah. • Masyarakat dan sangat ramah. • Berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. 	<p>Komunikatif, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasarnya pendakwah dinilai bagus dalam berkomunikasi. • Interaktif dua arah maupun linier satu arah. • Tan Mei Hwa seseorang yang ekspresif. • Komunikatif tanpa batas dan terus terang. • Tidak berbelit-belit.
3.	Perihal Yang Disampaikan Tan Mei Hwa	<p>Tidak terlalu mengetahui secara detail.</p>	<p>Permasalahan agama dan permasalahan perempuan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakangnya seorang ustadzah. • Untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
4.	Agama Sebagai Unsur Politik	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertepatan dengan latar belakangnya sebagai pendakwah. 	<p>Tidak masalah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendakwah hanya melanjutkan apa sudah dilakukan sebelumnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Hal yang memungkinkan dan yang terdekat untuk dilakukan. • Asalkan positif, saling menghargai yang agama islam dan nonislam, serta tidak berbau SARA. • Dapat juga sebagai salah satu bentuk kampanye. • Meyakinkan jamaah pengajiannya bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi wakil bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. • Tujuannya kemaslahatan atau kemanfaatan untuk umat atau masyarakat. • Tidak ada Undang-Undang politik yang melarang. • Dalam politik sesuatu yang halal akan menjadi haram dan yang haram akan menjadi halal. • Melakukan doktrin secara agama.
K O N S I S T E N S I			
1.	Konsistensi Tan Mei Hwa	<p>Tidak konsisten, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seorang Pendakwah menjadi seorang politisi. • Seorang ulama berpindah ke umara. • Politik merupakan hal yang bertolak belakang dengan dunia dakwah. • Perlu dipertanyakan apa yang dicari seorang Tan Mei Hwa. • Membuang waktu dan tenaga. • Dapat dipengaruhi kawan anggota partai politiknya untuk korupsi. 	<p>Tidak konsisten dan sebagian tidak dapat menilai, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpilih. • Pendakwah melompat menjadi politisi. • Perlu dipertanyakan apa yang dicari seorang Tan Mei Hwa. • Ustadzah seharusnya komunitas agama yang lebih dikedepankan. • Tan Mei Hwa terjun politik tujuannya tidak jelas. • Politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipengaruhi kawan anggota partai politik untuk korupsi.
--	--	--	---

(Sumber: Olahan Peneliti)

5.2.4.3 Hasil Akhir antara Informan P dan informan U

1. Kekhasan Tan Mei Hwa

Menurut David McNally & Karl D. Speak (2004) Kekhasan berasal dari pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan orang lain, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mampu melakukan hal itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai diri. Berikut penjelasan beberapa poin kekhasan yang terdapat di Tan Mei Hwa.

Poin pertama adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik. Menurut Subiakto dan Ida (2012) banyak anggapan perempuan tidak boleh bermain dan berkiperah di ranah politik, akibatnya menjadi semakin sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasi posisi dan kedudukannya serta semakin mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili. Terlebih makna mencalonkan perempuan hanya dilihat perempuan sebagai kategori jenis kelamin yang berbeda dari laki-laki, dan sama sekali tidak berbicara tentang perempuan sebagai identitas gender.

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, ternyata memiliki pemikiran yang sama yakni Tan Mei Hwa sebagai seorang perempuan masuk ranah politik tidak masalah. Alasannya karena tidak ada undang-undang yang melarangnya, bahkan yang ada pemerintah mengubah UU Parpol No.2/2008 dan UU Pemilu No.10/2008, dimana tentang

penambahan kuota perempuan 30% pada Pemilu yang harus dilakukan pada pemilu 2009 (Soetjipto, 2011).

Adapun kelompok informan P menambahkan yang terpenting ketika politisi perempuan masuk dalam ranah politik, dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program kerja seperti sekolah gratis, kesehatan murah, jalan mulus, lapangan kerja tersedia, dan terutama perempuan dalam isu-isu serius seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, kesetaraan, dan keadilan gender bagi kaum perempuan di Tanah Air (Subiakto & Ida, 2012).

Tetapi berbeda dengan kelompok informan U, dimana tidak masalah perempuan masuk ranah politik asalkan tidak dalam konteks agama dan keluarga, hal tersebut dikarenakan latar belakang kelompok informan U secara keseluruhan telah berkeluarga dan beragama islam. Meskipun kelompok informan P secara keseluruhan adalah mahasiswa dan kelompok informan U secara keseluruhan seorang politik, tak disangka dua kelompok tersebut memiliki harapan pada politisi perempuan harus tegas, harus pandai, harus ulet, semangat tinggi, tidak boleh korupsi, dan berintegritas dalam memimpin.

Sehingga dengan mengetahui persamaan dan perbedaan antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat Tan Mei Hwa sebagai perempuan dapat masuk ranah politik karena tidak ada Undang-Undang yang melarangnya dan dapat melaksanakan tugas serta janji-janji program kerjanya apabila terpilih. Sedangkan hal yang perlu ditingkatkan harus tegas, harus pandai, harus ulet, semangat tinggi, tidak boleh korupsi, dan berintegritas dalam memimpin.

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin. Selama ini khalayak perempuan hanya menjadi penonton politik, sehingga keterlibatan aktif suara mereka tidak mampu diraih, hanya dalam hal jumlah atau kuantitas saja yang diperjuangkan. Bahkan menurut Falk (2010) liputan berita tentang kandidat politisi perempuan yang *stereotype*, menggambarkan perempuan lemah, tidak dapat mengambil keputusan, mempunyai masalah dengan keluarga, dan lain sebagainya merupakan hambatan bagi kandidat perempuan (Falk dalam Subiakto & Ida, 2012).

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, ternyata dapat dilihat bahwa kedua kelompok memiliki kesamaan pemikiran yang mengatakan, tidak masalah perempuan menjadi pemimpin asalkan tidak dalam konteks agama dan keluarga, karena kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kesamaan pendapat tersebut dikarenakan latar belakang kedua kelompok informan adalah agama islam.

Namun terdapat perbedaan pemikiran kelompok informan P, yang memandang tidak masalah Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin karena posisinya hanya sebagai wakil bupati, apabila menjadi bupati akan kurang efisien serta mentalnya kurang kuat dalam persaingan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Tetapi sebenarnya untuk menjadi posisi calon bupati, permasalahan Tan Mei Hwa bukan pada kurang efisien atau tidak memiliki mental, terlebih seperti yang dikatakan Subiakto dan Ida (2012) meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi tetapi tetap tidak dapat mengkomunikasikan identitas dirinya sebagai perempuan, agenda-agenda, dan visi politiknya.

Karena yang lebih sering dikedepankan adalah masalah yang memihak kepentingan dominan laki-laki. Serta tambahan lainnya, kelompok informan P melihat Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin, bergantung dengan gaya kepemimpinannya yang dipunya, dimana norma perilaku yang digunakan oleh seseorang perempuan harus berhasil mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan (Ratnaningsih, 2009).

Sebab apabila tidak berhasil memiliki gaya kepemimpinan yang baik, akan berakhir seperti yang Hillary Clinton, dimana studi analisis isi koran-koran kasus gender di Amerika terkait pencalonan Hillary dan Obama, kesimpulan penelitian Falk menemukan bahwa meskipun dalam *polling* saat itu Hillary Clinton unggul tetapi memperoleh liputan yang lebih sedikit dibandingkan Obama dan lebih sering memiliki julukan yang rendah dengan memanggil nama pertamanya (Falk, 2008).

Berbeda dengan kelompok informan U yang terbiasa berkecimpung dalam partai politik dan mengelola partai politik, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin karena seorang pemimpin dapat dibentuk sesuai situasi dan kondisi dalam kepentingan tertentu. Hal tersebut sama yang dikatakan oleh Firmanzah (2007) yang menjelaskan tentang politik sangat terkait erat dengan keberagaman kepentingan, konflik dan kekuasaan. Siapapun yang terlibat dalam dunia politik termasuk Tan Mei Hwa akan akrab dengan ketiga hal diatas.

Disamping itu, apabila Tan Mei Hwa sebagai perempuan menjadi pemimpin di suatu daerah tidak akan berjalan sendirian, karena ada DPRD yang akan selalu mengawasi dan telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan

Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo (dprd-sidoarjokab.go.id).

Sehingga dengan mengetahui persamaan dan perbedaan antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat Tan Mei Hwa sebagai perempuan dapat menjadi pemimpin karena tidak dalam konteks agama dan keluarga. Hanya perlu ditekankan lebih mengedepankan permasalahan kesetaraan dan keadilan gender, serta memiliki gaya kepemimpinan yang baik supaya tidak berakhir layaknya Hillary Clinton yang digambarkan perempuan lemah, tidak dapat mengambil keputusan, mempunyai masalah dengan keluarga, dan lain sebagainya merupakan hambatan bagi kandidat perempuan (Falk dalam Subiakto & Ida, 2012).

Poin ketiga adalah Tan Mei Hwa Sebagai Etnis Tionghoa Menjadi Pemimpin. Menurut Suryadinata (2002) terdapat tiga hal penting dalam menganalisis politik Indonesia, yaitu Etnisitas, Agama dan Militer. Pada pemilihan umum 1955 partai yang menggunakan identitas etnik tidak ada yang unggul. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemenang pemilu juga bukanlah partai yang menggunakan identitas agama. PNI merupakan partai terbesar yang menunjukkan identitas nasionalis lebih diterima dibandingkan identitas etnik maupun agama (Feith dalam Widyawati, 2014).

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U dapat mengetahui pandangan masyarakat terhadap etnis Tionghoa menjadi pemimpin. Ternyata kedua kelompok memiliki perbedaan, dimana kelompok informan P tidak masalah etnis Tionghoa menjadi pemimpin Kabupaten Sidoarjo, karena diyakini masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki pemikiran yang terbuka dengan adanya etnis Tionghoa mencalonkan sebagai wakil

bupati, selain itu Tan Mei Hwa sudah sebagai warga Negara Indonesia yang sah, secara otomatis pasti mengikuti budaya Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo, sehingga Tan Mei Hwa dapat saling berbaur dan menghargai satu sama lain berdasarkan semboyan Negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika.

Tetapi pada nyatanya isu etnisitas dan agama muncul menjelang pemilu 2009, *Rakyat Merdeka* 11 Maret 2008 mengangkat berita berjudul: Bachtiar Chamsyah Mau Jadi Presiden, “Tapi Mana Mungkin, Saya Bukan Orang Jawa”. Pernyataan Bachtiar Chamsyah bisa diartikan dalam dua hal: pertama, etnisitas merupakan salah satu variabel yang menentukan elektabilitas kandidat. Kedua, pernyataan Bachtiar Chamsyah merupakan sebuah teks yang menunjukkan bahwa selama ini terjadi hegemoni dalam pembentukan pesan seolah-olah hanya orang Jawa yang pantas menjadi Presiden.

Hegemoni tersebut dilakukan oleh kelompok dominan untuk mengamankan posisi mereka tidak hanya dalam institusi publik, melainkan juga dalam pendapat, nilai, standar pengakuan melalui bagian terbesar masyarakat, serta adanya hegemoni pengaruh budaya Jawa dalam politik Indonesia yang merasa sungkan untuk membicarakan etnisitas dalam konteks kekuasaan. Sedangkan terminologi “bukan orang Jawa”, menggambarkan sebuah realitas bahwa selama ini terjadi kesadaran palsu seolah-olah bahwa hanya orang Jawa yang berhak menjadi Presiden, kesadaran Palsu tersebut dibentuk melalui proses sejarah yang panjang, sejak Republik Indonesia berdiri hingga saat ini hanya terdapat satu presiden dari luar Jawa, yaitu B.J. Habibie (Widyawati, 2014).

Perbedaan pemikiran kelompok informan P dengan kenyataan dalam surat kabar, menandakan adanya sebuah keterbatasan konsumsi media akan

perkembangan politik, hal tersebut dapat dimungkinkan secara kelusurhan kelompok informan P adalah pelajar mahasiswa, dimana usia yang terbilang muda menjadikan pengalamannya terbatas dalam lingkup kampus dan masih menerima segala sesuatu disekitar lingkungannya tanpa pertimbangan serta tanpa perbandingan dengan realita yang terjadi diberbagai daerah.

Sedangkan kelompok informan U mengatakan belum saatnya etnis Tionghoa memimpin Kabupaten Sidoarjo, karena masyarakat masih sulit menerima etnis lain untuk memimpin dan lebih memilih sesama pribumi yang lebih pandai, dikarenakan Negara ini adalah Indonesia dan secara tidak langsung diasumsikan kelompok informan U menegaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo bukan Negara Cina. Terkecuali kandidat yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dibandingkan kandidat yang pernah ada. Sulit menerimanya kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa tercermin pada peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi masyarakat, penjarahan dan pembakaran terjadi dimana-mana. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 berujung kerusuhan pada penghujung rezim Orde Baru pimpinan almarhum Soeharto.

Tidak sampai di situ saja, kerusuhan yang terjadi malah menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa, dimana banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Serta paling buruk massa pribumi yang melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para wanita dari etnis Tionghoa (Diputra, 2016). Disamping itu, tak disangka kelompok informan U yang notabene sudah memiliki usia tua, telah berkeluarga, dan memiliki pengalaman, masih memiliki pemikiran mengenai SARA yakni Suku, Agama, RAS

dan Aliran sebagai permasalahan yang bakal muncul dan belum ada jalan keluar yang harus ditempuh (Aziz, 2012).

Sehingga dengan mengetahui perbedaan antara kelompok informan P dan informan U, dapat dilihat bawah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa untuk menjadi pemimpin tidak memiliki unsur kuat, sesuai dengan perkataan Widyawati (2014) partai yang menggunakan identitas etnik tidak ada yang unggul. Karena hanya kelompok informan P yang dapat menerima sebuah perbedaan tetapi tidak dengan kelompok informan U. Hal yang dapat merubah kemungkinan hanya dengan memiliki sebuah kelebihan yang luar biasa, dimana tidak pernah ada pada era kepemimpinan sebelumnya.

Poin keempat adalah Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama muslim. Menurut Eriyanto (2008) pengaruh etnisitas dan agama terhadap perilaku memilih dalam Pemilu maupun Pilkada sangat kontekstual pengaruhnya, bergantung pada daerah dan karakteristik sosial budaya masyarakat. Tetapi kenyataannya pengaruh tersebut merambah hingga tingkat nasional, yang terjadi pada pemilu tahun 2009 terdapat isu etnisitas dan agama ketika Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pemilihan Presiden. Isu etnisitas tersebut sebagai advokasi politik yang dilontarkan melalui slogan “Pasangan Nusantara”, dimaksudkan adalah perpaduan antara kandidat yang berasal dari luar Jawa, yaitu Jusuf Kalla dari Makasar dan Wiranto dari Jawa. Begitupun isu agama dilontarkan melalui slogan “Istri Muslimah” dan “Jilbab Loro”, terkandung makna bahwa pasangan JK-Wiranto merupakan representasi dari umat Islam, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan mendapatkan simpati sebagai kandidat yang paling Islami. Hasilnya ternyata pada pemilihan presiden 2009 perolehan suara JK-Wiranto 12,41%, angka tersebut lebih

rendah dibandingkan partai yang mengusung mereka, yakni Partai Golkar (14,45%) dan Partai Hanura (3,77%).

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama muslim. Ternyata kedua kelompok memiliki pemikiran yang sama yakni tidak masalah, meskipun yang membedakan hanya ekspresi pendapat ketika kelompok informan P dan informan U mendengar atau melihat realitas etnis Tionghoa beragama muslim. Kelompok informan P berpendapat dengan ekspresi biasa atau normal, bahwa agama islam menerima segala etnis manapun, asalkan dapat menjalani perintah-perintah agama islam

Berbeda dengan kelompok informan U yang berpendapat dengan aneka ragam ekspresi, diantaranya rasa terima kasih, sangat senang sekali, lebih menarik, dan lebih menyenangkan Tan Mei Hwa dapat memeluk agama islam, karena banyak kaum pribumi yang menganut agama islam hanya dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan yang terpenting adalah dapat menjadi pengaruh positif di masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Hal menarik adalah kelompok informan U menghubungkan Tan Mei Hwa dengan dasar sejarah kewalian dalam islam, yakni walisongo banyak dari etnis Tionghoa, seperti yang tertulis dalam buku Prof. Slamet Muljana yang berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara”, membeberkan nama-nama asli Walisongo yang asli Cina atau Tionghoa dan sangat jauh dari kesan berbau Arab. Salah satunya Prof. Slamet Muljana menyimpulkan bahwa Sunan Ampel aslinya bernama Bong Swi Hoo, kemudian menikah dengan Ni Gede Manila yang merupakan anak Gan Eng Cu

(mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423) (Muljana, 2008). Serta, apabila Tan Mei Hwa menganut agama islam adanya tendensi terhadap politik, tidak mempermasalahkan asalkan banyak pendukungnya atau elektabilitasnya tinggi. Hal tersebut memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Haroen (2014) bekal yang dimiliki seseorang yang harus dimiliki ketika masuk politik salah satunya adalah kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain. Karena kelompok informan U memiliki latar belakang semuanya di politik, maka sudah tidak asing ketika ada sebuah calon kandidat yang mencalonkan dengan tendensi tertentu, supaya mendapatkan kekuatan secara non-material. Dan hal ini tidak terpikirkan oleh kelompok informan P, karena keterbatasan pengalaman dalam politik.

Sehingga dengan mengetahui persamaan antara kelompok informan P dan informan U, dapat dilihat unsur terkuat Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa memeluk agama islam adalah karena agama islam menerima segala etnis manapun, sejarah walisongo sebagian besar dari etnis Tionghoa, dan asalkan dapat menjalani perintah-perintah agama islam. Bahkan apabila Tan Mei Hwa memiliki tendensi politik dalam memeluk agama islam tidak masalah, karena sering terjadi diperpolitikan Indonesia.

Poin kelima adalah penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik. David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan kekhasan menjadi hal penting supaya berbeda dengan kebanyakan orang, kekhasan berasal dari pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan orang lain, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mampu melakukan hal itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai diri. Dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai hidup dalam diri akan membedakan

dengan *personal* yang lain. Nilai-nilai diri dapat berupa kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian.

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai salah satu nilai diri dari Tan Mei Hwa yakni tampilan secara fisik. Ternyata kedua kelompok informan memiliki pemikiran yang sama, yakni Tan Mei Hwa bernampilan di ranah publik dengan apa adanya, sederhana, tidak bermegah, dan *low profile* atau dengan kata lain tidak sembarangan dalam memilih pakaian.

Hal tersebut sebenarnya dilakukan Tan Mei Hwa, karena ingin menanamkan *personal brandnya* kepada masyarakat, dan masyarakat merasakan nilai kesederhaan dalam cara bernampilannya, bahkan hal tersebut semata-mata bukan karena rencana pencalonan tetapi sebuah keaslian nilai-nilai pribadi yang ada dalam diri Tan Mei Hwa (Haroen, 2014). Disamping itu tegas dan berwibawa dengan tertutup dalam berpakaian menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim atau dengan kata lain terlihat islami, sesuai dengan ajaran islam yakni harus menutupi aurat, tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh sempit karena akan menampilkan lekuk tubuh, Anjuran memakai pakaian berwarna gelap, tidak boleh disemprotkan parfum, tidak boleh menyerupai pakaian pria, tidak bermegah-megah, dan tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (Saefullah, 2015).

Tetapi terdapat perbedaan yang secara tidak langsung terlihat seperti bertolak belakang, dimana kelompok informan P sebagai mahasiswa atau anak muda melihat Tan Mei Hwa secara keseluruhan berpenampilan dengan sopan dan rapi, berbeda dengan kelompok informan U yang melihat Tan Mei Hwa secara keseluruhan *fashionable*. Apabila dicermati dengan seksama, bahwa penampilan sopan dan rapi

sebenarnya bisa jadi tidak *fashionable*, artinya Tan Mei Hwa bernampilan sopan dan rapi bukan karena mengikuti model pakaian yang terkini. Begitupun sebaliknya *fashionable* sebenarnya bisa jadi tidak sopan dan tidak rapi, artinya Tan Mei Hwa berpenampilan *fashionable* hanya untuk mengikuti model pakaian terkini tetapi tidak sopan dan tidak rapi.

Sehingga dengan mengetahui persamaan antara kelompok informan P dan informan U, dapat dilihat Tan Mei Hwa memiliki unsur kuat dalam penampilan di ranah publik, seperti apa adanya, sederhana, tidak bermegah, dan *low profile* atau dengan kata lain tidak sembarangan dalam memilih pakaian. Disamping itu juga memiliki ketegasan dan berwibawa dengan tertutup dalam berpakaian menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim atau dengan kata lain terlihat islami. Meskipun masih ada cara pandang yang berbeda berkaitan dengan penampilan antara sopan rapi dengan *fashionable*, tetapi tidak menjadi kendala berarti.

Poin keenam adalah kualitas dalam diri Tan Mei Hwa. Karena David McNally & Karl D. Speak (2004) mengatakan kekhasan supaya berbeda dengan kebanyakan orang, tentunya sebuah kualitas diri memiliki peran penting dalam membedakan satu sama lain. Apalagi ketika berbicara mengenai kualitas diri, tentunya ada nilai-nilai yang harus dipertahankan dan dapat dirasakan oleh khalayak, karena nantinya berdampak pada kuatnya *personal branding* seseorang.

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai kualitas Tan Mei Hwa. Ternyata kedua kelompok memiliki pemikiran yang sama, yakni Tan Mei Hwa memiliki kualitas dalam diri secara agama. Hal tersebut dibuktikan Tan Mei Hwa menjadi *public figure* atau tokoh masyarakat sebagai

pendakwah yang terkenal hingga di media, disamping itu kualitas ajaran Al-Qur'an sudah benar maka kualitas secara duniawi akan mengikuti, karena dari ajaran agama sudah mengatur segala bidang kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan politik.

Terlebih kelompok informan P menambahkan kualitas agama yang dimiliki oleh Tan Mei Hwa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang didominasi agama Islam, dimana data Kementerian Agama tahun 2014 menunjukkan pemeluk agama Islam 1,678,677 orang, Kristen 212,582 orang, Katholik 17.104 orang, Hindu 6,659 orang, Budha 3,399 orang, Konghucu 300 orang, dari total penduduk Kabupaten Sidoarjo 1,918,721 orang (jatim.kemenag.go.id).

Namun kelompok informan P dan informan U juga terdapat perbedaan, dimana kelompok informan U yang memiliki latar belakang aktif dalam partai politik, menilai Tan Mei Hwa tidak mempunyai kualitas dalam politik, karena dalam politik harus mempunyai ambisi, harus pandai diplomasi, harus tidak berbelas kasihan, harus punya kekuatan uang. Terlebih disayangkan Tan Mei Hwa sebagai ulama harus berpindah ke umara, dimana perbedaan mendasar dari ulama dan umara, yakni ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang. Sedangkan *umara* adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengurus kehidupan masyarakat, dimana kebijakan dan keputusannya dalam hukum dan peraturan ditegakkan demi ketenteraman umum (Azhari, 2014).

Perbedaan tugas yang jelas berbeda antara Ulama dan Umara, secara tidak langsung dikhawatirkan Tan Mei Hwa menjual agama untuk mendapatkan

kekuasaan atas masyarakat. Berbeda dengan kelompok informan P yang tidak terpikirkan akan kualitas diri Tan Mei Hwa dari segi politik, karena secara keseluruhan kelompok informan P tidak memiliki pengalaman dalam politik, dan tidak ikut serta dalam bagian politik.

Sehingga dengan melihat adanya perbedaan dan persamaan antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat dari kualitas nilai-nilai yang dipertahankan dan dirasakan adalah secara agama. Tetapi untuk kualitas segi politik perlu di perbaiki oleh Tan Mei Hwa, sehingga dapat lebih meyakinkan dari sudut pandang kelompok informan U.

2. Relevansi Tan Mei Hwa

Relevansi akan dimulai ketika seseorang percaya bahwa *personal* dapat memahami dan memperhatikan apa yang penting untuk orang lain. Relevansi juga merupakan bagaimana dapat memecahkan masalah orang lain dan kebutuhan orang lain. Sehingga dengan kata lain, latar belakang keahliannya dengan kebutuhan orang lain harus relevan supaya dapat dipercayai dengan mudah oleh masyarakat tanpa anggapan negatif omong kosong (David McNally & Karl D. Speak, 2004). Berikut penjelasan beberapa point relevansi yang ada pada Tan Mei Hwa.

Poin pertama adalah penilaian terhadap pemimpin berbeda etnis. Menurut O'Shaughnessy (2001) bahwa partai politik menjual produk yang tidak nyata, sangat terkait dengan sistem nilai dan di dalamnya terdapat visi yang bersifat daya tarik, kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera tercapai tetapi hasilnya lebih dapat dinikmati dalam jangka panjang, tidak pasti dan dapat ditafsirkan bermacam-

macam. Maka terkait hal tersebut, seorang Tan Mei Hwa termasuk sebuah produk yang tidak nyata, dalam artian masyarakat tertarik hanya melalui visi dan misi.

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat diketahui pendapat masyarakat mengenai keuntungan atau kerugian terdapat pemimpin berbeda etnis. Ternyata secara keseluruhan informan P menilai banyak kerugian, karena dikhawatirkan masih adanya penjajahan yang kemungkinan datang dikit demi sedikit, apalagi dengan datangnya MEA, dimana Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya (www.bbc.com).

Disamping itu kerugiannya yakni pada polling ketika pemilihan berlangsung, dimana warga sidoarjo akan kalah jumlah dari pada etnis Tionghoa yang merasa sesama etnis dan etnis Tionghoa mempunyai *stereotype* tidak suka memberi atau kikir, seperti yang dialami Margareta Astaman yang mengisahkan dirinya sendiri dalam bukunya “Excuse-Moi” sebagai keturunan Tionghoa sedang berdebat dengan seorang pengemis di jalan raya dan seorang pria di rumah makan padang. Ketika Margareta menolak pengemis yang meminta sedekah, memakinya dengan istilah “cina pelit” (Astaman, 2011).

Sedangkan kelompok informan U yang memiliki segudang pengalaman dalam politik, dari segi usia yang sudah matang, dan termasuk pemilih yang rasional, menilai sebuah keuntungan atau kerugian bergantung *output* atau hasil kinerjanya Tan Mei Hwa nanti (Firmanzah, 2008). Tentunya apabila memberikan kemaslahatan atau manfaat lebih besar pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mensejahterakannya, hal tersebut tentunya memberikan keuntungan.

Namun sebenarnya kerugian secara tidak langsung bukan pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, melainkan kandidatnya sendiri atau Tan Mei Hwa yang rugi secara finansial karena gagal memimpin suatu daerah atau masyarakat yang tidak tertarik dengan pemimpin yang berbeda etnis, dimana lebih baik memilih kaum pribumi yang pandai.

Sehingga dengan melihat adanya perbedaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa memimpin kabupaten Sidoarjo tidak memiliki unsur relevansi yang kuat, bahkan kelompok informan P masih memandang sebuah kerugian adanya etnis Tionghoa dalam memimpin, sehingga perlu pembuktian nyata supaya dapat diterima masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Poin kedua adalah Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat. Menurut Haroen (2014) dalam berkomunikasi perlu dibedakan dari pendekatannya dan alatnya. Salah satunya berkomunikasi melalui kinerja, keterlibatan dalam berbagai kegiatan publik, salah satu contohnya ikut terlibat dalam kerja bhakti dengan kontribusi yang berbeda, ikut terlibat dalam konflik isu yang sedang menjadi perbincangan, dimana keterlibatan tersebut untuk kepentingan publik.

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi. Ternyata kedua kelompok informan terdapat kesamaan pendapat, dimana Tan Mei Hwa berkomunikasi secara komunikatif dengan masyarakat. Hal tersebut karena pada dasarnya Tan Mei Hwa adalah seorang pendakwah, maka ilmunya dalam berkomunikasi tinggi, baik secara interaktif dua arah maupun linier satu arah. Disamping itu kelompok informan U

menambahkan, Tan Mei Hwa adalah seseorang yang ekspresif, karena dapat terampil mengirimkan pesan nonverbal (Mulyana, 2007), sehingga membuat pendengar dapat nyaman dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bentuk dan teknik penyajian pesan yang terus terang dan tidak berbelit-belit dalam upaya merancang pesan yang efektif, secara tidak langsung Tan Mei Hwa memperhatikan dua faktor, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Namun yang menarik adalah kelompok informan P melihat, Tan Mei Hwa memiliki komunikasi yang merakyat dan sangat ramah, dimana Tan Mei Hwa terjun secara langsung diantara masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Hal tersebut secara tidak langsung bagi kelompok informan P adalah positif, sebab mengingat usia mereka yang terbilang masih muda dan aktif dalam berkegiatan, menjadikan serasa memiliki pemimpin yang berjiwa muda dengan tindakan nyata. Berbeda dengan kelompok informan U yang terbilang sudah usia tua, yang melihat komunikasi Tan Mei Hwa lebih difokuskan pada saluran media yang digunakan, dimana kelompok informan U menangkap komunikasi Tan Mei Hwa lebih dominan pada bahasa nonverbal (Moerdijati, 2012).

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi memiliki unsur terkuat yakni komunikatif. Hal tersebut dikarenakan pendekatan dan alatnya sudah sesuai dengan latar belakangnya sebagai Pendakwah, dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi.

Poin ketiga adalah perihal yang disampaikan Tan Mei Hwa. Menurut Haroen (2014) hal yang perlu diperhatikan apa yang akan dikomunikasikan, seharusnya semata-mata bukan karena rencana pencalonan, hal tersebut terlalu sederhana dan sering kali tidak dapat menggerakkan energi orang lain untuk bisa mendukung dalam berbagai hal. Jadi yang harus dipikirkan oleh Tan Mei Hwa bukan hanya kepentingan pribadi semata dan mengabaikan kepentingan khalayak, justru kepentingan khalayak yang harus diutamakan sehingga mempunyai alasan mengapa harus mendukung. Sebab ketika khalayak terpenuhi kebutuhannya, maka nilai-nilai dari pribadi dapat dirasakan khalayak dan semakin tegas *personal brand* yang tertanam dibenak khalayak.

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai perihal yang Tan Mei Hwa sampaikan. Ternyata terdapat perbedaan pendapat mengenai perihal yang disampaikan Tan Mei Hwa dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kelompok informan P tidak terlalu mengetahui secara detail apa yang dominan Tan Mei Hwa sampaikan pada masyarakat. Ketidaktahuan tersebut sejatinya dapat dikarenakan banyak faktor, salah satunya dapat terjadi Tan Mei Hwa kurang matang dalam pemilihan saluran media, seperti yang disampaikan Rothschild (1978) dalam pemilihan media untuk penetrasi pesan politik ke publik memiliki tingkat perbedaan antara media TV, Radio, Cetak, dll, bergantung pada wilayah untuk menjamin efektivitas pesan politik yang disampaikan.

Faktor lainnya adalah pengalaman pemimpin masa lalu menjadikan kelompok informan P termasuk pemilih skeptis, dimana tidak memiliki ikatan emosi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat dan

siapapun yang memenangkan pemilu tidak akan dapat membawa bangsa ke arah perbaikan yang diharapkan (Firmanzah, 2008), sehingga keaktifan dalam mencari atau mendapatkan informasi mengenai Tan Mei Hwa kurang.

Berbeda dengan kelompok informan U yang mengetahui perihal yang Tan Mei Hwa sampaikan kepada masyarakat adalah terkait permasalahan agama dan permasalahan perempuan. Karena latar belakangnya seorang ustadzah, maka yang paling dominan Tan Mei Hwa sampaikan yakni hal mengenai ajaran agama islam. Selain itu, karena Tan Mei Hwa seorang perempuan, maka tidak jauh dari permasalahan meningkatkan harkat dan martabat perempuan, seperti isu-isu serius perempuan yakni kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, kesetaraan. dan keadilan gender bagi kaum perempuan di Tanah Air (Subiakto dan Ida, 2012).

Sehingga dengan mengetahui perbedaan antara kelompok informan P dan kelompok informan U, unsur perihal terkuat dari Tan Mei Hwa adalah permasalahan agama dan perempuan. Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan latar belakang Tan Mei Hwa dan sudah dilakukan sebelum pencalonan, jadi bukan semata-mata karena rencana pencalonan baru melakukannya. Hal yang perlu diperbaiki kemungkinan dari sisi kelompok informan P yang kurang memiliki keterkaitan dengan perihal yang disampaikan oleh Tan Mei Hwa.

Poin keempat adalah agama sebagai unsur politik. Menurut David McNally & Karl D. Speak (2004) relevansi seharusnya dapat memahami dan memperhatikan apa yang penting untuk orang lain. Disamping itu bagaimana dapat memecahkan masalah orang lain. Sehingga dengan kata lain, latar belakang keahliannya dengan kebutuhan orang lain harus relevan supaya dapat dipercayai dengan mudah oleh

masyarakat. Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai latar belakang Tan Mei Hwa sebagai Pendakwah dengan menggunakan pengajian untuk mencari dukungan politik.

Ternyata kedua kelompok informan memiliki kesamaan pendapat tidak masalah Tan Mei Hwa menggunakan unsur agama yakni pengajian untuk mendulang sebuah dukungan politik. Tan Mei Hwa menggunakan pengajian untuk mencari pendukung hanya berteepatan dengan latar belakangnya sebagai pendakwah dan hal yang memungkinkan terdekat untuk dilakukan oleh Tan Mei Hwa adalah pengajian. Meskipun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengajian adalah belajar membaca Al-Qur'an (kbbi.web.id), tetapi selama tujuannya kemaslahatan atau kemanfaatan untuk umat atau masyarakat tidak menjadi permasalahan, dan didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, maka tidak salah menggunakan pendekatan agama khususnya pengajian untuk mengumpulkan dukungan.

Bahkan kelompok informan P dan kelompok informan U menambahkan, menggunakan pengajian tujuannya harus positif, saling menghargai yang agama islam dan nonislam, serta tidak berbau SARA dalam pengajian. Bahkan dapat juga sebagai salah satu bentuk kampanye dari Tan Mei Hwa, karena sangat berkaitan erat dengan kemampuannya dalam berkomunikasi dan meyakinkan para jamaah pengajiannya bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi wakil bupati (Niffenegger, 1989).

Disamping itu tidak ada Undang-Undang politik yang melarang berkampanye dalam agama, melainkan yang ada mengharuskan dalam memilih pemimpin

mengikut sertakan agama, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah didalam UU Nomor 18 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana dalam Bab III, Persyaratan calon kepala daerah, pada pasal 7 butir a sampai dengan butir u, dicantumkan persyaratan warga Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota. Secara khusus dalam Pasal 7 butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Syarat ini menyiratkan secara tidak langsung bahwa seorang pemimpin harus beragama supaya dapat bertakwa kepada Tuhan sesuai keyakinanya (Koto, 2016).

Tetapi yang menarik dan berbeda adalah kelompok informan U melihat dalam politik, sesuatu yang halal akan menjadi haram dan yang haram akan menjadi halal. Salah satunya permasalahan politik uang yang dibahas oleh KPUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam artikelnya “Dorong MUI Buat Fatwa Haram Poltik Uang”, menjelaskan bahwa dalam kaedah islam, politik uang itu adalah haram, tetapi masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami kaedah islam tersebut, karena partai politik sering kali dikuasai oleh para pemodal, maka sulit dihindari proses kapitalisasi pemilu. Kultur politik Indonesia adalah kultur politik pasar, maka siapa yang berani membayar paling tinggi tentu yang akan mendapatkan suara. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan maraknya politik uang dalam pemilu, Pertama, partai politik lahir dari gerakan sosial yang dituntut harus terus berinteraksi dengan masyarakat, ketika kultur politik kita adalah kultur politik pasar, maka berinteraksi dengan masyarakat harus dibayar. Kedua, kapasitas partai politik dengan keuangan sangat terbatas, akibatnya partai politik tidak bisa

membangun interaksi dengan masyarakat secara terus-menerus, hal tersebut menjadikan ketika pemilu akan berlangsung seorang kandidat atau partai politik baru turun ke masyarakat. Dalam kondisi-kondisi seperti itulah menjadikan masyarakat tidak percaya dengan partai, maka cara yang paling mudah membuat masyarakat percaya adalah politik uang (kpud-ntbprov.go.id).

Bahkan masih adanya kemungkinan Tan Mei Hwa melakukan doktrin secara agama. seperti yang dilansir oleh Eko Widiyanto terdapat buku berjudul 'Belum Terlambat Sebelum Kiamat' yang ditulis Dewan Syuro DPP PKB, KH Ushfuri Anshor, berisikan kalimat yang terbilang kontroversial. Dalam halaman 8 buku tersebut, disebutkan warga NU yang tidak mencoblos PKB, tidak akan masuk surga. Dan Buku tersebut dapat dilihat di situs www.dpp.pkb.or.id dimana ditampilkan dalam versi file kompresi (rar) (Widyanto, 2013).

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan P dan kelompok informan U, Tan Mei Hwa tidak masalah menggunakan agama khususnya pengajian untuk mencari dukungan suara politik, karena memiliki unsur kuat yakni bertepatan dengan latar belakangnya sebagai pendakwah dan hal yang memungkinkan terdekat untuk dilakukan oleh Tan Mei Hwa adalah pengajian, serta didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.

3. Konsistensi Tan Mei Hwa

Berdasarkan penjelasan David McNally & Karl D. Speak (2004) konsistensi akan menegaskan *personal brand* secara lebih jelas dan lebih ringkas dibandingkan dengan kecakapan yang paling terpoles dan paling banyak dipraktekkan sekalipun. Dalam sebuah hubungan, konsistensi akan terbentuk dari perilaku seseorang lagi,

lagi dan lagi. Sehingga orang lain akan mempercayai *personal brand* dengan merasakan konsistensi yang dilakukan secara terus menerus, disisi lain orang lain memutuskan percaya setelah mengetahui prestasi yang diperoleh.

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai konsistensi dari Tan Mei Hwa. Ternyata kedua kelompok informan memiliki kesamaan pendapat bahwa Tan Mei Hwa selama ini yang telah dilakukannya tidak konsisten, dimana awalnya seorang Pendakwah menjadi seorang Politisi atau dengan kata lain seorang Ulama berpindah ke Umara, karena Tan Mei Hwa sebagai Ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang (Azhari, 2014).

Sehingga dikhawatirkan dengan potensi ilmu dakwah yang dimiliki Tan Mei Hwa, sengaja dijual kepada seseorang yang berkepentingan untuk meraih kekuasaan. Maka dari itu perlu dipertanyakan apa yang dicari seorang Tan Mei Hwa sebenarnya dalam politik, karena politik merupakan hal yang bertolak belakang dengan dunia dakwah, dan sebagai Pendakwah seharusnya komunitas agama yang lebih dikedepankan. Pada intinya politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan, dan dapat dipengaruhi kawan anggota partai politiknya untuk korupsi, sebab menyangkut uang rentan sekali. Meskipun belum terpilih, hal tersebut sudah membuang waktu dan tenaga.

Hal yang menarik, kelompok informan P secara keseluruhan merupakan pelajar mahasiswa dan kelompok informan U memiliki latar belakang politisi, tetapi

jalan pikiran kedua kelompok tersebut sama apabila Tan Mei Hwa masuk dalam politik akan terkait erat dengan keberagaman kepentingan, konflik dan kekuasaan.

Siapapun yang terlibat dalam dunia politik akan akrab dengan ketiga hal diatas, dimana kekuasaan untuk mendapatkan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik tingkat lokal maupun nasional, selanjutnya konflik adalah ruang dinamika untuk tukar menukar ide dan gagasan sekaligus pembagian tugas dan pekerjaan, dan kepentingan adalah yang melatarbelakangi seseorang untuk masuk politik. Bahkan hal terburuk adalah terikat oleh pragmatisme partai politik yang menjadikan politik sebagai media kekuasaan, politik sebagai media jalan pintas, politik sebagai media kapitalis, dan politik sebagai materialisme (Firmanzah, 2007).

Sehingga dengan mengetahui persamaan antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa memiliki unsur terkuat untuk tidak konsisten. karena dalam sebuah hubungan, konsistensi akan terbentuk dari perilaku seseorang lagi, lagi dan lagi. Sehingga orang lain akan mempercayai *personal brand* dengan merasakan konsistensi yang dilakukan secara terus menerus.

Disamping itu Tan Mei Hwa yang memiliki latar belakang Pendakwah seharusnya komunitas agama yang lebih dikedepankan, secara tidak langsung untuk memperbaiki masalah konsisten Tan Mei Hwa harus memilih apakah mempertahankan sebagai Pendakwah atau harus melepas statusnya sebagai Pendakwah dan benar-benar terjun sebagai aktivis politik.

5.3 Opini Informan Tentang Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa

Menurut Haoren (2014) jika dikaitkan dengan pencalonan politik, masyarakat terhubung dengan *personal brand* idealnya harus pada dimensi *personal brand* yakni karakter, kompetensi, dan kekuatan.

5.3.1 Dimensi Karakter Tan Mei Hwa

Karakter dalam bahasa Indonesia mengandung arti antara lain watak, sifat, atau akhlak sehari-hari. Karakter merupakan krisis yang dialami Indonesia saat ini, karena buruknya karakter pejabat publik tidak sedikit yang melakukan tindak korupsi, padahal karakter merupakan dasar atau fondasi dari suatu kepemimpinan (Purjear Jr, 2000). Karena karakter dari seorang tokoh politik menyumbangkan porsi yang paling besar atas munculnya kepercayaan, kepercayaan mengalahkan suka atau benci, sentimen atau tidak sentimen. Sehingga karakter adalah sebuah kualitas personal, diri sebenarnya, ekspresi dan pembuktian, tetapi bukan sebuah kepribadian, sebab kepribadian merupakan sebuah persona atau kedok yang biasanya dipakai oleh pemain sandiwara untuk menjadi karakter pribadi tertentu. Karakter merupakan sumber reputasi, sedangkan reputasi adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda (Purjear Jr, 2000).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) sebagian besar melihat karakter Tan Mei Hwa secara tidak langsung dari nilai diri seorang pendakwah yang tanggung jawab dan peduli, karena banyak dari informan menegaskan tidak pernah bertemu secara langsung dan bersumber dari beberapa media informasi untuk mengenal Tan Mei Hwa. Adapun informan P1 memaparkan untuk menilai karakter sesungguhnya

seseorang harus mendalami orang tersebut, hal tersebut dikarenakan statusnya hanya sebagai mahasiswa dan tidak terjun secara langsung dalam partai politik sehingga terbatas akses untuk kenal secara langsung dengan Tan Mei Hwa.

Hmm..kalau saya sih untuk menilai karakter seseorang biasanya harus mendalami orangnya, tapi kalau belum mengenal pastinya hanya dinilai sebatas secara umum, karena Beliau seorang pendakwah pasti semua orang menilai bahwa Beliau itu baik, istilahnya mencerdaskan umat melalui agama, mungkin untuk Sidoarjo sendiri memiliki wakil bupati seorang pendakwah cukup bagus, karena di Sidoarjo sendiri untuk pondok pesantrennya sudah lumayan berkembang sekarang. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Meskipun terbatas akses Informan P1 tetap mengikuti perkembangan Tan Mei Hwa melalui media TV lokal Surabaya, dengan begitu informan P1 dapat menilai Tan Mei Hwa selama ini menurutnya baik. Penilaian baik menurut informan P1 lebih difokuskan pada sisi agama, dimana bagi informan P1 latar belakang seorang pendakwah pasti dapat mengajarkan masyarakat tentang hal baik atau hal buruk sesuai dengan perintah di Al-Qur'an. Disamping itu juga pendakwah mencerdaskan umat melalui ajaran agama dan hal tersebut memiliki implikasi nilai karakter yang dikatakan oleh Kartajaya (2012) yakni tanggung jawab dan peduli, dimana tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui agama dan peduli dengan perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu Tan Mei Hwa memerlukan orang yang mempunyai nilai plus seperti yang dipaparkan oleh informan P4 mengenai Tan Mei Hwa.

Kalau menurut penilai saya, setau saya dia seorang mualaf dari tahun 1993, bagi saya seorang mualaf sudah bisa mendakwah itu menjadi nilai plus tersendiri buat saya, dan yang dia dakwahkan ada benar-benar di ayat-ayat Al-Qur'an, jadi menurut saya perfectlah bisa berdakwah dengan umur mualaf baru berapa taun. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P4 mengatakan bahwa meskipun Tan Mei Hwa seorang mualaf tetapi dapat mendakwah adalah nilai plus baginya, bahkan informan P4

menambahkan penilaian sempurna untuk seseorang yang menjadi muallaf dari tahun 1993. Sehingga informan P1 dan P4 melihat seorang karakter pemimpin yang tepat bagi Kabupaten Sidoarjo yakni seperti Tan Mei Hwa yang dapat mencerdaskan masyarakat melalui ajaran agama, bukan bangku sekolah secara formal tetapi pesantren yang harus berkembang. Kepercayaan informan P1 dan P4 akan kualitas personal dari karakter Tan Mei Hwa seorang pendakwah sama halnya dikatakan oleh Haroen (2014) yang menyatakan karakter adalah kualitas personal, diri sebenarnya, ekspresi dan pembuktian. Maka Tan Mei Hwa terbukti mempunyai kualitas personal dalam bidang agama dan terekam dengan baik pada informan P1 ataupun informan P4.

Senada dengan informan P1 dan P4, pendapat informan P2 dan informan P3 yang memaparkan kualitas karakter seorang Tan Mei Hwa tidak hanya pada ajaran agama, tetapi juga cara penyampaian yang humoris dan mudah dipahami ketika melihatnya di media TV lokal, sehingga banyak orang otomatis suka dan tertarik oleh karakter Tan Mei Hwa.

Kalau menurut saya tentang Tan Mei Hwa sih secara Beliau menyampaikan dakwahnya sih humoris, mudah dipahami, mungkin itu yang bikin buat banyak audien yang tertarik buat milih dia. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kalau setauku dalam berdakwah mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mungkin ilmu-ilmu yang dibagikan pada orang-orang bisa membuat orang-orang lebih suka beragam, lebih memahami arti-arti agama baik buruknya. Karena Bu Tan Mei Hwa dalam berdakwah dimana-mana, otomatis orang itu banyak yang suka dengan Beliau, gitu. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P2 dan P3 menilai karakter Tan Mei Hwa humoris dan mudah dipahami, secara tidak langsung mengacu pada teknik penyajian pesan, menurut Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi

pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Begitupun dengan pendapat informan U4 yang mengetahui Tan Mei Hwa dari dakwahnya di media TV lokal, bahwa Tan Mei merupakan orang yang tegas.

Kalau menurut saya selama liat di TV itu, kalau dakwah itu orangnya tegas, terus saya pernah liat juga visinya, kalau dia kepilih jadi wakil bupati Sidoarjo dia akan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, jadi saya setuju aja sama idenya Beliau, karena di Sidoarjo kan punya potensi untuk ibu-ibu rumah tangganya. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P5 juga menilai Tan Mei Hwa sangat memberdayakan kaum perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi besar. Hal yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa, memang seperti yang dikatakan oleh Subiakto & Ida (2012) isu-isu perempuan masih perlu diperjuangkan seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, kesetaraan, dan keadilan gender bagi kaum perempuan. Serta memiliki implikasi nilai karakter yang dikatakan oleh Kartajaya (2012) yakni tanggung jawab dan peduli, dimana isu-isu perempuan masih diperjuangkan hingga saat ini.

Selain itu pendapat informan P7 yang mengalami secara langsung saat Tan Mei Hwa berkampanye, menyatakan Tan Mei Hwa adalah seorang yang mempunyai niat dan tekad.

Kalau dari saya, aku suka dia mempunyai niat, tekad, contohnya mulai dari dia berkurban, berdakwah dimana-mana, dia juga salah satu pesantren, itu yang saya suka dari dia. Dia mempunyai dasar sebelum nyalon, juga mendakwah dan lain-lain, itu sudah cukup menurutku. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Hal tersebut dibuktikan Tan Mei Hwa dengan melakukan berbagai hal, seperti berkurban, berdakwah, mendirikan yayasan sosial, sehingga sebelum mencalon sebagai wakil bupati Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki dasar modal karakter diri.

Dimana modal Tan Mei Hwa tersebut, sama halnya dengan yang dikatakan Haroen (2014) sebagai kekuatan non-material yang terletak pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain. Setelah mengetahui kekuatannya, dapat menjadi sebuah tolak ukur pencapaian sebuah kemenangan yang akan diraih. Disamping itu modal sosial dari Tan Mei Hwa juga merupakan implikasi nilai karakter yang dikatakan oleh Kartajaya (2012) yakni tanggung jawab dan peduli, dimana Tan Mei Hwa sebagai umat manusia merasa peduli juga terhadap lingkungan sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan secara sosial, dan merasa ikut bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat secara sukarela di sekitarnya meskipun peran pemerintah yang seharusnya utama.

Namun berbeda dengan pendapat informan P6 yang mengetahui Tan Mei Hwa melalui poster di tempat perbelanjaan dekat tempat tinggalnya.

Kalau aku pribadi kan belum tau jelas, kalau menurut saya sih semoga gak cuma modal perjanjian aja, kan biasanya janji-janji saja, intinya orang kalau mau nyalon yang baik-baiknya dulu dan nanti kalau uda terpilih uda lupa sama janji-janjinya, semoga gak lupa, itu kalau saya. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P6 tidak memberikan penilaian secara pasti terhadap karakter Tan Mei Hwa, melainkan hal yang disinggung pada sisi kepercayaan sebagai pemilih, dimana informan P6 tidak ingin pengalamannya selama ini dalam dunia politik terus berulang yang sering mengecewakan masyarakat ketika telah terpilih dalam menjabat sebuah posisi di pemerintahan. Secara tidak langsung informan P6 ingin Tan Mei Hwa ketika terpilih melakukan tugas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infokukum.kkp.go.id) dan 5 program utamanya yang sudah dikampanyekan yakni Sekolah Gratis, Kesehatan Murah, Jalan Mulus, Lapangan Kerja Tersedia dan Perempuan Sejahtera (uswatan.com).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) mengatakan Tan Mei Hwa memiliki karakter menghormati, jujur, berintegritas, tanggung jawab, peduli, dan berani. Adapun pendapat informan U1 secara umum karakter Tan Mei Hwa adalah baik dalam menyampaikan ajaran agama, menjadikan enak didengar dan pandangan jauh kedepan lebih baik.

Secara umum baik dan disukai masyarakat, setiap memberikan ceramah enak didengar, jadi pandangan-pandangannya kedepan jauh lebih baik. Baik masalah agama ya dan kasih wawasan yang lebih, jadi ketika ada pengajian Bu Tan Mei Hwa di tempat saya berbondong-bondong dari mulut ke mulut banyak yang datang, cara dia berkomunikasi enak didengar dan yang mendengarkanpun juga tidak bosan. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U1 menjelaskan ketika Tan Mei Hwa mengadakan pengajian di daerahnya, banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang dan banyak yang suka dengan dakwahnya yang enak didengar dan tidak bosan. Hal tersebut dikarenakan teknik penyajian pesan Tan Mei Hwa bagus, memenuhi kriteria yang dikatakan oleh Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Kemudian informan U2 menyatakan Tan Mei Hwa pandai bergaul dan tidak membedakan golongan, baik anak muda ataupun ibu-ibu dapat diterima.

Kalau menurut saya orangnya enak sekali dalam penyampaian pengajiannya, dia tidak membedakan golongan dan semua dapat diterima baik, kemudian penyampaiannya gaul dan enak dimana digolongan anak muda dapat diterima dan digolongan ibu-ibu juga dapat diterima. Trus satu yang saya suka lagi dari Beliau sama suaminya, sesibuk apapun dia selalu melayani suaminya, saya tahu dia pasti memasak suaminya, seperti kita tahu Beliau kan sibuk terus ya tapi dia selalu ingat melayani suaminya dan

itu yang jarang dimiliki wanita karir. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Maka artinya Tan Mei Hwa memenuhi salah satu karakter yang dikatakan oleh Kartajaya (2012) yakni menghormati, dimana semua golongan dapat diterima oleh Tan Mei Hwa tanpa dibeda-bedakan dan sebagai seorang istri tetap melayani suami, meskipun sibuk sebagai perempuan karir.

Selain itu pendapat dari informan U4 juga memiliki penilaian karakter Tan Mei Hwa adalah baik, ketika di khalayak maupun non-khalayak.

Ya terima kasih, kalau saya melihat beberapa publik dia tampil baik di khalayak maupun non khalayak melalui visual di JTV dan radio Suara Surabaya yang saya dengar cukup menarik, karena dia model paradigma yang terbaru mengikuti perkembangan dan mengikuti kasus-kasus yang ada dengan joke-joke yang segar, yang gaul, yang anak muda, dan materi-materinya sangat baru sehingga sangat mengugah kaum perempuan, bahkan tidak melarang bagi bapak-bapak untuk berpoligami tetapi justru ibu-ibulah yang bagaimana cara bapak-bapak itu tidak boleh poligami, sebagai contoh pertama ibu harus pandai memasak, kedua ibu harus pandai berdandan, ketiga ibu harus pandai membuat anak yang enak, tentunya itu salah satu bahasa gaul. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Penilaian informan U4 tersebut tentunya didasari oleh pernah ikut serta dalam pengajian Tan Mei Hwa di daerah tempat tinggalnya, dan didukung media TV lokal yang mendukung pendapatnya dalam membandingkan dua situasi tersebut. Disamping itu latar belakang informan U4 yang merupakan Ketua Partai Pemuda Indonesia menjadikan detail dalam menilai seorang kandidat, dibuktikan memiliki pandangan berbeda dalam memaparkan karakter Tan Mei Hwa dalam dua situasi, situasi pertama pada khalayak, yang dimaksudkan adalah ketika Tan Mei Hwa berhadapan langsung dengan masyarakat baik di pengajian atau kampanye bertemu warga. Situasi kedua pada non-khalayak, yang dimaksudkan adalah ketika Tan Mei Hwa memberikan ceramah di TV lokal atau radio yang sifatnya tidak bertemu secara langsung dengan masyarakat dan satu arah dalam komunikasi. Dimana kedua situasi tersebut dinilai tetap baik serta menarik di pandangan

informan U4, sehingga secara tidak langsung informan U4 menilai karakter seorang Tan Mei Hwa adalah jujur dan berintegritas (Kartajaya, 2012).

Disamping itu Tan Mei Hwa sebagai model paradigma baru, karena Tan Mei Hwa mengikuti perkembangan jaman, penuh canda, pandai bergaul dengan siapapun bahkan hingga anak muda, materi dalam berdakwah selalu baru untuk menyinggung kaum perempuan yang telah berkeluarga, dan paradigma tersebut tidak lain adalah menyangkut teknik penyajian pesan yang dikatakan oleh Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Dukungan juga datang dari informan U5 yang menilai Tan Mei Hwa adalah pembina mental yang baik, hingga tingkat Jawa Timur.

Kalau pendapat saya mengenai Tan Mei Hwa memang dia seorang Da'i, dia seorang pembina mental yang baik, jadi dia seorang figur yang baik didalam ceramah kemana-mana bahkan dia ke tingkat Jawa Timur, itu satu. Kedua dia punya yayasan yang namanya Az-Zahra, Az-Zahra itu menangani masalah kemasyarakatan, kemanusiaan, bakti sosial, terus kesehatan bagi lansia, sunatan masal, itu program rutin untuk satu tahunnya. Adanya itu dia untuk modal Pilkada maju ke calon kandidat sudah tidak lagi pencitraan, karena citra beliau ini sudah baik, dengan karna itu dia tidak perlu. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebenarnya pembina mental yang baik menurut informan U5, secara tidak langsung sudah merupakan nilai karakter yang tanggung jawab dan peduli (Kartajaya, 2012). Bahkan didukung dengan memiliki yayasan Az-Zahra yang bergerak dibidang sosial melayani masalah kemasyarakatan, kemanusiaan, bakti sosial, kesehatan untuk lansia, dan sunatan masal. Semua yang dilakukan oleh Tan

Mei Hwa tersebut adalah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan dana pribadi dalam melaksanakan kegiatan di yayasan Az-Zahra (Indra, 2014).

Begitupun dengan informan U8 dengan pengalaman pribadinya melihat seorang Tan Mei Hwa baik secara langsung ataupun melalui TV lokal, menilai karakter seorang Tan Mei Hwa adalah berani.

Sesuai dengan apa yang saya dengar dan sekali-sekali melihat ceramah di TV. Dia sebagai perempuan memang berani, dalam arti berani karena satu-satunya ustadzah dari etnis lain, ini dia sudah punya satu keberanian. Dia disebut ustad gaul iya memang, ustad ngakak memang dengan joke-jokenya, politik pengajian biasanya memang seperti itu. Ada juga ustadzah yang dia selalu ingin geguyu, kalau tidak ada yang ketawa nggak ramai dan intinya kadang-kadang tidak masuk tetapi salah satunya bu Tan Mei Hwa ini cukup bagus secara pribadi. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U8 memandang Tan Mei Hwa adalah sosok perempuan yang pemberani meskipun dari etnis yang berbeda atau kaum minoritas, dimana dalam sejarah Kabupaten Sidoarjo jarang sekali yang mencalonkan sebagai kandidat seorang wanita, apalagi dari etnis yang berbeda. Sehingga informan U8 menegaskan ada sebuah keberanian. Disamping itu Tan Mei Hwa seorang ustadzah yang gaul, humoris, ramah dan hal tersebut mengacu pada teknik penyajian pesan yang dikatakan oleh Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan yang efektif, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan, faktor pertama yaitu struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan, faktor kedua yaitu daya tarik pesan yang terdiri dari *threat appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor* (Senjaya dalam Moerdijati, 2012).

Namun berbeda dengan pendapat informan U3 tidak mengenal karakter Tan Mei Hwa, karena hanya mengetahui keberadaanya melalui TV lokal, bahkan tidak pernah menghadiri pengajian secara langsung.

Terima kasih, sebenarnya secara jauh tidak mengenal Tan Mei Hwa. Saya mengenal sebatas dalam pengajian umum dan JTV, tetapi saya tidak pernah sekalipun hadir dalam pengajian karena saya sedikit berbeda pandangan dengan Tan Mei Hwa dalam konteks pengajian umum gimana caranya buat orang ketawa begitu saja. Masalah politik sangat disayangkan, namanya Tan Mei Hwa dibawa ke Sidoarjo untuk menjadi wakil bupati dengan Utsman itu hanya boneka saja. Saya sangat sesalkan sekali karena pengalaman politik saya dengan Tan Mei Hwa sangat janggal sekali, boleh dia jadi ulama tapi jangan diarahkan ke umara, dia disuruh ceramah tapi menjurus atau mengarah ke politik ini yang sangat disayangkan, apapun alasannya mereka seorang ulama dibawa ke umara jadinya seperti dipaksakan. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U3 bersikap seperti itu dikarenakan menyayangkan seorang Tan Mei Hwa dibawa ke Sidoarjo sebagai boneka seperti permainan, sebab bagi informan U3 yang telah berpengalaman dalam bidang politik sebagai Ketua DPD Partai Perindo, menyatakan sangat janggal ketika Tan Mei Hwa masuk ke dalam politik karena seorang ulama seharusnya tidak lari ke umara. Dimana menurut Azhari (2014) perbedaan mendasar dari ulama dan umara, yakni ulama merupakan pewaris ilmu para nabi dan penyambung lidah, karena para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang. Sedangkan *umara* adalah pemegang amanah Tuhan untuk mengurus kehidupan masyarakat, dimana kebijakan dan keputusannya dalam hukum dan peraturan ditegakkan demi ketenteraman umum.

Senada dengan informan U3, informan U6 juga tidak mengetahui pasti karakternya yang dimiliki oleh Tan Mei Hwa.

Kalau selama ini yang saya ketahui ceramahnya Bu Tan Mei Hwa ini memang enak didengar, saya pernah lihat di JTV, tapi untuk karakternya Beliau saya kurang mengetahui. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 hanya mengikuti ceramah Tan Mei Hwa di media TV lokal dan mengakui ceramahnya enak didengar, dan hal tersebut hanya mengacu pada teknik penyajian pesan yang dikatakan oleh Senjaya (1994) dalam upaya merancang pesan

yang efektif. Sedangkan pendapat informan U7 menilai karakter seorang Tan Mei Hwa sebagai Ustadzah tentunya baik, tetapi tergantung dari sudut pandang mana dalam menilai.

Sebetulnya saya belum pernah berhadapan langsung, cuma kalau dilihat sebagai penceramah atau ustadzah tentunya karakter yang baik. Namun sekarang dilihat dulu dari sudut pandang apa, apakah dia sebagai ustadzah untuk mencari rezeki atau kekayaan itu karakter sudah berbeda. Karena di dalam agama dijelaskan kalau agama sampai dijual, itu sudah tidak ada pahalanya, itu menurut pendapat saya. Jadi dilihat dulu sekarang dia mencalonkan sebagai wakil bupati niatnya apa dulu, kalau memang niatnya cari kekayaan tidak ada gunanya, berarti karakternya jelek. Makanya kita memilah-milah memilih orang dari karakter tergantung niatnya. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena Informan U7 sebagai pria Purnawirawan dalam hal menilai seseorang sudah menjadi pengalamannya, sehingga terlihat dalam menilai karakter Tan Mei Hwa bergantung sudut pandang. Informan U7 ingin seakan mengajak untuk berpikir kembali dalam menilai seseorang, sebab apa yang dilakukan Tan Mei Hwa selama ini sebagai penceramah tentunya baik tetapi belum tentu niatnya baik. Karena informan U7 khawatir apabila Tan Mei Hwa menjadi wakil bupati sudah memiliki niat yang berbeda dan tidak sama ketika Tan Mei Hwa menjadi seorang ustadzah atau pendakwah seperti sebelumnya. Informan U7 secara tidak langsung khawatir dengan yang dikatakan oleh Firmanzah (2007), yang menjelaskan tentang politik sangat terkait erat dengan keberagaman kepentingan, konflik dan kekuasaan. Siapapun yang terlibat dalam dunia politik, bahkan Tan Mei Hwa akan akrab dengan ketiga hal diatas, dimana kekuasaan untuk mendapatkan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik tingkat lokal maupun nasional, selanjutnya konflik adalah ruang dinamika untuk tukar menukar ide dan gagasan sekaligus pembagian tugas dan pekerjaan, dan kepentingan adalah yang melatarbelakangi seseorang untuk masuk politik.

5.3.2 Dimensi Kompetensi Tan Mei Hwa

Kompetensi merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, karena karakter saja tidak cukup, dengan kata lain menjadi orang baik dan orang bersih saja tidak cukup dalam politik. Sumber kompetensi adalah kemauan untuk belajar melalui berbagai sarana, Rustiyah (1982) mengatakan bahwa kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Berikut beberapa point yang terdapat dalam kompetensi Tan Mei Hwa:

5.3.2.1 Kompetensi Dari Tan Mei Hwa

Apabila mengacu pada UU No.13/200, tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10), kompetensi dibedakan menjadi dua bagian, yakni *hard competency* dan *soft competency*. Oleh karena itu dalam point ini, perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai *hard competency* Tan Mei Hwa, yang mencakup ketrampilan teknis atau pengetahuan. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) sebagian besar tidak mengetahui kompetensi Tan Mei Hwa, dan hanya beberapa saja yang mengetahui secara dakwah dan sosial. Adapun informan P3 melihat kompetensi yang mendominasi dari Tan Mei Hwa adalah sebagai pendakwah.

Kalau menurut saya sih untuk kompetensinya mungkin bisa dilihat dari saat ini sih Beliau kan sangat terkenal dengan cara berdakwahnya, untuk cara kepemimpinan sebelumnya sih belum tahu ya. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P3 melihat kompetensi Tan Mei Hwa lebih mengarah sebagai pendakwah, bukan dari gelar sarjana hukum yang notabene kebanyakan menjadi seorang hakim atau pengacara. Pada gambar IV.4 merupakan salah satu gambaran

ketika Tan Mei Hwa melakukan pengajian di salah satu rumah warga dan kegiatan itu sudah rutin dilakukan dari rumah ke rumah serta stasiun TV lokal pada gambar IV.11, sebelum pencalonan dirinya di Pemilihan Kepala Daerah. Tetapi informan P4 menambahkan kompetensi Tan Mei Hwa bukan hanya sebatas pendakwah saja tetapi rutinitas sosialnya sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo juga merupakan sebuah kompetensi.

Sepengetahuan saya sebelum menjabat sebagai calon wakil bupati ini, dia sudah memiliki aktivitas rutin tanpa ada tujuan mencalonkan diri, contohnya dia ada kegiatan rutin setiap satu tahun sekali khitanan masal, bantuan sosial, pengobatan gratis bagi warga lansia. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena informan P4 sudah mengikuti Tan Mei Hwa dari lama sebelum mencalonkan, sehingga mengetahui kegiatan sosial dari Tan Mei Hwa seperti khitanan masal, pengobatan gratis bagi lansia, bantuan sosial dan semua dilakukan setiap tahunnya. Kebenaran pernyataan informan P4 sama seperti yang dilansir oleh Steven Indra dalam artikelnya yang berjudul “Tan Mei Hwa, Apa Yang Diucapkan Juga Menjadi Perilakunya Sehari-hari”, yang menjelaskan bahwa Tan Mei melakukan kegiatan tersebut setiap tahunnya dan pada gambar IV.3 menggambarkan salah satu kegiatan Tan Mei Hwa yang sedang memberikan aksi sosial pada anak yatim ditengah kegiatan kampanye (Indra, 2014).

Namun berbeda halnya dengan informan P5 yang secara tidak langsung menjelaskan tidak mengetahui kompetensi Tan Mei Hwa, dikarenakan belum pernah menjadi kepala daerah.

Kalau dilihat dari rekam jejaknya, Ibu Tan Mei Hwa belum pernah menjadi pemimpin daerah, jadi partai politik yang mencalonkan Beliau cuma melihat secara potensi aja, belum tentu kompetensinya oke. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bagi informan P5 melihat sebuah kompetensi dari seseorang memerlukan sebuah pembuktian nyata, dimana informan P5 mengatakan karena Tan Mei Hwa belum pernah menjabat apapun di pemerintahan jadi tidak melihat apa kompetensinya. Bahkan informan P5 mengatakan pencalonan Tan Mei Hwa oleh partai politiknya hanya dilihat dari segi potensi ketenaran dari Tan Mei Hwa, bukan dari kompetensi yang dimiliki.

Apabila melihat teori Firmanzah (2008) *personal characteristic* merupakan karkter seorang kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas. Maka sebenarnya potensi Tan Mei Hwa secara tidak langsung diibaratkan sebagai salah satu produk politik yang dapat memberikan citra bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan pendapat informan P6, P7 dan P2, benar-benar tidak mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh Tan Mei Hwa.

Nggak tau juga. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Terkait itu saya kurang tau. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kalau saya belum seberapa tahu, mungkin dia dicalonkan oleh partai pengusungnya untuk mempopulerkan partai pengusungnya. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan informan P2 melihat Tan Mei Hwa dianggap hanya sebagai alat untuk mempopulerkan partai yang mengusungnya, hal tersebut implikasinya sama dengan informan P5 yang menganggap Tan Mei Hwa sebagai potensi saja. Meskipun tidak mengetahui secara pasti kompetensi Tan Mei Hwa, informan P1 setuju atas apa yang menjadi wacana beberapa partai politik untuk membuat sekolah kepemimpinan untuk pengkaderan.

Nah kalau pastinya saya juga belum tahu, karena tidak mengetahuinya secara langsung, tapi walaupun begitu persoalannya adalah partai pengusungnya harus sadar bahwa dia harus mengajukan kader-kader terbaik mereka.

Kemaren saya sempat ketemu sekjen dari Partai PDI, PKB dan Gerindra, mereka mengatakan bahwa akan mengadakan sebuah sekolah kepemimpinan untuk kader-kader mereka, mungkin itu salah satu wacana yang bagus sekali ketika ada sekolah untuk kaderisasi dari partai politik itu, sehingga masyarakat berpikir bahwa partai politik itu mengajukan kader-kader terbaik mereka, bukan sekedar kader yang tidak memiliki kualitas tetapi hanya memiliki uang. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P1 mengharapkan kesadaran partai politik untuk harus mengungkap kadernya yang terbaik, walaupun masyarakat banyak yang tidak mengetahui pasti bagaimana kompetensi calon kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Maka dari itu dengan adanya wacana sekolah kepemimpinan yang diadakan oleh Partai PDIP, Partai PKB, dan Partai Gerindra akan membuka kepercayaan masyarakat lebih luas, karena pembekalan kader tersebut menunjukkan sebuah kelayakan dari calon kandidat untuk memimpin suatu daerah tanpa adanya *money politic* yang masih menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Salah satunya permasalahan politik uang yang pernah dibahas oleh KPUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam artikelnya “Dorong MUI Buat Fatwa Haram Politik Uang”, menjelaskan bahwa dalam kaedah islam, politik uang itu adalah haram, tetapi masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami kaedah islam tersebut, karena partai politik sering kali dikuasai oleh para pemodal, maka sulit dihindari proses kapitalisasi pemilu.

Kultur politik Indonesia adalah kultur politik pasar, maka siapa yang berani membayar paling tinggi tentu yang akan mendapatkan suara. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan maraknya politik uang dalam pemilu, Pertama, partai politik lahir dari gerakan sosial yang dituntut harus terus berinteraksi dengan masyarakat, ketika kultur politik kita adalah kultur politik pasar, maka berinteraksi dengan masyarakat harus dibayar.

Kedua, kapasitas partai politik dengan keuangan sangat terbatas, akibatnya partai politik tidak bisa membangun interaksi dengan masyarakat secara terus-menerus, hal tersebut menjadikan ketika pemilu akan berlangsung seorang kandidat atau partai politik baru turun ke masyarakat. Dalam kondisi-kondisi seperti itulah menjadikan masyarakat tidak percaya dengan partai, maka cara yang paling mudah membuat masyarakat percaya adalah politik uang (kpud-ntbprov.go.id).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) secara keseluruhan mengatakan kompetensi Tan Mei Hwa yang utama adalah sebagai pendakwah. Adapun pendapat informan U2, secara agama Tan Mei Hwa tidak perlu dipertanyakan.

Kalau secara agama tidak perlu dipertanyakan, kalau pendidikannya bagus dia sarjana kan ya, gitu aja. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 mengatakan tersebut menandakan sebuah kepercayaan besar terhadap ilmu agama yang dimiliki Tan Mei Hwa, disamping itu informan U2 juga mengetahui dan mengakui Tan Mei Hwa memiliki pendidikan akademis yang bagus sebagai sarjana, walaupun tidak secara spesifik dalam bidang apa tetapi sesuai dengan profil yang informasikan oleh pihak KPUD Kabupaten Sidoarjo, bahwa Tan Mei Hwa merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (kpud-sidoarjokab.go.id), serta telah mengacu pada UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10) yang menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang disesuaikan.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh informan U4 mengenai kompetensi Tan Mei Hwa yang mumpuni dalam agama dan akademis.

Kalau pengetahuan yang mengarah ke ustadzah okelah, karena dia sarjana hukum yang mendalami keagamaan cukup lama mulai tahun 1993 sebagai ustadzah artinya sudah pandai pengetahuan yang dimiliki, menarik simpatik masyarakat oke sehingga pendukungnya banyak. Tapi seorang komunikator pembawaanya sebaik mungkin kalau mengenalnya kurang lama tidak jadi, sementara yang tidak harus sarjana mungkin mengenalnya lebih dulu akan jadi, apalagi yang di atasnya yang sudah menguasai materi. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U4 juga mengakui kompetensi Tan Mei Hwa yang mendalami ajaran agama sejak tahun 1993 sebagai ustadzah sudah mumpuni, dan lebih spesifik informan U4 mengatakan bahwa Tan Mei Hwa merupakan sarjana hukum, sehingga tidak salah Tan Mei Hwa menarik simpatik masyarakat dan banyak pendukungnya.

Pengetahuan informan U4 terhadap Tan Mei Hwa dapat spesifik dikarenakan pengalamannya terbiasa berkoalisi dan mencari informasi mengenai kandidat di setiap Partai Politik, ketika menjadi koordinator pemersatu 17 partai dalam mensukseskan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Bahkan informan U4 juga memaparkan bahwa sebaik apapun kompetensi yang dimiliki Tan Mei Hwa, apabila masyarakat Kabupaten Sidoarjo belum lama mengenalnya secara mendalam, maka tidak akan mudah memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Namun hasilnya dapat berbeda, apabila terdapat orang yang tidak harus memiliki gelar sarjana, tetapi telah lama dikenal masyarakat luas dengan tindakan nyatanya, maka orang tersebut mudah memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Sama halnya yang disampaikan informan U6 bahwa potensi Tan Mei Hwa sebagai ustadzah memang sangat mumpuni.

Kalau potensinya Ibu Tan Mei Hwa memang mumpuni ya karena Beliau seorang ustadzah, jadi wawasannya itu luas untuk mendidik kaum ibu-ibu dan mungkin dia selalu membaca, selalu menimba ilmu ya untuk masalah agama. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 yakin Tan Mei Hwa memiliki wawasan yang luas dan dapat mendidik kaum ibu-ibu yang nantinya memberikan dampak di dalam keluarga. Informan U6 mendasarkan wawasan Tan Mei Hwa memiliki wawasan luas dari selalu membaca dan menimba ilmu dari agama. Tetapi berbeda dengan kompetensi Tan Mei Hwa dalam pencalonan Pilkada, informan U7 yang berpendapat, bahwa kompetensi secara agama berbeda dengan kompetensi secara politik atau pemerintahan.

Kalau menurut saya dari ilmu agamanya bagus ya, tapi belum tentu bagus untuk ilmu politik atau dipemerintahan. Karena di pemerintah itu memerlukan ilmu yang lain seperti ideologi politik sosial ekonomi budaya atau juga ilmu tata negaranya, karena tidak semudah itu jadi pimpinan daerah itu, itu menurut saya. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U7 mengakui kompetensi secara agama Tan Mei Hwa sudah bagus, tetapi belum tentu untuk ilmu politik atau dipemerintahan, menurut pengalaman informan U7 pernah bekerja dalam pemerintahan, ilmu agama tidak bisa digunakan dalam politik dan pemerintah, karena di pemerintah membutuhkan ilmu seperti ideologi politik sosial ekonomi atau ilmu tata negara, dan tidak mudah menjadi kepala daerah. Namun berbeda dengan informan U5 yang memiliki sudut pandang Tan Mei Hwa sudah memiliki ilmu dari segala ilmu walaupun di dalam politik.

Kompetensi secara umum itu memang tidak dilakukan karena sikapnya dia itu berdasarkan Qur'an dan Hadiz, bahkan ilmu dari segala ilmu berdasarkan Qur'an, mengupasnya dari situ, walaupun masalah kemaslahatan atau masalah apapun, jadi nggak perlu diragukan walaupun itu di dalam politik. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Secara tegas informan U5 memang mengakui untuk kompetensi secara umum tidak dilakukan sebab Tan Mei Hwa melakukan hanya berdasar Qur'an dan Hadiz, karena menurut informan U5, Qur'an merupakan sumber ilmu dari segala ilmu yang mengupas segalanya hingga permasalahan politik. Maka dari itu informan U5

tidak khawatir akan Tan Mei Hwa, selama berdasar Qur'an masalah kemaslahatan atau masalah apapun dapat diselesaikan.

Selain itu informan U3 mengatakan Tan Mei Hwa menjadi seorang kepala daerah harus mengetahui segalanya dalam masyarakat.

Saya kira secara pribadi Tan Mei Hwa memenuhi karena dia selalu update, jadi ada gerakan baru apapun akan dia pelajari, karena dia yakin harus menjadi public figure yang segalanya harus tahu. Jadi selalu saya lihat dari setiap ceramah dia akan selalu membawa hal yang berbeda karena dia sudah menyiapkan diri bahwa saya harus lebih pintar dari yang dibawah. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pandangan pribadi informan U3 terhadap Tan Mei Hwa cukup memenuhi, dimana Tan Mei Hwa dirasa selalau *update* akan gerakan apapun untuk dipelajari karena sebagai calon kepala daerah harus mengetahui segalanya. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh informan U3 ketika melihat ceramahnya di TV lokal, Tan Mei Hwa selalu mempersiapkan diri untuk membawa hal yang berbeda dan baru supaya lebih berkembang kompetensinya dari orang yang berada di bawahnya. Begitupun dengan informan U1 yang setuju dengan informan U3, bahwa pendakwah harus meng*update* ilmunya selalu.

*Saya kira pengetahuan mengenai agama dalam hal ini islam dia cukup memadai karena pertama dia seorang pendakwah otomatis dia menguasai kajian-kajian islam. Tetapi saya kira tidak berdiri disitu saja, artinya sebagai seorang pendakwah dia juga harus meng*update* ilmunya, ya karena perkembangan jaman ini kan begitu besar. Tetapi sebagai seorang politikus atau calon leadership di Sidoarjo dia butuh pembelajaran dan pendalaman mengenai karakter Sidoarjo ini kan penting, karena kita kalau memenangkan sesuatu kan harus mengetahui A-Z apa yang kita menangkan itu, dan tidak kalah penting memilih teman itu jangan sampai keliru, kalau keliru jadi bahan tawaan, saya kira begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)*

Informan U1 mengingatkan bahwa pengetahuannya sebagai pendakwah memang sudah memadai dalam menguasai kajian-kajian islam, tetapi seharusnya diimbangi dengan meng*update* ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan jaman, salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang nantinya akan dipimpin. Apabila

mengetahui segalanya dari Kabupaten Sidoarjo dari A – Z, hingga pintar dalam memilih *partner* niscaya akan memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Informan U1 membahas mengenai *partner*, secara tidak langsung memiliki implikasi pada kesalahan Tan Mei Hwa menggandeng Utsman Ikhsan, karena sesuai dengan yang diberitakan oleh Bruriy Susanto pada artikel situs www.suarasurabaya.net yang berjudul “Mantan Napi Maju Pilkada Yakin Dapat 80 Persen Suara”, yang menjelaskan Utsman Ikhsan merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003, dan pencalonannya didukung dari partai koalisi, PKS dan Gerindra sebagai calon Bupati Sidoarjo, serta simpatisan yang setia mendukungnya (Susanto, 2015).

Pendapat informan U1 juga didukung oleh informan U8 yang mengatakan bahwa Tan Mei Hwa memang memiliki pengetahuan yang banyak dan berbeda dengan yang lain.

Sebagai ustadzah dia memang pengetahuannya harus banyak, saya rasa sampai saat ini cukup banyak dan saya lihat ditempat lain tidak selalu sama. Karena ada juga ustadzah yang selalu itu-itu saja, jadi dia mungkin hanya bisa dua atau tiga judul untuk dia ceramah. Tapi kalau saya rasa dia cukup dan berganti-ganti selalu update, nah untuk ilmu politik dan lain sebagainya saya rasa masih kurang. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U8 supaya Tan Mei Hwa tidak memiliki pengetahuan yang monoton dan selalu tidak sama dalam berdakwah, sebab ada ustadzah yang selalu itu-itu aja dalam mendakwah. Tetapi secara ilmu politik masih kurang dan ilmu pengetahuan lainnya dirasa masih kurang.

5.3.2.2 Sikap Dari Tan Mei Hwa

Apabila mengacu pada UU No.13/200, tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10), kompetensi dibedakan menjadi dua bagian, yakni *hard competency* dan *soft competency*. Oleh karena itu dalam point ini, perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai *soft competency* Tan Mei Hwa, yang mencakup antara lain aspek sikap dan kepribadian. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) menilai sikap dan kepribadian Tan Mei Hwa adalah sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Adapun pendapat informan P1 yang mengatakan sikap Tan Mei Hwa baik, karena tidak membeda-bedakan.

Untuk Bu Tan Mei Hwa memang mempunyai sikap baik, tidak membedakan, dan itu memang yang seharusnya seorang pendakwah dalam bersikap dengan masyarakat manapun. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P1 memang sebagai pendakwah harus begitu dalam bersikap, tidak membeda-bedakan dengan masyarakat manapun. Hal tersebut seperti yang dikatakan LaPierre, yang mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (LaPierre dalam Azwar, 2007). Jadi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi sosial manapun yang akhirnya memiliki sikap tidak membeda-bedakan siapapun. Begitupun dengan pendapat informan P2 yang menilai Tan Mei Hwa memiliki sikap yang komunikatif.

Cukup komunikatif karena sudah sering berdakwah, jadi komunikasi sangat lancar dan enak didengar. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P2 mengatakan Tan Mei Hwa komunikatif, dikarenakan sering berdakwah sehingga menjadikan jauh lebih lancar dalam berbicara dan jelas untuk didengar, dan dakwahnya berawal pada tahun 1993 yang ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya (kpu-dsidoarjo.go.id). Secara tidak langsung informan P2 sedang menunjukkan komponen afektif terhadap Tan Mei Hwa, dimana menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, atau perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu (Azwar, 2007). Selain itu pendapat informan P3 sikap yang dimiliki Tan Mei Hwa adalah pintar.

Orangnya pintar mas, dia selalu menjawab yang terbaik karena seorang pendakwah harus bisa memberikan solusi bagi jamaahnya. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P3 mengatakan Tan Mei Hwa pintar, karena sebagai pendakwah selalu dapat menjawab dan memberikan solusi bagi jamaahnya. Solusi yang diberikan Tan Mei Hwa pada jamaah sejatinya sikap evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu (Definisi Petty & Cacioppo dalam Azwar, 2007). Kemudian pendapat informan P4 menilai sikap Tan Mei Hwa berjiwa sosial.

Sangat baik sekali karena ya itu, selalu ada khitanan masal, ada bantuan kepada lanjut usia tiap tahun itu rutin, training yang sifatnya gratis, memberikan pengajian-pengajian, sikap yang ditanamkan pada masyarakat sudah ditanamkan jauh sebelumnya sosialisasi untuk Pilkada. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Hal tersebut dikarena Tan Mei Hwa selalu mengadakan khitanan masal, bantuan kepada lanjut usia, training sifatnya gratis, memberikan pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra yang didirikan sendiri oleh Tan Mei Hwa meliputi bidang pelatihan, konsultasi dan majelis dzikir, serata melayani perusahaan walau itu milik nonmuslim (Indra, 2014). Bahkan

pendapat informan P5 melihat figur Tan Mei Hwa dapat sebagai seorang ibu dan dapat sebagai seorang teman.

Kalau saya lihat sikapnya dia seperti figur seorang ibu atau kayak temen gitu, bisa dibilang sosialnya tinggi sekali dan untuk mengumpulkan pahala. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sama halnya dengan informan P4, memang Tan Mei Hwa adalah seorang yang memiliki jiwa sosialnya tinggi sekaligus mengumpulkan pahala. Kemudian pendapat informan P6 sikap yang dimiliki oleh Tan Mei Hwa adalah tegas.

Sikapnya seperti pemimpin, jadi tegas dan mungkin saya berharap bisa seperti Bu Risma. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P6 berharap ketegasan Tan Mei Hwa dapat seperti Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya yang tegas menutup pusat prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014). Sedangkan pendapat informan P7, karena Tan Mei Hwa pada dasarnya seorang ustadzah, tentunya memiliki sikap baik.

Karena seorang ustadzah jadi sangat baik, selain itu menerapkan ilmu-ilmu agama sehingga dapat menjadi contoh orang banyak. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kebaikan tersebut diartikan informan P7 dengan Tan Mei Hwa yang selalu menerapkan ilmu-ilmu agama sehingga dapat menjadi contoh atau teladan masyarakat secara luas.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) menilai sikap dan kepribadian Tan Mei Hwa sikap tidak membedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Adapun informan U1 yang menilai sikap Tan Mei Hwa adalah responsif.

Jadi kalau dilihat dari sikap ya, Beliau ini kan mungkin kalau komputer sudah Core mungkin barang kali, tetapi waktu kalau kita melihat Pak Utsman itu di

Pentium, jadi kayaknya lambat kan, lemot gitu lo. Artinya apa kalau dia seperti itu, secara responnya itu cepet, jadi kalau ada sesuatu itu buruan diselesaikan dan segera dijawab, ketika bersama audience dalam ceramah atau mungkin dalam tanya jawab dalam Pilkada dan saya rasa responsif ya, saya kira bagus itu karena modal pendakwah kan seperti itu, kalau pendakwahnya pasif atau lambat ya para jemaatnya tidur semua, saya kira sudah bagus. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sikap responsif yang dimaksudkan oleh informan U1 adalah apabila ada sesuatu permasalahan akan diselesaikan sesegera mungkin, dan dilakukan juga ketika berhadapan dengan jamaahnya saat di pengajian. Sebab sebagai pendakwah kalau responnya lambat, menjadikan orang yang mendengarkan bosan. Responsif yang ditunjukkan oleh Tan Mei Hwa sebenarnya adalah sebuah kesiapan antisipatif dalam menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang telah terkondisikan. (LaPierre dalam Azwar, 2007). Begitupun dengan pendapat informan U2 yang mendukung sikap Tan Mei Hwa responsif dan komunikatif.

Cukup dua, cukup responsif dan komunikatif. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kemudian pendapat informan U8 juga mengatakan sikap Tan Mei Hwa responsif dan tidak membedakan.

Untuk Bu Tan Mei Hwa memang sikapnya bagus, responsif, dan tidak membedakan. Jadi itu modal cukup untuk seorang ustadzah, tapi maaf saja mudah-mudahan itu dari hati nuraninya. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U8 melihat sikap tersebut adalah sebuah modal yang dipunya sebagai ustadzah, dan berharap sikap yang ditunjukkan murni dari hati nurani seorang Tan Mei Hwa. Dimana menurut Bertens (2007) hati nurani adalah penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku konkret, dan hal tersebutlah harapan yang dimaksudkan oleh informan U8 terhadap Tan Mei Hwa mempunyai sikap yang konkret. Selain itu pendapat informan U3 memandang Tan Mei Hwa memiliki sikap yang pintar.

Sikapnya memang pintar mas, dia memberikan jawaban yang terbaik dan memberikan solusi yang terindah, itu karena seorang ustadzah dan paling tidak dia seorang panutan. Apapun alasannya meskipun sakit hati, dia di depan umum meberikan solusi yang terbaik, walaupun solusi dia sendiri tidak terselesaikan sehingga penempatan dia sangat bagus di dalam public, menurut saya begitu ya, karena bagaimanapun dia public figure jadi dalam kondisi apapun harus smile. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sikap yang pintar menurut informan U3 adalah Tan Mei Hwa dapat memberikan jawaban dan solusi yang terbaik, karena sebagai ustadzah harus dapat menjadi panutan atau teladan, meskipun dalam dirinya sendiri ada permasalahan harus tetap memberikan yang terbaik dengan senyuman. Solusi yang diberikan Tan Mei Hwa pada jamaah sejatinya sikap evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu (Definisi Petty & Cacioppo dalam Azwar, 2007). Bahkan pendapat informan U4 secara tidak langsung menilai sikap yang dimiliki Tan Mei Hwa berjiwa sosial yang sudah ditanamkan jauh sebelum pencalonannya di Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

Dibilang baik ya biasalah, namun dia mengemasnya cukup bagus dan cukup menarik artinya sesuai dengan motonya dia meringankan beban orang banyak, artinya dia punya planning tiap tahun seperti yang dikatan Pak Dedi tadi yaitu ada khitanan masal, ada bantuan kepada lanjut usia tiap tahun itu rutin. Jadi sikap yang ditanamkan pada masyarakat sudah ditanamkan jauh sebelumnya sosialisasi, memberikan training yang sifatnya gratis, pengajian-pengajian katakanlah ceramah yang mungkin di lain tempat dia komersil hanya kecil sekali. Kalau sikap di umum karena belum jadi saya tidak tahu, tapi sekedar saat dia itu kampanye menjadi daya tarik sendiri karena begitu orang dimasukan ke komunikasinya dia, akhirnya memilih dia tetapi memang masih perlu waktu lama, saya kira sudah cukup demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U4 Tan Mei Hwa mengemas jiwa sosialnya bagus dan menarik, dimana setiap tahun ada khitanan masal, bantuan lanjut usia, training sifatnya gratis, pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra yang didirikan sendiri oleh Tan Mei Hwa meliputi bidang pelatihan, konsultasi dan majelis dzikir, serata melayani perusahaan walau itu milik non

muslim (Indra, 2014). Begitupun dengan pendapat informan U5 yang melihat sikap Tan Mei Hwa berjiwa sosial tinggi.

Kalau saya lihat sikap di jamaah majelis ya, itu dia sebagai figur seorang ibu, figur seorang teman, jadi dia berada di tengah-tengah jamaah. Terus untuk dia jiwa sosialnya sangat tinggi sekali karena dia sering menyantuni mas, walaupun diundang dalam pengajian tidak mau target itupun walaupun dia punya usaha masalah training hanya untuk ibadah bukan untuk apa-apa, dikumpulkan untuk ibadah itu aja. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U5 Tan Mei Hwa dapat dijadikan sebagai seorang figur ibu atau teman, dan sering memberikan santunan seperti pada gambar IV.3 Tan Mei Hwa memberikan santunan kepada yatim piatu, pengajian seperti pada gambar IV.4 bersama ibu-ibu pengajian, serta training secara sukarela, hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala. Namun pendapat informan U6 sikap Tan Mei Hwa sebenarnya kepemimpinannya yang bagus.

Sikapnya menarik karena Beliau seorang ustadzah, sebenarnya leadershipnya juga bagus. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Dimana menurut Ratnaningsih (2009) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan pemimpin. Selain itu pendapat informan U7 menegaskan bahwa seorang ustadzah tentunya baik.

Kalau menurut saya ya karena seorang ustadzah tentu sangat baik ya, karena dia sudah mendalami ilmu-ilmu agama paling tidak sosialisasi dengan masyarakat atau dengan siapa saja pasti akan baik. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kebaikan yang dimaksudkan oleh informan U7 adalah Tan Mei Hwa sudah mendalami ilmu-ilmu agama yang menjadikannya dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat, dibuktikan seperti pada gambar IV.3 Tan Mei Hwa memberikan santunan kepada yatim piatu, gambar IV.5 Tan Mei Hwa sedang mendengarkan aspirasi tukang sampah, gambar IV.6 Tan Mei Hwa bersosialisasi dengan pedagang

kecil, gambar IV.7 Tan Mei Hwa ikut jalan sehat dengan warga, gambar IV.8 Tan Mei Hwa bersama dengan pemuda karang taruna, dan gambar IV.12 Tan Mei Hwa bersama dengan Ikatan Haji Muslimat NU.

5.3.2.3 Loyalitas Kerja Dari Tan Mei Hwa

Perdebatan etnis hari-hari ini sudah bukan hal yang tabu atau harus disembunyikan, layaknya Pemilu tahun 1971 Orde Baru pergolakan politik yang berkaitan dengan isu etnisitas dan agama tidak banyak dibicarakan serta tidak muncul dalam partai, menurut Suryadinata (2002) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak diperkenankan dibicarakan secara terbuka. Maka dengan terbukanya era saat ini, perlu sedikit mendalami perdebatan tersebut apakah masih dikesampingkan atau hal tersebut perlu menjadi perhatian.

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai perbedaan etnis tersebut terhadap loyalitas Tan Mei Hwa dalam bekerja nantinya. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara keseluruhan menilai tidak ada pengaruhnya Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa terhadap kinerja nantinya bilamana terpilih. Adapun pendapat informan P6 yang mengatakan secara singkat tidak ada bedanya.

Hmm kalau aku nggak sih. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tentunya diperkuat juga oleh pendapat informan P1 yang mengatakan sudah bukan saatnya lagi membeda-bedakan etnis dan lebih fokus pada kepemimpinan.

Pendapat saya bahwa sudah bukan saatnya lagi kita membeda-bedakan, yang pasti ketika dia sudah menjadi berkomitmen untuk menjadi pemimpin di Sidoarjo dan pasti tujuan dia memakmurkan warga. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ketika Tan Mei Hwa sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin pastinya tujuannya hanya memakmurkan rakyat, menurut informan P1. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan P1 melihat seorang pemimpin bukan dari etnisnya dalam mempengaruhi sebuah loyalitas, tetapi bagaimana tujuannya dalam memimpin apakah memikirkan diri sendiri atau memikirkan hajat hidup orang banyak. Serta sesuai dengan tugas kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan janji-janjinya yakni pemenuhan 5 program yang diandalkan oleh Tan Mei Hwa untuk Kabupaten Sidoarjo (uswatan.com). Sama halnya dengan informan P5 yang mendukung dengan mengatakan tidak berpengaruh, dan yang terpenting adalah ketika terpilih menjadi pemimpin, otomatis tujuannya harus memikirkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan.

Kalau saya ya nggak pengaruh ya itu, orang Cina apa orang Jawa, kalau uda terpilih jadi pemimpin ya otomatis harus mikirin warganya seperti pendapat saya tadi. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Begitupun informan P2 yang mendukung tidak adanya perbedaan dalam etnisitas terhadap loyalitas Tan Mei Hwa dalam bekerja.

Tidak jauh dari pernyataan barusan, ya tidak ada perbedaan antara orang Jawa atau orang Cina yang penting itu hasil etos kerjanya dia. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P2 sangat jelas mengatakan tidak jauh dari pernyataan informan P1 yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara etnis Cina atau etnis Jawa, dan yang dipentingkan adalah sebuah etos kerja dari Tan Mei Hwa. Tetapi apabila melihat sebuah etos kerja, pada pemilu tahun 2009 terdapat isu etnisitas pada Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pemilihan Presiden. Isu etnisitas tersebut sebagai advokasi politik yang dilontarkan melalui slogan “Pasangan Nusantara”,

dimaksudkan adalah perpaduan antara kandidat yang berasal dari luar Jawa, yaitu Jusuf Kalla dari Makasar dan Wiranto dari Jawa (Widyawati, 2014).

Mendengar nama Jusuf Kalla tentunya sudah tidak asing, sebagai mantan Wakil Presiden tahun 2004-2009 pada era Susilo Bambang Yudoyono, kerja nyatanya sudah terlihat di seluruh Indonesia bahkan dapat dikatakan tidak diragukan kali penguasaan medan di Indonesia, sehingga menjadikannya berani maju sebagai calon Presiden pada periode tahun 2009-2014. Namun etos kerja dan loyalitasnya terhadap Negara Indonesia selama menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak menjadikannya luput dari isu etnisitas, hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya isu sebuah etnisitas masih menjadi perhatian untuk beberapa kalangan. Begitupun dengan informan P7 yang mengatakan tidak ada pengaruhnya baik dari keturunan etnis Cina ataupun keturunan Jawa.

Kalau bicara loyalitas ya ga ada pengaruhnya, mau keturunan Cina atau keturunan Jawa yang penting sebagai seorang pemimpin harus mempunyai jiwa loyalitas tanpa batas, ya wes yang bagus sekalian bagus jangan setengah-setengah dalam menjalankannya, seperti itu. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 menyatakan bahwa ketika Tan Mei Hwa menjadi seorang pemimpin harus mempunyai loyalitas tanpa batas, tidak boleh setengah-setengah dalam bekerja dan harus maksimal untuk rakyat Kabupaten Sidoarjo khususnya. Sebenarnya apabila melihat kompetensi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah sesuai dengan karakter Negara Indonesia yang mayoritas beragama muslim, usaha Tan Mei Hwa terbukti secara maksimal dilakukan dengan mendakwah sembari berkampanye yang dapat dilihat pada gambar IV.9 peserta pengajian membawa atribut kampanye dari Tan Mei Hwa. Usaha tersebut sebenarnya sudah membuktikan Tan Mei Hwa sebelum menjadi pemimpin Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan yang terbaik untuk meyakinkan masyarakat dengan kompetensi yang

dimilikinya. Sama halnya informan P4 yang mendukung informan P7 secara lantang mengatakan tidak.

Ya saya juga tidak, soalnya kenapa yang dia pimpin kan dari berbagai etnis, tidak hanya etnis Cina doang, jadi dia harus menyesuaikan dengan masyarakat yang dia pimpin tadi, dia harus adil dan nggak hanya mikirin minoritas etnis dia saja, udah sih itu aja. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P4 menambahkan apabila Tan Mei Hwa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo, maka secara tidak langsung harus menyesuaikan keberagaman etnis secara keseluruhan dan tidak dapat dipilah-pilah sesuai keinginannya. Sehingga Tan Mei Hwa harus adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, layaknya sila ke-5 dalam Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pada golongan etnisnya saja dan dapat menambahkan sejarah baru di Indonesia dari etnis berbeda memimpin suatu daerah, layaknya Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi Wakil Gubernur bersama dengan Gubernur Joko Widodo periode tahun 2012-2017.

Dukungan juga bertambah dari informan P3 yang mengatakan tidak terpengaruh meskipun Tan Mei Hwa seorang etnis Tionghoa.

Menurut saya sih tidak berpengaruh ya, karena tergantung dari cara berkepemimpinan dia, kalau diharapkan sih Bu Tan Mei Hwa itu dapat menjadi pemimpin yang netral, yang bisa memahami etnis Jawa. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P3 hanya bisa berharap pada Tan Mei Hwa ketika menjadi pemimpin seharusnya dapat menjadi pemimpin yang netral, dan dapat memahami etnis Jawa yang sebagian besar juga merupakan pengikutnya dalam setiap pengajian yang diadakan secara rutin jauh sebelum pencalonan.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) melihat banyak pengaruhnya

ketika Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Adapun pendapat informan U7 menekankan bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi seorang pemimpin daerah pasti akan meningkatkan loyalitasnya kepada masyarakat, Bangsa dan Tanah Air. Karena seorang pemimpin harus berpikir secara luas dalam memimpin rakyat.

Kalau menurut saya kalau mereka sudah terpilih menjadi pemimpin di daerah saya rasa dia akan meningkatkan loyalitasnya kepada masyarakat, Bangsa, dan Tanah Air, karena dia akan berpikir secara luas lagi ingin menjadi pemimpin. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Namun pada nyatanya isu Etnisitas dan Agama masih muncul menjelang pemilu 2009, *Rakyat Merdeka* 11 Maret 2008 mengangkat berita berjudul: Bachtiar Chamsyah Mau Jadi Presiden, “Tapi Mana Mungkin, Saya Bukan Orang Jawa”. Pernyataan Bachtiar Chamsyah bisa diartikan dalam dua hal: pertama, etnisitas merupakan salah satu variabel yang menentukan elektabilitas kandidat. Kedua, pernyataan Bachtiar Chamsyah merupakan sebuah teks yang menunjukkan bahwa selama ini terjadi hegemoni dalam pembentukan pesan seolah-olah hanya orang Jawa yang pantas menjadi Presiden. Media menyoroti hal tersebut seakan-akan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bahwa secara tidak langsung presiden harus dari orang Jawa dan kandidat dari daerah lain tidak mempunyai kesempatan.

Selain itu pendapat informan U1 mengatakan secara tidak langsung terdapat pengaruh, tetapi sifatnya lebih pada internal kaum Tionghoa secara keseluruhan, dan mempengaruhi pembuktian pada masyarakat Indonesia.

Saya kira mereka akan lebih pede di intern kaum Tionghoa sendiri karena ternyata mereka juga bisa diterima ini ditingkat bawah akan terjadi pembauran secara teori mungkin bisa tetapi nyatanya di lapangan masih ada skat-skat gitu. Tapi paling tidak mereka menjadi pemimpin, menjadikan mereka lebih percaya diri bahwa mereka juga diterima sebagai keluarga besar Bangsa Indonesia, saya kira begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tan Mei Hwa bersama dengan kaum Tionghoa akan merasakan pengaruh besar apabila terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo, karena kaum Tionghoa dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi batu loncatan untuk lebih percaya diri, serta menjadi tauladan dalam membangun bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo tanpa adanya batasan antar etnis. Namun setidaknya menurut informan U2 kaum Tionghoa handal dalam masalah perekonomian.

Kalau menurut saya sih berpengaruh sekali karena kalau kita berbicara masalah ekonomi mau tidak mau pengusaha kan banyak yang Tionghoa, ya sangat membangun sekali menurut saya. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U2 mengatakan kalau berbicara masalah ekonomi, etnis Tionghoa handal dalam mendirikan usaha dan tanpa dipungkiri pengusaha di Indonesia didominasi oleh kaum Tionghoa. Sehingga menurut informan U2 sangat pengaruh membangun loyalitas dari etnis Tionghoa yang sejalan dengan jiwanya dalam menjalankan usaha, dan berharap dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Begitupun dengan informan U3 yang memandang berpengaruh sekali sebuah loyalitas ketika etnis Tionghoa menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Sidoarjo.

Biasanya kalau dari kelompok minoritas jadi seorang pemimpin itu sangat perhatian, satu contoh kalau dari mereka dari luar islam menjadi mualaf kalau dia menjalankan ibadah semakin khusyuk. Kalau mereka jadi pemimpin di Sidoarjo mereka akan kehati-hatian jadi pandangan saya begitu, beda dengan kalangan islam yang biasa sembahyang tidak terlalu khusyuk dibandingkan mereka yang mualaf pasti khusyuk. Sama saya lihat Ahok, dia paham dia kelompok minoritas, dia akan menunjukkan yang terbaik, sama kalau Tan Mei Hwa akan memimpin Sidoarjo kalau jadi pemimpin, ya dia akan berpikir jauh dan dia akan mempertahankan minoritas bahwa minoritas yang terbaik di Sidoarjo. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pendapat informan U3 adalah ketika seorang yang berbeda etnis diberi kesempatan untuk memimpin, maka akan jauh lebih perhatian dan jauh lebih berhati-hati dalam melangkah dibandingkan etnis pribumi yang telah biasa memimpin, layaknya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok wakil gubernur DKI

Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai Gerindra, meskipun melalui dua tahap Pemilu pada akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org), dan saat ini telah naik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi presiden periode tahun 2014-2019. Sehingga informan U3 berharap Tan Mei Hwa juga dapat menunjukkan dan mempertahankan bahwa minoritas yang terbaik di Sidoarjo dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi menurut informan U5 sebuah loyalitas adalah keharusan secara tidak langsung ketika menjadi seorang pemimpin daerah.

Kalau loyalitas jelas ya karena seorang pemimpin di Indonesia itu ada pendidikan khusus Lemhanas, sebelum dia terjun ke masyarakat pendidikan khusus Lemhanas, jadi mau nggak mau dia harus loyalitas, satu. Kedua, jelas kata mbak rizna tadi pengaruh sekali karena untuk masalah perekonomian baiknya orang Cina yang lebih maju dari pada warga Negara kita. Nah masalah hak dan kewajiban itu sama karena sudah diatur dalam UUD, itu saya kira. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U5 menunjukkan bahwa apabila Tan Mei Hwa menjadi pemimpin, dipastikan akan mendapatkan pendidikan khusus Lemhanas sebelum terjun ke masyarakat dan akan menjadikan seseorang memiliki loyalitas tinggi. Maka Informan U5 juga setuju dengan pernyataan informan U2 kalau loyalitas lebih berpengaruh dari etnis Tionghoa dalam masalah perekonomian, tercermin dari Negara Cina yang sudah maju secara perekonomian dibandingkan Indonesia. Sehingga secara tidak langsung Tan Mei Hwa sudah dipercaya dalam dua kompetensi mendasar yakni pakar dakwah dan pakar perekonomian. Namun untuk masalah hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin sama saja, baik etnis Tionghoa maupun pribumi karena telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id). Disamping itu pendapat mengejutkan datang dari suara hati

murni informan U8 yakni selama 40 tahun tinggal di Kabupaten Sidoarjo sesungguhnya ingin sekali dipimpin dari etnis Tionghoa.

Terus terang saja selama 40 tahun lebih saya menjadi penduduk Sidoarjo sebetulnya saya juga pengen Sidoarjo dipimpin oleh etnis Cina, soalnya selama ini saya evaluasi ya gitu-gitu juga, sapa tahu lebih bagus, ini suara hati saya ya. Untung saja saya tidak mau jadi bupati, saya jadi bupati mungkin lain lagi ceritanya. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U8 ingin dipimpin oleh etnis Tionghoa dikarenakan selama tinggal di Kabupaten Sidoarjo tidak ada perubahan secara signifikan, dapat dikatakan begitu-begitu saja. Sehingga informan U8 berpandangan bahwa mungkin saja dengan adanya etnis Tionghoa menjadi pemimpin, loyalitas kepada masyarakat jauh lebih baik dibandingkan pemimpin yang sebelumnya. Bahkan karena terlalu kesalnya terhadap pemimpin saat ini, informan U8 mengandaikan bila dirinya menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo akan pasti berbeda hasilnya saat ini.

Tetapi informan U4 memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai loyalitas dari seorang Tan Mei Hwa, selain dikarenakan pengalamannya sebagai Ketua Partai Pemuda Indonesia tetapi secara tidak langsung informan U4 ingin menegaskan mengenai loyalitas harus terbukti programnya ketika terpilih.

Dia bisa nggak menjalankan kebijakan yang pendek artinya dalam 100 hari bahkan 1 tahun yang direalisasikan, katakanlah dari bekerja bisa tidak menjalankan, katakanlah bisa menjalankan 100 hari itu kebijakan regulasi terwujud mungkin menjadi hal terbaru lagi buat Tan Mei Hwa bisa jalan seutuhnya, itu jangka pendek. Untuk jangka panjangnya program-program yang harus dijalankan planning, controlling, actuating oleh Tan Mei Hwa, kalau selama itu bisa otomatis mempengaruhi kebawah dan lagi harus ada sensasi gebrakan yang baru, apa yang baru untuk Sidoarjo seperti Ahok kan gitu ada yang baru, demikian. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Dalam menilai seseorang apakah memiliki sebuah loyalitas atau tidak, Informan U4 membandingkan terlebih dahulu Tan Mei Hwa dengan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dimana Ahok berhasil memberikan gebrakan kebijakan baru

dalam 100 hari dan hal tersebut secara tidak langsung diakui informan U4 sebagai etnis Tionghoa yang memiliki loyalitas tinggi. Begitupun dengan Tan Mei Hwa, informan U4 ingin melihat apakah etnis Tionghoa ini dapat memberikan yang sama di Kabupaten Sidoarjo dengan Ahok di DKI Jakarta, bahkan apabila dalam jangka panjang dari *planning, controlling, actuating* sukses dilaksanakan loyalitas tidak datang dari Tan Mei Hwa saja tetapi hingga tingkat paling bawah akan terpengaruh.

Hal yang disampaikan informan U4 tentunya terkait erat dengan gaya kepemimpinan setiap pemimpi yang berbeda, dimana menurut Ratnaningsih (2009) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan pemimpin, maka Tan Mei Hwa sebagai pemimpin memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan program-programnya bersama bawahannya.

Menjadi seorang pemimpin tentunya tidak mudah dan akan banyak pihak yang menilai setiap langkah yang dibuat oleh pemimpinnya, sehingga informan U6 tidak ingin menilai loyalitas dari segi etnis tetapi hanya mengingatkan apabila Tan Mei Hwa menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Sidoarjo.

Kalau Tan Mei Hwa menjadi pemimpin di Sidoarjo hendaknya mereka semakin berhati-hati ya, semakin jujur ya melaksanakan kebijaksanaan, kemungkinan kecil korupsi ya karena dia menunjukkan ke dunia luar maksudnya Sidoarjo khususnya bahwa mereka itu mampu dan mereka akan lebih berhati-hati dan jujur. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan U6 mengatakan apabila Tan Mei menjadi seorang pemimpin dapat bertindak lebih berhati-hati, bertindak jujur dalam melaksanakan kebijakan, dan tidak ada tindakan korupsi, maka masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dapat memberikan penilaian positif terhadap loyalitasnya.

5.3.2.4 Pengaturan Kebijakan Dari Tan Mei Hwa

Menurut Bystrom et al. (2004) media massa dianggap sering menggambarkan politisi perempuan mempunyai masalah atau dikaitkan dengan isu domestik yang berkaitan dengan perilaku anak dan suaminya, namun tidak dengan politisi laki-laki. Disamping itu media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan di rumah, persoalan penampilan mereka di publik, dan perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja *online*, dan sebagainya. Sedangkan kandidat laki-laki secara umum lebih memiliki kebebasan dalam berpakaian dan bertingkah laku karena publik telah terkoordinasikan atau terbiasa untuk menerima laki-laki sebagai pemimpin.

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai Tan Mei Hwa sebagai perempuan apakah dapat mengatur sebuah kebijakan di pemerintahan. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara keseluruhan menilai Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus bisa mengatur kebijakan. Adapun pendapat informan P6 yang mengatakan dengan jelas dan singkat harus bisa.

Harus bisa. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Begitupun dengan pendapat informan P7 yang mengatakan Tan Mei Hwa sebagai perempuan mampu mengatur kebijakan di pemerintahan.

Menurut saya mampu, seperti Bu Risma aja ya sebagai walikota aja banyak yang mau ditarik ke Presiden. Tan Mei Hwa sendiri menurut saya bisa karena mempunyai dasar niat dan tekad, mulai dari terjun langsung ke lapangan. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Informan P7 mengibaratkan Tan Mei Hwa yang memiliki niat dan tekad seperti Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan dirinya sebagai perempuan dipertimbangkan oleh banyak pihak hingga muncul wacana akan di calonkan sebagai presiden, seperti yang dilansir oleh Laksono Hari Wiwoho dalam artikelnya di kompas.com dengan judul “Jokowo Sebut Risma Cocok Jadi Presiden”, menjelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memuji sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berani dan dekat dengan rakyat, sehingga menurut Jokowi cocok menjadi seorang presiden (Wiwoho, 2014). Selain itu pendapat informan P5 Tan Mei Hwa harus optimis kalau bisa melakukan kebijakan di pemerintahan.

Kalau saya rasa harus optimis sih, optimis kalau Bu Tan Mei Hwa pasti bisa karena ya itu tadi, contohnya Bu Risma nggak semua perempuan direndahkan, mungkin aja kalau orangnya tegas, ya pasti bisa, optimis aja intinya. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sama halnya seperti informan P7, yang mencontohkan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya sebagai perempuan dapat tegas mengatur pemerintahan Kota Surabaya sehingga tidak direndahkan. Selanjutnya pendapat informan P4 yang sesama perempuan meyakini, Tan Mei Hwa bisa melakukan kebijakan di pemerintahan.

Ya menurut saya bisa, karena seharusnya perempuan cukup memenuhi program-program dan janji-janjinya itu, ntar kalau uda terpenuhi semua, dari para kaum lelaki bisa menilai, dan tidak seperti apa dia pikirkan. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Terpenting bagi informan P4 adalah pemenuhan akan program-program yang telah disusun dan diketahui masyarakat, supaya kaum laki-laki dapat menilai kinerja seorang perempuan dan tidak seperti apa yang dipikirkan selama ini perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja

online, dan sebagainya (Subiakto & Ida, 2012). Tetapi bagi informan P3 kembali lagi pribadi Tan Mei Hwa dalam mempunyai tekad untuk membuktikan pada kaum laki-laki yang meremehkannya.

Kalau menurut saya sih kembali lagi pada Bu Tan Mei Hwa, kalau dia mempunyai tekad tinggi untuk menjadi pemimpin yang baik, apa salahnya dia mencoba dan membuktikan pada lelaki yang meremehkannya sebagai pemimpin, wanita juga mempunyai pemikiran pemimpin, bisa jadi lebih bisa diandalkan dari pada cara kepemimpinannya laki-laki. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P3 sebagai perempuan juga dapat memiliki pemikiran kepemimpinan, bahkan bisa lebih dari cara kepemimpinan laki-laki. Salah satunya pemimpin perempuan Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya yang menutup pusat prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin seorang laki-laki yakni Bambang Dwi Hartono hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014).

Namun menurut pendapat informan P2 secara tidak langsung yakin Tan Mei Hwa dapat melakukan kebijakan di pemerintah, karena tidak selalu perempuan lemah dan direndahkan.

Memang menurut kebanyakan orang kaum perempuan itu direndahkan, tapi tak selalu wanita itu lemah dan direndahkan, untuk jadi pemimpin perempuan harus bisa belajar bermental kuat untuk memimpin suatu daerah, mental kuat itu contohnya dari cibiran-cibiran orang, sisi negatif orang tersebut, dan seperti Bu Risma dapat dijadikan sebuah contoh, dimana Bu Risma tegas, berani mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, seperti menutup gang dolly itu kan dari jaman dahulu belum ada yang berani dan baru kali ini Bu Risma sebagai perempuan berani mengambil tegas dari tindakan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P2 untuk menjadi pemimpin perempuan harus bermental kuat dengan tidak mendengarkan cibiran-cibiran negatif dari masyarakat, layaknya Tri Rismaharini wali kota Surabaya yang diakui juga oleh informan P7 dan P5 merupakan orang tegas dan berani dalam mengambil keputusan menutup pusat

prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin seorang laki-laki yakni Bambang Dwi Hartono hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014). Selanjutnya pendapat informan P1 secara tidak langsung menjawab baik perempuan atau laki-laki pasti dapat mengatur kebijakan di pemerintah, asalkan dapat menjadi pemimpin yang baik.

Ya menurut saya disini kita harus melihat pertama, dibedakan dulu manajer sama leader, kalau manajer kan perempuan banyak sekali, kita harus paham dulu manajer itu adalah orang yang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, tapi kalau leader dia harus bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau berperilaku sesuai yang diinginkan oleh pemimpin itu tadi, yang dipertanyakan disini tidak dilihat sebagai perempuan atau laki-laki, biar dia perempuan atau laki-laki tidak bisa mempengaruhi bawahannya untuk berperilaku sesuai keinginan pemimpin itu tadi, dia tidak bisa disebut pemimpin yang baik. Nah menurut saya perempuan ataupun laki-laki itu sama aja, yang penting dia bisa masuk mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti kebijakan yang dia putuskan, itu yang kita sebut sebagai pemimpin. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena menurut informan P1 sebagai pemimpin harus dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan pemimpin, dan tidak terbatas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ratnaningsih (2009) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan pemimpin. Sehingga ketika Tan Mei Hwa dapat menjadi pemimpin yang baik, diyakini oleh informan P1 akan secara otomatis dapat mengatur kebijakan di pemerintahan.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) sebagian besar mengatakan Tan Mei Hwa mampu dalam mengatur kebijakan di pemerintah. Adapun pendapat informan U1 secara tidak langsung mengatakan Tan Mei Hwa mampu, karena

menurut pengalaman informan U1 sebagai Ketua Cabang Partai Buruh Kabupaten Sidoarjo, dalam pemerintahan sudah ada bagiannya masing-masing.

Dalam pemerintahan itu kan ada bagiannya masing-masing ya, jadi pemimpin itu sebagai fungsi manajerial saja sebenarnya, pelaksanaannya ada di kepala dinas, SKPD-SKPD dan sebagainya. Jadi saya kira tidak masalah ya yang penting dia memiliki leadership yang baik. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U1 apabila Tan Mei Hwa terpilih menjadi kepala daerah sebenarnya fungsi manajerial saja atau dengan kata lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk mengatur (kbbi.web.id). Dikarenakan arena pelaksana ada pada kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya, sehingga informan U1 yakin Tan Mei Hwa mampu. Begitupun dengan pendapat informan U2 yang menilai Tan Mei Hwa mampu karena sudah mengetahui kemampuannya.

Insyallah mampu dilihat dari kemampuan Beliau, baik dari sisi religinya maupun politiknya, cuman tadi itu tinggal cara molesnya aja gimana. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kemampuan Tan Mei Hwa dari sisi religi dan sisi politik, menjadikan informan U2 yakin mampu melakukannya, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Bahkan pendapat informan U3 sebagai Ketua DPD Partai Perindo, sangat yakin Tan Mei Hwa mampu melakukan kebijakan di pemerintahan.

Sangat mampu sekali karena seorang pemimpin dia tidak akan berpikir sendiri, walaupun toh dia tidak mempunyai dasar politik masih di cover tim staf ahli dan didukung oleh birokrasi-birokrasi, jadi cuma menjalankan saja dan hanya leadershipnya yang main, sangat mampu saya kira. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U3, apabila Tan Mei Hwa terpilih menjadi pemimpin tidak akan berpikir sendiri, walaupun tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli dan birokrasi-birokrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(infohukum.kkp.go.id), sehingga Tan Mei Hwa hanya tinggal menjalankan dan jiwa kepemimpinan yang lebih diutamakan. Senada dengan pendapat informan U3, informan U6 yakin Tan Mei Hwa mampu karena ada staf-staf ahli dan tidak bekerja sendiri dalam pemerintahan.

Insyaallah mampu karena disana ada staf-staf yang ahli ya jadi mampu. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Namun informan U2 melihat posisi Tan Mei Hwa apabila terpilih sebagai wakil bupati tidak menjadi masalah dan dirasa mampu dalam memberikan kebijakan di pemeritahan, sebab berbeda dengan posisi calon bupati Tan Mei Hwa tidak akan mampu mengatur kebijakan.

Kalau selaku W2nya mampu, W2 kan istilahnya ban serep, tapi kalau dia didepan oh tidak mampu karena harus sangat baik sekali, artinya baik saja belum cukup tetapi harus ambisi, pandai diplomasi masih kurang, tega tidak punya sama sekali padahal di eksekutif tega harus dimiliki itu untuk kemenangan, oke itu aja. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Sebab menurut informan U4 menjadi yang terdepan sebagai bupati baik saja tidak cukup, tetapi harus mempunyai ambisi, pandai diplomasi, dan tidak berbelas kasihan maupun dalam jajaran eksekutif bersama kepala daerah lainnya. Sama halnya dengan informan sebelumnya U3 dan U6, pendapat informan U5 juga menambahkan bahwa Tan Mei mampu melaksanakan kebijakan di pemerintah.

Ya mampu, karena semua itu ada staf ahli ya. Karena di dalam pemerintahan itu dibagi job description masing-masing antara bupati dan wakil bupati, jadi artinya tidak sebagai ban serep kalau ban serep otomatis dia hanya sebagai boneka, kali ini ada jobnya tersendiri dalam pembagian tugas. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena dalam pemerintahan Tan Mei Hwa tidak sendirian, karena ada staf ahli yang akan membantu sesuai dengan tugas dan pelaksana bagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id),. Tetapi informan U5 menegaskan bukan ban serep, karena

meskipun posisi sebagai wakil bupati sudah ada tugas sendiri. Namun berbeda dengan pendapat informan U7 yang masih sangsi akan kemampuan Tan Mei Hwa dalam mengatur kebijakan di pemerintahan.

Kalau untuk saya masih sangsi kemampuannya karena seorang leadership harus menguasai keseluruhan meskipun dia punya staf ahli, karena kalau dia tidak punya kemampuan POLEKSOSBUD tadi sesuai dengan pimpinan di daerah itu nanti akan dibuat permainan sama orang pemerintah, sebagai leadership harus memang siap sebelum menjadi calon pimpinan di daerah itu, saya rasa itu. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U7 sebagai pemimpin harus menguasai keseluruhan meskipun mempunyai staf ahli, dan kalau tidak mempunyai ilmu Politik Ekonomi Sosial Budaya yang cukup, maka akan dibuat permainan oleh orang pemerintah. Sama halnya dengan informan U7, pendapat informan U8 juga melihat Tan Mei Hwa belum mampu dalam mengatur kebijakan dalam pemerintah.

Kalau untuk saat sekarang belum mampu karena tadi memang beberapa faktor harus punya dia, tapi kalau untuk dia belajar untuk 5 tahun mendatang mudah-mudahan bisa karena mungkin ilmu menejemennya kurang. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U8 seorang pemimpin memang harus memiliki beberapa faktor, salah satunya Politik Ekonomi Sosial Budaya yang mumpuni. Informan U8 berharap Tan Mei Hwa belajar dahulu dan lebih layak 5 tahun kedepan dalam pencalonan. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjelaskan permasalahan *positioning* dan *timing* yang telah dibahas informan U8 sebelumnya, dimana mengenai *positioning* Tan Mei Hwa belum sesuai dengan pasangan politiknya, dikarenakan Tan Mei Hwa berpasangan dengan Utsman Ikhan yang menurut Susanto (2015) merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003. Begitupun dengan *timing* yang tidak tepat, karena berhadapan dengan calon *incumbent* Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati

dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015).

5.3.3 Dimensi Kekuatan Tan Mei Hwa

Menurut Haroen (2014) kekuatan sejatinya telah dimiliki setiap orang, hanya saja ada yang sudah mengetahuinya dan ada yang belum mengetahui. Kekuatan merupakan sebuah bekal yang dimiliki seseorang yang telah ada atau telah terbentuk sejak dini, dimana kekuatan seseorang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuatan material dan non-material. Kekuatan material lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal dan kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain. Berikut beberapa point kekuatan yang ada pada Tan Mei Hwa:

5.3.3.1 Kepercayaan Reputasi Tan Mei Hwa Sebagai Pendakwah

Fokus dalam point ini adalah kekuatan non-material pada Tan Mei Hwa yang berarti lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain (Haroen, 2014). Sebab menurut Steven Indra dalam artikelnya berjudul “Tan Mei Hwa, Apa Yang Diucapkan Juga Menjadi Perilakunya Sehari-hari”, menjelaskan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah sudah dimulai sejak dakwahnya pada tahun 1993 ditekuni setiap harinya secara konsisten, sehingga banyak masyarakat semakin mengenalnya dengan pendakwah yang mencerahkan dan penuh dengan humor. Bahkan dakwah yang dilakukan telah memiliki agenda kegiatan rutin sebelum pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dengan pengajian dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum

perempuan muslim, hingga terkenal secara luas ketika taushiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya (Indra, 2014).

Maka dari itu perlu mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, sehingga mengetahui apakah kekuatan non-material tersebut dapat diandalkan. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara keseluruhan menilai percaya pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Adapun pendapat informan P6 dan P2 sebagai mahasiswa, secara singkat mengatakan percaya pada Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Percaya. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Ya saya percaya. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Begitupun dengan pendapat informan P1, ketika Tan Mei Hwa dapat mempercayai Tuhan, maka informan P1 juga yakin bisa percaya pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Ketika Tan Mei Hwa bisa mempercayai Tuhan, InsyaAllah kita bisa mempercayai Tan Mei Hwa. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Selain itu pendapat informan P7 mengatakan percaya reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, asalkan dapat menjadi pemimpin yang bagus.

Kalau masalah dipercaya sih, saya percaya aja siapa aja pemimpinnya asal bagus dan bertampak baik. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan pendapat informan P5 mengatakan, sebagai rakyat hanya bisa berharap pada kinerja pemimpinnya, sehingga dengan yakin reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah dapat dipercaya.

Kalau menurut saya InsyaAllah bisa, karena kita semua sama calon pemimpin cuma bisa berharap, karena kita belum tahu gimana mereka kerjanya. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kepercayaan informan P5 terhadap reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, layaknya yang dikatakan oleh Gefen (2004) mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan untuk membuat dirinya peka pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya. Namun pendapat informan P4 menegaskan, pandangannya untuk sementara ini dapat mempercayai reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Menurut saya sih dapat dipercaya, tapi itu pandangan saya untuk sementara, semoga untuk kedepannya dan selanjutnya dapat seperti itu terus. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Untuk saat ini dapat dipercaya, untuk kedepannya dilihat nanti. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Tetapi untuk kedepannya informan P4 dan P3 melihat perkembangan Tan Mei Hwa apabila terpilih sebagai wakil bupati, dan berharap semoga dapat dipercaya secara terus menerus.

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) sebagian besar mengatakan relatif tergantung kepribadiannya. Adapun pendapat informan U1 dan U2 mengatakan persoalan percaya tidak percaya nomor sekian, yang terpenting dalam politik adalah elektabilitasnya.

Saya kira dia mau pendakwah mau apapun, kalau elektabilitasnya bagus mereka akan memilih, soal percaya dan tidak percaya saya kira nomor sekian, memang ada nilai-nilai itu pasti diminta oleh masyarakat, tetapi bahwa seorang pendakwah apakah bisa dipercaya saya kira relatif, kalau hubungannya sama Pilkada bagaimana elektabilitasnya bagus tidak, kalau jelek pasti tidak ada yang milih, mau gelarnya haji mau siapapun tidak akan memilih. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Idem. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Elektabilitas sendiri menurut Said Zainal Abidin dalam artikelnya di news.detik.com yang berjudul “Popularitas atau Elektabilitas?”, menjelaskan elektabilitas merupakan kesediaan orang untuk memilihnya untuk menempati

jabatan tertentu (Abidin, 2013). Maka dari itu informan U1 menegaskan bahwa apakah dia seorang pendakwah atau tokoh apapun bahkan gelarnya haji, apabila dalam jumlah banyak orang dalam Kabupaten Sidoarjo bersedia Tan Mei Hwa menjadi wakil bupati, secara tidak langsung akan berkorelasi dengan kepercayaan yang tinggi. Begitupun dengan pendapat informan U3 mengatakan, percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing.

Percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing mas, jadi saya tidak akan kemana-mana tapi saya akan ada dimana-mana, akhirnya jatuhnya dimana-mana tetap kembali ke pribadi. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pernyataan informan U3 secara tidak langsung sesuai dengan Gefen (2004) mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan masing-masing pribadi untuk membuat dirinya peka pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya.

Selain itu pendapat informan U6 juga hampir sama, meskipun Tan Mei Hwa dapat menasehati orang lain, belum tentu dapat melakukan untuk dirinya sendiri.

Kalau saya sih belum tentu ya, mereka bisa menasehati orang lain tetapi belum tentu mereka melaksanakan, saya ambil contoh Aa Gym dulu pada waktu ceramah selalu menentang poligami ternyata dia melakukan sendiri poligami. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Informan mencontoh seorang ustadzah bernama Aa Gym yang pernah berceramah selalu menentang poligami, tetapi nyatanya Aa Gym melakukan sendiri poligami tersebut. Hal tersebut dibuktikan oleh Tri Wahono pada artikelnya di situs entertainment.kompas.com yang berjudul “Empat Alasan Kuat, Poligami Aa Gym Dikabulkan”, membenarkan Aa Gym berpoligami karena memiliki empat alasan, yakni Pertama, karena Elfarini Eridani atau Teh Rini sebagai istri menyetujui Aa Gym berpoligami. Kedua, majelis hakim menilai penghasilan Aa Gym mencukupi untuk menghidupi tujuh anaknya. Ketiga, bisnis Aa Gym yang dirintis sejak 1990 bersama Teh Ninih, juga menjadi pertimbangan untuk mendampingi bisnisnya

sembari berdakwah. Keempat, karena tujuh anak yang dianggap masih terlalu kecil dan membutuhkan kasih sayang (Wahono, 2012). Sebenarnya informan U6 memiliki perasaan yang tidak nyaman akan kepercayaan terhadap seorang ustaz dan menjadikannya mengambil langkah untuk tidak terlalu percaya, layaknya yang dikatakan oleh West & Turner (2009) Perasaan tidak nyaman akan memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan.

Maka dari itu pendapat informan U7 ragu-ragu, seharusnya pendakwah adalah seorang yang dapat dipercaya, tetapi maju mundurnya iman seseorang setiap saat berbeda.

Kalau seorang pendakwah seharusnya kita percaya, tapi kalau ada contoh seperti menteri agama tetap korupsi sama saja, tergantung dari manusianya saja tidak ada hubungannya pendakwah karena maju mundurnya iman itu setiap saat berbeda. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Dimana informan U7 mencontohkan seorang menteri agama yang terlibat korupsi, sehingga menjadikannya sangsi terhadap sebuah kepercayaan. Menteri agama yang dimaksudkan oleh informan U7 adalah Suryadharma Ali, seperti yang diberitakan oleh Yohannie Linggasari dalam artikelnya di CNN Indonesia yang berjudul “Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara”, yang menjelaskan Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali divonis enam tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta subsider selama tiga bulan terkait kasus korupsi. Hakim juga memutuskan Suryadharma harus membayar kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dengan pengganti pidana penjara selama dua tahun. Suryadharma Ali didakwa menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Perbuatan itu dinilai telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi (Linggasari, 2016).

Tetapi informan U8 menegaskan apabila Tan Mei Hwa dalam berdakwah sesuai dengan tindakannya tidak masalah.

Kalau memang dia berkata dalam berdakwah sesuai dengan perbuatannya tidak masalah, tapi kadang-kadang banyak omong tidak bisa menjalankan. Saya rasa korelatif saja bagaimana dirinya pribadi saja. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U8 terkadang seseorang berbicara banyak, tetapi tidak dapat menjalankannya, seperti yang dicontohkan oleh informan sebelumnya mengenai Aa Gym dan Suryadharma Ali. Sehingga terpenting bagi informan U8 adalah dilihat dahulu korelasi antara perkataan dengan perbuatan.

Sedangkan informan U4 berbeda pendapat yang mengatakan, Tan Mei Hwa dapat dipercaya reputasinya sebagai pendakwah.

Kalau menurut saya dapat dipercaya karena bisa nuturi orang apalagi nuturi diri sendiri, sudah keliatan suri tauladannya, otomatis sebelum dia tampil pasti sudah ada yang memilih, ustazah itu sebagai pinutur memberikan wawasan yang baik, otomatis kalau jadi lebih baik dari itu. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena bagi informan U4, Tan Mei Hwa sebagai ustazah memberikan nasehat dan wawasan yang baik pada orang lain apalagi untuk diri sendiri, sudah terlihat teladannya. Sehingga apabila Tan Mei Hwa terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Sidoarjo, informan U4 akan jauh lebih baik lagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Senada dengan informan U4, pendapat informan U5 Tan Mei Hwa dapat dipercaya reputasinya sebagai pendakwah.

Idem sama Pak Handoko, artinya di dalam hal dakwah ini sangat pengaruh sekali karena langsung hubungan dengan sosial masyarakat. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U5 dalam hal dakwah sangat berpengaruh, karena langsung berhubungan dengan sosial masyarakat, dan nantinya masyarakat yang dapat menilai sendiri bagaimana reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

5.3.3.2 Materi Pribadi Sebagai Modal Tan Mei Hwa

Fokus dalam point ini adalah kekuatan material pada Tan Mei Hwa yang berarti lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal. Karena dalam politik ada harga untuk membangun *image* berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif suatu bangsa-negara dan bisa menjadi kebanggaan atau tidak. Sehingga menurut Firmanzah (2008) menyatakan bahwa harga meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat-akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye.

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai kemampuan modal materi Tan Mei Hwa sendiri sebagai calon wakil bupati dalam membangun *image*. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara keseluruhan melihat Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya tetapi sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya. Adapun pendapat informan P1 dalam berpolitik Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan uang, meskipun yang banyak dari Pak Utsman Ikhsan.

Didalam berpolitik itu ada sosial dan semuanya itu pasti uang, seperti pencitraan untuk bangun tim, setelah itu kendaraan partai, dan biaya kampanye. Jadi Bu Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan uang juga meskipun yang banyak dari Pak Utsman. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P1 dalam berpolitik pasti ada sosialisasi, seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, dan biaya kampanye. Hal tersebut memang sesuai dengan apa yang dikatakan Firmanzah (2008) yang menyatakan bahwa harga meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat-akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye. Disamping itu pendapat informan P4

dan P5 juga melihat Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya dan paling tidak Utsman Ikhsan sebagai pasangan jauh lebih besar.

Menurut saya sama lah pasti keluar dan paling tidak ada sumbangsih dari Pak Utsman yang lebih besar. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Keluar biaya saya rasa tidak banyak mungkin beberapa juta, tapi Pak Utsman pasti jelas paling besar dan bisa kita lihat dia dapat membayar mahar ke partai, saya rasa bukan rahasia lagi. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P5 menambahkan Pak Utsman Ikhsan pasti yang lebih besar karena dapat membayar mahar ke partai, dan bukan rahasia lagi. Permasalahan mahar Utsman Ikhsan dibuktikan oleh Nur Hadi pada halaman m.tempo.co dalam artikelnya berjudul “Mahar Politik Calon Bupati Sidoarjo dari Gerindra Capai Rp 3 Miliar” menjelaskan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar. Besaran nominal mahar politik Utsman Ikhsan diketahui dari rekaman pembicaraan antara M. Sholeh dan salah seorang pengacara petinggi Partai Gerindra Sidoarjo (Hadi, 2015). Hal tersebut merupakan sebuah realita dalam perpolitikan di Indonesia masih membutuhkan biaya, tidak hanya untuk sosialisasi atau kampanye saja tetapi seperti yang dikatakan informan P5 pembayaran mahar untuk pencalonan diri juga menjadi pertimbangan partai dalam berkontestasi di Pilkada, meskipun ada resiko melanggar Pasal 47 Undang-undang No 8 Tahun 2015 (dprd.go.id).

Begitupun dengan pendapat informan P2 dan P3 yang mengatakan siapapun mencalonkan diri termasuk Tan Mei Hwa sebagai kandidat kepala daerah,

konsekuensinya pasti akan mengeluarkan biaya meskipun tidak mengetahui besarnya secara pasti.

Saya kira siapapun yang mencalonkan konsekuensinya pasti akan keluar biaya, seberapa besarnya itu yang tidak tahu. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sudah pasti, apalagi biasanya banyak orang yang dibelakang yang memberikan bantuan yang berharap imbalan. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan pendapat informan P3 menambahkan terdapat beberapa orang dibelakang yang memberikan bantuan pasti berharap sebuah imbalan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena partai politik sendiri sudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, seperti yang dilansir oleh Metrotvnews.com yang berjudul “Mewujudkan Kemandirian Parpol”, menjelaskan bantuan negara selama ini senilai Rp13,7 miliar per tahun untuk 10 parpol, meskipun terlihat sangat sulit rasanya mewujudkan mimpi orang dengan integritas tinggi, tapi minim modal memimpin partai politik. Tetapi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berwawancara menambah anggaran buat parpol menjadi Rp1 triliun dan jumlah tersebut dapat dikatakan tepat, dapat juga dikatakan terlalu besar, yang terpenting transparansi dan akuntabilitas peruntukan atau penggunaan dana, sehingga tidak ada lagi imbalan atau korupsi.

Selain itu informan P6 berpendapat, Tan Mei Hwa mengeluarkan biaya hanya sedikit, dan tidak mengetahui untuk donatur ada atau tidak.

Bu Tan Mei Hwa sedikit ya, kalau dana dari donatur kurang tahu ada atau tidak. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Namun informan P7 mengatakan Tan Mei Hwa tidak mungkin mengeluarkan biaya dalam pencalonannya sebagai calon wakil bupati.

Kalau Tan Mei Hwa sendiri tidak mungkin mengeluarkan biaya, karena yang berkepentingan terlihat sekali Pak Utsmannya. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena menurut informan P7 yang lebih berkepentingan adalah Utsman Ikhsan sebagai calon bupati, dan hal tersebut memang terlihat Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh secara terbuka menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar (Hadi, 2015).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) secara keseluruhan mengatakan Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya pribadi, meskipun yang terbesar dari pasangan politiknya. Adapun pendapat informan U1 dan U2 yang mengatakan siapapun termasuk Tan Mei Hwa, ketika mencalonkan konsekuensinya pasti mengeluarkan biaya.

Saya kira siapapun ya ketika mencalonkan konsekuensinya pasti dia akan keluar biaya, tentang seberapa besarnya itu yang kita tidak tahu, jadi saya kira ya pastilah. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Ya jelas mas itu sudah pasti, berbicara politik itu pasti ada orang yang dibelakang tapi kalau kekayaan pribadi pasti juga ikut. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U1 dan U2 seberapa besaran biaya pastinya tidak mengetahui, dan pasti ada bantuan dari orang dibelakangnya. Begitupun dengan informan U3 yang mengamati Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya pribadi.

Saya amati satu pasti keluar dari pribadi, kedua paling tidak ada sumbangsih dari jamaah tapi yang jelas keluar terbanyak dari Pak Utsman. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tetapi informan U3 melihat yang jelas terlihat mengeluarkan biaya besar adalah Utsman Ikhsan, dan terbukti memang terlihat Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh secara terbuka menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra

Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar (Hadi, 2015). Bahkan informan U4 sependapat dengan informan U3, Tan Mei Hwa memiliki dana politik paling sedikit diantara kandidat lainnya.

Kali ini saya sependat dengan Pak Edy, sebetulnya paling sedikit kekayaannya diantara beberapa kandidat, dia tidak punya uang dan tidak terlalu ambisi, makanya dia tidak mau tega dan tidak pandai diplomasi, karena yang perlu disini Pak Utsman sama partainya, partainya yang mengarahkan pakai inilah sementara partai ingin juga dilamar dapat duit sehingga tidak mengeluarkan uang, sementara vander tidak punya Bu Ustadzah ini hanya Pak Utsman pribadi. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut pengalaman informan U4 sebagai Ketua Pemuda Partai Indonesia, melihat Tan Mei Hwa tidak terlalu memiliki keinginan untuk berpolitik dan tidak memiliki modal besar. Maka dari itu Tan Mei Hwa masih berbelas kasihan, tidak pandai diplomasi, dan yang berkepentingan lebih pada Utsman Ikhsan beserta partainya ikut mengarahkan. Sekali lagi hal tersebut terbukti Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh secara terbuka menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar (Hadi, 2015).

Selain itu pendapat informan U5 mengatakan secara tidak langsung Tan Mei pasti mengeluarkan uang, karena dalam politik membutuhkan dua modal yakni modal sosial dan modal uang, sama seperti yang dikatakan Haroen (2014) seseorang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuatan material dan non-material. Kekuatan material lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal dan kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain.

Didalam berpolitik itu ada modal dua, satu sosial dan kedua uang. Semua itu karena kepentingan, di Indonesia ini sudah salah kapra mas, sudah nabrak

norma-norma Pancasila, sekarang bayangkan untuk Pilkada pencitraan aja sudah berapa untuk bangun timnya dia, setelah itu kendaraan partai backup-an, belum lagi biaya kampanye, karena ini dibelakang ada pendana-pendana yang tidak kelihatan atau siluman orientasinya proyek, itu yang harus diketahui masyarakat, masyarakat itu dibodohi. Kalau dari Pak Utsmanya sendiri mungkin sudah, saya yakin mulai dulu dia kelebihan suara apalagi dia mantan napi, jadi di dalam pemerintahan itu ada celah-eelah untuk mendapatkan keuangan atau dana cuma tidak dimengerti oleh masyarakat, suatu contoh perijinan-perijinan retail, sebenarnya kalau mau dikawal kita jauh lebih baik dari sekarang. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pengalaman informan U5 mensukseskan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama partai demokrat dalam dua periode berturut-turut, menjadi paham seluk-beluk arah perpolitikan di Indonesia. Menurut informan U5 perpolitikan di Indonesia sudah salah kaprah dan menabrak norma-norma Pancasila, sebab apabila dalam berpolitik diperlukan dana pencitraan, dana membangun tim, dana kendaraan partai, dana kampanye, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh donatur atau pendana yang orientasinya dapat bekerja sama untuk proyek pemerintah. Sehingga informan U5 melihat dana yang keluar lebih dahulu dari Utsman Ikhsan karena ketika menjabat dipemerintahan sebelumnya sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode tahun 1999-2004 sudah mempunyai dana sampingan dari ijin-ijin retail dan sebagainya.

Kemudian pendapat informan U6 dan U8 mengatakan Tan Mei Hwa keluar dana pribadi untuk politik hanya sedikit.

Kalau dana dari Bu Tan Mei Hwa sedikit ya, kalau dana dari donatur kurang tahu ya apa ada atau tidak, yang lebih dominan kan W1nya, jadi rasanya Bu Tan Mei Hwa hanya pelengkap penderita saja. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Tan Mei Hwa keluar biaya saya rasa tidak banyak hanya beberapa juta kemungkinan, tapi jelas dana itu dikumpulkan oleh W1 yang didapat dari donatur-donatur yang punya keinginan kalau jadi bupati dapat proyek dan lain sebagainya, itu saya rasa bukan rahasia lagi. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U6 dan U8 dana lebih banyak dari Utsman Ikhsan yang kemungkinan dikumpulkan dari donatur-donatur yang mempunyai tendensi proyek apabila Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa terpilih sebagai kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo. Namun berbeda dengan pendapat informan U7 yang mengatakan Tan Mei Hwa sendiri tidak mungkin mengeluarkan biaya.

Kalau menurut saya sebelum mencalonkan diri saya rasa sudah ada penyandang-penyandang dana yang mendukung dia, kalau Tan Mei Hwa sendiri tidak mungkin mengeluarkan biaya. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U7 sebelum Tan Mei Hwa dicalonkan sebagai kandidat bersama Utsman Ikhsan, sudah ada persiapan matang dari donatur-donatur yang mendukung partai politik Utsman Ikhsan untuk berkompetisi dengan kandidat lainnya. Persiapan tersebut dikarenakan pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 34 kota (www.kpu.go.id), sehingga masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan beberapa pihak. Seperti yang dipublikasikan oleh Ferdinand Waskita pada halaman situs www.tribunnews.com dalam artikelnya berjudul “Pilkada Serentak Miliki Kelemahan dan Keunggulan”, menjelaskan Djohermansyah sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan adanya kelemahan dalam Pilkada serentak, dimana membuat kepemimpinan pejabat sementara dapat mencapai dua tahun sehingga kurang efektif, kemudian dapat terjadi eksekusi Pilkada (kerusuhan) yang bersamaan mengancam stabilitas nasional dan penanganannya membutuhkan sumber daya yang besar termasuk dana dan gelar pasukan yang belum merata diseluruh daerah (Waskita, 2012).

5.3.3.3 Dukungan Partai Politik Sebagai Kekuasaan

Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran partai politik di Indonesia perlu diletakkan dalam kerangka lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok ideologis dalam partai sendiri. Baik buruknya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menentukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa, karena partai politik yang paling bertanggung untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Sehingga untuk dapat melakukan tersebut, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik (Firmanzah, 2007).

Oleh sebab itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai partai politik yang mengusung Tan Mei Hwa sebagai calon wakil bupati, apakah Tan Mei Hwa menjadi kader politik benar-benar untuk melahirkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya untuk sebuah kepentingan keuntungan partai politik pribadi. Sebab apabila partai politik sudah tidak dapat lagi mengamanatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tan Mei Hwa masih terbuka untuk mencalonkan secara independen (perseorangan) sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf a-d, Pasal 41 ayat (2)

huruf a-d UU No. 8 Tahun 2015, dengan persyaratan pada Pasal 41 ayat (2) UU Pilkada berbunyi “calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% dari DPT Pemilu sebelumnya.” (www.hukumonline.com).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) secara keseluruhan mengatakan ada kepentingan keuntungan partai politik dalam pengusungan Tan Mei Hwa. Adapun pendapat informan P2 yang mengatakan pasti ada kepentingan keuntungan partai politik, karena Pilkada sebagai ajang mengedepankan dirinya untuk berkuasa.

Ya pasti ada, karena Pilkada sebagai ajang menonjolkan dirinya untuk berkuasa. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Pernyataan informan P2 sesuai dengan perkataan Firmanzah (2007) partai politik sangat terkait erat dengan kekuasaan, untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik. Namun pendapat informan P1 berpandangan sebenarnya partai politik diibaratkan sebuah pisau, apabila digunakan dengan baik pasti ada manfaatnya dan sebaliknya.

Menurut saya tentu ada, dan menurut saya Pilkada ini ranah pesta partai politik, gini pandangan kita terhadap politik harus dirubah, politik ibarat pisau tergantung siapa yang menggunakan, ketika pisau itu digunakan untuk kebaikan pasti ada manfaatnya, tapi ketika digunakan untuk suatu keburukan pasti tidak baik. Untuk mengambil keuntungan dari partai politik ketika berkoalisi dengan partai politik lain untuk memenangkan dari satu calon itu tidak masalah, asalkan disitu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme didalamnya. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sehingga secara tidak langsung informan P1 mengatakan tidak masalah partai politik mencari sebuah keuntungan dalam memenangkan seorang calon, asalkan tidak melanggar hukum, dimana tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada

nepotisme. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji mengutamakan kelompok tertentu, dan nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan di lingkungan pemerintah (kbbi.web.id).

Begitupun dengan pendapat informan P5 yang merasakan setiap partai politik yang mencalonkan pemimpin pasti berkeinginan menang.

Ya saya rasa setiap partai politik yang mencalonkan calon pemimpin pasti berkeinginan juga untuk menang, karena otomatis dibiayai, jadi berharap bisa menang. Kita sih hanya berharap ketika sudah menang, berharap pemimpin nggak cuma dikendalikan oleh partai politiknya. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P5 sebagai rakyat hanya bisa berharap ketika pemimpin terpilih tidak dikendalikan oleh partai politik, karena partai politik masih punya keterkaitan dengan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2007). Selain itu pendapat informan P4 dan P7 mengatakan pasti ada kepentingan keuntungan dari partai politik, karena tidak mungkin tidak ada.

Menurut saya ada kepentingan, soalnya sepengetahuan saya politik emang seperti itu, nggak mungkin gak ada kepentingan. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Kalau menurutku Bu Tan Mei Hwa mungkin ada lah bermain dengan partai politik, karena di Indonesia banyak sekali politik-politik yang curang. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan informan P7 menambahkan banyak sekali partai politik di Indonesia masih curang dalam praktik berpolitik. Salah satunya masih ada praktik kolusi permasalahan mahar Utsman Ikhsan dibuktikan oleh Nur Hadi pada halaman m.tempo.co dalam artikelnya berjudul “Mahar Politik Calon Bupati Sidoarjo dari Gerindra Capai Rp 3 Miliar” menjelaskan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur

M. Sholeh menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar. Besaran nominal mahar politik Utsman Ikhsan diketahui dari rekaman pembicaraan antara M. Sholeh dan salah seorang pengacara petinggi Partai Gerindra Sidoarjo (Hadi, 2015).

Tetapi berbeda dengan pendapat informan P6 mengatakan tidak mengetahui ada atau tidaknya kepentingan dari partai politik pengusung Tan Mei Hwa.

Kalau aku nggak tau sih. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sedangkan menurut pendapat informan P3 tidak mungkin calon kandidat yakni Tan Mei Hwa berdiri sendiri dan koalisi dengan partai politik yang lain, sehingga partai politik yang mengusungnya berharap imbalan, layaknya pemikiran Max Weber yakni partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2007).

Kalau menurut saya sih rasanya ada, kan nggak mungkin berdiri sendiri dan koalisi dengan tim yang lain, mungkin kalau keuntungan seperti ini “Aku sudah membantu kamu, jadi kamu harus memberi untuk timbal balik kepada saya”, bisa jadi seperti itu. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Namun sebenarnya apabila Tan Mei Hwa ingin maju secara independen sangat dimungkinkan, karena sudah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a-d, Pasal 41 ayat (2) huruf a-d UU No. 8 Tahun 2015, dengan persyaratan pada Pasal 41 ayat (2) UU Pilkada berbunyi “calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan

jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% dari DPT Pemilu sebelumnya.” (www.hukumonline.com).

Sementara itu, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) secara keseluruhan mengatakan pasti ada kepentingan keuntungan dari partai politiknya dalam pencalonan Tan Mei Hwa. Adapun pendapat informan U2 dan U3 yang mengatakan politik itu adalah kekuasaan, dan secara tidak langsung pasti ada kepentingan keuntungan dari partai politiknya.

Saya simpel saja mas, politik itu adalah kekuasaan. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Ya mas intinya politik itu kekuasaan, bagaimana cara memilih calonnya itu karena tidak ada pilihan lagi yang layak jual di Partai Gerinda dan PKS ya Tan Mei Hwa aja. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pernyataan informan U2 dan U3, layaknya pemikiran Max Weber yakni partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2007). Bahkan pendapat informan U7 mengatakan jelas ada, karena sebelum pendaftaran partai politik sudah mencari keuntungan.

Kalau menurut saya pengusung itu jelas mencari keuntungan, sebelum pendaftaran aja sudah mencari keuntungan apalagi setelah jadi. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Secara tidak langsung informan U7 mengarah pada Utsman Ikhsan yang memberikan mahar sebelum Pilkada Kabupaten Sidoarjo berlangsung, dan dipublikasikan oleh Nur Hadi pada halaman situs m.tempo.co dalam artikelnya berjudul “Mahar Politik Calon Bupati Sidoarjo dari Gerindra Capai Rp 3 Miliar” menjelaskan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh menyebutkan

nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar. Besaran nominal mahar politik Utsman Ikhsan diketahui dari rekaman pembicaraan antara M. Sholeh dan salah seorang pengacara petinggi Partai Gerindra Sidoarjo (Hadi, 2015).

Begitupun pendapat informan U1 yang mengatakan pasti otomatis ada kepentingan keuntungan dalam partai politik dalam pencalonan Tan Mei Hwa.

Otomatis, artinya politik itu kan seni menguasai orang atau sesuatu, jadi niscaya suatu hal yang sangat tidak mungkin Partai Gerindra dan PKS ini tanpa tendensi mengusung Tan Mei Hwa sama Pak Utsman ya, tentu ada tendensi itu, otomatis dengan calonnya jadi diharapkan paling tidak itu menjadi lumbungnya mereka dan ATMnya mereka. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U1 politik itu seni menguasai orang atau sesuatu, seperti pemikiran Max Weber yakni partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2007). Sehingga suatu hal tidak mungkin partai pengusung Tan Mei Hwa yakni PKS dan Gerindra tidak mempunyai tendensi, bahkan dapat menjadi pencetak keuntungan bagi partai. Selain itu pendapat informan U4 mengatakan secara tidak langsung pasti ada kepentingan keuntungan, apabila Tan Mei Hwa terpilih.

Memang dapat dukungan dan kekuasaan tentunya itupun kalau jadi, paling tidak dua partai kecil ini termasuk dukungan dan kekuasaan karena dia yang menikmati meskipun tahu persis pasti tidak jadi, harusnya dua orang ini pandai perkiraan tidak jadi tidak harus beli partai nanti ditunggu incumbent turun, harusnya dia riset dulu satu Indonesia kira-kira berapa persen incumbent yang turun dalam dua periode, karena di Partai pasti beli kavling sekian harganya, seperti itu. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut pengalaman informan U4 sebagai Ketua Partai Pemuda Indonesia, seharusnya Tan Mei Hwa dapat memperkirakan untuk *incumbent* turun terlebih

dahulu dan melakukan riset seluruh Indonesia, karena partai politik seperti halnya kavling yang mempunyai harga tertentu. Jadi intinya menurut informan U5 dipastikan sangat menguntungkan partai politik pengusungnya.

Jadi intinya sangat-sangat menguntungkan partai pengusung, kalau tidak jadi dia sudah dapat duit untuk rekom tadi apalagi sudah jadi, itupun kadang-kadang dia jual beli kursi, kadang-kadang dia ada proyek apa sama kekuasaan eksekutif dia yang borong, itu karena disini ada kepentingan kekuasaan intinya dari situ mas, jadi tidak dipungkiri lagi di dalamnya ada unsur-unsur koruptor sudah. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Walaupun Tan Mei Hwa tidak terpilih, partai politik sudah mendapatkan rekom politik, yang dimaksudkan informan U5 layaknya Ustman Ikhsan yang membayar mahar politik supaya mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar (Hadi, 2015). Namun terkadang masih ada juga jual beli kursi, kemudian kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif, dan hal tersebut merupakan rangkaian kepentingan keuntungan partai politik apabila Tan Mei Hwa terpilih.

Kemudian pendapat informan U6 mengatakan keuntungan lebih pada partai politik pengusungnya daripada Tan Mei Hwa, dan seharusnya menunggu *incumbent* turun terlebih dahulu.

Yang diuntungkan adalah parpolnya ya, sebenarnya Pak Utsman itu harus meneliti selama incumbent itu mencalonkan tidak bakalan bisa jadi, selama ini saya amati kalau incumbent mencalonkannya yang ke-2 pasti jadi, karena incumbent itu yang utama dia udah ada modal, yang kedua dia sudah tahu celah-celahnya, arah-arahnya kampanye kemana sudah tahu arahnya jelas terarah, tetapi kalau calon yang baru ini mereka belum tahu arahnya pos-pos mana yang harus dibuat kampanye dan lagi dananya kurang bagus. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Karena menurut informan U6 apabila *incumbent* mencalonkan kedua kalinya akan berat tantangannya, dimana *incumbent* Saiful Ilah telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-

10-2015). Disamping itu *incumbent* dipastikan sudah ada modal dan mengetahui celah arah kampanye, jauh lebih terarah dibandingkan kandidat yang baru pertama kali mencalonkan. Terakhir pendapat informan U8, sebenarnya partai politiknya sudah mengetahui bakal tidak akan menang, dan secara tidak langsung ada kepentingan keuntungan dari partai politik pengusung.

Jadi inilah akibat dari politik praktis, sebetulnya Tan Mei Hwa itu kasian ya meskipun dia tidak rugi tapi dia sudah dipakai alat, sebenarnya kedua partai tersebut sudah tahu bahwasanya tidak akan jadi, memang dibalik tangan itu pasti ada, jadi pasti ada mengambil keuntungan, tapi Tan Mei Hwa ada untungnya dimana dia jadi tahu seluk beluk di dalam partai dan nanti untuk dia dakwah dari pengalamannya. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun menurut informan U8 Tan Mei Hwa tidak dirugikan, tetapi sudah dipakai menjadi alat untuk mencari keuntungan. Kelebihannya bagi Tan Mei Hwa menjadi mengerti bentuk asli di dalam partai dan menjadi bahan dakwah dari pencalonan sebagai kepala daerah.

5.3.3.4 Keterbatasan Tan Mei Hwa

Mengetahui kekuatan dapat menjadi sebuah tolak ukur pencapaian sebuah kemenangan yang akan diraih, tetapi kekuatan tidak hanya sampai disitu saja, termasuk diantaranya mengetahui kelemahan dan keterbatasan. Sebab bila seorang politisi hanya mengetahui kekuatan saja tanpa mengetahui kelemahan dan keterbatasannya, akan berpotensi celaka setiap saat (Haroen, 2014).

Maka dari itu perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai kelemahan dan keterbatasan Tan Mei Hwa dalam pencalonannya di Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pertama, pendapat informan kategori P (pemilih pemula) sebagian besar mengatakan kelemahan Tan Mei Hwa

salah memilih partai, *incumbent* yang masih mencalonkan kembali, pasangan politik yang kurang tepat pencitraan yang kurang, dan berasal dari kaum minoritas.

Adapun pendapat informan P1 mengatakan basis partai terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah PKB, dimana 8 kecamatan dari 18 kecamatan yakni dikuasai partai PKB. Berdasarkan dukungan data KPU Sidoarjo Suara Pileg 2014, PKB menguasai diseluruh Dapil dengan hasil Dapil 1 terdapat 60.208, Dapil 2 terdapat 52.757, Dapil 3 terdapat 33.197, Dapil 4 terdapat 50.649, Dapil 5 terdapat 38.449, Dapil 6 terdapat 28.370, dan total seluruh dapil terdapat 263.630 suara (kpu-sidoarjo.go.id).

Politik di Sidoarjo cukup berat, karena basis partai di Sidoarjo adalah PKB dan incumbent didalamnya, jadi kelemahannya dia belum dikenal benar seperti incumbent. (Informan P1, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Bahkan menurut informan P1 kandidat *incumbent* yakni Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015). Hal tersebut menjadikan Tan Mei Hwa belum dikenal benar seperti *incumbent* yang diusung oleh PKB. Begitupun dengan pendapat informan P2 yang mendukung, Kabupaten Sidoarjo adalah ladangnya partai PKB, dan Tan Mei Hwa salah dalam memilih partai.

Saya setuju, kita tahu kan ladangnya Sidoarjo PKB, kedua Beliau dari minoritas sehingga kurang dilirik kalau di Sidoarjo tidak seperti di Jakarta. (Informan P2, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Disamping itu menurut informan P2 Tan Mei Hwa yang berasal dari minoritas, menjadikan kurang dilirik warga Kabupaten Sidoarjo. Tidak seperti di DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dipilih Joko Widodo sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDI-P dan Partai Gerindra,

meskipun melalui dua tahap Pemilukada akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 pada 15 Oktober 2012 (ahok.org).

Namun pendapat informan P3 pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu pendek, setidaknya sekali lagi dalam pencalonan. Tetapi sebenarnya Tan Mei Hwa sudah melakukan pencitraan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kampanye dan selalu dipublikasikan lebih dominan dibandingkan pasangannya Utsman Ikhsan, seperti pada gambar IV.14 adalah website resmi Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa, gambar IV.15 adalah akun facebook resmi Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa, dan gambar IV.16 adalah akun twitter resmi Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa.

Pencitraan yang dilakukan Bu Tan Mei Hwa masih terlalu pendek setidaknya dia butuh waktu 1 kali lagi pencalonan, kemudian pasangannya yang mempunyai reputasi yang baik. (Informan P3, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Disamping itu menurut informan P3 pasangan yang dipilih mempunyai reputasi yang tidak baik, dan secara tidak langsung mengarah pada yang diberitakan oleh Bruriy Susanto pada artikel situs www.suarasurabaya.net yang berjudul “Mantan Napi Maju Pilkada Yakin Dapat 80 Persen Suara”, yang menjelaskan Utsman Ikhsan merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003, dan pencalonannya didukung dari partai koalisi, PKS dan Gerindra sebagai calon Bupati Sidoarjo, serta simpatisan yang setia mendukungnya (Susanto, 2015). Selain itu informan P4 berpendapat, Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang pendakwah, sehingga belum paham situasi politik dan belum dikenal secara politik di Kabupaten Sidoarjo.

Bu Tan Mei Hwa sebenarnya kan sebagai penceramah, dia belum paham benar situasi politik Sidoarjo, sehingga tidak terlalu dikenal secara politik.

Kemudian Pak Utsman punya masalah politik yang korupsi waktu ketua DPR, jadi masyarakat banyak yang kurang percaya. (Informan P4, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Pada sisi lain menurut informan P4, pasangan Tan Mei Hwa yakni Utsman Ikhsan mempunyai masalah korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003 (Susanto, 2015), menjadikan masyarakat kurang percaya. Selanjutnya informan P5 mengatakan permasalahan dari Tan Mei Hwa adalah menghadapi *incumbent* yang sudah dikenal dan kerjanya nyata selama 5 tahun.

Permasalahannya adalah karena incumbent yang kerjanya sudah 5 tahun, jadi sudah mulai duluan dikenal dan nyata sehingga mungkin butuh periode berikutnya ketika incumbent sudah tidak menjabat, saya rasa punya peluang besar mengingat yang wanita cuma Bu Tan Mei Hwa. (Informan P5, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Sehingga menurut informan P5 butuh periode Pilkada berikutnya, ketika *incumbent* sudah tidak menjabat, sehingga mempunyai peluang besar mengingat calon dari perempuan hanya Tan Mei Hwa dan secara tidak langsung tetap menjadi sorotan kaum perempuan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pendapat informan P6 yang mengatakan kekurangan dari Tan Mei Hwa adalah terletak pada kesalahan masuk partai politik.

Kekurangan Bu Tan Mei mungkin masuk partai yang salah ya, jadi harusnya tidak masuk Partai Gerindra dan PKS karena banyak kontroversi. (Informan P6, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Karena menurut informan P6, Partai Gerindra dan Partai PKS sering terjadi kontroversi. Salah satunya menurut Rahmat (2008) PKS merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi yang memiliki ideologi Ikhwanul Muslimin, dimana memiliki agenda tersembunyi di Indonesia yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam, sehingga melalui dakwah PKS berupaya menegakkan sistem pemerintahan islam dengan berbagai atributnya dan akan mengganggu

stabilitas nasional (Rahmat, 2008). Selanjutnya informan P7 berpendapat Tan Mei Hwa dikenal sebatas pendakwah, sehingga banyak yang meragukan.

Bu Tan Mei Hwa ini dikenalnya sebagai penceramah dan masyarakat masih meragukan karena belum pernah menjabat di pemerintahan sama sekali, jadi perlu bukti mungkin supaya masyarakat percaya. (Informan P7, Focus Group Discussion, 7 Desember 2015)

Menurut informan P7 masyarakat masih meragukan, dikarenakan Tan Mei Hwa belum pernah menjabat di pemerintahan, setidaknya perlu bukti supaya masyarakat menjadi jauh lebih percaya dengan kerja nyatanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) kedua, pendapat informan kategori U (pemilih lanjutan) sebagian besar mengatakan Tan Mei Hwa memiliki kelemahan salah memilih partai, *incumbent* yang masih mencalonkan kembali, pasangan politik yang kurang tepat pencitraan yang kurang, dan berasal dari kaum minoritas. Adapun pendapat informan U1 dan U7 mengatakan Tan Mei Hwa sebagai pendatang baru yang dikenal bukan dari aktivis partai politik, tetapi hanya seorang pendakwah, jadi banyak masyarakat yang masih meragukan.

Tan Mei Hwa ini dikenalnya sebagai penceramah ya dan masyarakat masih meragukan kepemimpinannya dia karena dia hanya seorang penceramah. (Informan U7, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Saya kira dia sebagai pendatang baru dalam politik di Sidoarjo cukup berat, dia bukan dari Partai Politik artinya bukan aktivis parpol sehingga masyarakat umum jarang yang tahu. Jadi kelemahannya yang pertama dia belum dikenal sebagai kader parpol walaupun itu bukan jaminan tapi paling tidak itu, kedua dia hanya dikenal sebagai seorang pendakwah belum menjadi aktivis yang memperjuangkan sesuatu misalnya memperjuangkan lumpur lapindo bisa berhasil, elektabilitasnya pasti tidak rendah saya kira begitu. (Informan U1, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Walaupun menurut informan U1 aktivis partai politik tidak menjamin dikenal, tetapi setidaknya pernah memperjuangkan sesuatu, seperti contohnya berhasil memperjuangkan lumpur lapindo, maka elektabilitasnya jauh lebih baik.

Dimana seperti yang dilansir oleh Badrus (2015) pada halaman situs DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan judul “Survei Pilkada Sidoarjo The Republic Institute, Inilah Popularitas dan Elektabilitas Masing-Masing Calon”, menjelaskan Tan Mei Hwa memiliki elektabilitas pada urutan ketiga dengan persentase popularitas calon wakil bupati untuk tanggal 3-9 agustus 2015, yakni Abdul Kolik 45,6%, Nur Ahmad Syaifuddin 36,7%, Tan Mei Hwa 33,5%, dan Imam Sugiri 35%.

Begitupun dengan pendapat informan U2 yang menilai Tan Mei Hwa salah masuk partai politik, karena Kabupaten Sidoarjo adalah ladang partai PKB dengan hasil 8 kecamatan dari 18 kecamatan telah dikuasai. Berdasarkan dukungan data KPU Sidoarjo Suara Pileg 2014, PKB menguasai diseluruh Dapil dengan hasil Dapil 1 terdapat 60.208, Dapil 2 terdapat 52.757, Dapil 3 terdapat 33.197, Dapil 4 terdapat 50.649, Dapil 5 terdapat 38.449, Dapil 6 terdapat 28.370, dan total seluruh dapil terdapat 263.630 suara (kpu-sidoarjokab.go.id).

Kalau saya lihat itu Beliau salah tempat ini, kita tahu kan ladangnya Sidoarjo PKB, kedua Beliau dari minoritas trus bukan politisi ulung, ketiga namanya kurang tenar sepak terjangnya belum sempat kebaca. (Informan U2, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Disamping itu menurut informan U2 Tan Mei Hwa merupakan kaum minoritas dan hasil kerja nyatanya belum banyak orang mengetahui. Selain itu pendapat informan U3 mengatakan pencitraan Tan Mei Hwa masih terbilang dangkal, setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk pencitraan. Tetapi sebenarnya Tan Mei Hwa sudah melakukan pencitraan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kampanye dan selalu dipublikasikan lebih dominan dibandingkan pasangannya Utsman Ikhsan, seperti pada gambar IV.14 adalah website resmi Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa, gambar IV.15 adalah akun facebook resmi

Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa, dan gambar IV.16 adalah akun twitter resmi Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa.

Satu, tebar pesona dan pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa sangat dangkal sekali setidaknya dia butuh waktu 3 tahun untuk tebar pesona dan pencitraan. Kedua, dia tidak menguasai medan Sidoarjo. Ketiga, adalah finansial sangat minim sekali. (Informan U3, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Pada sisi lain menurut informan U3 Tan Mei Hwa tidak menguasai medan partai politik di Kabupaten Sidoarjo yang basis terbesar di kuasai oleh partai PKB (kpud-sidoarjokab.go.id), dan faktor finansial yang minim. Selanjutnya pendapat dari informan U4 juga setuju Tan Mei Hwa kurang dikenal, karena hanya sebagai seorang pendakwah.

Hampir sama dengan Pak Edy tapi tidak semuanya. Pertama, memang kurang pamor dan kedua mudah dirayu, karena dia belum menguasai medan sehingga mudah dirayu Pak Utsman dan partai tentunya sehingga dia masuk ke dalam lubang politik. Lantas yang ketiga, seharusnya melalui Caleg dulu baru W2, jangan tanpa Caleg langsung ke atas. Keempat, yang paling fatal tidak menunggu incumbent turun. (Informan U4, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Kemudian menurut informan U4 Tan Mei Hwa tidak menguasai medan partai politik di Kabupaten Sidoarjo yang didominasi oleh partai PKB, dan seharusnya tidak langsung mencalonkan sebagai kepala daerah, tetapi alangkah baiknya menurut informan U4 dimulai dari Pemilihan Legislatif terlebih dahulu, terakhir yang paling salah tidak menunggu *incumbent* turun, dimana *incumbent* Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015).

Namun menurut informan U5 berpendapat, sebenarnya pencitraan Tan Mei Hwa sudah bagus, karena sudah terkenal melalui JTV yang disiarkan hingga seluruh Jawa Timur dan melakukan aksi sosial sebelum pencalonan.

Hmm masalah pencitraan ya, tadi menurut rekan-rekan menurut saya sudah bagus ya karena sudah tenar di JTV sampai Jawa Timur, apalagi dia sudah melangkah ke bhakti sosial setiap tahunnya, belum lagi mendanai masalah kesehatan lansia itu sudah cukup baik namanya, otomatis pencitraan sudah terbangun sudah lama, karena yang merugikan dia itu pendampingnya artinya dari Pak Utsman sendiri yang mantan narapidana. Berikutnya merasa rugi karena adanya incumbent yang kerjanya sudah 5 tahun, jadi dia sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, saya sudah mengetahui 3 tahun yang lalu incumbent itu sudah turun ke bawah otomatis dia menang start. (Informan U5, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Menurut informan U5 yang merugikan adalah pendampingnya Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana, yang sudah tidak baik dimata masyarakat. Disamping itu *incumbent* kerjanya sudah berlangsung selama 5 tahun, dan informan U5 sudah mendapati *incumbent* memulai sosialisasi 3 tahun sebelumnya, menjadikan Tan Mei Hwa kalah dalam langkah awal.

Berikutnya pendapat informan U6 yang menilai Tan Mei Hwa tidak punya kendaraan politik, yang dimaksudkan adalah Partai Gerindra dan Partai PKS kurang bagus sebagai partai pengusung. Karena menurut informan U6 basis partai terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah partai PKB yang telah menguasai 8 kecamatan dari 18 kecamatan (kpud-sidoarjokab.go.id).

Keterbatasannya yaitu Ibu Tan Mei Hwa tidak mempunyai kendaraan politik, tebar pesonanya kurang bagus, dia kalau masuk di W2 termasuk masuk ke dalam lubang buaya maksudnya di Sidoarjo rata-rata pendukungnya pendukung hijau semuanya terutama di daerah tambak-tambak itu PKB semua, nah kebetulan incumbent itu dari Ketua DPC PKB kalau tidak salah, jadi otomatis umatnya memilih incumbent. Jadi Ibu Tan Mei Hwa masuk ke dalam lubang buaya dan tidak tahu kendaraan politik mana yang bagus dan dia dipilih oleh Partai Gerindra dan PKS kurang bagus dan lagi pendampingnya kurang bagus lagi. (Informan U6, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Selain itu *incumbent* Saiful Ilah telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB (Jawa Pos, 7-10-2015). Bahkan Tan Mei Hwa salah dalam memilih pendamping bersama Utsman Ikhsan,

dikarenakan statusnya sebagai mantan narapidana kasus korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003 (Susanto, 2015).

Disamping itu pendapat informan U8 Tan Mei Hwa kelemahannya hanya sebagai pendakwah, dan belum mengetahui situasi politik di Kabupaten Sidoarjo.

Seperti tadi Bapak Ramli bahwasanya tenarnya sebagai penceramah, dia belum mengetahui atau paham benar situasi politik Sidoarjo, mungkin dia di TV atau dimana mungkin terkenal tapi Sidoarjo lain. Kemudian nomor duanya, mungkin dia kurang pendukung dalam masalah politik, jadi dia belum tahu masuk kamar mana, dia salah kamar aja dia. Saya harapkan tadi ada etnis lain yang bisa jadi penguasa Sidoarjo mudah-mudahan 5 tahun mendatang. (Informan U8, Focus Group Discussion, 8 Desember 2015)

Meskipun menurut informan U8 Tan Mei Hwa terkenal di TV lokal, tetapi tidak menjamin di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Tan Mei Hwa salah dalam memilih partai politik sebagai pengusungnya, sehingga harus melawan basis partai terbesar di Kabupaten Sidoarjo yakni Partai PKB. Tetapi informan U8 tetap berharap Tan Mei Hwa sebagai etnis minoritas dapat menjadi kepala daerah.

5.3.4 Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa Secara Umum

Sesuai yang dikatakan Rachmah Ida dalam bukunya “Studi Meida dan Kajian Budaya”, menjelaskan bahwa dalam mendapatkan data berkaitan dengan opini khalyak menggunakan *Focus Group Discussion* akan memperoleh nantinya “makna bersama atau pendapat komunal”. Dimana pendapat komunal yang terkadang bisa mempengaruhi pendapat individu, atau bahkan terkadang mengkonfrontasi pendapat individu dengan atau terhadap individu lain.

Oleh sebab itu dengan data yang telah diperoleh dari *Focus Group Discussion* informan P dan informan U terhadap karakteristik personal brand Tan Mei Hwa, didapati makna bersama atau pendapat komunal sebagai berikut:

5.3.4.1 Pendapat Komunal Informan P (Pemilih Pemula)

1. Karakter Tan Mei Hwa

Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai karakter Tan Mei Hwa seorang pendakwah yang tanggung jawab dan peduli. Dimana dapat mengajarkan masyarakat tentang hal baik atau hal buruk sesuai dengan perintah di Al-Qur'an, sekaligus mencerdaskan umat melalui ajaran agama. Disamping itu sempurna untuk seseorang yang menjadi muallaf dari tahun 1993, dan langsung menjadi pendakwah. Selain itu, Tan Mei Hwa sangat memberdayakan kaum perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi besar. Bahkan memiliki kegiatan rutin berkurban, berdakwah, dan bersosial bersama yayasan Az-Zahra miliknya.

2. Kompetensi Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah kompetensi dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan tidak mengetahui kompetensi Tan Mei Hwa, karena sebuah kompetensi dari seseorang memerlukan sebuah pembuktian nyata, dan selama ini Tan Mei Hwa hanya dianggap sebagai alat untuk mempopulerkan partai yang mengusungnya.

Poin kedua adalah sikap dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai sikap dan keperibadian Tan Mei Hwa yang Memiliki sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Karena sebagai pendakwah harus memiliki sikap yang tidak membeda-bedakan dengan masyarakat manapun. Tan Mei Hwa seorang yang komunikatif, dikarenakan sering berdakwah sehingga menjadikan jauh lebih lancar

dalam berbicara dan jelas untuk didengar. Disamping itu Tan Mei juga pintar, karena sebagai pendakwah selalu dapat menjawab dan memberikan solusi bagi jamaahnya. Bahkan selalu mengadakan khitanan masal, bantuan kepada lanjut usia, training sifatnya gratis, memberikan pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra miliknya. Serta memiliki ketegasan dengan menerapkan ilmu-ilmu agama, sehingga menjadi contoh atau teladan masyarakat secara luas.

Poin ketiga adalah loyalitas kerja dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai secara keseluruhan tidak ada pengaruhnya Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa terhadap kinerja nantinya bilamana terpilih. Karena apabila sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. Disamping itu pembuktian sebuah etos kerja dari Tan Mei Hwa, dengan mempunyai loyalitas tanpa batas, tidak boleh setengah-setengah dalam bekerja dan harus maksimal untuk rakyat. Tan Mei Hwa sebagai pemimpin juga harus menyesuaikan keberagaman etnis secara keseluruhan dan tidak dapat dipilah-pilah sesuai keinginannya. Bahkan harus dapat menjadi pemimpin yang netral, dan dapat memahami etnis Jawa yang sebagian besar juga merupakan pengikutnya dalam setiap pengajian yang diadakan secara rutin jauh sebelum pencalonan.

Poin keempat adalah pengaturan kebijakan dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus bisa mengatur kebijakan. Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus optimis, harus memiliki niat dan tekad mampu mengatur

kebijakan di pemerintahan. Disamping itu pemenuhan akan program-program yang telah disusun dan diketahui masyarakat, supaya kaum laki-laki dapat menilai kinerja seorang perempuan dan tidak seperti apa yang dipikirkan selama ini tentang perilaku politisi perempuan di masyarakat. Sebenarnya perempuan juga dapat memiliki pemikiran kepemimpinan, bahkan bisa lebih dari cara kepemimpinan laki-laki, karena perempuan tidak selalu lemah dan direndahkan. Selain itu, pemimpin perempuan harus bermental kuat dengan tidak mendengarkan cibiran-cibiran negatif dari masyarakat dan harus dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan pemimpin.

3. Kekuatan Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah kepercayaan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai memilih percaya pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Bilamana Tan Mei Hwa dapat mempercayai Tuhan, maka reputasinya sebagai pendakwah yakin dapat dipercaya, serta tidak lupa menjadi pemimpin yang bagus. Sebagai rakyat hanya bisa berharap pada kinerja pemimpinnya, sehingga secara tidak langsung percaya reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Poin kedua adalah materi pribadi sebagai modal Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya tetapi sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya. Siapun orangnya termasuk Tan Mei Hwa, ketika terjun dalam politik pasti mengeluarkan uang, karena dalam berpolitik pasti membutuhkan sosialisasi, seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, dan biaya kampanye. Namun

sebenarnya sumbangsih terbesar dari Pak Utsman Ikhsan hingga dapat membayar mahar ke partai politik, tetapi tidak menutup kemungkinan ada donatur atau terdapat beberapa orang dibelakang yang memberikan bantuan berharap sebuah imbalan.

Poin ketiga adalah dukungan partai politik sebagai kekuasaan. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai adanya kepentingan keuntungan partai politik dalam pengusungan Tan Mei Hwa. Karena Pilkada sebagai ajang mengedepankan dirinya untuk berkuasa, dan sebenarnya partai politik diibaratkan sebuah pisau, apabila digunakan dengan baik pasti ada manfaatnya dan sebaliknya. Sebenarnya tidak masalah partai politik mencari sebuah keuntungan dalam memenangkan seorang calon, asalkan tidak melanggar hukum, dimana tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Bahkan setiap partai politik yang mencalonkan pemimpin pasti berkeinginan menang, dan tidak mungkin Tan Mei Hwa berdiri sendiri dan koalisi dengan partai politik yang lain.

Poin keempat adalah keterbatasan Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan P (pemilih pemula) memiliki kecenderungan memaknai kelemahan atau keterbatasan Tan Mei Hwa salah memilih partai, *incumbent* yang masih mencalonkan kembali, pencitraan yang kurang, pasangan politik yang kurang tepat, dan kaum minoritas. Perlu diketahui basis partai terbesar di Kabupaten Sidoarjo, 8 kecamatan dari 18 kecamatan yakni dikuasai Partai PKB, dimana terdapat kandidat *incumbent* yakni Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun mengabdikan untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB. Sehingga Tan Mei Hwa yang berasal

dari minoritas, menjadikan kurang dilirik warga Kabupaten Sidoarjo. Adapun pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu pendek, setidaknya sekali lagi dalam pencalonan, bahkan pasangan yang dipilih yakni Utsman Ikhsan mempunyai reputasi yang tidak baik, karena masalah korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003 (Susanto, 2015). Disamping itu Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang pendakwah, sehingga belum paham situasi politik dan belum dikenal secara politik di Kabupaten Sidoarjo, dibutuhkan periode Pilkada berikutnya, ketika *incumbent* sudah tidak menjabat, sehingga mempunyai peluang besar untuk menang, mengingat calon dari perempuan hanya Tan Mei Hwa dan secara tidak langsung tetap menjadi sorotan kaum perempuan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kelemahan terletak pada kesalahan masuk partai politik, dimana Partai Gerindra dan Partai PKS sering terjadi kontroversi, sehingga banyak yang meragukan. Maka dari itu setidaknya perlu bukti supaya masyarakat menjadi jauh lebih percaya dengan kerja nyatanya, dengan mengambil peran menjabat di pemerintahan.

5.3.4.2 Pendapat Komunal Informan U (Pemilih Lanjutan)

1. Karakter Tan Mei Hwa

Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai karakter Tan Mei Hwa seorang pendakwah yang menghormati, jujur, berintegritas, tanggung jawab, peduli, dan berani. Dibuktikan Tan Mei Hwa yang pandai bergaul dan tidak membedakan golongan, baik anak muda ataupun ibu-ibu dapat diterima. Kemudian, apa adanya ketika di hadapan khalayak maupun non-khalayak, pembina mental yang baik, memiliki yayasan Az-Zahra untuk sosial

secara rutin setiap tahun. Bahkan Tan Mei Hwa sosok perempuan yang pemberani meskipun dari etnis yang berbeda atau kaum minoritas, tetapi tetap maju sebagai kandidat dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo.

2. Kompetensi Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah kompetensi dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai kompetensi Tan Mei Hwa yang utama adalah sebagai pendakwah. Karena secara agama Tan Mei Hwa tidak perlu dipertanyakan, dasarnya adalah Qur'an merupakan sumber ilmu dari segala ilmu yang mengupas segalanya hingga permasalahan politik. Disamping itu memiliki wawasan yang luas dan dapat mendidik kaum ibu-ibu yang nantinya memberikan dampak di dalam keluarga. Bahkan selalau *update* akan gerakan apapun untuk dipelajari dan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, karena sebagai calon kepala daerah harus mengetahui segalanya.

Poin kedua adalah sikap dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai sikap dan kepribadian Tan Mei Hwa tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Tan Mei Hwa memiliki sikap responsif dan komunikatif, karena apabila ada sesuatu permasalahan dengan siapapun akan diselesaikan sesegera mungkin. Disamping itu tidak membeda-bedakan dan pintar dapat memberikan jawaban dan solusi yang terbaik bagi siapapun tanpa pilih-pilih. Begitupun dengan jiwa sosialnya bagus dan menarik, dimana setiap tahun ada khitanan masal, bantuan lanjut usia, sering memberikan santunan, training sifatnya gratis, pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra yang didirikan sendiri oleh Tan Mei

Hwa. Bahkan kepemimpinannya bagus mendalami ilmu-ilmu agama yang menjadikannya dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat.

Poin ketiga adalah loyalitas kerja dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai banyak pengaruhnya ketika Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Dimana Tan Mei Hwa sebagai pemimpin daerah harus berpikir secara luas dalam memimpin rakyat dan meningkatkan loyalitasnya kepada rakyat, Bangsa, dan Tanah Air. Disamping itu terdapat pengaruh, tetapi sifatnya lebih pada internal kaum Tionghoa secara keseluruhan, bahwa kaum Tionghoa dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi batu loncatan untuk lebih percaya diri, serta menjadi tauladan dalam membangun bangsa Indonesia. Bahkan kaum Tionghoa handal dalam masalah perekonomian, dan sangat pengaruh membangun loyalitas dari etnis Tionghoa yang sejalan dengan jiwanya dalam menjalankan usaha, dan berharap dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, ketika seorang yang berbeda etnis diberi kesempatan untuk memimpin, maka akan jauh lebih perhatian dan jauh lebih berhati-hati dalam melangkah dibandingkan etnis pribumi yang telah biasa memimpin. Tetapi yang pasti Tan Mei Hwa menjadi pemimpin, akan mendapatkan pendidikan khusus Lemhanas sebelum terjun ke masyarakat dan akan menjadikan seseorang memiliki loyalitas tinggi.

Poin keempat adalah pengaturan kebijakan dari Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa mampu dalam mengatur kebijakan di pemerintah. Apabila melihat posisi Tan Mei Hwa sebagai wakil bupati tidak menjadi masalah, karena sebenarnya fungsi manajerial saja, dan dalam arena pelaksana ada pada kepala dinas, SKPD,

dan bagian lainnya. Tan Mei Hwa dari sisi religi dan sisi politik sudah bagus dan pasti mampu melakukannya, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Selain itu, terpilih menjadi pemimpin tidak akan berpikir sendiri, walaupun tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli dan birokrasi-birokrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id).

3. Kekuatan Tan Mei Hwa

Poin pertama adalah kepercayaan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai kepercayaan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah relatif tergantung kepribadiannya. Dimana sebenarnya persoalan percaya tidak percaya nomor sekian, yang terpenting dalam politik adalah elektabilitasnya. Disamping itu percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing, sebab sebagai pendakwah dapat menasehati orang lain, belum tentu dapat melakukan untuk dirinya sendiri. Tetapi seharusnya pendakwah adalah seorang yang dapat dipercaya, namun maju mundurnya iman seseorang setiap saat dapat berbeda.

Poin kedua adalah materi pribadi sebagai modal Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya pribadi, meskipun sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya. Karena dalam politik membutuhkan dua modal yakni modal sosial dan modal uang, seberapa besaran modal uang pastinya tidak mengetahui, sebab pasti ada bantuan dari orang dibelakangnya. Namun sebenarnya yang jelas terlihat mengeluarkan biaya besar adalah Utsman Ikhsan, karena yang

berkepentingan lebih pada Utsman Ikhsan beserta partainya. Disamping itu, Utsman Ikhsan yang kemungkinan mengumpulkan dari donatur-donatur yang mempunyai tendensi proyek apabila Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa terpilih.

Poin ketiga adalah dukungan partai politik sebagai kekuasaan. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai pasti adanya kepentingan keuntungan dari partai politiknya dalam pencalonan Tan Mei Hwa. Karena politik adalah seni menguasai seseorang atau sesuatu, dan secara tidak langsung pasti ada kepentingan keuntungan dari partai politiknya. Karena sebelum pendaftaran partai politik sudah mencari keuntungan, seperti Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo harus membayar mahar politik, dan dipastikan sangat menguntungkan partai politik pengusungnya. Bahkan terkadang masih ada juga jual beli kursi, kemudian kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif, meskipun Tan Mei Hwa tidak dirugikan, tetapi sudah dipakai menjadi alat untuk mencari keuntungan.

Poin keempat adalah keterbatasan Tan Mei Hwa. Secara keseluruhan informan U (pemilih lanjutan) memiliki kecenderungan memaknai Tan Mei Hwa memiliki kelemahan atau keterbatasan salah dalam memilih partai, pencitraan yang kurang bagus, *incumbent* masih mencalonkan, pasangan politik yang kurang tepat, kaum minoritas, dan minim finansial. Dimana Tan Mei Hwa sebagai pendatang baru dikenal bukan dari aktivis partai politik, tetapi hanya seorang pendakwah, jadi belum mengetahui situasi politik di Kabupaten Sidoarjo dan banyak masyarakat yang masih meragukan. Disamping itu Tan Mei Hwa salah masuk partai politik, Partai Gerindra dan Partai PKS kurang bagus sebagai partai pengusung, karena

Kabupaten Sidoarjo adalah ladang partai PKB dengan hasil 8 kecamatan dari 18 kecamatan telah dikuasai. Selain itu, Tan Mei Hwa merupakan kaum minoritas dan hasil kerja nyatanya belum banyak orang mengetahui. Bahkan Tan Mei Hwa dirugikan oleh pendampingnya Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana, dimana sudah tidak baik dimata masyarakat. Kemudian *incumbent* kerjanya sudah berlangsung selama 5 tahun, dan mendapati *incumbent* memulai sosialisasi 3 tahun sebelumnya, menjadikan Tan Mei Hwa kalah dalam langkah awal.

Tabel V.2 Ringkasan Dimensi Personal Brand Tan Mei Hwa

NO.	PEMBAHASAN	INFORMAN P	INFORMAN U
K A R A K T E R			
1.	Karakter Tan Mei Hwa	<p>Pendakwah yang tanggung jawab dan peduli, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengajarkan masyarakat tentang hal baik atau hal buruk sesuai dengan perintah di Al-Qur'an. • Mencerdaskan umat melalui ajaran agama. • Sempurna untuk seseorang yang menjadi mualaf dari tahun 1993, dan langsung menjadi pendakwah. • Tan Mei Hwa sangat memberdayakan kaum perempuan, • Memiliki kegiatan rutin berkorban, berdakwah, dan bersosial bersama yayasan Az-Zahra miliknya. 	<p>Pendakwah yang menghormati, jujur, berintegritas, tanggung jawab, peduli, dan berani, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandai bergaul dan tidak membeda-bedakan golongan, baik anak muda ataupun ibu-ibu dapat diterima. • Apa adanya ketika di hadapan khalayak maupun non-khalayak. • Pembina mental yang baik. • Memiliki yayasan Az-Zahra untuk sosial secara rutin setiap tahun. • Sosok perempuan yang pemberani, dari etnis minoritas tetap maju sebagai kandidat politik.

K O M P E T E N S I			
1.	Kompetensi Dari Tan Mei Hwa	<p>Tidak mengetahui kompetensi, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dari seseorang memerlukan sebuah pembuktian nyata. • Sebagai alat untuk mempopulerkan partai yang mengusungnya. 	<p>Kompetensi Tan Mei Hwa yang utama adalah sebagai pendakwah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara agama Tan Mei Hwa dasarnya adalah Qur'an. • Memiliki wawasan yang luas dan dapat mendidik kaum ibu-ibu yang nantinya memberikan dampak di dalam keluarga. • <i>Update</i> akan gerakan apapun untuk dipelajari. • <i>Update</i> ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman.
2.	Sikap Dari Tan Mei Hwa	<p>Memiliki sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendakwah harus memiliki sikap yang tidak membeda-bedakan. • Sering berdakwah sehingga menjadikan jauh lebih lancar dalam berbicara dan jelas untuk didengar. • Pendakwah selalu dapat menjawab dan memberikan solusi bagi jamaahnya. • Selalu mengadakan khitanan masal, bantuan kepada lanjut usia, training sifatnya 	<p>Memiliki sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada sesuatu permasalahan dengan siapapun akan diselesaikan sesegera mungkin. • Tidak membeda-bedakan. • Dapat memberikan jawaban dan solusi yang terbaik. • Setiap tahun ada khitanan masal, bantuan lanjut usia, sering memberikan santunan, training sifatnya gratis, pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama

		<p>gratis, memberikan pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra miliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki ketegasan dengan menerapkan ilmu-ilmu agama 	<p>dengan lembaga Az-Zahra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinannya bagus mendalami ilmu-ilmu agama.
3.	Loyalitas Kerja Dari Tan Mei Hwa	<p>Tidak ada pengaruhnya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. • Pembuktian sebuah etos kerja dari Tan Mei Hwa, dengan mempunyai loyalitas tanpa batas, • Pemimpin tidak boleh setengah-setengah dalam bekerja dan harus maksimal untuk rakyat. • Pemimpin juga harus menyesuaikan keberagaman etnis secara keseluruhan dan tidak dapat dipilah-pilah sesuai keinginannya. • Pemimpin harus netral, dan dapat memahami etnis Jawa yang sebagian besar juga merupakan pengikutnya. 	<p>Banyak pengaruhnya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin daerah harus berpikir secara luas dalam memimpin rakyat dan meningkatkan loyalitasnya kepada rakyat, Bangsa, dan Tanah Air. • Bahwa kaum Tionghoa dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi batu loncatan untuk lebih percaya diri, serta menjadi tauladan dalam membangun bangsa Indonesia. • Kaum Tionghoa handal dalam masalah perekonomian. • Jauh lebih perhatian dan berhati-hati dalam melangkah.

4.	Pengaturan Kebijakan Dari Tan Mei Hwa	<p>Harus bisa mengatur kebijakan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai perempuan harus optimis. • Harus memiliki niat dan tekad mampu mengatur kebijakan di pemerintahan. • Harus memenuhi program-program yang telah disusun. • Perempuan juga dapat memiliki pemikiran kepemimpinan. • Perempuan tidak selalu lemah dan direndahkan. • Pemimpin perempuan harus bermental kuat. • Tidak mendengarkan cibiran-cibiran negatif dari masyarakat. • Harus dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat. 	<p>Mampu dalam mengatur kebijakan di pemerintah, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi Tan Mei Hwa sebagai wakil bupati. • Sebenarnya fungsi manajerial saja. • Dalam arena pelaksana ada pada kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya. • Sisi religi dan sisi politik sudah bagus dan tinggal bagaiamana mengaplikasikannya. • Pemimpin tidak akan berpikir sendiri. • Walaupun tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli dan birokrasi-birokrasi.
K E K U A T A N			
1.	Kepercayaan Reputasi Tan Mei Hwa Sebagai Pendakwah	<p>Memilih percaya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tan Mei Hwa dapat mempercayai Tuhan. • Pemimpin yang bagus. • Sebagai rakyat hanya bisa berharap pada kinerja pemimpinnya. 	<p>Relatif tergantung kepribadiannya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persoalan percaya tidak percaya nomor sekian, yang terpenting elektabilitasnya. • Percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing. • Sebagai pendakwah dapat menasehati orang lain, belum tentu dapat melakukan untuk dirinya sendiri.

			<ul style="list-style-type: none"> • Seharusnya pendakwah adalah seorang yang dapat dipercaya, namun maju mundurnya iman seseorang setiap saat dapat berbeda.
2.	Materi Pribadi Sebagai Modal Tan Mei Hwa	<p>Pasti mengeluarkan biaya tetapi sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapun orangnya termasuk Tan Mei Hwa, ketika terjun dalam politik pasti mengeluarkan uang. • Dalam berpolitik pasti membutuhkan sosialisasi, seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, dan biaya kampanye. • Sumbangsih terbesar dari Pak Utsman Ikhsan. • Tidak menutup kemungkinan ada donatur atau terdapat beberapa orang dibelakang yang memberikan bantuan. 	<p>Pasti mengeluarkan biaya pribadi, meskipun sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam politik membutuhkan dua modal yakni modal sosial dan modal uang. • Ada bantuan dari orang dibelakangnya. • Karena yang berkepentingan lebih pada Utsman Ikhsan beserta partainya. • Utsman Ikhsan yang kemungkinan mengumpulkan dari donatur-donatur yang mempunyai tendensi proyek
3.	Dukungan Partai Politik Sebagai Kekuasaan	<p>Adanya kepentingan keuntungan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilkada sebagai ajang mengedepankan dirinya untuk berkuasa. • Partai politik diibaratkan sebuah pisau, apabila digunakan dengan baik pasti ada 	<p>Adanya kepentingan keuntungan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politik adalah seni menguasai seseorang atau sesuatu. • Sebelum pendaftaran partai politik sudah mencari keuntungan. • Rekomendasi sebagai calon bupati Kabupaten

		<p>manfaatnya dan sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sebenarnya tidak masalah partai politik mencari sebuah keuntungan asalkan tidak melanggar hukum. •Tidak mungkin Tan Mei Hwa berdiri sendiri dan koalisi dengan partai politik yang lain. 	<p>Sidoarjo harus membayar.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Terkadang masih ada juga jual beli kursi. •Adanya kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif.
4.	Keterbatasan Tan Mei Hwa	<p>Kelemahan atau keterbatasan salah memilih partai, <i>incumbent</i> yang masih mencalonkan kembali, pencitraan yang kurang, pasangan politik yang kurang tepat, dan kaum minoritas, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basis partai terbesar di Kabupaten SidoarjoPartai PKB. • Kandidat <i>incumbent</i> Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun. • <i>Incumbent</i> sudah dua periode sebagai Wakil Bupati dan satu periode sebagai Bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB. • Etnis Tionghoa yang berasal dari minoritas. • Pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu pendek. 	<p>Kelemahan atau keterbatasan salah dalam memilih partai, pencitraan yang kurang bagus, <i>incumbent</i> masih mencalonkan, pasangan politik yang kurang tepat, kaum minoritas, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pendatang baru dikenal bukan dari aktivis partai politik. •Hanya seorang pendakwah, banyak masyarakat yang masih meragukan. •Belum mengetahui situasi politik di Kabupaten Sidoarjo. •Salah masuk partai politik, Kabupaten Sidoarjo adalah ladang partai PKB. •Etnis Tionghoa merupakan kaum minoritas. •Hasil kerja nyatanya belum banyak orang mengetahui.

	<ul style="list-style-type: none"> • Utsman Ikhsan mempunyai reputasi yang tidak baik. • Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang pendakwah. • Belum dikenal secara politik di Kabupaten Sidoarjo. • Ketika <i>incumbent</i> sudah tidak menjabat, mempunyai peluang besar untuk menang. • Kesalahan masuk partai politik. • Belum mengambil peran menjabat di pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana. • <i>Incumbent</i> kerjanya sudah berlangsung selama 5 tahun, • Mendapati <i>incumbent</i> memulai sosialisasi 3 tahun lalu.
--	--	---

(Sumber: Olahan Peneliti)

5.3.4.3 Hasil Akhir antara Informan P dan informan U

1. Karakter Tan Mei Hwa

Karakter merupakan dasar atau fondasi dari suatu kepemimpinan (Purjear Jr, 2000). Karakter adalah sebuah kualitas personal, diri sebenarnya, ekspresi dan pembuktian, tetapi bukan sebuah kepribadian. Sehingga menyumbangkan porsi yang paling besar atas munculnya kepercayaan, kepercayaan mengalahkan suka atau benci, sentimen atau tidak sentimen (Haroen, 2014). Idealnya pemimpin harus memiliki karakter seperti yang dikatakan Kartajaya (2012), yakni Kepercayaan (Jujur dan Integritas), Menghormati, Tanggung Jawab, Keadilan, Peduli, dan Kewarganegaraan.

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, ternyata terdapat kesamaan pendapat mengenai

karakter yang dimiliki Tan Mei Hwa, yakni tanggung jawab dan peduli. Tanggung jawab yang dilakukan Tan Mei Hwa adalah sebagai pendakwah dapat membina mental yang baik dengan mengajarkan masyarakat tentang hal baik atau hal buruk sesuai dengan perintah Al-Qur'an, sehingga masyarakat menjadi cerdas melalui ajaran agama. Begitupun Tan Mei Hwa memiliki sebuah kepedulian dengan berdakwah dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga terkenal secara luas di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya, serta memiliki lembaga yayasan Az-Zahra yang memiliki agenda rutin setiap tahun seperti mengadakan khitanan massal, berkorban, bantuan sosial, dan pengobatan gratis bagi warga lansia, dimana semua dana yang digunakan diambil dari dana pribadinya (Indra, 2014). Disamping itu, Tan Mei Hwa juga memiliki kepedulian terhadap kaum perempuan memberdayakan kaum perempuan, baik anak muda ataupun ibu-ibu dapat diterima karena berpotensi besar.

Tetapi terdapat perbedaan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U. Kelompok informan U melihat Tan Mei Hwa memiliki sebuah kejujuran dan integritas, dengan tampil apa adanya ketika di hadapan khalayak maupun non-khalayak. Hal tersebut artinya Tan Mei Hwa memiliki karakter yang sama dan tidak dibuat-buat, dimana dihadapan khalayak ketika Tan Mei Hwa berhadapan langsung dengan masyarakat di pengajian atau kampanye bertemu warga, dan non-khalayak adalah ketika Tan Mei Hwa memberikan ceramah di TV lokal atau radio yang sifatnya tidak bertemu secara langsung dengan masyarakat dan satu arah dalam komunikasi. Disamping itu, Tan Mei Hwa merupakan sosok perempuan yang pemberani meskipun dari etnis yang berbeda atau kaum minoritas, tetapi tetap maju sebagai kandidat dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan

penilaian kelompok informan U didasari oleh latar belakang yang aktif dalam partai politik, menjadikan terbiasa mengamati gerak gerik setiap kandidat dari berbagai partai politik dalam bersaing di kontestasi politik.

Sehingga dengan adanya persamaan antara kelompok informan P dan informan U, ternyata unsur terkuat dari karakter Tan Mei Hwa yang sesuai dengan yang dikatakan Kartajaya (2012) adalah tanggung jawab, peduli, jujur, berintegritas, dan berani. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah masalah nilai karakter keadilan menghormati, dan kewarganegaraan.

2. Kompetensi Tan Mei Hwa

Kompetensi merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, karena karakter saja tidak cukup, dengan kata lain menjadi orang baik dan orang bersih saja tidak cukup dalam politik. Sumber kompetensi adalah kemauan untuk belajar melalui berbagai sarana, Rustiyah (1982) mengatakan bahwa kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Berikut penjelasan beberapa point yang terdapat dalam kompetensi Tan Mei Hwa.

Poin pertama adalah kompetensi dari Tan Mei Hwa. Apabila mengacu pada UU No.13/200, tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10), kompetensi dibedakan menjadi dua bagian, yakni *hard competency* dan *soft competency*. Oleh karena itu dalam point ini, perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai *hard competency* Tan Mei Hwa, yang mencakup ketrampilan teknis atau pengetahuan.

Setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U terdapat perbedaan dalam melihat *hard competency* dari Tan Mei Hwa. Kelompok informan P tidak mengetahui kompetensi Tan Mei Hwa, karena melihat

sebuah *hard competency* dari seseorang memerlukan sebuah pembuktian nyata, dan selama ini Tan Mei Hwa hanya dianggap sebagai alat untuk mempopulerkan partai yang mengusungnya. Karena apabila melihat teori Firmanzah (2008) *personal characteristic* merupakan karkter seorang kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas. Sehingga kelompok informan P sebenarnya secara tidak langsung melihat kompetensi Tan Mei Hwa diibaratkan sebagai salah satu produk dari politik yang harus dibuktikan, dan dapat memberikan citra, simbol, kredibilitas bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan kelompok informan U melihat sebuah *hard competency* Tan Mei Hwa yang utama adalah sebagai pendakwah. Karena secara agama Tan Mei Hwa tidak perlu dipertanyakan, dasarnya adalah Al-Qur'an merupakan sumber ilmu dari segala ilmu yang mengupas segalanya hingga permasalahan politik. Disamping itu memiliki wawasan yang luas dan dapat mendidik kaum ibu-ibu yang nantinya memberikan berdampak di dalam keluarga. Bahkan selalau *update* akan gerakan apapun untuk dipelajari dan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, karena sebagai calon kepala daerah harus mengetahui segalanya.

Sehingga dengan mengetahui perbedaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat *hard competency* dari Tan Mei Hwa adalah sebagai Pendakwah, karena hal tersebut yang mencakup ketrampilan teknis atau pengetahuannya. Masalah yang perlu diperbaiki adalah sebuah bukti untuk kelompok informan P, dimungkinkan karena latar belakang kelompok informan P adalah mahasiswa, jadi lebih suka dengan tindakan nyata.

Poin kedua adalah sikap dari Tan Mei Hwa. Apabila mengacu pada UU No.13/200, tentang ketenagakerjaan pasal 1 (10), kompetensi dibedakan menjadi

dua bagian, yakni *hard competency* dan *soft competency*. Oleh karena itu dalam point ini, perlu mengetahui pendapat masyarakat mengenai *soft competency* Tan Mei Hwa, yang mencakup antara lain aspek sikap dan kepribadian. Setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, ternyata terdapat kesamaan pada kedua kelompok informan yang mengatakan sikap Tan Mei Hwa tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Komunikatif seorang Tan Mei Hwa terbangun disebabkan seringnya berdakwah dari desa ke desa, perumahan ke perumahan secara rutin terutama kaum perempuan muslim, hingga terkenal secara luas ketika tausiah di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya (Indra, 2014), sehingga menjadikan jauh lebih lancar dalam berbicara dan jelas untuk didengar. Disamping itu, pada dasarnya sebagai pendakwah harus memiliki sikap yang tidak membeda-bedakan dengan masyarakat manapun, dan harus pintar untuk selalu dapat menjawab dan memberikan solusi bagi jamaahnya.

Bahkan Tan Mei Hwa selalu bersosialisasi setiap tahunnya dengan mengadakan khitanan masal, bantuan kepada lanjut usia, training sifatnya gratis, memberikan pengajian-pengajian, dan sudah dilakukan bersama dengan lembaga Az-Zahra miliknya (Indra, 2014). Serta kepemimpinannya memiliki ketegasan dengan mendalami dan menerapkan ilmu-ilmu agama, untuk menjadi contoh atau teladan masyarakat secara luas. Pada intinya segala sikap yang dilakukan Tan Mei Hwa pada masyarakat, secara tidak langsung seperti yang dikatakan LaPierre, yang mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara

sederhana sikap adalah respon Tan Mei Hwa terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan pada lingkungan sekitarnya (LaPierre dalam Azwar, 2007).

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat *soft competency* dari Tan Mei Hwa adalah tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan teladan. Maka tidak ada yang perlu diperbaiki dari sikap Tan Mei Hwa.

Poin ketiga adalah loyalitas kerja dari Tan Mei Hwa. Perdebatan etnis hari-hari ini sudah bukan hal yang tabu atau harus disembunyikan, layaknya Pemilu tahun 1971 Orde Baru pergolakan politik yang berkaitan dengan isu etnisitas dan agama tidak banyak dibicarakan serta tidak muncul dalam partai, menurut Suryadinata (2002) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak diperkenankan dibicarakan secara terbuka. Maka dengan terbukanya era saat ini, perlu sedikit mendalami perdebatan etnis apakah masih dikesampingkan atau hal tersebut perlu menjadi perhatian terkait loyalitas dalam bekerja. Setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, ternyata terdapat perbedaan pola pikir mengenai Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa terhadap loyalitas dalam bekerja.

Kelompok informan P berpendapat tidak ada pengaruhnya, karena apabila sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. Disamping itu, pembuktian sebuah etos kerja dari Tan Mei Hwa adalah loyalitas tanpa batas, tidak boleh setengah-setengah dalam bekerja dan harus maksimal untuk rakyat. Selain itu, Tan Mei Hwa sebagai pemimpin juga harus menyesuaikan keberagaman etnis secara keseluruhan dan tidak dapat dipilah-pilah sesuai

keinginannya. Bahkan harus dapat menjadi pemimpin yang netral, dan dapat memahami etnis Jawa yang sebagian besar juga merupakan pengikutnya dalam setiap pengajian yang diadakan secara rutin jauh sebelum pencalonan.

Sedangkan kelompok informan U berpendapat banyak pengaruhnya ketika Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidoarjo. Dimana Tan Mei Hwa sebagai pemimpin daerah harus berpikir secara luas dalam memimpin rakyat dan meningkatkan loyalitasnya kepada rakyat, Bangsa, dan Tanah Air. Menariknya terdapat pengaruh, tetapi sifatnya lebih pada internal kaum Tionghoa secara keseluruhan, bahwa kaum Tionghoa dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi batu loncatan untuk lebih percaya diri, serta menjadi tauladan dalam membangun bangsa Indonesia. Bahkan kaum Tionghoa handal dalam masalah perekonomian, dan sangat pengaruh membangun loyalitas dari etnis Tionghoa yang sejalan dengan jiwanya dalam menjalankan usaha, dan berharap dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, ketika seorang yang berbeda etnis diberi kesempatan untuk memimpin, maka akan jauh lebih perhatian dan jauh lebih berhati-hati dalam melangkah dibandingkan etnis pribumi yang telah biasa memimpin. Tetapi yang pasti Tan Mei Hwa menjadi pemimpin, akan mendapatkan pendidikan khusus Lemhanas sebelum terjun ke masyarakat dan akan menjadikan seseorang memiliki loyalitas tinggi.

Perbedaan pemikiran kelompok informan U dikarenakan pengalamannya yang masih dalam partai politik, bahkan salah satunya berhasil dua kali berturut-turut mengantarkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 bersama partai yang tergolong baru yakni Partai Demokrat, dan hal tersebut tentunya tidak dipunyai oleh kelompok informan P.

Sehingga dengan mengetahui perbedaan pola pikir antara kelompok informan P dan informan U, unsur terkuat pengaruh loyalitas Tan Mei Hwa adalah bukan dari segi etnisnya, melainkan dari segi kepemimpinannya. Ketika Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin, pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. Disamping itu, Tan Mei Hwa akan mendapatkan pendidikan khusus Lemhanas sebelum terjun ke masyarakat, sehingga menjadikan seseorang memiliki loyalitas tinggi untuk bangsa, dan tanah air.

Poin keempat adalah pengaturan kebijakan dari Tan Mei Hwa. Menurut Bystrom et al. (2004) media massa dianggap sering menggambarkan politisi perempuan mempunyai masalah atau dikaitkan dengan isu domestik yang berkaitan dengan perilaku anak dan suaminya, namun tidak dengan politisi laki-laki. Disamping itu media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan di rumah, persoalan penampilan mereka di publik, dan perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja *online*, dan sebagainya. Sedangkan kandidat laki-laki lebih memiliki kebebasan dalam berpakaian dan bertingkah laku karena publik telah terkoordinasikan atau terbiasa menerima laki-laki sebagai pemimpin.

Oleh sebab setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai Tan Mei Hwa sebagai perempuan apakah dapat mengatur sebuah kebijakan di pemerintahan. Ternyata terdapat perbedaan pola pikir antara kedua kelompok

informan, dimana kelompok informan P berpendapat Tan Mei Hwa harus bisa mengatur kebijakan. Meskipun secara tidak langsung terdengar seperti sebuah harapan, tetapi Tan Mei Hwa sebagai perempuan harus optimis, harus memiliki niat dan tekad mampu mengatur kebijakan di pemerintahan. Disamping itu pemenuhan akan program-program yang telah disusun yakni sekolah gratis, kesehatan murah, jalan mulus, lapangan kerja tersedia dan terutama kesejahteraan perempuan (uswatan.com), supaya kaum laki-laki dapat menilai kinerja seorang perempuan dan tidak seperti apa yang dipikirkan selama ini tentang perilaku politisi perempuan di masyarakat, misalnya model rambutnya, gaunnya, atau kebiasaan jelek minum-minuman atau menghabiskan uang miliaran untuk belanja *online*, dan sebagainya (Bystrom et al., 2004).

Sebenarnya perempuan juga dapat memiliki pemikiran kepemimpinan, bahkan bisa lebih dari cara kepemimpinan laki-laki, layaknya seorang perempuan bernama Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang menutup pusat prostitusi di gang dolly Surabaya, dimana belum dapat dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya Bambang Dwi Hartono yang hanya bisa membatasi jumlah PSK di setiap wisma (Ardiansyah, 2014). Hal tersebut karena perempuan tidak selalu lemah dan direndahkan, seharusnya pemimpin perempuan bermental kuat dengan tidak mendengarkan cibiran-cibiran negatif dari masyarakat dan harus dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan pemimpin (Ratnaningsih, 2009).

Menariknya kelompok informan U lebih memiliki sebuah kepastian, dimana pendapatnya mampu dalam mengatur kebijakan di pemerintah. Apabila melihat posisi Tan Mei Hwa sebagai wakil bupati tidak menjadi masalah, karena

sebenarnya fungsi manajerial saja, dan dalam arena pelaksana ada pada kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id). Disamping itu, Tan Mei Hwa dari sisi religi dan sisi politik sudah bagus dan pasti mampu melakukannya, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Selain itu, terpilih menjadi pemimpin tidak akan berpikir sendiri, walaupun tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli, birokrasi-birokrasi, dan diawasi oleh DPR, dan telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo (dprd-sidoarjokab.go.id).

Sehingga dengan mengetahui perbedaan antara kelompok informan P dan informan U, unsur yang terkuat dari Tan Mei Hwa sebagai perempuan dapat mengatur kebijakan adalah karena seorang pemimpin hanya fungsi manajerial, dalam arena pelaksana ada pada kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya. Walaupun tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli, birokrasi-birokrasi, dan diawasi oleh DPR. Hal tersebut disampaikan oleh kelompok informan U karena pengalamannya di partai politik, sehingga mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang kepala daerah hingga bagaimana pelaksanaannya. Berbeda dengan kelompok informan P yang hanya sebatas harapan bahwa Tan Mei Hwa mampu, dan hal tersebut dimungkinkan karena tidak pernah terjun langsung dalam politik, serta wawasan tentang politik kurang.

3. Kekuatan Tan Mei Hwa

Menurut Haroen (2014) kekuatan sejatinya telah dimiliki setiap orang, hanya saja ada yang sudah mengetahuinya dan ada yang belum mengetahui. Kekuatan merupakan sebuah bekal yang dimiliki seseorang yang telah ada atau telah terbentuk sejak dini, dimana kekuatan seseorang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuatan material dan non-material. Kekuatan material lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal dan kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain. Berikut penjelasan beberapa point kekuatan yang ada pada Tan Mei Hwa.

Poin pertama adalah kepercayaan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Fokus dalam point ini adalah kekuatan non-material pada Tan Mei Hwa yang berarti lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain (Haroen, 2014). Maka dari itu setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Ternyata kedua kelompok informan memiliki perbedaan rasa percaya akan Tan Mei Hwa sebagai sebagai pendakwah, dimana kelompok informan P memilih percaya pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah. Bilamana Tan Mei Hwa dapat mempercayai Tuhan, maka reputasinya sebagai pendakwah diyakini dapat dipercaya, namun disertai dengan menjadi pemimpin yang baik, artinya melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (infohukum.kkp.go.id) dan 5 program utamanya yang sudah dikampanyekan yakni Sekolah Gratis, Kesehatan Murah, Jalan Mulus, Lapangan Kerja Tersedia dan Perempuan Sejahtera (uswatan.com). Sebagai rakyat hanya bisa berharap pada

kinerja pemimpinya, sehingga secara tidak langsung percaya reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah.

Sedangkan kelompok informan U memaknai kepercayaan reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah yakni relatif tergantung kepribadiannya. Dimana sebenarnya persoalan percaya tidak percaya nomor sekian, yang terpenting dalam politik adalah elektabilitasnya, dimana elektabilitas merupakan kesediaan orang untuk memilihnya untuk menempati jabatan tertentu (Abidin, 2013). Disamping itu percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing, sebab sebagai pendakwah dapat menasehati orang lain, belum tentu dapat melakukan untuk dirinya sendiri. Perasaan tidak percaya terhadap seorang Tan Mei Hwa sebagai Pendakwah, sebenarnya untuk mengurangi ketidaknyamanan atau takut mengecewakan (West & Turner, 2009).

Menariknya, seharusnya pendakwah adalah seorang yang dapat dipercaya. Namun menurut kelompok informan U, maju mundurnya iman seseorang setiap saat dapat berbeda. Layaknya Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali divonis enam tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta subsider selama tiga bulan terkait kasus korupsi. Hakim juga memutuskan Suryadharma harus membayar kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dengan pengganti pidana penjara selama dua tahun. Suryadharma Ali didakwa menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Perbuatan tersebut dinilai telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan merugikan keuangan negara Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi (Lingasari, 2016).

Sehingga dengan mengetahui perbedaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa sebagai pendakwah memiliki unsur kuat

dipercaya oleh kelompok informan P. Namun kelompok informan U memilih relatif, karena pertimbangan secara usia dan pengalaman menjadikan pemikiran berbeda. Apalagi didukung elektabilitas Tan Mei Hwa termasuk rendah, persentase popularitas calon wakil bupati untuk tanggal 3-9 agustus 2015, yakni Abdul Kolik 45,6%, Nur Ahmad Syaifuddin 36,7%, Tan Mei Hwa 33,5%, dan Imam Sugiri 35% (Badrus, 2015).

Poin kedua adalah materi pribadi sebagai modal Tan Mei Hwa. Fokus dalam point ini adalah kekuatan material pada Tan Mei Hwa yang berarti lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal. Karena dalam politik ada harga untuk membangun *image* berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif suatu bangsa-negara dan bisa menjadi kebanggaan atau tidak. Sehingga menurut Firmanzah (2008) menyatakan bahwa harga meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat-akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye.

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai modal pribadi Tan Mei Hwa keluaran. Ternyata kedua kelompok informan memiliki kesamaan pemikiran yakni Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan biaya pribadi, meskipun sumbangsih terbesar dari pasangan politiknya. Siapun orangnya termasuk Tan Mei Hwa, ketika terjun dalam politik pasti membutuhkan dua modal yakni modal sosial dan modal uang, seperti yang dikatakan Haroen (2014) modal seseorang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekuatan material dan non-material. Kekuatan material lebih pada internal diri memiliki sebuah kekayaan atau modal

dan kekuatan non-material lebih pada jaringan komunikasi, modal sosial, ketokohan, dan lain-lain.

Meskipun yang berkepentingan lebih pada Utsman Ikhsan beserta partainya, Tan Mei Hwa tentunya tetap mengeluarkan uang, seberapa besaran jumlahnya tidak ada yang mengetahui pasti, tetapi dalam berpolitik pasti membutuhkan uang untuk sosialisasi, seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, iklan, publikasi, dan biaya kampanye (Firmanzah, 2008). Tetapi sebenarnya yang jelas terlihat mengeluarkan biaya besar adalah Utsman Ikhsan, yang kemungkinan mengumpulkan dari donatur-donatur yang mempunyai tendensi proyek apabila Utsman Ikhsan dan Tan Mei Hwa terpilih.

Menariknya, kelompok informan P dan informan U memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi usia dan pengalaman. Tetapi keduanya mengerti dan paham, bahwa dalam politik selalu ada permainan uang atau sering disebut *money politics*. Hal tersebut memang sejatinya sudah bukan rahasia lagi untuk masyarakat, nyatanya secara terbuka Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur M. Sholeh menyebutkan nominal mahar politik yang dikeluarkan Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 3 miliar. Besaran nominal mahar tersebut, diketahui dari rekaman pembicaraan antara M. Sholeh dan salah seorang pengacara petinggi Partai Gerindra Sidoarjo (Hadi, 2015).

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa dalam mengeluarkan modal uang pribadi memiliki unsur kuat, yakni dalam politik pasti membutuhkan dua modal yakni modal sosial dan modal uang, kemudian dalam berpolitik pasti membutuhkan uang untuk

sosialisasi, seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, iklan, publikasi, dan biaya kampanye.

Poin ketiga adalah dukungan partai politik sebagai kekuasaan. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui pendapat masyarakat mengenai alasan dasar partai politik mengusung Tan Mei Hwa. Ternyata kedua kelompok informan memiliki pemikiran yang sama yakni ada kepentingan keuntungan partai politik mengusung Tan Mei Hwa sebagai calon wakil bupati. Karena sebelum pendaftaran partai politik sudah mencari keuntungan, seperti Utsman Ikhsan untuk mendapatkan rekomendasi DPC Gerindra Sidoarjo maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidoarjo harus membayar mahar politik mencapai Rp 3 miliar (Hadi, 2015), dan dipastikan sangat menguntungkan partai politik pengusungnya.

Selain itu, politik sebagai ajang mengedepankan dirinya untuk berkuasa atau seni menguasai seseorang atau sesuatu, untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik (Firmanzah, 2007). Sebenarnya partai politik diibaratkan sebuah pisau, apabila digunakan dengan baik pasti ada manfaatnya dan sebaliknya. Maka

tidak masalah partai politik mencari sebuah keuntungan dalam memenangkan seorang calon, asalkan tidak melanggar hukum, dimana tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Karena setiap partai politik yang mencalonkan pemimpin pasti berkeinginan menang, dan tidak mungkin Tan Mei Hwa berdiri sendiri dan koalisi dengan partai politik yang lain.

Menariknya, kelompok informan U menambahkan terkadang masih ada juga jual beli kursi, kemudian kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif, meskipun Tan Mei Hwa tidak dirugikan, tetapi sudah dipakai menjadi alat untuk mencari keuntungan. Padahal sejatinya partai politik masih punya keterkaitan dengan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2007).

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan dan informan U, Tan Mei Hwa didukung partai politik memiliki unsur kuat untuk mencari keuntungan. Karena sebelum pendaftaran partai politik sudah mencari keuntungan, politik sebagai ajang mengedepankan dirinya untuk berkuasa, bahkan masih ada jual beli kursi, dan kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif.

Poin keempat adalah keterbatasan Tan Mei Hwa. Mengetahui kekuatan dapat menjadi sebuah tolak ukur pencapaian sebuah kemenangan yang akan diraih, tetapi kekuatan tidak hanya sampai disitu saja, termasuk diantaranya mengetahui kelemahan dan keterbatasan. Sebab bila seorang politisi hanya mengetahui kekuatan saja tanpa mengetahui kelemahan dan keterbatasannya, akan berpotensi celaka setiap saat (Haroen, 2014).

Maka dari itu, setelah mendapatkan pendapat komunal antara kelompok informan P dan informan U, dapat mengetahui keterbatasan Tan Mei Hwa

sebenarnya menurut pandangan masyarakat. Ternyata kedua informan memiliki kesamaan yakni salah memilih partai, *incumbent* yang masih mencalonkan kembali, pasangan politik yang kurang tepat pencitraan yang kurang, dan berasal dari kaum minoritas.

Pertama, Tan Mei Hwa salah masuk partai politik, dimana Partai Gerindra dan Partai PKS sering terjadi kontroversi, salah satunya menurut Rahmat (2008) PKS merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi yang memiliki ideologi Ikhwanul Muslimin, dimana memiliki agenda tersembunyi di Indonesia yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam, sehingga melalui dakwah PKS berupaya menegakkan sistem pemerintahan islam dengan berbagai atributnya dan akan mengganggu stabilitas nasional (Rahmat, 2008). Sehingga tidak salah banyak masyarakat yang meragukan, dan Kabupaten Sidoarjo adalah ladang partai PKB dengan hasil 8 kecamatan dari 18 kecamatan telah dikuasai, berdasarkan dukungan data KPU Sidoarjo Suara Pileg 2014, PKB menguasai diseluruh Dapil dengan hasil Dapil 1 terdapat 60.208, Dapil 2 terdapat 52.757, Dapil 3 terdapat 33.197, Dapil 4 terdapat 50.649, Dapil 5 terdapat 38.449, Dapil 6 terdapat 28.370, dan total seluruh dapil terdapat 263.630 suara (kpud-sidoarjokab.go.id).

Kedua, Tan Mei Hwa berhadapan dengan kandidat *incumbent* yang mencalonkan kembali, yakni Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun untuk warga Sidoarjo, dimana dua periode sebagai wakil bupati dan satu periode sebagai bupati beserta partai besar pengusungnya yakni PKB. dan mendapati *incumbent* memulai sosialisasi 3 tahun sebelumnya, menjadikan Tan Mei Hwa kalah dalam langkah awal. Ketiga, Tan Mei Hwa salah mempunyai pasangan politik, dimana Utsman Ikhsan mempunyai reputasi yang tidak baik, ketika menjabat sebagai ketua DPRD

periode 1999-2004, melakukan korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003 (Susanto, 2015).

Keempat, Tan Mei Hwa kurang dalam pencitraan. Adapun pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu pendek, setidaknya sekali lagi dalam pencalonan, disamping itu Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang pendakwah, sehingga belum paham situasi politik dan belum dikenal secara politik di Kabupaten Sidoarjo, dibutuhkan periode Pilkada berikutnya. Kelima, Tan Mei Hwa yang berasal dari minoritas, menjadikan kurang dilirik warga Kabupaten Sidoarjo. Maka setidaknya perlu bukti, apabila Tan Mei Hwa mempunyai kelebihan yang tidak dipunya pemimpin era sebelumnya, supaya dapat meyakinkan masyarakat menjadi jauh lebih percaya dengan kerja nyatanya.

Sehingga dengan mengetahui persamaan pendapat antara kelompok informan P dan informan U, Tan Mei Hwa memiliki unsur keterbatasan atau kelemahan yang kuat, yakni salah memilih partai, *incumbent* yang masih mencalonkan kembali, pasangan politik yang kurang tepat pencitraan yang kurang, dan berasal dari kaum minoritas. Maka dengan mengetahui keterbatasan atau kelemahan tersebut, dapat menjadi intropeksi dan pertimbangan kedepan bagi Tan Mei Hwa, apabila mencalonkan kembali sebagai kepala daerah.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Dari hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat mengenai *personal brand* Tan Mei Hwa adalah perempuan pendakwah beretnis Tionghoa. Namun pemilihan partai dan pasangan politik yang kurang sesuai menyebabkan *personal brand* Tan Mei Hwa tidak maksimal dalam pencalonan wakil bupati. Hal itu dapat terlihat dari dua aspek penting dalam *personal brand* Tan Mei Hwa, yakni karakteristik dan dimensi.

Adapun pada aspek karakteristik, elemen kekhasan terlihat dari pendapat masyarakat secara keseluruhan tidak memperlakukan Tan Mei Hwa sebagai perempuan masuk ranah politik, selama tidak ada pelarangan dari Undang-Undang yang berlaku, dan melaksanakan tugas dan janji program kerja, serta meningkatkan kualitas dalam memimpin. Masih dalam elemen kekhasan, masyarakat secara keseluruhan merasakan kualitas nilai-nilai agama yang tetap dipertahankan sembari memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sebagai seorang perempuan, Tan Mei Hwa juga layak menjadi pemimpin dengan syarat tidak dalam konteks agama dan keluarga.

Tetapi dalam menerima etnis Tionghoa di dalam masyarakat terdapat perbedaan, kelompok P memiliki pemikiran yang terbuka dengan adanya etnis Tionghoa mencalonkan sebagai wakil bupati, sedangkan kelompok U mengatakan belum saatnya etnis Tionghoa memimpin Kabupaten Sidoarjo, karena masyarakat masih sulit menerima etnis lain untuk memimpin dan lebih memilih sesama pribumi

yang lebih pandai. Tetapi, apabila Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa beragama Islam secara keseluruhan masyarakat menilai tidak masalah, karena agama Islam dapat menerima segala etnis manapun. Dilihat dari sisi penampilan, Tan Mei Hwa yang selalu tampil di ranah publik dengan apa adanya, sederhana, tidak bermegah, *low profile*, dan tertutup untuk menjaga hakat dan martabat sebagai perempuan muslim diranah publik.

Elemen lain dari aspek karakteristik yakni relevansi, di dalam masyarakat terlihat terdapat perbedaan pendapat. Kelompok P belum bisa menerima pemimpin dari etnis Tionghoa, karena adanya label kikir yang terlanjur melekat dan kekhawatiran menguasai perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan kelompok U menilai sebuah keuntungan atau kerugian bergantung *output* atau hasil kinerjanya Tan Mei Hwa. Namun terkait pencalonannya sebagai wakil bupati, secara keseluruhan masyarakat tidak memperlakukan Tan Mei Hwa menggunakan aktivitas agama seperti pengajian untuk mencari dukungan suara politik. Hal tersebut dikarenakan Tan Mei Hwa memang merupakan pribadi yang komunikatif dan pendekatannya yang sama dengan latar belakang sebagai pendakwah, serta didukung dengan mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam.

Sementara elemen konsistensi yang juga merupakan bagian aspek karakteristik, memperlihatkan apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh Tan Mei Hwa dalam politik tidak konsisten. Hal ini dikarenakan latar belakang Tan Mei Hwa sebagai pendakwah seharusnya lebih mementingkan kepentingan komunitas agama dibandingkan kepentingan ke politik.

Berikutnya pada aspek dimensi, elemen pertama yaitu karakter. Secara keseluruhan masyarakat terlihat dari pendapat masyarakat yang melihat Tan Mei Hwa sebagai sosok yang bertanggung jawab, peduli, jujur, berintegritas, dan berani.

Elemen kedua yaitu kompetensi, di dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat, kelompok U saja yang menilai bahwa Tan Mei Hwa memiliki ketrampilan teknis atau pengetahuan sebagai pendakwah, tetapi berbeda dengan kelompok P yang tidak mengetahui sama sekali. Bahkan dalam hal loyalitas terdapat perbedaan, kelompok P berpendapat tidak ada pengaruhnya karena apabila sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin, Tan Mei Hwa pastinya tujuannya hanya memikirkan rakyat dan memakmurkan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan. Berbeda dengan kelompok U berpendapat banyak pengaruhnya, karena Tan Mei Hwa dapat saja masih mementingkan golongan.

Begitupun Tan Mei Hwa sebagai calon pemimpin perempuan dalam mengatur kebijakan, di dalam masyarakat terdapat perbedaan. Kelompok P berpendapat hanya dapat berharap Tan Mei Hwa bisa mengatur kebijakan, sedangkan kelompok U dengan tegas berpendapat bahwa, mengingat fungsi pemimpin terbatas pada aspek manajerial, sementara aspek pelaksanaan dikelola kepala dinas, SKPD, dan bagian lainnya. Sehingga, apabila Tan Mei Hwa yang tidak mempunyai dasar politik akan dibantu oleh staf ahli, birokrasi-birokrasi, dan diawasi oleh DPR. Namun secara keseluruhan masyarakat menilai, Tan Mei Hwa memiliki sikap tidak membeda-bedakan, komunikatif, pintar, berjiwa sosial, dan dapat menjadi teladan.

Elemen ketiga yaitu kekuatan, terdapat perbedaan pendapat di dalam masyarakat dalam menilai reputasi Tan Mei Hwa. Kelompok P memilih percaya

pada reputasi Tan Mei Hwa sebagai pendakwah, karena bilamana dapat mempercayai Tuhan, maka reputasinya sebagai pendakwah diyakini dapat dipercaya. Sedangkan kelompok U masih meragukan status pendakwah, terlebih ketika terjun ke politik. Tetapi tentunya untuk menjadi seorang kepala daerah, secara keseluruhan masyarakat memahami bahwa Tan Mei Hwa bisa dipastikan mengeluarkan modal uang pribadi untuk sosialisasi seperti pencitraan, membangun tim, kendaraan partai, iklan, publikasi, dan biaya kampanye. Terlebih, partai politik sering kali mencari keuntungan dimulai sebelum pendaftaran, seperti Utsman Ikhsan sebagai mantan narapidana yang membayar mahar untuk rekomendasi calon bupati bersama Tan Mei Hwa, jual beli kursi, dan kerja sama proyek dengan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan politik sebagai ajang mengedepankan kepentingan pribadi untuk berkuasa dalam membentuk dan mengontrol kebijakan publik.

Setelah menjabarkan aspek karakteristik dan dimensi *personal brand* Tan Mei Hwa, secara keseluruhan masyarakat menilai Tan Mei Hwa masih memiliki kelemahan atau keterbatasan, yang dapat diperbaiki apabila ingin mencalonkan kembali dalam kontestasi politik. Pertama, Tan Mei Hwa salah masuk partai politik, dimana Partai Gerindra dan Partai PKS sering mengalami kontroversi. Padahal Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan kantong suara partai PKB dengan menguasai 8 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada.

Kedua, Tan Mei Hwa berhadapan dengan kandidat *incumbent* yang mencalonkan kembali, yakni Saiful Ilah yang telah mengabdikan 15 tahun untuk warga Kabupaten Sidoarjo, dimana selama dua periode menjadi wakil bupati dan satu periode sebagai bupati yang diusung partai PKB. Selain itu, masyarakat mendapati

incumbent sudah memulai sosialisasi 3 tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Tan Mei Hwa terlambat dalam membangun citra. Ketiga, Tan Mei Hwa kurang sesuai memilih pasangan politik, dimana Utsman Ikhsan mempunyai reputasi yang tidak baik ketika menjabat sebagai ketua DPRD periode 1999-2004. Hal ini dikarenakan Utsman Ikhsan melakukan tindakan korupsi dana Sumber Daya Manusia (SDM) APBD Sidoarjo tahun 2003.

Keempat, Tan Mei Hwa kurang dalam pencitraan. Adapun pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa terlalu singkat, setidaknya sekali lagi dalam pencalonan Pilkada. Selain itu, Tan Mei Hwa pada dasarnya adalah seorang pendakwah, sehingga belum paham situasi politik dan belum dikenal luas di Kabupaten Sidoarjo. Kelima, Tan Mei Hwa berasal dari kelompok minoritas, sehingga kurang dilirik oleh warga Kabupaten Sidoarjo.

6.2 Saran

Penelitian ini menyajikan hasil opini mengenai *personal brand* pada politisi perempuan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan melakukan analisis tekstual *personal brand* politisi perempuan pada media massa. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengambil pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan kecenderungan opini masyarakat terhadap *personal brand* politisi perempuan. Dengan demikian penelitian berikutnya dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait dengan makna pesan teks mengenai *personal brand* pada politisi di Indoensia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Academy, MIM. (2010). *Brand Operation*. Surabaya: Esensi Erlangga Group.
- Anthony, & Govindarajan. (2005). *Management Control System: Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astaman, Margareta. (2011). *Excuse-Moi*. Jakarta: PT. Gramedia
- Azwar, S. (2007). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, adisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bystrom, Dianne G., Terry Robertson, Christine M. Banwart, & Linda L. Kaid (2004). *Gender and Candidate Communication: Videostyle, Web Style, New Style*. New York: Routledge.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, & Glen M. Broom. (2011). *Efektive Public Relations; Edisi Kesembilan*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. (2008). *Etnis dalam Pilkada*. Jakarta: Lingkaran Survey Indonesia.
- Firmanzah, Ph.D. (2007). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah, Ph.D. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haroen, Dewi. (2014). *Personal Branding: Kesuksesan Berkiprah Di Dunia Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ida, Rachmah. (2014). *Metode Penelitian: Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Junaedi, Fajar. (2013). *Komunikasi Politik, Teori, Aplikasi, dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Kartajaya, Hermawan dan Ardhi Ridwansyah. (2012). *Branding with Character*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, Philip. (2002). *Marketing Management*. PTR: Prentice Hall.
- Mc. Nally D. and Speak, K. D. (2004). *Be Your Own Brand*. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers.

- Moerdijati, Sri. (2012). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Montoya, P. And Vanderhey, T. (2009). *The Personal Branding Phenomenon*. Personal Branding Press.
- Muljana, Prof. Dr. Slamet. (2008). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda.
- Nimmo, Dan. (2001). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- O'Shaughnessy, J. (1995). *Competitive Marketing: A Strategic Approach*. London: Clays Ltd, St. Ives Plc.
- Purjean Jr, Edgar F. (2000). *American Generalship: Character Is Everything: The Art of Command*. Presidio Press.
- Rahmat, M. Imdadun. (2008). *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LkiS.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2001). *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rampersad, K, Hubert. (2008). *Authentic Personal Branding – A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand (terjemahan: Sukses Membangun Authentic Personal Branding)*. Jakarta: PPM.
- Rustiyah. (1982). *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekamto, Sujono. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto, Ani. (2011). *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Tangerang: PT. Wahana Aksi Kritika.
- Subiakto, Henry., & Ida, Rachmah. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudibyoy, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LkiS.
- Sunarjo, Dra. Djoenaesih S., SU. (1997). *Opini Publik*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Elections and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- West, Richard., & Turner, Lynn H. (2009). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba.

Widyawati, Nina. (2014). *Etnisitas dan Agama: Sebagai Isu Politik Kampanye JK-Wiranto Pada Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wignjosuebrototo, Soetandyo., dkk. (2008). *Membangun Kedewasaan Sikap Politik & Kualitas Demokrasi di Provinsi Jawa Timur di Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Jurnal dan Tesis

Butler, P. & Collins, N. (1994). *Political Marketing: Structure and Process*. European Journal of Marketing. (28), 1. hlm. 19-34.

Butler, P. & Collins, N. (2001). *Payment On Delivery: Recognising Constituency Service as Political Marketing*. European Journal of Marketing. (30), 10-11. hlm. 32-44.

Dean, D. & Croft, R. (2000). *Friends and Relations: Long-Term Approach to Political Campaigning*. Journal of Marketing. (63). hlm. 3-13.

Fitranisa, Intan. (2011). *Wacana Perempuan Tionghoa Dalam Novel Indonesia Paska Reformasi*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Gefen, D. dan Straub, D.W. (2004). *Consumer Trust in B2C e-Commerce and the Importance of Social Presence: Experiments in e-Products and e-Service*. Omega: The International Journal of Management Science, 1-18.

Hariati, Yanny. (2015). *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Political Personal Branding: Studi Kasus pada Komunitas Young on Top Malang*. Tesis Media dan Komunikasi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Hoon, C. (2006). *Reconceptualising Ethnic Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia*. Journal of School of Social and Cultural Studies. Australia: The University of Western Australia.

Locke, A. & Harris, P. (1996). *Political Marketing-Vive La Difference*. European Journal of Marketing. (30), 10-11, hlm 51-74.

Nazir, Moh., Ph.D. (1999). *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Niffenegger, P.B. (1989). *Strategies For Succes From The Political Marketers*. The Journal of Consumer Marketing. (6), 1. hlm. 45-51.

Nurlita, Ita. (2014). *Opini Publik Terhadap Kredibilitas Calon Presiden RI Tahun 2014 Dalam Perspektif Mahasiswa*. Surabaya: Universitas Bhayangkara.

- O’Cass, A. (2001). *Political Marketing: An Investigation of The Political Marketing Concept and Political Market Orientation in Australian Politics*. European Journal of Marketing. (35), 9-10. hlm. 1003-1025.
- Paine, L. S. (1994). *Managing for Organizational Integrity*, Harvard Business Review, March-April, pp 106-117.
- Ramadhan, Hasan. (2014). *Perempuan dan Korupsi*. <http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-korupsi.html>, diakses 31 Mei 2016.
- Ratnaningsih, E., (2009), *Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Dengan Motivasi Sebagai Intervening Variable*, Jurnal Ekonomi Janavisi, Vol. 12, No. 2.
- Rothschild, M.L. (1978). *Political Advertising: A Neglected Policy Issue in Marketing*. Journal of Marketing Research. (15), 1. hlm. 58-71.
- Scammell, M. (1997). *The Wisdom Of The War Room: ES-Campaigning And Americanization*. Joan Shorenstein Centre on Press. Politics and Public Policy Research Paper. Cambridge: Harvard University.
- Tresnawati, Yuni & Irmulan Sati T. (2014). *Personal Branding Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2014-2019*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Wring, D. (1996). *Political Marketing and Party Development in Britain: A Secret History*. European Journal of Marketing. (30), 10-11. hlm. 11-28.
- Yukl, G. A. dan Van Fleet, D. D. (1992). *Theory and Research on Leadership in Organizations*, di dalam Dunnette, M. D. dan Hough, L. M. (ed), Handbook of Industrial & Organizational and Psychology, 2 ed, Vol 3, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Zakina. (2008). *Politik Etnisitas dan Pencitraan Kandidat Minoritas dalam Pemilihan Kepala Daerah Indonesia (Studi Kasus: Cornelius Christiandy Sanjaya pada Pilkada Kalimantan Barat)*. Tesis UI. Jakarta: Universitas Indonesia.

Situs

ahok.org, diakses 31 Mei 2016.

dprd-sidoarjo.go.id/tentang-dprd/tugas-wewenang, diakses 31 Mei 2016.

infokukum.kkp.go.id/, diakses 31 Mei 2016.

inti.or.id, diakses tanggal 24 November 2015.

jatim.kemenag.go.id, diakses 2 Juni 2016.

kbbi.web.id/, diakses 31 Mei 2016.

kpud-ntbprov.go.id, diakses 1 Juni 2016

kpud-sidoarjoakab.go.id, diakses tanggal 5 Oktober 2015.

nasional.tempo.co, diakses tanggal 26 September 2015.

www.bangsaonline.com, diakses 1 Juni 2016.

www.bbc.com, diakses 1 Juni 2016.

www.dpr.go.id, diakses 1 Juni 2016.

www.facebook.com, 26 September 2015.

www.hukumonline.com, diakses 31 Mei 2016

www.kemendagri.go.id, diakses 1 Juni 2016.

www.kpk.go.id, diakses 1 Juni 2016.

www.kpu.go.id, diakses tanggal 26 September 2015.

www.nielsen.com/, diakses 1 Juni 2016.

www.pks.or.id, diakses tanggal 26 September 2015.

www.suarasurabaya.net, diakses tanggal 26 September 2015.

Bahan Lain

- Abidin, Said Zainal. (2013). *Popularitas atau Elektabilitas?*.
<http://news.detik.com/kolom/2134761/popularitas-atau-elektabilitas>, diakses 2 Juni 2016.
- Afrianti, Desy dan Dwifantya Aquina. (2011). *Syiar Muslim Tionghoa Berawal Di Jakarta*.
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/239199-syiar-muslim-tionghoa-berawal-di-jakarta>, diakses 31 Mei 2016.
- Andriansyah, Moch. (2014). *Ini Alasan Risma Mati-Matian Tutup Lokalisasi Gang Dolly*.
<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-risma-tutup-lokalisasi-gang-dolly-mati-matian.html>, diakses 31 Mei 2016.
- Apriani, Zarah. (2016). *Pengertian, Definisi, dan Rumus Break Event Point*.
https://www.academia.edu/9912518/Pengertian_Definisi_dan_Rumus_BEP_Break_Even_Point, diakses 31 Mei 2016.

- Azhari, Muhammad Shobri. (2014). *Ulama dan Umara*. [http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/02/22/n1da22-
ulama-dan-umara](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/02/22/n1da22-ulama-dan-umara), diakses 1 Juni 2016.
- Aziz, Ibnu Dawam. (2012). *SARA Itu Intimidasi?*. [http://www.kompasiana.com/baniaziz/sara-itu-satu-intimidasi-mencermati-
kandungan-sara-dalam-tulisan-anita-tahmid_5513f4e7a333111a70ba82b9](http://www.kompasiana.com/baniaziz/sara-itu-satu-intimidasi-mencermati-kandungan-sara-dalam-tulisan-anita-tahmid_5513f4e7a333111a70ba82b9),
diakses 31 Mei 2016.
- Badrus. (2015). *Survei Pilkada Sidoarjo The Republic Institute, Inilah Popularitas dan Elektabilitas Masing-Masing Calon*. [http://dprd-
sidoarjokab.go.id/survei-pilkada-sidoarjo-the-republic-institute-inilah-
popularitas-dan-elektabilitas-masing-masing-calon.html](http://dprd-sidoarjokab.go.id/survei-pilkada-sidoarjo-the-republic-institute-inilah-popularitas-dan-elektabilitas-masing-masing-calon.html), diakses 1 Juni 2016.
- Bilkis, Mulya Nur. (2016). *Ahok Ceplak-ceplos, Nasdem: Daripada Ngomong Baik Tapi Nggak Kerja*. [http://news.detik.com/berita/3140571/ahok-ceplak-
ceplos-nasdem-daripada-ngomong-baik-tapi-nggak-kerja](http://news.detik.com/berita/3140571/ahok-ceplak-ceplos-nasdem-daripada-ngomong-baik-tapi-nggak-kerja), diakses 1 Juni 2016.
- Diputra, Rizka. (2016). *Lima Konflik SARA Paling Mengerikan Ini Pernah Terjadi Di Indonesia*. [http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-
konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia](http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia), diakses 31 Mei 2016.
- Fahamsyah, Miftahul. (2015). *Tan Mei Janji Memberdayakan Para Janda*. Surabaya: Jawa Pos 24-9-2015.
- Falk, Erika. (2008). “Cutting Women Out: the Media’s Bias Against Female Presidential Candidate”, dalam *In These Times*, 25 Februari 2008, diakses dari http://www.inthesetimes.com/article/3539/cutting_women_out/ pada 20 Mei 2010.
- Gusblero. (2014). *Maharani Shima*. [http://www.kompasiana.com/gusblero/-
maharani-shima_54f5ed6da333115b7c8b45de](http://www.kompasiana.com/gusblero/-maharani-shima_54f5ed6da333115b7c8b45de), diakses 31 Mei 2016.
- Hadi, Nur. (2015). *Mahar Politik alon Bupati Sidoarjo dari Gerindra Capai Rp 3 Miliar*. [https://m.tempo.co/read/news/2015/08/06/078689576/mahar-politik-
calon-bupati-sidoarjo-dari-gerindra-capai-rp-3-miliar](https://m.tempo.co/read/news/2015/08/06/078689576/mahar-politik-calon-bupati-sidoarjo-dari-gerindra-capai-rp-3-miliar), diakses 3 Juni 2016.
- Indra, Steven. (2014). *Tan Mei Hwa, Apa Yang Diucapkan Juga Menjadi Perilakunya Sehari-hari*. [http://mualaf.com/tan-mey-wha-apa-yang-
diucapkan-juga-menjadi-perilakunya-sehari-hari/](http://mualaf.com/tan-mey-wha-apa-yang-diucapkan-juga-menjadi-perilakunya-sehari-hari/), diakses 1 Juni 2016.
- Ismail. M. (2015). *Tan Mei Hwa Kumpul Pengamen Di Sop Pak Amin*. [http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/247860/tan_mei_hwa_ku-
mpul_pengamen_di_sop_ayam_pak_min.html](http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/247860/tan_mei_hwa_kumpul_pengamen_di_sop_ayam_pak_min.html), diakses 1 Juni 2016.

- Ismail. M. (2015). *Nyai Tan Setuju Perempuan Dilibatkan Musrenbang Desa*. http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/247756/nyai_tan_setuju_perempuan_dilibatkan_musrenbang_desa.html, diakses 1 Juni 2016.
- Jawa Pos. (2015). *Sutjipto Enam, Saiful Delapan*. Surabaya: PT. Jawa Pos Koran 7-10-2015
- Koto, Ferry. (2016). *Undang-Undang Yang Mengharuskan Agama Dilibatkan Dalam Memilih Pemimpin*. http://www.kompasiana.com/ferrykoto/uu-yang-mengharuskan-agama-dilibatkan-dalam-memilih-pemimpin_5715f8118923bd2f08511c36, diakses 1 Juni 2016.
- Linggasari, Yohannie. (2016). *Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160111223215-12-103605/mantan-menteri-agama-suryadharma-ali-divonis-6-tahun-penjara/>, diakses 2 Juni 2016.
- Listyanti, Agita Sukma. (2013). *Hasil Lengkap Pilkada Jatim Versi Hitung Cepat LSI*. <https://m.tempo.co/read/news/2013/08/29/078508602/hasil-lengkap-pilkada-jatim-versi-hitung-cepat-lsi>, diakses 31 Mei 2016.
- Machmudi, Yon., Ph.D. (2007). *Pks Mengancam Eksistensi Ormas Islam?*. Bandung: Koran Sindo 15-5-2007.
- Metrotvnews. (2015). *Mewujudkan Kemandirian Parpol*. <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369384/mewujudkan-kemandirian-parpol>, diakses 3 Juni 2016.
- Muhammad, Djibril. (2012). *Mualaf Di Indonesia Mengalami Peningkatan*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/14/m742sv-mualaf-di-indonesia-alami-peningkatan>, diakses 31 Mei 2016.
- Pamungkas, Muhammad Singgih. (2015). *Makna Akidah*. <https://muslim.or.id/24808-makna-akidah.html>, diakses 1 Juni 2016.
- Merdeka, Rakyat. (2008). *Bachtiar Chamsyah Mau Jadi Presiden, "Tapi Mana Mungkin, Saya Bukan Orang Jawa"*. Jakarta: Harian Rakyat Merdeka
- Ramdlan, Mahbub Ma'afi. (2014). *Kebolehan Mengangkat Pemimpin Non Muslim*. <http://www.nu.or.id/post/read/55652/kebolehan-mengangkat-pemimpin-non-muslim>. diakses 31 Mei 2016.
- Reviyanto, Dhemas. (2014). *Terpilih Lagi, Eko Patrio Punya Resep Khusus*. <https://m.tempo.co/read/news/2014/04/24/078573003/terpilih-lagi-eko-patrio-punya-resep-khusus>, diakses 2 Juni 2016.
- Rudi, Alsada. (2016). *Penanganan Banjir Dongkrak Elektabilitas Ahok*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/23/18335501/Penanganan.Banjir.Dongkrak.Elektabilitas.Ahok>, diakses 1 Juni 2016.

- Sachiko, Desi. (2014). *Prosedur Mualaf Di Indonesia*. <http://www.desisachiko.com/2014/03/20/prosedur-mualaf-wna-di-indonesia/>, diakses 31 Mei 2016.
- Saefullah, Saad. (2015). *8 Syarat Pakaian Wanita Muslimah*. <https://www.islampos.com/ini-8-syarat-pakaian-wanita-muslimah-170525/>, diakses 1 Juni 2016.
- Sajadi, Syukron. (2014). *Madrasah dan Sekolah*. https://www.academia.edu/-8267915/Madrasah_dan_Sekolah, diakses 31 Mei 2015.
- Setyorini, Tantri. (2015). *Profil Susi Pudjiastuti*. <http://profil.merdeka.com/-indonesia/s/susi-pudjiastuti/>, diakses 31 Mei 2016.
- Sindo. (2007). Bandung: Koran Sindo 3-5-2007.
- Sindo. (2007). Bandung: Koran Sindo 9-5-2007.
- Spiunud. (2013). *Bimtek Pengelolaan SDM 2012*. <http://spi.unud.ac.id/index.php/-archives/category/bimbingan-teknis-bimtek/>, diakses 1 Juni 2016.
- Supriyono, Arif. (2016). *Etnis Tionghoa dan Pusaran Elite Kekuasaan*. <http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/01/01/o09xiu254-etnis-tionghoa-dan-pusaran-elite-kekuasaan>, diakses 31 Mei 2016.
- Susanto, Bruriy. (2015). *Mantan Napi Maju Pilkada Yakin Dapat 80 Persen Suara*. http://www.suarasurabaya.net/print_news/Politik/2015/156234-Mantan-Napi-Maju-Pilkada-Yakin-Dapat-80-Persen-Suara, diakses 1 Juni 2016.
- Syairwan, Irwan. (2016). *Ini Penyebab Kembali Molornya Proyek Frontage Road Waru-Buduran Sidoarjo*. <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/14/ini-penyebab-kembali-molornya-proyek-frontage-road-waru-buduran-sidoarjo>, diakses 1 Juni 2016.
- Wahono, Tri. (2012). *Empat Alasan Kuat, Poligami Aa Gym Dikabulkan*. <http://entertainment.kompas.com/read/2012/04/26/18050067/empat.alasan.kuat.poligami.aa.gym.dikabulkan>, diakses 3 Juni 2016.
- Waskita, Ferdinand. (2012). *Pilkada Serentak Miliki Kelemahan dan Keunggulan*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/14/pilkada-serentak-miliki-kelemahan-dan-keunggulan>, diakses 3 Juni 2016.
- Widiyanto, Eko. (2013). *Yang Tak Coblos PKB Takkan Masuk Surga*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/17/mgrwcz-yang-tak-coblos-pkb-takkan-masuk-surga>, diakses 1 Juni 2016.
- Wiwoho, Laksono Hari. (2014). *Jokowo Sebut Risma Cocok Jadi Presiden*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/20/1608014/Jokowi.Sebut.Risma.Cocok.Jadi.Presiden>, diakses 2 Juni 2016.

PEDOMAN WAWANCARA

No.	KATEGORI	PERTANYAAN
KARAKTERISTIK PERSONAL BRAND		
1.	Kekhasan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana memandang Tan Mei Hwa seorang perempuan yang masuk ranah politik? • Bagaimana memandang Tan Mei Hwa seorang perempuan menjadi pemimpin? • Bagaimana memandang Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin? • Bagaimana memandang etnis Tionghoa beragama muslim? • Bagaimana memandang penampilan Tan Mei Hwa diranah publik? • Apakah Tan Mei Hwa mempunyai kualitas dalam diri?
2.	Relevansi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah sebuah keuntungan atau kerugian apabila terdapat pemimpin berbeda etnis? • Apakah mengetahui cara Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat? • Hal apa yang paling dominan disampaikan oleh Tan Mei Hwa? • Bagaimana memandang unsur keagamaan seperti pengajian digunakan untuk mendulang suara dalam politik?
3.	Konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah secara keseluruhan yang telah dilakukan Tan Mei Hwa di masyarakat konsisten?
DIMENSI PERSONAL BRAND		
1.	Karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana memandang karakter seorang Tan Mei Hwa?
2.	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana memandang pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki Tan Mei Hwa? • Bagaimana memandang sikap yang dimiliki Tan Mei Hwa? • Apakah Tan Mei Hwa sebagai keturunan Tionghoa mempengaruhi loyalitas dalam bekerja?

		<ul style="list-style-type: none">• Apakah Tan Mei Hwa sebagai perempuan mampu mengatur kebijakan di pemerintahan?
3.	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none">• Apakah reputasinya sebagai pendakwah dapat dipercaya sebagai kekuatannya?• Apakah Tan Mei Hwa menggunakan kekayaan materi pribadi dalam politik?• Apakah terdapat dukungan kepentingan partai politik untuk berkuasa atau mendapatkan keuntungan?• Apakah yang menjadi kelemahan atau keterbatasan Tan Mei Hwa?



DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION



Focus Group Discussion – Kelompok P



Focus Group Discussion – Kelompok U

**TRANSKIP WAWANCARA
KELOMPOK P**

Interview Focus Group Discussion (FGD)

- Moderator : Rama Dimas (Kode inisial: RD)**
Informan 1 : Maulana Bintang Bahari (Kode inisial: P1)
Informan 2 : Dwi Purnomo (Kode inisial: P2)
Informan 3 : Oktavia Susanti (Kode inisial: P3)
Informan 4 : Brenda Rahmawati (Kode inisial: P4)
Informan 5 : Aida Fitria (Kode inisial: P5)
Informan 6 : Siti Amariyah (Kode inisial: P6)
Informan 7 : Fian Dwi Rachmatdani (Kode inisial: P7)

RD : Ok, terima kasih sudah mau datang, bisa perkenalkan diri masing-masing?

- P1 : Ooh ok..nama saya Maulana Bintang Bahari, umur 20 tahun.
P2 : Eee..nama saya Dwi Purnomo, umunya 20 tahun, alamat Sidoarjo.
P3 : Nama saya Oktavia Susanti, umur saya 20 tahun.
P4 : Perkenalkan nama saya Brenda Rahmawati, umur saya 21 tahun.
P5 : Nama saya Aida Fitria, umur 20 tahun.
P6 : Nama saya Siti Amariyah dari Sidoarjo, umur saya 21 tahun.
P7 : Oke nama saya Fian Dwi Rachmatdani, saya masih berumur 20 tahun.

RD : Pertanyaan pertama...Bagaimana memandang karakter seorang Tan Mei Hwa? dari Maulana dulu.

- P1 : Hmm..kalau saya sih untuk menilai karakter seseorang biasanya harus mendalami orangnya, tapi kalau belum mengenal pastinya hanya dinilai sebatas secara umum, karena Beliau seorang pendakwah pasti semua orang menilai bahwa Beliau itu baik, istilahnya mencerdaskan umat melalui agama, mungkin untuk Sidoarjo sendiri memiliki wakil bupati seorang pendakwah cukup bagus, karena di Sidoarjo sendiri untuk pondok pesantrennya sudah lumayan berkembang sekarang. Jadi selain Sidoarjo menjadi tempat investasi

nomer 2 atau 1 di Jawa Timur itu kan besar investor yang datang ke Sidoarjo dan bagus juga kalau Sidoarjo

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau setauku dalam berdakwah mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mungkin ilmu-ilmu yang dibagikan pada orang-orang bisa membuat orang-orang lebih suka beragam, lebih memahami arti-arti agama baik buruknya. Karena Bu Tan Mei Hwa dalam berdakwah dimana-mana, otomatis orang itu banyak yang suka dengan Beliau, gitu.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Kalau menurut saya tentang Tan Mei Hwa sih secara Beliau menyampaikan dakwahnya sih humoris, mudah dipahami, mungkin itu yang bikin buat banyak audien yang tertarik buat milih dia.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Kalau menurut penilain saya, setau saya dia seorang mualaf dari tahun 1993, bagi saya seorang mualaf sudah bisa mendakwah itu menjadi nilai plus tersendiri buat saya, dan yang dia dakwahkan ada benar-benar di ayat-ayat Al-Qur'an, jadi menurut saya *perfect*lah bisa berdakwah dengan umur mualaf baru berapa taun.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya selama liat di TV itu, kalau dakwah itu orangnya tegas, terus saya pernah liat juga visinya, kalau dia kepilih jadi wakil bupati Sidoarjo dia akan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, jadi saya setuju aja sama idenya Beliau, karena di Sidoarjo kan punya potensi untuk ibu-ibu rumah tangganya.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau dari saya, aku suka dia mempunyai niat, tekad, contohnya mulai dari dia berkorban, berdakwah dimana-mana, dia juga salah satu pesantren, itu yang saya suka dari dia. Dia mempunyai dasar sebelum nyalon, juga mendakwah dan lain-lain, itu sudah cukup menurutku.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau aku pribadi kan belum tau jelas, kalau menurut saya sih semoga gak cuma modal perjanjian aja, kan biasanya janji-janji saja, intinya orang kalau

mau nyalon yang baik-baiknya dulu dan nanti kalau uda terpilih uda lupa sama janji-janjinya, semoga gak lupa, itu kalau saya.

RD : Oke terus berikutnya...Apakah mengetahui cara Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat? dari Maulana.

P1 : Untuk dari segi komunikasi Bu Tan Mei Hwa ini dapat dikatakan elektabilitasnya cukup tinggi menurut saya, karena Bu Tan Mei Hwa itu sangat merakyat tidak hanya di Sidoarjo, bahkan di kalangan regional Jawa Timur sudah terkenal, istilahnya untuk masyarakat Sidoarjo sendiri Beliau sangat mudah untuk masuk ke kalangan masyarakat. Karena itu tadi pendakwah itu kan ilmu komunikasi dakwahnya pasti tinggi dan dari situlah Beliau memiliki kelebihan masuk ke dalam masyarakat, kemungkinan besar Bu Tan Mei Hwa bisa mengambil hati rakyat, bisa menjadi wakil bupati di Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Sepengetahuan saya komunikasi Beliau dengan masyarakat Sidoarjo itu yang pertama mengadakan pengajian di desa Pecantingan, Sekardangan. Kemudian dia komunikasi dengan menyerahkan hewan kurban sapi di desa Sugihwaras dan suka berkumpul dengan pengamen yang kebetulan ketemu di Sop Pak Amin, sepengetahuan saya sampe itu aja sih.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Setauku Bu Tan Mei Hwa itu berkomunikasi hanya melalui dakwah, dakwah di khitanan, di pernikahan, di acara-acara hajatan seperti itu. Mungkin dakwahnya tidak jauh dari dengan agama atau beribadah, seperti itu saja yang saya tau dari Ibu Tan Mei Hwa.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Sejauh yang saya tau kalau komunikasi untuk pilkada ini jujur saya belum pernah tau Ibu Tan Mei Hwa ini seperti apa komunikasi dengan masyarakat Sidoarjo, cuma yang saya tau kemarin pas daftar pencalonan, itu Beliau sama pasangannya naik sepeda kalau gak salah ke KPUD Sidoarjo, menurut saya bagus sih bentuk komunikasinya.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Menurut saya sih belum tau bener-bener bentuk komunikasinya.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau dari komunikasi Bu Nyai Tan Mei Hwa cukup bagus, dia langsung terjun ke masyarakatnya, seperti saya lihat sendiri di Sugihwaras, dia terjun langsung untuk berkorban, sangat ramah dengan masyarakat setempat dan itu yang saya suka.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Menurut saya sih belum tau bener-bener bentuk komunikasinya.

RD : Berikutnya...Hal apa yang paling dominan disampaikan oleh Tan Mei Hwa? dari Maulana.

P1 : Untuk mengenai program dari Tan Mei Hwa sendiri, jujur saya belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan Beliau, mengikuti kampanye Beliau atau melihat Beliau berkampanye, tetapi minimal saya sudah pernah membuka salah satu *websitenya* Beliau tentang strategi-strateginya, untuk Pilkada itu masalah klasik sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, ya klasik lah seperti itu, yang paling penting adalah nanti bagaimana mereka merealisasikan janji-janji mereka itu.

RD : Menurut Maulana ada masalah baru di Sidoarjo?

P1 : Nah yang paling penting juga untuk Kabupaten Sidoarjo ini adalah dalam hal ketegasan, beberapa kasus itu pemerintah Sidoarjo tuh kurang berani secara tegas seperti Kota Surabaya, contohnya *frontageroad* yang seharusnya dilanjutkan dari Waru ke Sidoarjo, itu sangat lama sekali eksekusi oleh pemerintah Kabupaten, bahkan Mall Cito pun sangat cepat diatasi oleh Bu Risma. Nah harapannya pemimpin Sidoarjo lebih tegas dan lebih jujur tidak ada permainan mafia didalam pemerintah itu.

RD : Selanjutnya untuk Dwi?

P2 : Nggak tau, hehehe

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Setauku Beliau untuk berdakwah saja, lainnya itu aku kurang tau.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Ya sama seperti itu hanya dakwah saja.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Setauku sih memberdayakan perempuan Sidoarjo itu aja, mungkin lewat Batik Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Untuk itu saya kurang tau mas.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Untuk komunikasinya saya tidak pernah secara langsung.

RD : Ya Maulana ada yang ingin ditambahkan?

P1 : Saya menangkap 5 program dari Bu Tan Mei ini, tapi yang jadi pertanyaan mengapa masyarakat Sidoarjo banyak yang belum nggeh dengan strategi Beliau. Sebenarnya Bu Tan Mei Hwa itu memikirkan bagaimana cara mencitrakan dirinya, oke kenyataanya Bu Tan Mei Hwa dekat dengan rakyat, merakyat dan masuk dalam rakyat, tapi harusnya bagaimana Bu Tan Mei Hwa bisa *membranding* dirinya ini terlihat dengan diliput, dibuat suatu tanyangan yang mana mengarahkan masyarakat kalau Bu Tan Mei Hwa itu dengan rakyat dan itu sangat penting seperti Bu Risma dan Pak Jokowi itu benar-benar strategi yang sangat jitu di era saat ini yang berbeda dengan era-era jaman dulu.

RD : Selanjutnya...Bagaimana memandang penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik? mulai dari Fian.

P7 : Ya yang baik-baik aja, kembali ke dasarnya sebagai pendakwah, seorang pria pasti melihat oh dia beriman rek, otomatis itu aja sudah mengangkat Bu Tan Mei Hwa.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau menurut saya sopan, sama rapi, udah itu aja.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya ya kelihatan tegas, yang kelihatan berwibawa, enak dipandang juga. Supaya dilihat seorang perempuan itu tidak lemah, kan biasanya orang lihat dari tampilan fisik dulu, kalau dari tampilan fisik kelihatan garang gitu, mungkin gak akan direndahkan dan juga pakaiannya nggak bermewah-mewahan gitu, karena biasanya masyarakat kan nggak suka seorang pemimpin yang bajunya mencolok.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Ya menurut saya sih didepan umum sopan, tertutup, menjaga hakat dan martabatnya dengan mengikuti adat ketimuran.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau menurut pengamatan dia apa adanya, seandainya jadi pemimpin dia harus merubah penampilan yang dulu seperti lebih rapi, berwibawa, humoris, dan tegur sapa sama waga.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Pandangan saya penampilan murah senyum terhadap publik dan sederhana, secara penampilan tidak nyleneh.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Ya saya kira penampilan yang standart saja, pasti berpenampilan dia nyaman, sopan dan yang paling penting dia dapat menempatkan dia sedang berada dimana, istilahnya dia tidak harus sederhana dan dia tidak harus mewah, tapi bisa menempatkan dia berada dimana karena dia calon simbol dari Kabupaten Sidoarjo.

RD : Pertanyaan berikutnya...Bagaimana memandang sikap yang dimiliki Tan Mei Hwa? dari Maulana.

P1 : Untuk Bu Tan Mei Hwa memang mempunyai sikap baik, tidak membedakan, dan itu memang yang seharusnya seorang pendakwah dalam bersikap dengan masyarakat manapun.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Cukup komunikatif karena sudah sering berdakwah, jadi komunikasi sangat lancar dan enak didengar.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Orangnya pintar mas, dia selalu menjawab yang terbaik karena seorang pendakwah harus bisa memberikan solusi bagi jamaahnya.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Sangat baik sekali karena ya itu, selalu ada khitanan masal, ada bantuan kepada lanjut usia tiap tahun itu rutin, *training* yang sifatnya gratis,

memberikan pengajian-pengajian, sikap yang ditanamkan pada masyarakat sudah ditanamkan jauh sebelumnya sosialisasi untuk Pilkada.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau saya lihat sikapnya dia seperti figur seorang ibu atau kayak temen gitu, bisa dibilang sosialnya tinggi sekali dan untuk mengumpulkan pahala.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Sikapnya seperti pemimpin, jadi tegas dan mungkin saya berharap bisa seperti Bu Risma.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Karena seorang ustadzah jadi sangat baik, selain itu menerapkan ilmu-ilmu agama sehingga dapat menjadi contoh orang banyak.

RD : Berikutnya...Bagaimana memandang pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki Tan Mei Hwa? dari Fian.

P7 : Terkait itu saya kurang tau.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Nggak tau juga.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau dilihat dari rekam jejaknya, Ibu Tan Mei Hwa belum pernah menjadi pemimpin daerah, jadi partai politik yang mencalonkan Beliau cuma melihat secara potensi aja, belum tentu kompetensinya oke.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Nah kalau pastinya saya juga belum tahu, karena tidak mengetahuinya secara langsung, tapi walaupun begitu persoalannya adalah partai pengusungnya harus sadar bahwa dia harus mengajukan kader-kader terbaik mereka. Kemaren saya sempat ketemu sekjen dari Partai PDI, PKB dan Gerindra, mereka mengatakan bahwa akan mengadakan sebuah sekolah kepemimpinan untuk kader-kader mereka, mungkin itu salah satu wacana yang bagus sekali ketika ada sekolah untuk kaderisasi dari partai politik itu, sehingga masyarakat berpikir bahwa partai politik itu mengajukan kader-kader terbaik mereka, bukan sekedar kader yang tidak memiliki kualitas tetapi hanya memiliki uang.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau menurut saya sih untuk kompetensinya mungkin bisa dilihat dari saat ini sih Beliau kan sangat terkenal dengan cara berdakwahnya, untuk cara kepemimpinan sebelumnya sih belum tahu ya.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Sepengetahuan saya sebelum menjabat sebagai calon wakil bupati ini, dia sudah memiliki aktivitas rutin tanpa ada tujuan mencalonkan diri, contohnya dia ada kegiatan rutin setiap satu tahun sekali khitanan masal, batuan sosial, pengobatan gratis bagi warga lansia.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Kalau saya belum seberapa tahu, mungkin dia dicalonkan oleh partai pengusungnya untuk mempopulerkan partai pengusungnya.

RD : Selanjutnya...Bagaimana memandang Tan Mei Hwa seorang perempuan yang masuk ranah politik? dari Fian.

P7 : Banyak ya, seperti lulusan SMP juga bisa jadi menteri kelautan, seperti Bu Risma perempuan yang menutup gang dolly. Jadi Bu Tan Mei Hwa semoga bisa menjadikan Sidoarjo jauh lebih baik lagi.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau untuk saya nggak ada beda sih, semoga gak mengingkari janjinya itu aja sih.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya ini era wanita modern, jadi wanita sekarang tidak terpaku sama profesi yang mainstream, mungkin aja dia sudah punya kemampuan, mungkin partai politik juga melihat perempuan lebih menarik hati pemilih.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya tidak apa-apa soalnya kenapa, dari 100% diambil 30% di DPR atau dipolitik harus diisi oleh wanita.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Wanita ataupun laki-laki sama aja jadi pemimpin, asalkan mereka mampu melaksanakan tugasnya, baik wakilnya atau bukan yang penting bisa melaksanakan janji-janjinya.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Untuk saya sih g ada masalahnya dan tidak menutup kemungkinan perempuan bisa sangat baik memimpin di dunia politik dari pada laki-laki, udah itu aja sih.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Kalau menurut saya tidak masalah. Pertama, karena apa itu tidak bertentangan dengan undang-undang kita, bahwa undang-undang kita tidak menyebutkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, Bupati, atau Gubernur harus laki-laki. Kedua, saya rasa perempuan harus ranah politik karena mewakili rakyat, jadi butuh beberapa perempuan yang duduk sebagai pemimpin untuk mewakili aspirasi-aspirasi wanita, bayangkan kalau di isi laki-laki siapa yang akan mewakili suara perempuan, seperti itu aja sih.

RD : Selanjutnya...Apakah Tan Mei Hwa mempunyai kualitas dalam diri? dari Maulana.

P1 : Menurut saya Bu Tan Mei Hwa punya semua itu. Jadi gini ya dari segi agama mengatur dari segala bidang kehidupan kita mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, di agama kita sudah diatur, jadi ketika agama orang itu sudah bagus, InsyaAllah dia bisa mengatur segala bidang.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Ya menurut saya sependapat barusan, udah gitu aja.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Saya sendiri sebagai warga Sidoarjo menilai Tan Mei Hwa ini mendapat nilai positif, karena warga Sidoarjo ini kebanyakan beragama islam dan Beliau berdakwah menyebarkan ajaran islam, jadi banyak orang menilai Tan Mei Hwa memang baik dalam menyebarkan agama islam di Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Kalau menurut saya sih sangat berkualitas dan sangat bernilai positif, karena saya melihat tujuan dia, visi misinya dia untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan keadaan masyarakat Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya, ngelihat kualitasnya bagus sih. Orang yang religius pasti dasar atau pondasi yang kuat, jadi menurut sudut pandang agama saya, itu kualitasnya sudah bagus sih.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau menurut saya bagus-bagus aja sih mas, karena dari pencitraannya sudah kelihatan bagus.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau menurut saya terkait nilai positif, ya ada lah Bu Tan Mei Hwa, mulai dari dakwahnya itu sudah bagus, kalau kualitas saya belum lihat kualitasnya karena saya belum melihat progresnya kedepan.

RD : Selanjutnya...Bagaimana memandang Tan Mei Hwa seorang perempuan menjadi pemimpin? dari Dwi.

P2 : Kalau buat pemimpin perempuan, ya bagus-bagus aja sih, nggak masalah.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Untuk perempuan atau laki-laki itu sama aja, yang penting mereka itu dapat menjalankan janji-janjinya, tugas-tugasnya, jadi mereka itu tidak hanya mengumbar janji.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Kalau menurut saya sih gpp, masalahnya kan dia mencalon sebagai wakil bupati bukan yang bupati. Bukan salah kalau jadi bupati, tapi kurang efisien ditakutkan dia itu mentalnya kurang kuat, itu aja sih.

RD : Untuk Aida gimana?

P5 : Kalau menurut agama saya kan pemimpin lebih baik laki-laki, tapi kalau memang Beliau mempunyai kemampuan ya gpp juga, karena saya juga mendukung emansipasi wanita, ya kalau bisa seorang pemimpin itu laki-laki.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau wakil bupati ngga masalah, contohnya Bu Risma sebagai walikota, buktinya bisa memberantas gang dolly, tegas itu kan.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Ya untuk saya, cewek cowok tidak ada masalah, paling penting berani tegas, tindakannya berani, jangan asal janji tapi bukti paling penting. Karena kebanyakan pemimpin seperti Walikota, Bupati, Presiden, kebanyakan janji dan progres banyak tidak terlaksana.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Kalau menurut saya sih sebenarnya perempuan dan laki-laki ada bedanya, karena secara alamiah sudah sangat berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Kalau melihat perempuan sebagai seorang pemimpin, kita kembali lagi pada teori politik bahwa seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti apa yang dia perintahkan. Nah kalau yang memimpin adalah seorang perempuan, kurang di power yaitu dari uang dan agama tapi khususnya dari segi agama dimana perempuan diletakan tempat kedua setelah pria, tapi tidak ada salahnya kalau tidak ada laki-laki yang lebih baik dari perempuan itu

RD : Berikutnya...Apakah Tan Mei Hwa sebagai perempuan mampu mengatur kebijakan di pemeritahan? dari Fian.

P7 : Menurut saya mampu, seperti Bu Risma aja ya sebagai walikota aja banyak yang mau ditarik ke Presiden. Tan Mei Hwa sendiri menurut saya bisa karena mempunyai dasar niat dan tekad, mulai dari terjun langsung ke lapangan.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Harus bisa.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau saya rasa harus optimis sih, optimis kalau Bu Tan Mei Hwa pasti bisa karena ya itu tadi, contohnya Bu Risma nggak semua perempuan direndahkan, mungkin aja kalau orangnya tegas, ya pasti bisa, optimis aja intinya.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Ya menurut saya bisa, karena seharusnya perempuan cukup memenuhi program-program dan janji-janjinya itu, ntar kalau uda terpenuhi semua, dari para kaum lelaki bisa menilai, dan tidak seperti apa dia pikirkan.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau menurut saya sih kembali lagi pada Bu Tan Mei Hwa, kalau dia mempunyai tekad tinggi untuk menjadi pemimpin yang baik, apa salahnya dia mencoba dan membuktikan pada lelaki yang meremehkannya sebagai pemimpin, wanita juga mempunyai pemikiran pemimpin, bisa jadi lebih bisa diandalkan dari pada cara kepemimpinannya laki-laki.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Memang menurut kebanyakan orang kaum perempuan itu direndahkan, tapi tak selalu wanita itu lemah dan direndahkan, untuk jadi pemimpin perempuan harus bisa belajar bermental kuat untuk memimpin suatu daerah, mental kuat itu contohnya dari cibiran-cibiran orang, sisi negatif orang tersebut, dan seperti Bu Risma dapat dijadikan sebuah contoh, dimana Bu Risma tegas, berani mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, seperti menutup gang dolly itu kan dari jaman dahulu belum ada yang berani dan baru kali ini Bu Risma sebagai perempuan berani mengambil tegas dari tindakan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Ya menurut saya disini kita harus melihat pertama, dibedakan dulu manajer sama *leader*, kalau manajer kan perempuan banyak sekali, kita harus paham dulu manajer itu adalah orang yang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, tapi kalau *leader* dia harus bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau berperilaku sesuai yang diinginkan oleh pemimpin itu tadi, yang dipertanyakan disini tidak dilihat sebagai perempuan atau laki-laki, biar dia perempuan atau laki-laki tidak bisa mempengaruhi bawahannya untuk berperilaku sesuai keinginan pemimpin itu tadi, dia tidak bisa disebut pemimpin yang baik. Nah menurut saya perempuan ataupun laki-laki itu sama aja, yang penting dia bisa masuk mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti kebijakan yang dia putuskan, itu yang kita sebut sebagai pemimpin.

RD : Selanjutnya...Bagaimana memandang Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin? dari Fian.

P7 : Ya ngga masalah mas kalau menurutku.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Ngga sih, Tan Mei Hwa kan orang Cina dan mayoritas orang Sidoarjo orang Jawa, mungkin bisa berbaur dengan orang Jawa.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya ya ngga masalah, karena masyarakat Sidoarjo berpikiran terbuka, kita kan ngga bisa melihat dari etnisnya saja, ini orang Cina atau bukan dan saya yakin orang Sidoarjo ngga rasis ya, karena biasanya menurut tanggapan tetangga-tetangga saya kalau lihat dakwah Ibu Tan Mei Hwa juga yang dikomentari mengenai dakwahnya, bukan mengenai orang Cina atau Jawa.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya sih gpp, semboyan Negara kita aja Bhineka Tunggal Ika, jadi menurut saya ya gpp.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau menurut saya entah berbeda suku atau entah berbeda agama, asal Bu Tan Mei Hwa dapat mengikuti budaya kita di Indonesia, lebih tepatnya di Sidoarjo ini.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Kalau menurut saya ngga ada masalah, kalau pemimpin yang bukan pribumi seperti Ahok yang memimpin Jakarta, Beliau kan latar belakangnya bukan asli Jakarta dan orang Cina, tidak menutup kemungkinan orang tersebut layak memimpin suatu daerah. Negara ini Negara Pancasila, ngga harus asli pribumi, Indonesia kan luas dari Sabang sampai Merauke dan berbagai suku.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Mungkin di tahun 2015 ini bukan saatnya lagi kita melihat dia etnisnya apa, yang pasti dilihat Bu Tan Mei Hwa warga Negara Indonesia, sudah itu cukup dan tidak harus melihat dia etnis apa.

RD : Selanjutnya...Apakah sebuah keuntungan atau kerugian apabila terdapat pemimpin yang berbeda etnis? dari Fian.

P7 : Ya kalau dari keuntungan, keuntungan sih ya pasti ada tergantung dia mempinnya, *progresssnya* dia sebagai seorang pemimpin, terus kalau yang

aku takutkan sekarang banyak sekali dari luar bentuk sedikit-sedikit dari penjajahan apalagi datangnya MEA, seperti itu.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya tergantung dia mimpinya bagaimana, kan kita belum tau juga, tapi kalau dilihat selama ini berkaca dari pak Ahok mungkin saya rasa enggak ya, karena kalau sudah jadi pemimpin otomatis yang dipikir masyarakat majemuk, berbeda-beda budayanya, mungkin rasnya juga, pasti seorang pemimpin harus mikir warganya memang majemuk.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau aku sih kerugian, kan kebiasaan orang Cina itu kan pelit, jadi mudah-mudahan nggak pelit sama masyarakatnya.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya tidak ada keuntungannya, tetapi ada kerugian, kenapa kerugian sepengetahuan saya etnis Cina dalam pemilihan poling suara pencoblosan pada saat nanti mungkin kerugiannya, itu lebih memilih hanya yang sama seetnis dengan dia saja yang memilih.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau untuk kelebihan itu Beliau pernah berbagi ajaran agama kepada warga Sidoarjo tentunya dan untuk kerugiannya mungkin gini kan dia dari etnis cina, otomatis calon pemilihnya tidak dari cina juga ada yang asli dari warga Sidoarjo, mungkin kerugiannya yang asli warga Sidoarjo akan kalah poling dari yang ada etnis cinanya itu.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Kalau menurut pernyataan saya sih nggak jauh dari pernyataan temen-temen sebelumnya, mungkin sebagian warga Sidoarjo yang fanatik dengan daerahnya, mungkin mereka masih mikir-mikir buat milih lain etnis dan berpengaruh pada poling suara juga.

RD : Selanjutnya Maulana?

P1 : Kalau saya pribadi melihatnya seperti yang saya bilang tadi, bukan lagi kita melihat orang Jawa, orang Cina, atau orang mana, yang pasti dia warga Indonesia ya sudah. Tapi dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari masyarakat Sidoarjo masih membeda-bedakan seperti itu, dan itu menjadi salah satu

kendala yang mungkin bisa berarti atau tidak lihat kondisinya, tergantung Bu Tan Mei Hwa mensiasati, bagaimana merebut hati dari seseorang yang berbeda etnis itu.

RD : Pertanyaan selanjutnya ya...Apakah Tan Mei Hwa sebagai keturunan Tionghoa mempengaruhi loyalitas? dari Maulana.

P1 : Pendapat saya bahwa sudah bukan saatnya lagi kita membeda-bedakan, yang pasti ketika dia sudah menjadi berkomitmen untuk menjadi pemimpin di Sidoarjo dan pasti tujuan dia memakmurkan warga Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Tidak jauh dari pernyataan barusan, ya tidak ada perbedaan antara orang Jawa atau orang Cina yang penting itu hasil etos kerjanya dia.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau bicara loyalitas ya ga ada pengaruhnya, mau keturunan Cina atau keturunan Jawa yang penting sebagai seorang pemimpin harus mempunyai jiwa loyalitas tanpa batas, ya wes yang bagus sekalian bagus jangan setengah-setengah dalam menjalankannya, seperti itu.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Hmm kalau aku nggak sih.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau saya ya nggak pengaruh ya itu, orang Cina apa orang Jawa, kalau uda terpilih jadi pemimpin ya otomatis harus mikirin warganya seperti pendapat saya tadi.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Ya saya juga tidak, soalnya kenapa yang dia pimpin kan dari berbagai etnis, tidak hanya etnis Cina doang, jadi dia harus menyesuaikan dengan masyarakat yang dia pimpin tadi, dia harus adil dan nggak hanya mikirin minoritas etnis dia saja, udah sih itu aja.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Menurut saya sih tidak berpengaruh ya, karena tergantung dari cara berkepemimpinan dia, kalau diharapkan sih Bu Tan Mei Hwa itu dapat menjadi pemimpin yang netral, yang bisa memahami etnis Jawa.

RD : Oke selanjutnya...Bagaimana memandang etnis Tionghoa beragama muslim? dari Maulana.

P1 : Hmm menurut saya ya tidak ada masalah, karena itu tadi di Al-Quran, Allah berfirman Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, ada lak-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, semuanya berbeda-beda, jangankan etnis yang berbeda-beda, antar beragamapun Allah berfirman “untukmu agamamu, untukmu agamaku”, jadi toleransi sangat diajarkan di islam.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Kalau menurut saya nggak masalah jadi mualaf, entah itu dari orang kristen atau katholik ngga ada masalah.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau untuk aku sih, agama itu terserah ya entah agama apapun sama, karena agama islam itu menerima segala etnis dan dari etnis manapun dapat beragama islam, asalkan menjalani perintah-perintah agama islam.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Kalau untuk aku sih sah-sah saja.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau untuk saya ngga ada masalah.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Iya sama...hehe

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Ya ngga ada masalah sih. Karena banyak juga contohnya kristen banyak yang pindah ke islam, tapi terkadang kurang dalam mendalaminya.

RD : Selanjutnya...Apakah reputasinya sebagai pendakwah dapat dipercaya sebagai kekuatannya? dari Maulana.

P1 : Ketika Tan Mei Hwa bisa mempercayai Tuhan, InsyaAllah kita bisa mempercayai Tan Mei Hwa.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau masalah dipercaya sih, saya percaya aja siapa aja pemimpinnya asal bagus dan bertampak baik.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Kalau menurut saya InsyaAllah bisa, karena kita semua sama calon pemimpin cuma bisa berharap, karena kita belum tahu gimana mereka kerjanya.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Percaya.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya sih dapat dipercaya, tapi itu pandangan saya untuk sementara, semoga untuk kedepannya dan selanjutnya dapat seperti itu terus.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Untuk saat ini dapat dipercaya, untuk kedepannya dilihat nanti.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Ya saya percaya.

RD : Oke selanjutnya...Bagaimana memandang unsur keagamaan seperti pengajian digunakan untuk mendulang suara dalam politik? dari Maulana.

P1 : Hmm menurut saya sih tidak masalah, selama tidak merusak nilai-nilai agama itu, tidak merusak aqidah umat, hanya meyakinkan umat karena memiliki potensi sebagai wakil bupati tidak masalah.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Ya wajar-wajar aja, intinya jangan rasis itu aja.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Sebenarnya sih gpp, asalkan tujuannya positif dan tidak merugikan yang beragam islam.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya sih sah-sah saja, asalkan dia tetap bisa menghargai agama yang non-muslim itu tadi, kan cara dia berdakwah karena kebetulan dia islam, tapi dia harus tetap menghormati agama-agama lain.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Hmm menurut saya sih ngga juga ya, mungkin kebetulan Beliau itu seorang pendakwah, ya yang biasa dilakukan ya pengajian, kalau memang orang-orang memilih dia karena pengajian-pengajiannya, itu kan pendapat masing-masing

orang, tapi biasanya orang memilih karena dia tahu, kalau nggak kenal sama calonnya ngapain dipilih.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Saling menghargai.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Menurut saya sih gpp itu salah satu bentuk kampanye dari Tan Mei Hwa.

RD : Pertanyaan berikutnya...Apakah Tan Mei Hwa menggunakan kekayaan materi pribadi dalam politik? dari Maulana.

P1 : Didalam berpolitik itu ada sosial dan semuanya itu pasti uang, seperti pencitraan untuk bangun tim, setelah itu kendaraan partai, dan biaya kampanye. Jadi Bu Tan Mei Hwa pasti mengeluarkan uang juga meskipun yang banyak dari Pak Utsmannya.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Saya kira siapapun yang mencalonkan konsekuensinya pasti akan keluar biaya, seberapa besarnya itu yang tidak tahu.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Sudah pasti, apalagi biasanya banyak orang yang dibelakang yang memberikan bantuan yang berharap imbalan.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya sama lah pasti keluar dan paling tidak ada sumbangsih dari Pak Utsman yang lebih besar.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Keluar biaya saya rasa tidak banyak mungkin beberapa juta, tapi Pak Utsman pasti jelas paling besar dan bisa kita lihat dia dapat membayar mahar ke partai, saya rasa bukan rahasia lagi.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Bu Tan Mei Hwa sedikit ya, kalau dana dari donatur kurang tahu ada atau tidak.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau Tan Mei Hwa sendiri tidak mungkin mengeluarkan biaya, karena yang berkepentingan terlihat sekali Pak Utsmannya.

RD : Berikutnya...Apakah terdapat dukungan kepentingan partai politik untuk berkuasa atau mendapatkan keuntungan? dari Maulana.

P1 : Menurut saya tentu ada, dan menurut saya Pilkada ini ranah pesta partai politik, gini pandangan kita terhadap politik harus dirubah, politik ibarat pisau tergantung siapa yang menggunakan, ketika pisau itu digunakan untuk kebaikan pasti ada manfaatnya, tapi ketika digunakan untuk suatu keburukan pasti tidak baik.

RD : Ada potensi untuk mengambil keuntungan?

P1 : Untuk mengambil keuntungan dari partai politik ketika berkoalisi dengan partai politik lain untuk memenangkan dari satu calon itu tidak masalah, asalkan disitu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme didalamnya.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Ya saya rasa setiap partai politik yang mencalonkan calon pemimpin pasti berkeinginan juga untuk menang, karena otomatis dibiayai, jadi berharap bisa menang. Kita sih hanya berharap ketika sudah menang, berharap pemimpin nggak cuma dikendalikan oleh partai politiknya.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Kalau menurutku Bu Tan Mei Hwa mungkin ada lah bermain dengan partai politik, karena di Indonesia banyak sekali politik-politik yang curang.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kalau aku nggak tau sih.

RD : Selanjutnya Brenda?

P4 : Menurut saya ada kepentingan, soalnya sepengetahuan saya politik emang seperti itu, nggak mungkin gak ada kepentingan.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Kalau menurut saya sih rasanya ada, kan nggak mungkin berdiri sendiri dan koalisi dengan tim yang lain, mungkin kalau keuntungan seperti ini “Aku sudah membantu kamu, jadi kamu harus memberi untuk timbal balik kepada saya”, bisa jadi seperti itu.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Ya pasti ada, karena Pilkada sebagai ajang menonjolkan dirinya untuk berkuasa.

RD : Pertanyaan berikutnya...Apa yang menjadi kelemahan atau keterbatasan dari Tan Mei Hwa? dari Maulana.

P1 : Politik di Sidoarjo cukup berat, karena basis partai di Sidoarjo adalah PKB dan *incumbent* didalamnya, jadi kelemahannya dia belum dikenal benar seperti *incumbent*.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Saya setuju, kita tahu kan ladangnya Sidoarjo PKB, kedua Beliau dari minoritas sehingga kurang dilirik kalau di Sidoarjo tidak seperti di Jakarta.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Pencitraan yang dilakukan Bu Tan Mei Hwa masih terlalu pendek setidaknya dia butuh waktu 1 kali lagi pencalonan, kemudian pasangannya yang mempunyai reputasi yang baik.

RD : Selanjutnya Brenda

P4 : Bu Tan Mei Hwa sebenarnya kan sebagai penceramah, dia belum paham benar situasi politik Sidoarjo, sehingga tidak terlalu dikenal secara politik. Kemudian Pak Utsman punya masalah politik yang korupsi waktu ketua DPR, jadi masyarakat banyak yang kurang percaya.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Permasalahannya adalah karena *incumbent* yang kerjanya sudah 5 tahun, jadi sudah mulai duluan dikenal dan nyata sehingga mungkin butuh periode berikutnya ketika *incumbent* sudah tidak menjabat, saya rasa punya peluang besar mengingat yang wanita cuma Bu Tan Mei Hwa.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Kekurangan Bu Tan Mei mungkin masuk partai yang salah ya, jadi harusnya tidak masuk Partai Gerinda dan PKS karena banyak kontroversi.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Bu Tan Mei Hwa ini dikenalnya sebagai penceramah dan masyarakat masih meragukan karena belum pernah menjabat di pemerintahan sama sekali, jadi perlu bukti mungkin supaya masyarakat percaya.

RD : Pertanyaan terakhir...Apakah secara keseluruhan yang telah dilakukan Tan Mei Hwa di masyarakat ini konsisten? dari Maulana?

P1 : Berbicara masalah konsisten jelas tidak, dia sebagai pendakwah kemudian menjadi seorang politisi, perlu dipertanyakan apa yang Bu Tan Mei Hwa cari dalam politik, seperti yang dikatakan banyak orang bahwa politik itu bertolak belakang dengan dunia dakwahnya dan bisa menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi akan dakwahnya.

RD : Selanjutnya Dwi?

P2 : Bu Tan Mei Hwa konsisten, meskipun di politik dia tetap memperjuangkan wanita atau yang diajarkan agama, jadi sebenarnya tidak masalah masuk politik asalkan Bu Tan Mei Hwa tidak berubah.

RD : Selanjutnya Via?

P3 : Tidak konsisten karena seorang pendakwah ngapain harus ke politik dan membuang waktu dan tenaga saja, banyak hal lebih bermanfaat daripada masuk politik atau memperdalam lagi ilmu agamanya.

RD : Selanjutnya Brenda

P4 : Konsisten-konsisten aja sih, karena jamaahnya jumlahnya banyak dan banyak yang apresiasi dia sebagai pendakwah dan yang dilakukan untuk orang banyak, apalagi kalau dia jadi pemimpin.

RD : Selanjutnya Aida?

P5 : Karena belum terpilih menurut saya belum bisa dibilang konsisten, penilaian konsisten hanya sebatas saat dia berdakwah dan berkampanye aja.

RD : Selanjutnya Ria?

P6 : Seharusnya tidak usah lari ke politik karena politik itu kotor dan nantinya bisa dipengaruhi kawan-kawan partai untuk korupsi karena uang di pemerintahan sangat besar bisa menggiurkan mata siapapun tanpa terkecuali Bu Tan Mei Hwa.

RD : Selanjutnya Fian?

P7 : Ya tidak konsisten karena dia sebagai penceramah kok ingin berpindah sebagai pemimpin daerah kan aneh, ya semoga dia bisa membuktikan tetap konsisten dalam dunia politik dan agama.

RD : Oke terima kasih untuk pendapatnya, semoga bisa menjadi masukan untuk penelitian.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 : Sama-sama mas.



**TRANSKIP WAWANCARA
KELOMPOK U**

Interview Focus Group Discussion (FGD)

Moderator : Rama Dimas (Kode inisial: RD)

Informan 1 : Sukendar (Kode inisial: U1)

Informan 2 : Rizna (Kode inisial: U2)

Informan 3 : Edy Setyoboedi (Kode inisial: U3)

Informan 4 : Handoko (Kode inisial: U4)

Informan 5 : Dedi Kusuma Wardani (Kode inisial: U5)

Informan 6 : Dwi R. Indah Wahyuni (Kode inisial: U6)

Informan 7 : Mohammad Ramli (Kode inisial: U7)

Informan 8 : Bambang Hermutoko (Kode inisial: U8)

RD : Pertama saya mengucapkan terima kasih telah menghadiri dan mohon untuk memperkenalkan diri dahulu masing-masing.

U1 : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, langsung saja nama saya Sukendar, umur 48 tahun.

U2 : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, nama saya Riszna, umur 36 tahun.

U3 : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, nama saya Edy Setyoboedi, umur 47 tahun.

U4 : Yak, saya Handoko, umur 49 tahun.

U5 : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, perkenalkanlah saya Dedi Kusuma Wardani, umur 54 tahun.

U6 : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kenalkan nama saya Ibu Dwi Wahyuni, umur 51 tahun.

U7 : Perkenalkan nama saya Mohammad Ramli, kebetulan purnawirawan dari TNI AU, umur 67 tahun.

U8 : Perkenalkanlah nama saya Bambang Hermutoko, umur 68 tahun.

RD : Baik saya mulai ya, pertama dari Pak Sukendar...Bagaimana memandang karakter seorang Tan Mei Hwa?

U1 : Secara umum baik dan disukai masyarakat, setiap memberikan ceramah enak didengar, jadi pandangan-pandangannya kedepan jauh lebih baik.

RD : Baik yang lebih spesifik seperti apa?

U1 : Baik masalah agama ya dan kasih wawasan yang lebih, jadi ketika ada pengajian Bu Tan Mei Hwa di tempat saya berbondong-bondong dari mulut ke mulut banyak yang datang, cara dia berkomunikasi enak didengar dan yang mendengarkanpun juga tidak bosan.

RD : Kalau Ibu Rizna?

U2 : Kalau menurut saya orangnya enak sekali dalam penyampaian pengajiannya, dia tidak menbeda-bedakan golongan dan semua dapat diterima baik, kemudian penyampaiannya gaul dan enak dimana digolongan anak muda dapat diterima dan digolongan ibu-ibu juga dapat ditrerima. Trus satu yang saya suka lagi dari Beliau sama suaminya, sesibuk apapun dia selalu melayani suaminya, saya tahu dia pasti memasakkan suaminya, seperti kita tahu Beliau kan sibuk terus ya tapi dia selalu ingat melayani suaminya dan itu yang jarang dimiliki wanita karir.

RD : Berikutnya Pak Edy?

U3 : Terima kasih, sebenarnya secara jauh tidak mengenal Tan Mei Hwa. Saya mengenal sebatas dalam pengajian umum dan JTV, tetapi saya tidak pernah sekalipun hadir dalam pengajian karena saya sedikit berbeda pandangan dengan Tan Mei Hwa dalam konteks pengajian umum gimana caranya buat orang ketawa begitu saja. Masalah politik sangat disayangkan, namanya Tan Mei Hwa dibawa ke Sidoarjo untuk menjadi wakil bupati dengan Utsman itu hanya boneka saja. Saya sangat sesalkan sekali karena pengalaman politik saya dengan Tan Mei Hwa sangat janggal sekali, boleh dia jadi ulama tapi jangan diarahkan ke umara, dia disuruh ceramah tapi menjurus atau mengarah ke politik ini yang sangat disayangkan, apapun alasannya mereka seorang ulama dibawa ke umara jadinya seperti dipaksakan. Saya tidak tahu dengan Utsman gimana, kalau dia mau dijual disini kenapa tidak cari nilai jual yang sangat tinggi, taruklah dengan Pak Tjip mungkin bisa ya, dengan Pak Utsman ya

permisi walaupun mereka mantan orang PKB dan seorang Nahdlatul Ulama, dalam kontek Nahdlatul Ulama seperti apa.

RD : Berikutnya Pak Handoko?

U4 : Ya terima kasih, kalau saya melihat beberapa publik dia tampil baik di khalayak maupun non khalayak melalui visual di JTV dan radio Suara Surabaya yang saya dengar cukup menarik, karena dia model paradigma yang terbaru mengikuti perkembangan dan mengikuti kasus-kasus yang ada dengan *joke-joke* yang segar, yang gaul, yang anak muda, dan materi-materinya sangat baru sehingga sangat mengugah kaum perempuan, bahkan tidak melarang bagi bapak-bapak untuk berpoligami tetapi justru ibu-ibulah yang bagaimana cara bapak-bapak itu tidak boleh poligami, sebagai contoh pertama ibu harus pandai memasak, kedua ibu harus pandai berdandan, ketiga ibu harus pandai membuat anak yang enak, tentunya itu salah satu bahasa gaul. Saya sependapat dengan Bu Rizna tentunya, namun diluar itu dia tampil di Pilkada sepertinya belum saatnya seperti kata Pak Edy yaitu hal-hal seperti itu belum layak untuk saat ini, ya mungkin lebih pas penetrasi di ustadzah dulu, kalau Jawa Timur Tan Mei Hwa saya acungi jempol apalagi dia Tionghoa artinya unik sensasi sekali, namun tampil disini basisnya islami jadi presentasi orang Nahdlatul Ulama dipimpin oleh pimpinan orang perempuan sepertinya belum dibandingkan orang Surabaya mungkin tahun berikutnya dapat dipelajari.

RD : Kalau menurut Pak Dedi?

U5 : Kalau pendapat saya mengenai Tan Mei Hwa memang dia seorang Da'i, dia seorang pembina mental yang baik, jadi dia seorang figur yang baik didalam ceramah kemana-mana bahkan dia ke tingkat Jawa Timur, itu satu. Kedua dia punya yayasan yang namanya Azhara, Azhara itu menangani masalah kemasyarakatan, kemanusiaan, bakti sosial, terus kesehatan bagi lansia, sunatan masal, itu program rutin untuk satu tahunnya. Adanya itu dia untuk modal Pilkada maju ke calon kandidat sudah tidak lagi pencitraan, karena citra beliau ini sudah baik, dengan karna itu dia tidak perlu. Ketiga, masalah Pak Edy tadi masalah boneka ya, kalau saya kurang sependapat, karena di Indonesia ini demokrasi sangat mahal, untuk sosialisai, untuk ini untuk itu dan sebagainya, kemudian anda masuk di partai tingkat PAC harus punya duit, nah

dengan adanya itu saya kurang setuju Tan Mei Hwa sebagai boneka, dan sebenarnya Beliau ini sudah belajar ketika sebelumnya di partai PPP. Karena disini dimanfaatkan aja oleh oknum, di Indonesia ini untuk secara idealis kurang bagus buktinya sekarang tanpa diverifikasi bagus tetapi yang penting uangnya masuk walaupun orangnya mantan narapidana, sebetulnya kan harus dipertimbangkan dengan kredibilitas yang sangat tinggi. Sedangkan di Sidoarjo sendiri kota yang sangat religius yang rentan oleh agama, bahkan Beliau ini dekat dengan majelis zikir khususnya perempuan, sebetulnya dengan pasangan yang mumpuni, artinya dari partai politik pengusung ini juga selektif, daripada mantan narapidana ya yang lebih baik sedikit.

RD : Kalau Ibu Dwi?

U6 : Kalau selama ini yang saya ketahui ceramahnya Bu Tan Mei Hwa ini memang enak didengar, saya pernah lihat di JTV, tapi untuk karakternya Beliau saya kurang mengetahui. Kedua, Bu Tan Mei Hwa ini penempatan partainya kurang pas karena basisnya di Sidoarjo itu hijau, jadi rata-rata disini itu PKB, jadi kalau partai lain yang masuk kurang bisa.

RD : Kalau menurut Pak Ramli?

U7 : Sebetulnya saya belum pernah berhadapan langsung, cuma kalau dilihat sebagai penceramah atau ustadzah tentunya karakter yang baik. Namun sekarang dilihat dulu dari sudut pandang apa, apakah dia sebagai ustadzah untuk mencari rezeki atau kekayaan itu karakter sudah berbeda. Karena di dalam agama dijelaskan kalau agama sampai dijual, itu sudah tidak ada pahalanya, itu menurut pendapat saya. Jadi dilihat dulu sekarang dia mencalonkan sebagai wakil bupati niatnya apa dulu, kalau memang niatnya cari kekayaan tidak ada gunanya, berarti karakternya jelek. Makanya kita memilah-milah memilih orang dari karakter tergantung niatnya.

RD : Bagaimana menurut Pak Bambang?

U8 : Menggaris bawahi Pak Ramli tadi benar, tetapi sesuai dengan apa yang saya dengar dan sekali-sekali melihat ceramah di TV. Dia sebagai perempuan memang berani, dalam arti berani karena satu-satunya ustadzah dari etnis lain, ini dia sudah punya satu keberanian. Dia disebut ustad gaul iya memang, ustad ngakak memang dengan joke-jokenya, politik pengajian biasanya memang

seperti itu. Ada juga ustadzah yang dia selalu ingin geguyu, kalau tidak ada yang ketawa nggak ramai dan intinya kadang-kadang tidak masuk tetapi salah satunya bu Tan Mei Hwa ini cukup bagus secara pribadi.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar...Apakah mengetahui cara Tan Mei Hwa berkomunikasi dengan masyarakat?

U1 : Iya kalau melihat saat debat di JTV, sebenarnya kalau melihat gesturnya pada saat dia berkomunikasi, bagaimana dia ingin mengeluarkan ide-ide yang mungkin di kepalanya cukup banyak, tapi kalau sedang debat berarti ada lawannya pada saat itu Pak Gusman yakni lawan temannya dia. Kalau melihat dia sangat komunikatif, saya sebagai orang luar atau masyarakat biasa artinya yang dia presentasikan itu *messagenya* masuk, apa yang ingin dia sampaikan itu masuk, cuma kesempatan menyampaikannya itu yang kurang diberi waktu leluasa oleh Pak Utsman. Tetapi dia sebagai seorang ustadzah, saya kira dia memiliki komunikasi yang baik secara gestur dan komunikasinya bagus.

RD : Kalau menurut Bu Rizna?

U2 : Kalau melihat di TV sosok beliau itu komunikatif tanpa batas, seperti kalau kita melihat Ahok itu ceplas-ceplos ya, begitu ada pertanyaan ini langsung dijawab ada pertanyaan itu dijawab. Nah ini tidak ada batas, mau dimana enak-enak aja.

RD : Berikutnya Pak Edy?

U3 : Kalau secara pribadi saya tidak tahu, tapi kalau secara umum di TV jelas komunikasi baik karena ada manajemen dakwah itu tadi. Bagaimana seorang pendakwah membuat yang mendengarkan itu bisa enjoy bisa enak, kalau manajemen tidak dilakukan mungkin tidak laku seperti ini, disini kan hanya manajemen saja.

RD : Berikutnya Pak Handoko?

U4 : Kembali lagi sebagai ustadzah bagus sekali memang, dia punya program yang bagus, *planning kontroling* yang cukup bagus. Begitu tampil sebagai ustadzah tampil sangat menarik, orang-orang langsung ketawa, *joke-jokenya* keras, sehingga orang jarang yang mengantuk bahkan sampai ada orang disitu masih ingin terus dan ingin terus. Tapi begitu tampil di Pilkada sebagai calon wakil

bupati tentunya W2 ini tidak terlalu didengar oleh massa, biasanya W1nya. Dimana-mana calon W1 yang dikenal, seandainya datang calon W2 dapat waktu sisa saja, padahal calon W2 ini yang menarik dan ditunggu-tunggu, akhirnya tidak terlalu berpengaruh karena menjadi ban serep seandainya terjadi apa-apa, sehingga komunikasi tidak akan pernah sampai. Begitu dia sebagai ustadzah, dia sebagai komunikator menyampaikan pesan pada komunikan yang ingin berdialog interaktif maupun monolog langsung dari satu pihak dan diterima oleh pihak lain tanpa harus kembali responnya, itu kalau sebagai ustadzah bagus tapi begitu *timingnya* dibawa ke Pilkada sebagai W2 orang tidak terlalu mendengarkan karena *eventnya* sudah berbeda apalagi waktunya hanya sedikit, demikian.

RD : Berikutnya Pak Dedi?

U5 : Tan Mei Hwa memang untuk komunikasi bagus, itu sering diundang di tempat saya di jamaah ibu-ibu Al-Hidayah. Begitu mengetahui Beliau itu mencalonkan W2 disayangkan sama ibu-ibu, begitu bagus tapi sayangnya Pak Utsmannya seperti itu jadi jomplang. Walaupun dia komplain bahwa dia sudah bebas tapi namanya sudah mantan jadi sudah jelek, mohon maaf kalau ada yang tersinggung karena ini menyangkut masalah moral. Akhirnya ada timbul keragu-raguan, seumpunya pasangannya nilainya bagus mungkin suaranya akan terangkat. Sudah saya ceritakan diawal bahwa politik di Indonesia ini sulit karena semua serba uang, rekom pakai uang, jadi dia berdasarkan uang saja, walaupun jungkir balik yang penting sudah bayar. Sebetulnya kita belajarnya ditarik ke Amerika, memang kita Negara yang belum sejahtera seperti mereka, dalam tahap pembelajaran demokrasi.

RD : Kalau Bu Dwi?

U6 : Kalau Bu Tan Mei Hwa itu komunikasinya cukup bagus bisa membuat tertawa ibu-ibu, tetapi kalau untuk sebagai calon wakil bupati nampaknya memang kurang, kurangnya di calon bupatinya kurang pas. Jadi kalau komunikasinya memang bagus setahu saya di TV memang bagus, tetapi masyarakat Indonesia memang aneh, contohnya saya ikut caleg dua kali tetapi pandangan masyarakat itu selalu uang uang uang uang gitu, kalau mengadakan pertemuan kalau tidak ada uang itupun tidak ditanggapi, mungkin masyarakat

Indonesia kurang mampu atau gimana yang dipikirkan selalu uang aja. Selama dua kali itu hanya uang uang uang aja, walaupun jungkir balik setengah mati itu mas tidak berarti apalagi memberikan pengajian sudah tidak di tanggapi, mereka datang yang penting ada uang, itu masyarakat Indonesia yang sangat disayangkan.

RD : Kalau menurut Pak Ramli?

U7 : Ya terima kasih, saya simpel saja berhasilnya suatu misi kalau komunikasinya baik, cepat, lancar. Terutama misi pertempuran misalnya, nomor satu itu komunikasi, kalau komunikasinya tidak baik pasti tidak berhasil, hancur dengan musuh. Begitu juga misi untuk di Pilkada tidak berhasil berarti komunikasinya jelek, itu penilaian saya.

RD : Kalau menurut Pak Bambang?

U8 : Sebagai-bagusnya orang untuk di Sidoarjo biasanya kalau belum pribumi memang masih sulit. Sebelum tahun 1990an, saya mantan kepala desa, saya orang dari Tulungagung mencalonkan diri tanpa uang tetapi pencitraan kita sudah besar, sampai dulu pengurus kepala desa berkata ngapain kok mau dijajah sama orang pendatang. Jadi Tan Mei Hwa jelas secara umum itu bagus, cuma dalam Pilkada saya rasa masih kurang dan faktor tadi itu ngapain kok mau dijajah oleh pendatang.

RD : Pertanyaan ketiga...Hal apa yang paling dominan Tan Mei Hwa sampaikan ke masyarakat?

U1 : Dia kan dari kalangan perempuan secara naluriah dia pasti ingin meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan program mereka yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, peningkatan peran serta daripada wanita. Saya kira ini sesuatu yang alamiah, wajar-wajar saja karena kalau perempuan berpikinya naluriahnya ya perempuan yang disekitar kehidupannya dia. Jadi kalau melihat jargonnya juga sudah bagus dan di Sidoarjo peran dari wanita masih kurang optimal, jadi saya kira Tan Mei Hwa ini sesuatu tradisi baru yang dibutuhkan oleh Sidoarjo tapi *timing* dan *positioningnya* yang kurang tepat, artinya kalau tembakau itu enak, kopi itu enak kalau dijadikan satu tidak enak, kembali lagi Tan Mei Hwa sebagai suatu

aset dan berbicara aset berarti sesuatu kedepan butuh seorang Tan Mei Hwa. Bagaimanapun juga kita perlu orang-orang yang punya visioner kedepan, orang-orang yang lebih konsen kepada peningkatan dan peran serta dari pada perempuan. Melihat yang kecil saja misalkan sekolahan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak perempuannya, artinya mata rantai terbesar yang harus kita gerakkan adalah mata rantai yang paling banyak baru seterusnya dan seterusnya.

RD : Kalau menurut Bu Rizna?

U2 : Kalau dari Tan Mei Hwa karena *backgroundnya* sudah ustadzah, terus Beliau juga punya Azhara, jadi kalau melihat sosok Beliau itu dominannya sebagai konsultan, dia selalu mendengarkan dan selalu menjawab apa yang disampaikan.

RD : Berikutnya Pak Edy?

U3 : Ini kalau secara pribadi dominannya ustadzah papan atas gitu aja, kalau masalah politik dominannya hanya seorang perempuan di Sidoarjo.

RD : Kalau menurut Pak Handoko?

U4 : Kurang lebih demikian, tapi seandainya srikandi itu muncul yang dipasangkan tadi itu adalah srikandi yang berpasangan dengan orang yang basisnya banyak mungkin lebih pas meskipun dia W2, atau dia kembali lagi menjadi W1 meskipun pendukung partainya kecil mungkin disitu masih ada harapan karena peluang waktu untuk mendominasi itu ada, apalagi dia ada joke-joke dominan yang perlu diberikan pada kalayak di Sidoarjo khususnya muslimin. Nah itu disitu penting kelebihan dari ustadzah paling unik adalah di srikandinya, namun jangan lupa apakah srikandi ini dapat di tempatkan di Sidoarjo meskipun srikandi ini uniknya di tionghoanya, dia unik muslim ustadzahnya, namun apakah nilai jualnya disitu cocok dominan di Pilkadanya.

RD : Bagaimana kalau menurut Pak Dedi?

U5 : Dia itu untuk menumbuhkan semangat kaum ibu, bagaimana untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai dari rumah tangga. Makanya kenapa beliau ingin tahu politik dari situ, cuma sayangnya kemarin ini kurang bagus pasangannya itu. Dia sangat peduli mas, dia mengadakan bakti sosial setiap satu tahun rutin itu pertama. Kedua, pengobatan gratis termasuk

pengajian keliling kaum ibu-ibu, otomatis ibu-ibu terbangun adanya Tan Mei Hwa itu tadi. Jadi karena dakwahnya, memang dakwah membangun karakter mental secara islami, saya kira gitu.

RD : Kalau menurut Bu Dwi?

U6 : Singkat aja ya mas, dominannya di Tan Mei Hwa itu di perempuannya, mendidik ibu-ibu pandai memasak, dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi kurang pas pasangannya, tetapi kembali lagi untuk Sidoarjo itu memang kurang diminati, apalagi dari etnis Tionghoa karena Indonesia sendiri yang di ini kan kaum pribumi.

RD : Kalau menurut Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya, Tan Mei Hwa ini kan dari keturunan Tionghoa, ya yang paling dominan itu. Sehingga dia percaya diri pasti akan berhasil menjadi calon wakil bupati.

RD : Kalau menurut Pak Bambang?

U8 : Jadi saya rasa hampir 20 tahun ibu Tan Mei Hwa jadi ustadzah, dominannya memang lebih ke perempuan memang betul. Jadi itu untuk memperbaiki ibu-ibu, tapi untuk yang ke politik terus terang aja saya rasa belum waktunya, mungkin sudah waktunya tapi salah pasangan. Jadi saya kira masih ada peluang 5 tahun kemudian, mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang mindsetnya itu dirubah, bagaimana bisa lebih bagus.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar, kita ke pertanyaan berikutnya...Bagaimana memandang penampilan Tan Mei Hwa di ranah publik?

U1 : Secara penampilan *fashionable*, jadi enak dilihatlah, rapi dan kamera *facelah*, tetapi kembali lagi sebagai muslimah saya kira dia merupakan suatu tren baru dan fenomena baru di Jawa Timur. Sebenarnya kalau kita bicara Sidoarjo secara kultural beda dengan kota metropolis Surabaya, meskipun secara geografis kita hanya berjarak 1km, tetapi secara paradigma berpikir itu berbeda, beda jauh kita dengan Surabaya, kalau di Surabaya lebih egaliter ya, lebih individual, tapi apabila mereka di dasarkan pada poling lebih independen kalau di Surabaya, kalau di Sidoarjo pokoknya ada duitnya ya tak coblos, ini

agak susah. Saya kira dia punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin di Sidoarjo, hanya mungkin kalau diproyeksikan ke sana paling tidak dikenalkan secara luas pada publik. Nah ini bagian tim kampanyenya tentunya, mulai dari sedini mungkin harus *diupdate* sehingga dia lebih dikenal luas oleh masyarakat secara keseluruhan.

RD : Kalau menurut Bu Rizna?

U2 : Kalau saya lihat penampilannya Beliau itu apa adanya, saking apa adanya itu saya bertanya-tanya, loh ini kok W2 penampilannya seperti itu, harusnya kalau Beliau sudah berani menginjak ke ranah politik kan ada *prestige* pasti akan digunakan. Ya kalau saya lihat si seperti ustadzah gitu aja beda dengan Bu Risma atau Bu Lusi, pakaian-pakaian yang memang resmi untuk kampanye.

RD : Kalau menurut Pak Edy?

U3 : Memang secara pribadi saya kasih *applause* baik untuk Tan Mei Hwa yang jelas bisa merajut dan menjalin dengan kaum hawa ya, tetapi saya lihat memang penampilannya *low profile* dan saya dapat mengacungkan jempol masalah penampilan dengan ilmu dakwahnya ya. Jadi strategi dia sudah punya bagaimana cara berdakwah dan ilmu-ilmu dakwahnya masuk gitu, kalau secara politik tidak layak jual.

RD : Berikutnya menurut Pak Handoko?

U4 : Kalau pakaian sehari-hari sebagai ustadzah itu cukup sederhana, tidak terlalu mahal yang dipakai bahkan sebagai pemahaman penuturan kepada ibu-ibu, ibu-ibu tidak harus terlalu mewah pakaiannya artinya saat berjamaah mendengarkan pengajian dan sebagainya itu memberi contoh. Sikapnya okelah, peformancenya okelah, kapabilitinya untuk menarik perhatian orang okelah. Namun disini dia kurang penempatannya saja, artinya dia tampil sebagai ustadzah dia oke, namun ketika tampil sebagai *public figure* yang akan datang menjadi calon wakil bupati kalau jadi itu kurang menempatkannya, seakan-akan pakaian sehari-hari sebagai ustadzah dipakai sehingga kurang pas karena *public* disini kan sifatnya nasional bukan hanya satu agama tapi 5 agama plus 1 kepercayaan yang disitu ada, jadi ini kurang pas. Seharusnya beliaunya feminim dan elegan dipandang dari manapun enak seandainya jadi model bagus, jadi pramugari bagus, jadi apapun bagus, memang orangnya cantik.

RD : Kalau menurut Pak Dedi?

U5 : Kalau penampilan Beliau itu islami ya, karena dia itu *leadership* di majelis dzikirnya. Karena saya sendiri dari Humas Nur Salam punya SBY untuk Jawa Timur itu saya pantau terus, berapa masa yang dia punya, bagaimana cara dia kepemimpinannya, ternyata bagus dia sebagai *leadership*. Kenapa dia sangat sederhana, karena itu sesuai dengan tuntunan islami dan tuntutan Qur'an, jadi kalau diluar dia tidak perlu pakai yang bermewah-mewah, kalau ada suami dia baru berdandan itu perintah Qur'an. Jadi artinya dia itu memberi contoh kepada masyarakat khususnya di jamaahnya, itu saya kira.

RD : Kalau menurut Ibu Dwi sebagai perempuan bagaimana penampilannya?

U6 : Penampilan Bu Tan Mei Hwa itu sederhana ya, sangat sederhana. Tetapi kembali lagi ya untuk penampilan seorang calon wakil bupati sehendaknya harus modis ya, karena Sidoarjo kan heterogen juga ya, jadi yang modis harganya murah itu ada. Ya saya rasa sangat sederhana sekali.

RD : Kalau menurut Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya ya baguslah penampilannya, secara umum meskipun saya belum pernah melihat sendiri, dengan bukti dia laris untuk memberikan ceramah kan gitu, berarti penampilannya bagus. Namun belum tentu bagus dan belum tentu baik apabila nanti ketika jadi pimpinan kepala daerah, karena yang menilai masyarakat nanti itu penilaiannya lain lagi, tapi kalau untuk penceramah mungkin bagus karena dia laris kan.

RD : Kalau menurut Pak Bambang?

U8 : Masalah penampilan saya rasa ibu Tan Mei Hwa itu didunianya dunia ustadzah saya rasa cukup bagus ya, cukup baik dan sederhana memang, itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan kesederhaan untuk memberikan contoh. Orang jangan dilihat dari pakaiannya yang penting isinya, jadi baju ini saja sampai rumah saya lepas dan pakai kaos, tapi isinya Pak Bambang kan ya Pak Bambang gitu. Jadi seumpama saya insiyur, saya naik truk sama dengan kuli-kuli, kemudian saya hitung bangunan ambrol kan tidak mungkin. Kemudian hal-hal penampilan yang bersifat nasional, tadi seperti kata teman-teman bahwasanya harus modis dan harus nasional, ya saya terus terang aja

pribadi saya kalau melihat pakaian celana ya jangan terlalu ketat tetapi tetap islami pakai tudung, itu saya acungi jempol.

RD : Pertanyaan berikutnya untuk Pak Sukendar...Bagaimana memandang sikap yang dimiliki Tan Mei Hwa?

U1 : Jadi kalau dilihat dari sikap ya, Beliau ini kan mungkin kalau komputer sudah Core mungkin barang kali, tetapi waktu kalau kita melihat Pak Utsman itu di Pentium, jadi kayaknya lambat kan, lemot gitu lo. Artinya apa kalau dia seperti itu, secara responnya itu cepet, jadi kalau ada sesuatu itu buruan diselesaikan dan segera dijawab, ketika bersama *audience* dalam ceramah atau mungkin dalam tanya jawab dalam Pilkada dan saya rasa responsif ya, saya kira bagus itu karena modal pendakwah kan seperti itu, kalau pendakwahnya pasif atau lambat ya para jemaatnya tidur semua, saya kira sudah bagus.

RD : Kalau menurut Bu Rizna?

U2 : Cukup dua, cukup responsif dan komunikatif.

RD : Kalau menurut Pak Edy?

U3 : Sikapnya memang pintar mas, dia memberikan jawaban yang terbaik dan memberikan solusi yang terindah, itu karena seorang ustadzah dan paling tidak dia seorang panutan. Apapun alasannya meskipun sakit hati, dia di depan umum meberikan solusi yang terbaik, walaupun solusi dia sendiri tidak terselesaikan sehingga penempatan dia sangat bagus di dalam *public*, menurut saya begitu ya, karena bagaimanapun dia *public figure* jadi dalam kondisi apapun harus *smile*.

RD : Kalau menurut Pak Handoko?

U4 : Dibilang baik ya biasalah, namun dia mengemasnya cukup bagus dan cukup menarik artinya sesuai dengan motonya dia meringankan beban orang banyak, artinya dia punya *planning* tiap tahun seperti yang dikatan Pak Dedi tadi yaitu ada khitanan masal, ada bantuan kepada lanjut usia tiap tahun itu rutin. Jadi sikap yang ditanamkan pada masyarakat sudah ditanamkan jauh sebelumnya sosialisasi, memberikan *training* yang sifatnya gratis, pengajian-pengajian katakanlah ceramah yang mungkin di lain tempat dia komersil hanya kecil sekali. Kalau sikap di umum karena belum jadi saya tidak tahu, tapi sekedar

saat dia itu kampanye menjadi daya tarik sendiri karena begitu orang dimasukan ke komunikasinya dia, akhirnya memilih dia tetapi memang masih perlu waktu lama, saya kira sudah cukup demikian.

RD : Berikutnya Pak Dedi?

U5 : Kalau saya lihat sikap di jamaah majelis ya, itu dia sebagai figur seorang ibu, figur seorang teman, jadi dia berada di tengah-tengah jamaah. Terus untuk dia jiwa sosialnya sangat tinggi sekali karena dia sering menyantuni mas, walaupun diundang dalam pengajian tidak mau target itupun walaupun dia punya usaha masalah training hanya untuk ibadah bukan untuk apa-apa, dikumpulkan untuk ibadah itu aja.

RD : Kalau menurut Bu Dwi?

U6 : Sikapnya menarik karena Beliau seorang ustadzah, sebenarnya *leadershipnya* juga bagus.

RD : Kalau menurut Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya ya karena seorang ustadzah tentu sangat baik ya, karena dia sudah mendalami ilmu-ilmu agama paling tidak sosialisasi dengan masyarakat atau dengan siapa saja pasti akan baik.

RD : Kalau menurut Pak Bambang?

U8 : Untuk Bu Tan Mei Hwa memang sikapnya bagus, responsif, dan tidak membedakan. Jadi itu modal cukup untuk seorang ustadzah, tapi maaf saja mudah-mudahan itu dari hati nuraninya.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar, kita ke pertanyaan berikutnya...Bagaimana memandang pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki Tan Mei Hwa selama ini?

U1 : Saya kira pengetahuan mengenai agama dalam hal ini islam dia cukup memadai karena pertama dia seorang pendakwah otomatis dia menguasai kajian-kajian islam. Tetapi saya kira tidak berdiri disitu saja, artinya sebagai seorang pendakwah dia juga harus meng*update* ilmunya, ya karena perkembangan jaman ini kan begitu besar. Tetapi sebagai seorang politikus atau calon *leadership* di Sidoarjo dia butuh pembelajaran dan pendalaman mengenai karakter Sidoarjo ini kan penting, karena kita kalau memenangkan

sesuatu kan harus mengetahui A-Z apa yang kita menangkan itu, dan tidak kalah penting memilih teman itu jangan sampai keliru, kalau keliru jadi bahan tawaan, saya kira begitu.

RD : Kalau menurut Bu Rizna?

U2 : Kalau secara agama tidak perlu dipertanyakan, kalau pendidikannya bagus dia sarjana kan ya, gitu aja.

RD : Kalau menurut Pak Edy?

U3 : Saya kira secara pribadi Tan Mei Hwa memenuhi karena dia selalu *update*, jadi ada gerakan baru apapun akan dia pelajari, karena dia yakin harus menjadi *public figure* yang segalanya harus tahu. Jadi selalu saya lihat dari setiap ceramah dia akan selalu membawa hal yang berbeda karena dia sudah menyiapkan diri bahwa saya harus lebih pintar dari yang dibawah.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau pengetahuan yang mengarah ke ustadzah okelah, karena dia sarjana hukum yang mendalami keagamaan cukup lama mulai tahun 1993 sebagai ustadzah artinya sudah pandai pengetahuan yang dimiliki, menarik simpatik masyarakat oke sehingga pendukungnya banyak. Tapi seorang komunikator pembawaanya sebaik mungkin kalau mengenalnya kurang lama tidak jadi, sementara yang tidak harus sarjana mungkin mengenalnya lebih dulu akan jadi, apalagi yang diatasnya yang sudah menguasai materi.

RD : Berikutnya Pak Dedi?

U5 : Kompetensi secara umum itu memang tidak dilakukan karena sikapnya dia itu berdasarkan Qur'an dan Hadiz, bahkan ilmu dari segala ilmu berdasarkan Qur'an, mengupasnya dari situ, walaupun masalah kemaslahatan atau masalah apapun, jadi nggak perlu diragukan walaupun itu didalam politik.

RD : Mungkin ke Pak Ramli dulu tidak apa-apa?

U7 : Kalau menurut saya dari ilmu agamanya bagus ya, tapi belum tentu bagus untuk ilmu politik atau dipemerintahan. Karena di pemerintah itu memerlukan ilmu yang lain seperti ideologi politik sosial ekonomi budaya atau juga ilmu tata negaranya, karena tidak semudah itu jadi pimpinan daerah itu, itu menurut saya.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Sebagai ustadzah dia memang pengetahuannya harus banyak, saya rasa sampai saat ini cukup banyak dan saya lihat ditempat lain tidak selalu sama. Karena ada juga ustadzah yang selalu itu-itu saja, jadi dia mungkin hanya bisa dua atau tiga judul untuk dia ceramah. Tapi kalau saya rasa dia cukup dan berganti-ganti selalu *update*, nah untuk ilmu politik dan lain sebagainya saya rasa masih kurang.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau potensinya Ibu Tan Mei Hwa memang mumpuni ya karena Beliau seorang ustadzah, jadi wawasannya itu luas untuk mendidik kaum ibu-ibu dan mungkin dia selalu membaca, selalu menimba ilmu ya untuk masalah agama.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar...Bagaimana memandang Tan Mei Hwa sebagai seorang perempuan masuk ranah politik?

U1 : Saya kira sah-sah saja dan kalau kita melihat sejarah ada Ratu Shima dari Kalingga, saya kira ini menjadi motivasi ya bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan sesuatu yang ditabukan, walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih menganggap bahwa perempuan itu sebagai konco wingking ya, artinya bukan seorang yang didepan tapi tidak masalah saya kira. Banyak walikota dan bupati yang jadi kalangan perempuan ya, kita lihat Surabaya Bu Risma, kemudian ada Bupati dari Gunung Kidul Kediri Bu Dokter siapa itu. Tetapi kadang-kadang juga ada semacam dinasti ya, masyarakat kita masih menganggap mitologi itu seperti yang mistik itu masih melekat bahwa kalau orang tuanya pernah menjadi kepala desa misalkan, biasanya turun kepada tidak tahu anaknya, cucunya atau cicitnya, jadi silsilah seperti itu mau tidak mau masih ada. Jadi saya kira Ibu Tan Mei Hwa tidak masalah, sebagian masyarakat kita sudah bergeser pada sifatnya rasional, kalau memang dia baik memiliki kapasitas yang baik kenapa tidak.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Saya malah bangga perempuan itu menjadi pemimpin, contohnya seperti Bu Risma, dia itu seorang perempuan tegas dan wibawa di dalam lapangan. Saya inginkan itu perempuan seperti Bu Risma, dia punya semangat yang luar biasa

untuk masyarakat, untuk membangun. Jadi selama ini politisi-politisi untuk bisa menjadi suatu kedudukan dengan uang.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Saya dikira dijamin emansipasi tidak ada masalah, perempuan laki-laki pun saya kira sama tergantung integritasnya orangnya aja, bisa ndak dia memimpin gitu. Saya kira sah saja perempuan laki-laki dalam konteks kepemimpinan duniawi ya mas, dipimpin laki-laki gak becus ya percuma, mending dipimpin perempuan yang becus, tapi dipimpin perempuan tidak becus ya percuma. Saya kira di era emansipasi dimana kita bisa merebut peluang, laki perempuan tiada beda.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau saya lihat, dilihat dulu dimana basisnya Kota dan Kabupaten yang ditempati, artinya basis partai di Kota atau Kabupaten itu, kalau Nasional saya melihat okelah kalau perempuan itu, memang kalau dilihat secara Nasional dia jujur, dia menghindari korupsi kecil sehingga lebih banyak kuota laki-laki daripada perempuan meskipun perempuan ada. Makanya polwan-polwan itu ditaruh didalam ndak di luar, kalau ditaruh di luar jujur semua kena tilang semua, cuma ada kekurangannya kalau perempuan itu jadi orang nomer satu yang bisik-bisik suaminya sendiri dikuatirkan kebijakan itu melenceng tapi kalau yang jadi laki-laki istrinya tidak akan berani bisik-bisik, ya itu demikian.

RD : Bagaimana dengan Pak Dedi?

U5 : Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menyebutkan setiap warga Negara berhak mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tertulis, artinya semua warga Negara itu kedudukannya sama dalam hukum dan berpolitik, kan gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan bahwa ini tidak boleh berpolitik itu tidak ada, yang penting itu moral.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau perempuan sah-sah saja, asalkan mereka pandai, jujur, ulet dan semangat tinggi, tidak korupsi. Terima kasih.

RD : Berikutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya sah-sah saja karena tidak ada peraturan pemerintah atau Undang-Undang yang melarang untuk wanita sebagai pemimpin, cuma kalau

kita lihat dari sudut pandang agama kaum wanita tidak boleh jadi pemimpin, kan gitu, itu sudah tegas dijelaskan sampai rumah tangga saja tidak ada istri itu jadi pemimpin kecuali bapaknya, juga dalam sholat misalnya tidak ada perempuan jadi imam, dilarang itu sudah tegas, itu menurut pandangan saya. Mungkin pandangan pemerintah sah-sah saja karena tidak ada Undang-Undang yang melarang, tapi barangkali masyarakat Indonesia masih memilah-milah pertimbangan agama tadi, sehingga calon pimpinan wanita itu jarang yang jadi kalau kebetulan ada yang jadi itu udah top yang nomor satu.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Saya rasa baik-baik aja karena memang Undang-Undang tidak ada yang melarang, cuma bagaimana menyikapi dan interaktif dengan masyarakat karena kita punya hak jadi manusia. Jadi saya rasa tidak ada larangan, kalau kita melihat sudut pandang salah satu agama memang, saya jawabnya secara nasional ya jadi saya rasa tidak apa-apa jadi pimpinan juga tidak apa-apa, cuma jadi imam itu memang selama ini tidak bisa dalam Islam.

RD : Pertanyaan berikutnya...Apakah Tan Mei Hwa mempunyai kualitas dalam diri?

U1 : Sebenarnya seorang *public figure* ini memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan masyarakat biasa seperti saya, kalau dia seorang pendakwah otomatis dia menjadi *public figure* dan saya kira tinggal memoles ya, memoles itu pengertiannya bagaimana dia berkomunikasi dengan seluruh golongan karena kita tidak bisa menafikan di Indonesia ini sangat heterogen bukan hanya umat Islam saja tetapi masih ada banyak kalangan lain. Jadi saya kira sebagai seorang *public figure* atau seorang ustadzah dia memiliki khans yang besar menjadi seorang *leadership* dalam pengetahuan menduduki jabatan dalam strata struktur politik ya, mau jadi wakil bupati atau mau jadi bupati, walikota, dst. Tapi itu harus dibangun ya, bagaimana dia dikenal lebih oleh masyarakat, aktualisasinya lebih dipahami oleh masyarakat dimana dia akan dicalonkan.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau saya melihat beliau sangat berkualitas sekali mas, baik dari segi agama beliau seorang ustadzah, apalagi sudah jadi *public figure* terkenal di media dan di masyarakat langsung, jadi sangat berkualitas sekali.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Yang jelas punya tanda jempol besar untuk masalah kualitas dalam dia sebagai ustadzah. Tapi dalam segi politik sangat jauh, kalau dia saya lihat dari ceramahnya dia belum berani mengatakan bohongi itu benar, belum pernah mengatakan membual itu halal. Jadi kalau dari segi politik sangat bertolak belakang, maka saya tekankan dia seorang ulama yang mau ke umaroh karena di Indonesia kita tidak butuh orang yang kualitas butuhnya secara kuantitas, secara kuantitas dia sudah punya masanya banyak, kalau saya lihat dia kan setengah-setengah lari ke politik karena belum pernah tebar pesona dalam persoalan membual itu halal dalam segi politik itu sangat sulit. Makanya kualitas punya sangat besar dalam segi seorang ustadzah tapi secara politik belum mampu dia melakukan itu.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kualitas dalam Pilkada di W2 disini dia masih kalah jauh, dia paling sedikit karena dia nda banyak punya, artinya seorang maju dalam Pilkada atau Partai Politik ataupun berpolitik praktis ada beberapa hal, seperti harus ambisi itu satu, ambisi saja dia punya, pandai diplomasi dia kurang, tega sangat kurang yang lain tega, punya duit sama sekali tidak punya duit hanya kecil sekali itu yang paling ditentukan, pencitraan belum sama sekali dibirokrasi ndak, lembaga profesi nda, lembaga ormas ndak. Makanya saya klaim kualitasnya paling sedikit dibandingkan dengan yang lain, tunggu dulu mungkin ada waktunya perlu belajar lebih lama.

RD : Selanjutnya menurut Pak Dedi?

U5 : Memang saya selalu berdasar pada Qur'an dan Hadiz Islam, karena yang kita hadapi itu Pilkada yang ada di Sidoarjo yang sangat religius. Karena pada jamannya Pak Utsman jadi Ketua DPR, waktu penetapan atau pemilihan bupati atau kepala daerah itu kan langsung DPR, itu ada temen saya yang nonislam bahkan dia itu uangnya banyak tapi tersisihkan, kalau dipimpin orang ini

gimana rakyatnya kalau begini, itu perhitungan secara agama. Kalau sudah menginjak ke kualitas otomatis mas, kalau Qur'annya sudah bener dan bagus otomatis duniawi akan ikut, kan gitu. Kalau masalah kualitas pendidikan itu bisa dibina, suatu contoh anggota DPR tidak ada pembekalan apa-apa mas, kadang-kadang ada orang tidak tahu masalah politik bisa jadi, itu pembekalan namanya Pelatihan Bimtek, itu yang kasus Pak Utsman karena Pelatihan Bimtek itu dilatih sesuai dengan job-jobnya, contohnya pemerintahan masalah perpajakan dan sebagainya.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau Bu Tan Mei Hwa secara agama bagus ya, dia seorang *public figure*, seorang pendakwah, tetapi dalam hal politik masih kurang dibandingkan dengan kandidat lainnya masih kurang, untuk saat ini jangan dulu lah mungkin 10 tahun mendatang bisa kalau sekarang jangan dulu ya.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Saya rasa kualitasnya cukup tinggi ya dalam bidang moral agama tapi dalam bidang pemerintahan belum tentu karena dia belum mengalami bidang pemerintahan.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Kualitas di dalam dunianya cukup tapi kuantitasnya untuk ke arah politik masih jauh, kira-kira 5 tahun kemudian mungkin baru dia cari pasangan yang tepat.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar... Bagaimana memandang Tan Mei Hwa seorang perempuan menjadi pemimpin?

U1 : Saya kira kenapa tidak ya, bisa-bisa saja yang perlu digaris bawahi pemimpin kan bisa lahir dan diciptakan sesuai kebutuhan masyarakatnya kan gitu, yang terjadi di Sidoarjo ini kebetulan secara umum kepemimpinan Pak Saiful ini kan cukup baik artinya tidak ada sesuatu yang mendasari adanya perubahan yang radikal kecuali pemimpin kita maaf Pak Saifulilah ini terjadi sesuatu yang dia kena kasus korupsi atau lainnya itu pasti energi untuk menuju kesana akan lebih kuat. Jadi untuk seorang Tan Mei Hwa menjadi seorang pemimpin saya kira tidak apa-apa, saya kira tidak ada sesuatu aturan dalam Undang-Undang

yang mengharuskan seorang perempuan harus begini-begitu kan tidak, saya kira sama kedudukannya dalam hukum.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Saya sependapat bahwasanya pemimpin perempuan diciptakan juga tergantung sesuai situasi dan kondisi, mungkin kalau saya lihat Beliau karena Pak Ahok sebelumnya memimpin Jakarta akhirnya dimunculkan Tionghoa-Tionghoa selanjutnya, itu karena situasi dan kondisi saja kalau saya melihat, kalau secara ideologi kita sudah tidak membolehkan.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Saya kira kemungkinan besar Tan Mei Hwa bisa jadi pemimpin, cuma bagaimana manajemen politik dia lakukan dan bagaimana dia membangun pencitraan. Pertama, dia harus bisa membaca momentum, kalau saat ini saya lihat terlalu berat sangat ceroboh, makanya saya katakan tadi dijadikan boneka, kalau mungkin di tahun depan khusus Sidoarjo dimana Bapak Saiful tidak bisa menjabat lagi itu momentum yang sangat bagus, bagaimana dia memulai awal membangun pencitraan dari dasar bahwa yang namanya Tan Mei Hwa itu bisa dari segala manapun, dari pendidikan, dari hukum, dari budaya buat pencitraan bahwa dia itu dewa di Sidoarjo karena dewa itu kesempatannya lebih besar. Karena itu dibuat pencitraan yang bagus bagaimana dia bisa segalanya di Sidoarjo dan itu kemungkinan untuk 5 tahun kedepan, saya yakin bisa, kita lihat aturannya nggak usah ngomong masalah agama, dalam aturan Undang-Undang Dasar kita tidak menekankan seorang pemimpin perempuan nggak boleh kan nggak, kita real aja kan toh banyak pemimpin perempuan yang lebih sukses daripada pemimpin laki-laki ini dalam konteks kepemimpinan Negara.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Memang dalam Undang-Undang pecalegkan kuota perempuan 30%, pelan-pelan naik mungkin nanti bisa 40% - 50%, harapan saya demikian meskipun tidak ada Undang-Undang berapa persen, kesempatan Pilkada ini semuanya boleh mencalonkan. Saya katakan tadi memang perempuan itu jujur, tidak berani korupsi, dan tidak menyimpang, kekurangannya yang bisik-bisik bukan orang lain tetapi suaminya memang itu pun tertentu, dimanapun perempuan itu

saklak, di Sidoarjo demikian kalau boleh diganti yang sekarang diganti perempuan saja, diganti Tan Mei Hwa kalau boleh...hehehe

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Jujur kalau saya sebagai lelaki dipimpin oleh istri saya tidak mau kalau dirumah, tapi tidak salah kalau Beliau jadi pemimpin saya karena disitu ada DPR sebagai kontrol masyarakat, sebagai kontrol pemerintah, ada elemen-elemen lain, ada ormas, ada LSM, ada staf-staf ahli, jadi saya kira tidak ada permasalahan dalam pemerintahan sesuai kontrol. Kalau di rumah tangga saya jelas tidak mau dipimpin istri saya.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Memang Tan Mei Hwa sebagai pemimpin tidak masalah yang penting dia bisa menata Sidoarjo karena nanti kan ada *controlling* dari DPR dan sebagainya.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Menurut saya silahkan saja menjadi pemimpin, siapa aja boleh cuma jadi *leadership* itu memang sulit kalau di Birokrasi, kalau secara politis memang karena ini Pilkada pemimpin jadi panglima di daerah, yang penting bagaimana dia nanti dia memimpin ketika jadi pemimpin.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Ibu Tan Mei Hwa saya rasa tidak apa-apa jadi pemimpin, kenapa tidak boleh kan tidak ada Undang-Undangnya, ya itu tadi bagaimana nanti dia bisa memimpin atau tidak. Jadi niatnya itu memang untuk jadi pemimpin untuk memimpin rakyat dalam arti dia itu juga ibadah, jangan sampai nanti memimpin dengan harapan mencari rejeki yang lain, tidak bisa itu tidak boleh karena saya rasa tidak akan kesampaian, tapi ya itu untuk Sidoarjo paling tidak 5 tahun lagi.

RD : Pertanyaan berikutnya untuk Pak Sukendar...Apakah Tan Mei Hwa sebagai perempuan mampu mengatur kebijakan di Pemerintah?

U1 : Dalam pemerintahan itu kan ada bagiannya masing-masing ya, jadi pemimpin itu sebagai fungsi menejerial saja sebenarnya, pelaksanaanya ada di kepala dinas, SKPD-SKPD dan sebagainya. Jadi saya kira tidak masalah ya yang penting dia memiliki *leadership* yang baik.

RD : Selanjutnya Bu Rizna bagaimana?

U2 : Insyaallah mampu dilihat dari kemampuan Beliau, baik dari sisi religinya maupun politiknya, cuman tadi itu tinggal cara molesnya aja gimana.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Sangat mampu sekali karena seorang pemimpin dia tidak akan berpikir sendiri, walaupun toh dia tidak mempunyai dasar politik masih di *cover* tim staf ahli dan didukung oleh birokrasi-birokrasi, jadi cuma menjalankan saja dan hanya *leadershipnya* yang main, sangat mampu saya kira.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau selaku W2nya mampu, W2 kan istilahnya ban serep, tapi kalau dia didepan oh tidak mampu karena harus sangat baik sekali, artinya baik saja belum cukup tetapi harus ambisi, pandai diplomasi masih kurang, tega tidak punya sama sekali padahal di eksekutif tega harus dimiliki itu untuk kemenangan, oke itu aja.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Ya mampu, karena semua itu ada staf ahli ya. Karena di dalam pemerintahan itu dibagi *job description* masing-masing antara bupati dan wakil bupati, jadi artinya tidak sebagai ban serep kalau ban serep otomatis dia hanya sebagai boneka, kali ini ada jobnya tersendiri dalam pembagian tugas.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Insyaallah mampu karena disana ada staf-staf yang ahli ya jadi mampu.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau untuk saya masih sangsi kemampuannya karena seorang *leadership* harus menguasai keseluruhan meskipun dia punya staf ahli, karena kalau dia tidak punya kemampuan POLEKSOSBUD tadi sesuai dengan pimpinan di daerah itu nanti akan dibuat permainan sama orang pemerintah, sebagai *leadership* harus memang siap sebelum menjadi calon pimpinan di daerah itu, saya rasa itu.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Kalau untuk saat sekarang belum mampu karena tadi memang beberapa faktor harus punya dia, tapi kalau untuk dia belajar untuk 5 tahun mendatang mudah-mudahan bisa karena mungkin ilmu menejemennya kurang.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar lagi...Bagaimana memandang Tan Mei Hwa sebagai etnis Tionghoa menjadi pemimpin?

U1 : Sebenarnya untuk saat ini kita tidak bicara lagi etnis atau apa ya *in the right man in the right place* lah, saya kira kalau memang bagus punya *leadership* yang kuat saya kira kenapa tidak lah ya, saya kira saat ini banyak juga kok orang-orang etnis Tionghoa mereka justru memiliki semangat nasional yang besar ya, saya kira tidak ada masalah.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau saya mau jujur ya saya suka pribumi mas, yah karena kita Negara Indonesia..hahaha

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Untuk Sidoarjo memang untuk etnis sangat berpengaruh sekali kecuali dia mempunyai kelebihan yang sangat dan sangat luar biasa, kalau kelebihannya standart-standart saja sulit mas. Etnis apapun terjadi permisi ya saya islam apapun yang terjadi tidak mau dipimpin oleh agama lain kecuali dia punya kelebihan dalam kontek kerakyatan.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau saya setuju karena memang mungkin Ahok bagian dua tapi ini W2nya, ya toh. Sementara Ahok sudah berhasil karena biasanya tanpa tendensi, rata-rata Cina kan kaya punya duit begitu dia berkiprah nanti kembalinya mungkin tidak diperhitungkan, lain dengan kita-kita ini mau maju nanti harus kembali modal kan gitu, BEPnya berapa kan gitu kalau Cina sudah siap duitnya artinya bolehlah dia tampil untuk didepan.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Eee...Etnis Tionghoa selama dia udah masuk jadi warga Negara Indonesia hak dan kewajiban sama didalam hukum dan pemerintahan, ya itu aja.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau etnis Tionghoa saya kurang setuju ya kalau ada pribumi yang lebih pandai kenapa tidak milih pribumi yang lebih pandai. Saya lebih menyukai orang pribumi orang Indonesia asli dan mereka seorang muslim.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya tradisi masyarakat kita ini masih sulit untuk menerima seorang etnis ya, kita kan masih banyak calon pemimpin-pemimpin kita saja yang dipilih, sekian.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Untuk umum dulu ya saya rasa tidak ada masalah karena etnis apapun juga bisa jadi pemimpin apalagi dulu menurut sejarah bahwasanya wali-wali kita banyak yang dari etnis Cina, itu kan pemimpin juga tapi kalau untuk Sidoarjo saya rasa ini belum waktunya.

RD : Berikutnya Pak Sukendar...Apakah sebuah keuntungan atau kerugian apabila terdapat pemimpin berbeda etnis?

U1 : Dalam mengukur atau menjadi barometer keuntungan atau kerugian secara fisik ya, saya kira dihasilkan dari *outputnya* artinya kalau pemimpin memberikan kemaslahatan yang lebih besar kepada yang dipimpin saya kira itu lebih baik ya. Tapi sekali lagi memang primordial ini menjadi isu yang mengemuka sekarang ini tetapi saya kira dengan adanya persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara, saya kira tidak ada masalah. Jadi saya kira mengukur untung ruginya dari *outputnya* selama memimpin ya, artinya memberikan masalah nda kepada masyarakat, saya rasa begitu.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Saya setuju sama Pak Sukendar mas, semua itu tergantung *outputnya*. Kita bisa lihat Jakarta dipimpin oleh Ahok nggak banjir sekarang.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Keuntungan dan kerugian tergantung dari *output* pemimpin gitu lo, kalau mereka bisa untuk mensejahterahkan rakyat kenapa tidak.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Keuntungan dan kerugian saya belum tahu karena barometernya hanya satu Ahok saja, mungkin Ahok ini ada perubahan di Jakarta tapi Tionghoa yang lain belum tahu se-Indonesia selain Ahok, apakah yang lain berhasil dan untuk disini apakah bisa berhasil, demikian.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Selama dia memimpin sukses itu merupakan suatu keuntungan tapi yang di katakan oleh Pak Sukendar memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan yang sama dan hak yang sama dalam pemerintahan.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau untungnya bisa mensejahterakan masyarakat, ruginya masyarakat utama Sidoarjo memandang etnis Tionghoa tidak tertarik, saya pribadi kurang tertarik kalau ada pribumi kenapa sih nggak pilih pribumi yang lebih pandai dan yang lebih mumpuni ya.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Ini kan belum jadi wakil bupati ya, berarti belum tahu untung dan ruginya tapi sebelumnya sekilas kalau dia bisa memimpin masyarakat dengan baik saya rasa ada keuntungannya, tapi kalau ruginya saya rasa ketika tidak jadi pemimpin ruginya finansial saja.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Saya rasa pada umumnya kita tidak perlu skeptis bahwasanya etnis apa mau Arab, India atau Jawa dari mana saja saya rasa tidak apa-apa, otomatis nanti rakyat bisa menerima, itu hanya *mindset* mereka tidak mengingat sejarah atau jas merah siapa yang dulu pertama jadi orang islam kan orang Cina.

U1 : Boleh saya tambahkan lagi?

RD : Boleh silahkan pak.

U1 : Tapi sebenarnya ada keuntungannya mungkin kita sebagai sebuah Bangsa lebih berhasil, transformasi budaya berarti berhasil artinya kita sebagai Bangsa bisa lebih berbudaya karena bisa menerima hal yang berbeda, saya rasa begitu.

RD : Oke kalau begitu pertanyaan berikutnya...Apakah Tan Mei Hwa sebagai keturunan Tionghoa mempengaruhi loyalitas?

U1 : Saya kira mereka akan lebih pede di intern kaum Tionghoa sendiri karena ternyata mereka juga bisa diterima ini ditingkat bawah akan terjadi pembauran secara teori mungkin bisa tetapi nyatanya di lapangan masih ada skat-skat gitu. Tapi paling tidak mereka menjadi pemimpin, menjadikan mereka lebih percaya

diri bahwa mereka juga diterima sebagai keluarga besar Bangsa Indonesia, saya kira begitu.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau menurut saya sih berpengaruh sekali karena kalau kita berbicara masalah ekonomi mau tidak mau pengusaha kan banyak yang Tionghoa, ya sangat membangun sekali menurut saya.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Biasanya kalau dari kelompok minoritas jadi seorang pemimpin itu sangat perhatian, satu contoh kalau dari mereka dari luar islam menjadi mualaf kalau dia menjalankan ibadah semakin khusyuk. Kalau mereka jadi pemimpin di Sidoarjo mereka akan kehati-hatian jadi pandangan saya begitu, beda dengan kalangan islam yang biasa sembahyang tidak terlalu khusyuk dibandingkan mereka yang mualaf pasti khusyuk. Sama saya lihat Ahok, dia paham dia kelompok minoritas, dia akan menunjukkan yang terbaik, sama kalau Tan Mei Hwa akan memimpin Sidoarjo kalau jadi pemimpin, ya dia akan berpikir jauh dan dia akan mempertahankan minoritas bahwa minoritas yang terbaik di Sidoarjo.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Dia bisa nggak menjalankan kebijakan yang pendek artinya dalam 100 hari bahkan 1 tahun yang direalisasikan, katakanlah dari bekerja bisa tidak menjalankan, katakanlah bisa menjalankan 100 hari itu kebijakan regulasi terwujud mungkin menjadi hal terbaru lagi buat Tan Mei Hwa bisa jalan seutuhnya, itu jangka pendek. Untuk jangka panjangnya program-program yang harus dijalankan *planning, controlling, actuating* oleh Tan Mei Hwa, kalau selama itu bisa otomatis mempengaruhi kebawah dan lagi harus ada sensasi gebrakan yang baru, apa yang baru untuk Sidoarjo seperti Ahok kan gitu ada yang baru, demikian.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Kalau loyalitas jelas ya karena seorang pemimpin di Indonesia itu ada pedidikan khusus Lemhanas, sebelum dia terjun ke masyarakat pendidikan khusus Lemhanas, jadi mau nggak mau dia harus loyalitas, satu. Kedua, jelas kata mbak rizna tadi pengaruh sekali karena untuk masalah perekonomian

baiknya orang Cina yang lebih maju dari pada warga Negara kita. Nah masalah hak dan kewajiban itu sama karena sudah diatur dalam UUD, itu saya kira.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau Tan Mei Hwa menjadi pemimpin di Sidoarjo hendaknya mereka semakin berhati-hati ya, semakin jujur ya melaksanakan kebijaksanaan, kemungkinan kecil korupsi ya karena dia menunjukkan ke dunia luar maksudnya Sidoarjo khususnya bahwa mereka itu mampu dan mereka akan lebih berhati-hati dan jujur.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya kalau mereka sudah terpilih menjadi pemimpin di daerah saya rasa dia akan meningkatkan loyalitasnya kepada masyarakat, Bangsa, dan Tanah Air, karena dia akan berpikir secara luas lagi ingin menjadi pemimpin.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Terus terang saja selama 40 tahun lebih saya menjadi penduduk Sidoarjo sebetulnya saya juga pengen Sidoarjo dipimpin oleh etnis Cina, soalnya selama ini saya evaluasi ya gitu-gitu juga, sapa tahu lebih bagus, ini suara hati saya ya. Untung saja saya tidak mau jadi bupati, saya jadi bupati mungkin lain lagi ceritanya.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar untuk pertanyaan berikutnya...Bagaimana memandang etnis Tionghoa beragama muslim?

U1 : Sebagai seorang muslim saya tentu banggalah, berterima kasih sebagian kecil etnis Tionghoa termasuk Tan Mei Hwa bias memeluk agama islam, tapi masalahnya bukan berhenti disitu, sebenarnya kalau kita ingin menciptakan pemimpin tentu kita juga harus menyediakan ruang untuk itu. Bagaimana kita menyediakan ruang itu, artinya mulai dari pendidikan madrasah, sekolah-sekolah formal juga harus memungkinkan anak-anak didik kita menjadi calon pemimpin masa depan. Jadi saya berpikiran positif sajalah bahwa mereka memeluk islam tentu mereka dengan kesadaran sendiri ya, bukan karena dipaksa atau hal lain ya, saya kira begitu.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau saya pribadi mas sebagai orang islam ya sangat senang sekali apalagi minoritas mau masuk islam, cuma yang saya amati tuh gini setelah mereka mualaf terkesan eksklusif gitu lo, terkesan tidak bisa membaaur dengan kita padahal dia minoritas.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Itu sudah program saya, kalau di kristen ada kristenisasi saya sudah berprogram islamisasi, terus terang ini tapi selama 8 tahun baru 1 memasukkan orang kristen menjadi islam itu rejeki saya yang sangat besar, walaupun mereka berlomba-lomba masuk islam saya akan yang pertama memulainya, kalau Cina-Cina itu mau masuk islam aku danai mas, itu program saya.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau mualaf oke saya terima itu bagus, kalau tendensi ke politik juga oke boleh-boleh saja karena memang harus demikian, kan kita tidak dibatasi begitu mualaf tidak boleh asal pendukungnya ada kalau pendukungnya tidak ada ya tidak jadi gitu, demikian.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Ya baik-baik aja, Insyaallah bisa jadi pengaruh juga di masyarakat, bagaimanapun juga kalau menurut sejarah kewalian yang dikatakan sama Pak Bambang memang benar.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau seorang Tionghoa masuk muslim lebih menarik ya, lebih menyenangkan ya, biasanya Tionghoa masuk islam mereka lebih mempelajari dibandingkan pribumi, seorang pribumi islam banyak yang KTP tidak mempelajari secara detail ya, tapi kalau orang Tionghoa mempelajari secara detail dan mempelajari betul-betul islam itu.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya Tan Mei Hwa ini sudah terlambat masuk islam karena sejarah sunan-sunan dari sana, sunan ampel itu kan Tionghoa. Sebetulnya banyak orang Tionghoa terdahulu tapi tidak tampil dan tidak kelihatan di masyarakat, kalau tampilnya Tan Mei Hwa ini barusan saja.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Saya rasa kita harus berterima kasih ya kalau ada etnis Cina atau mungkin agama lain yang masuk islam, saya rasa kita sebagai umat islam juga harus senang terima dengan bagus, jangan terus dipilah-pilahkan dari dulu-dulu kita kan tidak tahu nenek moyang kita etnis Cina kan tidak tahu. Jadi jangan membedakanlah, itu istri saya dari Gunung Jati jadi Cina juga anak saya, apalagi ada yang bilang dipilah-pilahkan dari Cengho itu kan hanya sebuah nama aja, apa arti sebuah nama.

RD : Oke pak berlanjut ke pertanyaan berikutnya...Apakah reputasi sebagai pendakwah dapat dipercaya?

U1 : Saya kira dia mau pendakwah mau apapun, kalau elektabilitas bagus mereka akan memilih, soal percaya dan tidak percaya saya kira nomor sekian, memang ada nilai-nilai itu pasti diminta oleh masyarakat, tetapi bahwa seorang pendakwah apakah bisa dipercaya saya kira relatif, kalau hubungannya sama Pilkada bagaimana elektabilitasnya bagus tidak, kalau jelek pasti tidak ada yang milih, mau gelarnya haji mau siapapun tidak akan memilih.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Idem.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Percaya atau tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing mas, jadi saya tidak akan kemana-mana tapi saya akan ada dimana-mana, akhirnya jatuhnya dimana-mana tetap kembali ke pribadi.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau menurut saya dapat dipercaya karena bisa nuturi orang apalagi nuturi diri sendiri, sudah keliatan suri tauladannya, otomatis sebelum dia tampil pasti sudah ada yang memilih, ustadzah itu sebagai pinutur memberikan wawasan yang baik, otomatis kalau jadi lebih baik dari itu.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Idem sama Pak Handoko, artinya di dalam hal dakwah ini sangat pengaruh sekali karena langsung hubungan dengan sosial masyarakat.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau saya sih belum tentu ya, mereka bisa menasehati orang lain tetapi belum tentu mereka melaksanakan, saya ambil contoh Aa Gym dulu pada waktu ceramah selalu menentang poligami ternyata dia melakukan sendiri poligami.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau seorang pendakwah seharusnya kita percaya, tapi kalau ada contoh seperti menteri agama tetap korupsi sama saja, tergantung dari manusianya saja tidak ada hubungannya pendakwah karena maju mundurnya iman itu setiap saat berbeda.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Kalau memang dia berkata dalam berdakwah sesuai dengan perbuatannya tidak masalah, tapi kadang-kadang banyak omong tidak bisa menjalankan. Saya rasa korelatif saja bagaimana dirinya pribadi saja.

RD : Saya kembalikan ke Pak Sukendar, pertanyaan berikutnya pak...Bagaimana memandang unsur keagamaan seperti pengajian digunakan untuk mendulang suara dalam politik?

U1 : Saya kira di Jawa Timur bahkan di Indonesia, simbol-simbol agama atau kegiatan-kegiatan agama memberikan energi yang cukup kuat ya untuk mendulang suara, saya kira oke tidak apa-apa.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Sah-sah saja tidak apa-apa, karena melihat sosok Beliau lagi memang awalnya sudah ustadzah kalau mau ke dunia politik udah tinggal ngelanjutin aja.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Yah sah-sah saja mas, paling tidak dalam politik bagaimana yang halal menjadi haram dan yang haram jadi halal.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kalau menurut saya baik, itu memang salah satu cara apalagi akademisnya dari sarjana hukum, sarjana hukum kan melenceng jadi lurus dan lurus menjadi melenceng tergantung dari argumentasinya dan pasalnya tapi harus jujur dan benar bukan karena uang.

RD : Selanjutnya Pak Dedi

U5 : Tidak ada aturan melarang berkampanye dalam agama, apa ada aturan di UU politik mengatur, karena masanya dia itu dari pengajian yang lebih efektif, kalau misalkan dilarang bagaimana dia bisa mencari masa seperti itu, disamping itu dia bisa mengarahkan secara agama terhadap konsituen.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Okelah tidak apa-apa ya, karena berpolitik itu melalui agama dikarenakan mayoritas agama masyarakat Indonesia agama muslim, jadi sah-sah aja kalau melalui pengajian dan sebagainya karena di pengajian ibu-ibu yang banyak, jadi pendekatan melalui ibu-ibu.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Nggak masalah menurut saya, karena untuk kemaslahatan umat tidak apa-apa.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Saya rasa tidak masalah ya, karena jamannya sekarang itu begitu, mungkin caranya itu untuk ngiming-ngimingi doktrinnya selama ini lewat itu, kalau tidak lewat itu sulit juga karena *mindset* penduduk kita seperti jaman dulu kalau nyoblos ini masuk surga hahaha.

RD : Saya kembalikan lagi ke Pak Sukendar, pertanyaan berikutnya pak... Apakah Tan Mei Hwa menggunakan kekayaan materi pribadi dalam politik?

U1 : Saya kira siapapun ya ketika mencalonkan konsekuensinya pasti dia akan keluar biaya, tentang seberapa besarnya itu yang kita tidak tahu, jadi saya kira ya pastilah.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Ya jelas mas itu sudah pasti, berbicara politik itu pasti ada orang yang dibelakang tapi kalau kekayaan pribadi pasti juga ikut.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Saya amati satu pasti keluar dari pribadi, kedua paling tidak ada sumbangsih dari jamaah tapi yang jelas keluar terbanyak dari Pak Utsman.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Kali ini saya sependat dengan Pak Edy, sebetulnya paling sedikit kekayaannya diantara beberapa kandidat, dia tidak punya uang dan tidak terlalu ambisi, makanya dia tidak mau tega dan tidak pandai diplomasi, karena yang perlu disini Pak Utsman sama partainya, partainya yang mengarahkan pakai inilah sementara partai ingin juga dilamar dapat duit sehingga tidak mengeluarkan uang, sementara vander tidak punya Bu Ustadzah ini hanya Pak Utsman pribadi.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Didalam berpolitik itu ada modal dua, satu sosial dan kedua uang. Semua itu karena kepentingan, di Indonesia ini sudah salah kapra mas, sudah nabrak norma-norma Pancasila, sekarang bayangkan untuk Pilkada pencitraan aja sudah berapa untuk bangun timnya dia, setelah itu kendaraan partai *backup*-an, belum lagi biaya kampanye, karena ini dibelakang ada pendana-pendana yang tidak kelihatan atau siluman orientasinya proyek, itu yang harus diketahui masyarakat, masyarakat itu dibodohi. Kalau dari Pak Utsmannya sendiri mungkin sudah, saya yakin mulai dulu dia kelebihan suara apalagi dia mantan napi, jadi di dalam pemerintahan itu ada celah-eelah untuk mendapatkan keuangan atau dana cuma tidak dimengerti oleh masyarakat, suatu contoh perijinan-perijinan retail, sebenarnya kalau mau dikawal kita jauh lebih baik dari sekarang.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau dana dari Bu Tan Mei Hwa sedikit ya, kalau dana dari donatur kurang tahu ya apa ada atau tidak, yang lebih dominan kan W1nya, jadi rasanya Bu Tan Mei Hwa hanya pelengkap penderita saja.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya sebelum mencalonkan diri saya rasa sudah ada penyandang-penyandang dana yang mendukung dia, kalau Tan Mei Hwa sendiri tidak mungkin mengeluarkan biaya.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Tan Mei Hwa keluar biaya saya rasa tidak banyak hanya beberapa juta kemungkinan, tapi jelas dana itu dikumpulkan oleh W1 yang didapat dari

donatur-donatur yang punya keinginan kalau jadi bupati dapat proyek dan lain sebagainya, itu saya rasa bukan rahasia lagi.

RD : Pertanyaan berikutnya...Apakah terdapat dukungan kepentingan partai politik untuk berkuasa atau mendapatkan keuntungan?

U1 : Otomatis, artinya politik itu kan seni menguasai orang atau sesuatu, jadi niscaya suatu hal yang sangat tidak mungkin Partai Gerinda dan PKS ini tanpa tendensi mengusung Tan Mei Hwa sama Pak Utsman ya, tentu ada tendensi itu, otomatis dengan calonnya jadi diharapkan paling tidak itu menjadi lumbungnya mereka dan ATMnya mereka.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Saya simpel saja mas, politik itu adalah kekuasaan.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Ya mas intinya politik itu kekuasaan, bagaimana cara memilih calonnya itu karena tidak ada pilihan lagi yang layak jual di Partai Gerinda dan PKS ya Tan Mei Hwa aja.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Memang dapat dukungan dan kekuasaan tentunya itupun kalau jadi, paling tidak dua partai kecil ini termasuk dukungan dan kekuasaan karena dia yang menikmati meskipun tahu persis pasti tidak jadi, harusnya dua orang ini pandai perkiraan tidak jadi tidak harus beli partai nanti ditunggu incumbent turun, harusnya dia riset dulu satu Indonesia kira-kira berapa persen incumbent yang turun dalam dua periode, karena di Partai pasti beli kavling sekian harganya, seperti itu.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Jadi intinya sangat-sangat menguntungkan partai pengusung, kalau tidak jadi dia sudah dapat duit untuk rekom tadi apalagi sudah jadi, itupun kadang-kadang dia jual beli kursi, kadang-kadang dia ada proyek apa sama kekuasaan eksekutif dia yang borong, itu karena disini ada kepentingan kekuasaan intinya dari situ mas, jadi tidak dipungkiri lagi di dalamnya ada unsur-unsur koruptor sudah.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Yang diuntungkan adalah parpolnya ya, sebenarnya Pak Utsman itu harus meneliti selama incumbent itu mencalonkan tidak bakalan bisa jadi, selama ini saya amati kalau *incumbent* mencalonkannya yang ke-2 pasti jadi, karena incumbent itu yang utama dia udah ada modal, yang kedua dia sudah tahu celah-celahnya, arah-arahnya kampanye kemana sudah tahu arahnya jelas terarah, tetapi kalau calon yang baru ini mereka belum tahu arahnya pos-pos mana yang harus dibuat kampanye dan lagi dananya kurang bagus.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Kalau menurut saya pengusung itu jelas mencari keuntungan, sebelum pendaftaran aja sudah mencari keuntungan apalagi setelah jadi.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Jadi inilah akibat dari politik praktis, sebetulnya Tan Mei Hwa itu kasian ya meskipun dia tidak rugi tapi dia sudah dipakai alat, sebenarnya kedua partai tersebut sudah tahu bahwasanya tidak akan jadi, memang dibalik tangan itu pasti ada, jadi pasti ada mengambil keuntungan, tapi Tan Mei Hwa ada untungnya dimana dia jadi tahu seluk beluk di dalam partai dan nanti untuk dia dakwah dari pengalamannya.

RD : Kita ke pertanyaan berikutnya...Apa yang menjadi kelemahan atau keterbatasan dari Tan Mei Hwa?

U1 : Saya kira dia sebagai pendatang baru dalam politik di Sidoarjo cukup berat, dia bukan dari Partai Politik artinya bukan aktivis parpol sehingga masyarakat umum jarang yang tahu. Jadi kelemahannya yang pertama dia belum dikenal sebagai kader parpol walaupun itu bukan jaminan tapi paling tidak itu, kedua dia hanya dikenal sebagai seorang pendakwah belum menjadi aktivis yang memperjuangkan sesuatu misalnya memperjuangkan lumpur lapindo bisa berhasil, elektabilitasnya pasti tidak rendah saya kira begitu.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau saya lihat itu Beliau salah tempat ini, kita tahu kan ladangnya Sidoarjo PKB, kedua Beliau dari minoritas trus bukan politisi ulung, ketiga namanya kurang tenar sepak terjangnya belum sempet kebaca.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Satu, tebar pesona dan pencitraan yang dilakukan oleh Tan Mei Hwa sangat dangkal sekali setidaknya dia butuh waktu 3 tahun untuk tebar pesona dan pencitraan. Kedua, dia tidak menguasai medan Sidoarjo. Ketiga, adalah finansial sangat minim sekali.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Hampir sama dengan Pak Edy tapi tidak semuanya. Pertama, memang kurang pamor dan kedua mudah dirayu, karena dia belum menguasai medan sehingga mudah dirayu Pak Utsman dan partai tentunya sehingga dia masuk ke dalam lubang politik. Lantas yang ketiga, seharusnya melalui Caleg dulu baru W2, jangan tanpa Caleg langsung ke atas. Keempat, yang paling fatal tidak menunggu *incumbent* turun.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Hmm masalah pencitraan ya, tadi menurut rekan-rekan menurut saya sudah bagus ya karena sudah tenar di JTV sampai Jawa Timur, apalagi dia sudah melangkah ke bhakti sosial setiap tahunnya, belum lagi mendanai masalah kesehatan lansia itu sudah cukup baik namanya, otomatis pencitraan sudah terbangun sudah lama, karena yang merugikan dia itu pendampingnya artinya dari Pak Utsman sendiri yang mantan narapidana. Berikutnya merasa rugi karena adanya *incumbent* yang kerjanya sudah 5 tahun, jadi dia sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, saya sudah mengetahui 3 tahun yang lalu *incumbent* itu sudah turun ke bawah otomatis dia menang *start*.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Keterbatasannya yaitu Ibu Tan Mei Hwa tidak mempunyai kendaraan politik, tebar pesonanya kurang bagus, dia kalau masuk di W2 termasuk masuk ke dalam lubang buaya maksudnya di Sidoarjo rata-rata pendukungnya pendukung hijau semuanya terutama di daerah tambak-tambak itu PKB semua, nah kebetulan *incumbent* itu dari Ketua DPC PKB kalau tidak salah, jadi otomatis umatnya memilih *incumbent*. Jadi Ibu Tan Mei Hwa masuk ke dalam lubang buaya dan tidak tahu kendaraan politik mana yang bagus dan dia dipilih oleh Partai Gerinda dan PKS kurang bagus dan lagi pendampingnya kurang bagus lagi.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Tan Mei Hwa ini dikenalnya sebagai penceramah ya dan masyarakat masih meragukan kepemimpinannya dia karena dia hanya seorang penceramah.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Seperti tadi Bapak Ramli bahwasanya ternyata sebagai penceramah, dia belum mengetahui atau paham benar situasi politik Sidoarjo, mungkin dia di TV atau dimana mungkin terkenal tapi Sidoarjo lain. Kemudian nomor duanya, mungkin dia kurang pendukung dalam masalah politik, jadi dia belum tahu masuk kamar mana, dia salah kamar aja dia. Saya harapkan tadi ada etnis lain yang bisa jadi penguasa Sidoarjo mudah-mudahan 5 tahun mendatang.

RD : Pertanyaan terakhir mulai dari Pak Sukendar...Apakah secara keseluruhan yang telah dilakukan Tan Mei Hwa di masyarakat ini konsisten?

U1 : Saya kira berbicara masalah konsisten jelas dia tidak konsisten, dia posisinya sebagai pendakwah kemudian melompat menjadi seorang politisi atau menjadi seorang wakil bupati, artinya dalam hidup ini perlu ada semacam tujuan kalau dia lompat begitu perlu dipertanyakan kealimannya beliau, seperti yang dikatakan rekan-rekan sebaiknya seorang ustazah komunitasnya seperti itu, akan lebih baik seperti itu daripada terjun ke dunia politik karena pasti akan banyak mudharatnya kira-kira begitu.

RD : Selanjutnya Bu Rizna?

U2 : Kalau Beliau dalam hal ustazah saya amati Beliau konsisten, bagaimana dia melayani suami dan bagaimana dia posisi seorang istri terhadap suaminya, itu selalu diberitakan tapi kalau dalam seperti SPP gratis dan lain sebagainya orang belum menjabat apanya yang konsisten.

RD : Selanjutnya Pak Edy?

U3 : Tidak konsisten karena dia seorang ulama sudah ulama saja tidak perlu lari ke politik, sudah terima kasih.

RD : Selanjutnya Pak Handoko?

U4 : Mungkin dia belajar untuk konsisten jadi saya belum bisa memberikan nilai, tapi kalau dia jadi konsisten tetapi karena belum jadi masih belum bisa

membentuk apakah dia konsisten atau tidak. Tapi yang jelas kalayak menilai dari jamaahnya banyak lintas media masa menampungnya dengan gratis yang seharusnya iklan bertarif, itu sudah menunjukkan konsisten kan tapi mungkin masih perlu belajar di politik.

RD : Selanjutnya Pak Dedi?

U5 : Karena belum pernah merasakan W2 ya jadi bagaimana kita bisa menilai Beliau itu konsisten.

RD : Selanjutnya Bu Dwi?

U6 : Kalau menurut saya pribadi Bu Tan Mei Hwa tidak konsisten, Beliau seorang pendakwah seharusnya berdakwah aja tidak usah lari ke politik, trus tujuannya itu apa ke W2, tujuannya mencari keuntungan atau bagaimana, kalau dia sudah dikatakan ustadzah yang mumpuni, terkenal dan sering dakwah di TV seharusnya tidak usah lari ke kancah politik karena politik itu kotor sekali.

RD : Selanjutnya Pak Ramli?

U7 : Ya tidak konsisten karena dia sebagai penceramah kok ingin berpindah sebagai pemimpin daerah, saya rasa begitu.

RD : Selanjutnya Pak Bambang?

U8 : Maaf ini mungkin lain daripada kawan-kawan, permasalahan dari Bu Tan Mei Hwa dari pendakwah kok masuk politik, saya rasa tidak ada masalah cuma belum beruntung saja, soalnya kalau pendakwah tetap jadi pendakwah susah juga, sekarang apa bedanya pendakwah dan selebritis atau pelawak toh mereka ada yang masuk juga jadi nda masalah, ini jangan mendikotomikan. Saya rasa kita tidak boleh menghakimi bahwasanya pendakwah tetap menjadi pendakwah, kalau begitu pelawak jadi pelawak aja terus, selebritis jadi selebritis aja, sapa tahu namanya nasib dari Tuhan, jadi saya kira konsisten saja.

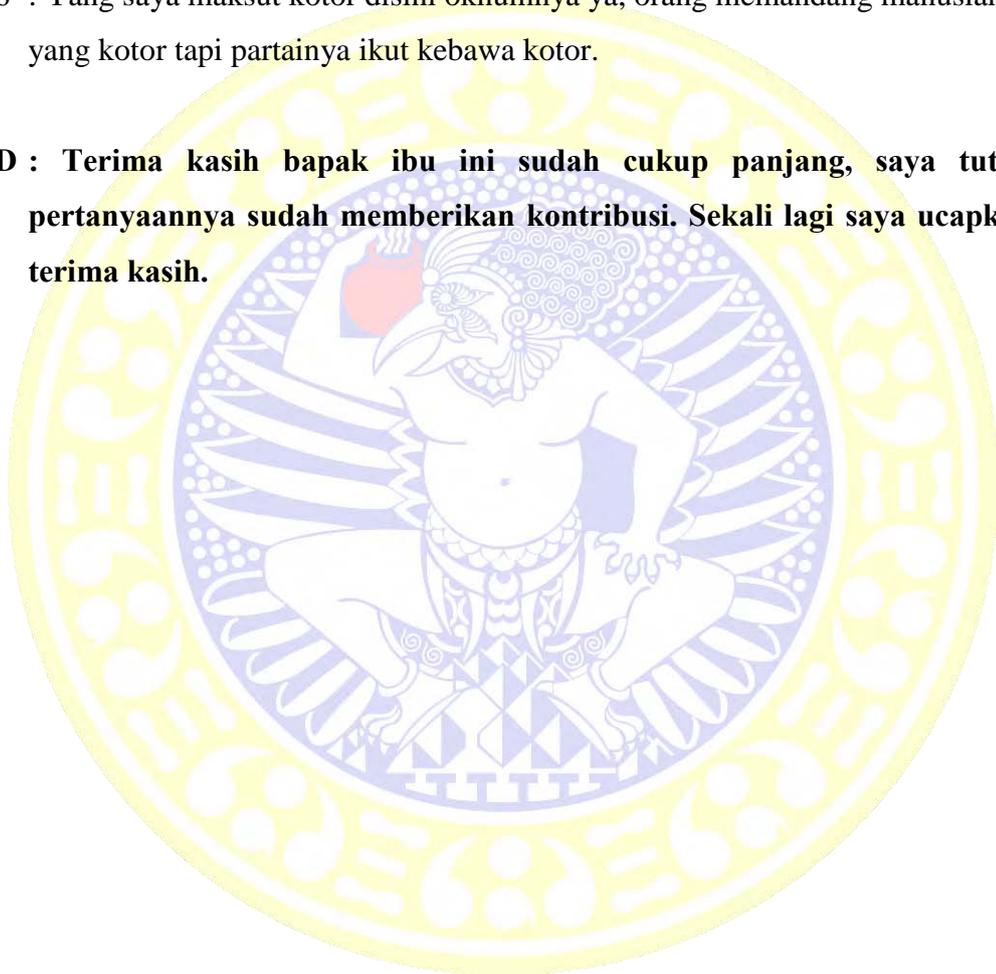
U6 : Maksudnya begini ya dia seorang pendakwah tentunya harus konsisten jadi pendakwah karena mereka berhubungan dengan Tuhan, tidak usah lari ke politik karena politik itu kotor, politik itu membingungkan, politik itu plin plan. Seharusnya pendakwah-pendakwah ulung sampai tingkat nasional sering memberikan ceramah-ceramah di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional itu kan lebih bagus karena politik itu sangat kotor sekali nantinya

bisa dipengaruhi kawan-kawannya sehingga bisa terjadi korupsi karena uang sangat rentan sekali.

U8 : Ya sebetulnya kalau dibilang politik kotor itu tidak ada, kalau saya bilang politik bagus karena orang hidup harus berpolitik, jadi kita lihat politik apa? prakteknya dibidang apa? mungkin manusia-manusia oknum yang membuat politik itu menjadi kotor, kalau politik kotor kenapa tidak dibubarkan saja politik di Indonesia kalau itu kotor ya.

U6 : Yang saya maksud kotor disini oknumnya ya, orang memandang manusianya yang kotor tapi partainya ikut dibawa kotor.

RD : Terima kasih bapak ibu ini sudah cukup panjang, saya tutup pertanyaannya sudah memberikan kontribusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.



BERITA ACARA PERBAIKAN UJIAN TESIS

Telah dilakukan Ujian Tesis Program Magister Media dan Komunikasi, atas nama:

N a m a : Rama Dimas Ade Kusuma

N I M : 071414853013

Judul : OPINI MASYARAKAT TERHADAP PERSONAL BRAND
CAWABUP DI KABUPATEN SIDOARJO
*(Studi Kasus Tan Mei Hwa Sebagai Perempuan Muslim Tionghoa
Dalam Pencalonan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015)*

Pembimbing I : Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M

Pembimbing II : Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D

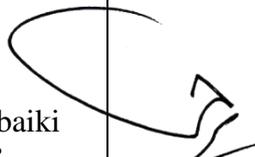
Pengujian dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, jam 09.00 s/d 10.30 WIB. Bertempat di ruang A-207 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Tim Penguji Ujian Tesis terdiri dari:

1. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si
2. Dr. Djoko W. Tjahjo, S.E., M.Si
3. Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M
4. Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D

Berdasarkan hasil ujian tesis atas nama Rama Dimas Ade Kusuma, S.Sn dinyatakan **Lulus** dengan beberapa perbaikan berdasarkan masukan dari masing-masing anggota tim penguji, sebagaimana terlampir.

No.	NAMA DOSEN	SARAN	DIPERBAIKI	TANDA TANGAN
1.	Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si	• Pada tinjauan pustaka perlu dicabar, karena masih terlihat kerangka konseptual.	• Sudah diperbaiki hal. 12 – 42	

2.	Dr. Djoko W. Tjahjo, S.E., M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • Pada hal. v terdapat typo. • Pada abstrak, membayar mahar bukan bagian dari <i>personal brand</i>. • Pada hal.7, paragraf pertama penjelasan konsep homo economicus. • LBM belum memperlihatkan permasalahan Tan Mei Hwa. • Pada bagian metode, kata “mewakili” hanya untuk kuantiti. • Metode kurang lengkap dan detail. • Pada bab 2, pemilihan konsep opini lebih diperjelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki hal. v. • Sudah diperbaiki hal. xi • Sudah diperbaiki hal. 7. • Sudah diperbaiki hal. 1-11. • Sudah diperbaiki hal. 43. • Sudah diperbaiki hal. 43-45. • Sudah diperbaiki hal. 19-20. 	
3.	Dr. Santi Isnaini, S.Sos, M.M	<ul style="list-style-type: none"> • Diperjelas opini mana yang dipakai. • Diperjelas kesimpulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki hal. 19-20. • Sudah diperbaiki hal. 329-333. 	
4.	Sony Kusumasondjaja, S.E, M.Com, Ph.D	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Tan Mei Hwa belum kelihatan. • Diperjelas mengenai hasil perbedaan kelompok FGD pada kesimpulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki hal. 1-11. • Sudah diperbaiki hal. 329-333. 	



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

K-07

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TESIS

SEMESTER GASAL / GENAP 20 15 / 20 16

NAMA MAHASISWA : RAMA DIMAS ADE KUSUMA
NIM : 071414853013
PEMBIMBING I : Dr. SANTI ISNAINI, S.Sos., M.M
PEMBIMBING II : SONY KUSUMASONDJAJA, S.E., M.Com, Ph.D
KONSULTAN :

TOPIK / JUDUL

OPINI MASYARAKAT TERHADAP PERSONAL DR AND CAWABUP DI KABUPATEN SIDOARJO
(STUDI KASUS TAN MELI HWA SEBAGAI PEREMPUAN MUSLIM TIONGHIA
DALAM PENCALON PILKADA KABUPATEN SIDOARJO 2015)

NO.	TANGGAL	MATERI YANG DIBAHAS	KRITIK/SARAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF	
				MHS.	DOSEN
1.	11/11/15	LAPORAN YANG HRS DIREVISI	DAPAT MELANJUTKAN KUANTITATIF ATAU DIGANTI KUALITATIF	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
2.	18/11/15	PERTANYAAN UTK FGD	DAPAT MELAKSANAKAN FGD UNTUK PENGAMBILAN DATA	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
3.	2/05/16	BIMBINGAN BAB I-IV + DATA	PERBAIKAN BAB 4 UNTUK LEBIH DI NARASIKAN	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
4.	13/05/16	BIMBINGAN BAB IV + BAB V	PERBAIKAN INFORMAN DAN PERBAIKAN CARA ANALISA	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
5.	12/11/15	LAPORAN YANG HRS DIREVISI	MERUBAH MENADI KUALITATIF	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
6.	20/11/15	PERTANYAAN UNTUK FGD	DIPERBAIKI SEDIKIT DAN DI KELOMPOKKAN, DAPAT LANJUT FGD	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
7.	17/05/16	BIMBINGAN BAB IV + V	PERBAIKAN BAHASA INFORMAN DAN LEBIH INSIGHT DALAM ANALISA	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
8.	1/06/16	BIMBINGAN BAB V	PERBAIKI CARA ANALISA	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
9.	14/06/16	BIMBINGAN BAB V + VI	DI HILANGKAN AYAT AL-QURAN DAN DIPERBAIKI KEMULAIANNYA	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
10.	9/06/16	BIMBINGAN BAB V	ANALISA MASH KURANG	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>
11.	13/06/16	BIMBINGAN BAB V + VI	MASUKAN BAGIAN ANALISA PADA KESIMPULAN	<i>Rama</i>	<i>Amain</i>